



RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU 2025-2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Maluku.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 2025 – 2026.

BAB II

RPD

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2025 – 2026 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk (dua) Tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2026.
- (2) RPD Tahun 2025 – 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJPN Tahun 2005 – 2025 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau pinjaman/hibah luar negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RPD Tahun 2025 – 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman Penyusunan RENSTRA;
 - b. Pedoman dalam rangka RENJA OPD Tahun 2025 – 2026.

Pasal 3

- (1) RPD Tahun 2025 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) RPD Tahun 2025 - 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Maret 2024

GUBERNUR MALUKU,



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 329.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-2
2.1.2 Kondisi Demografi	II-50
2.2 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat	II-54
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-54
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	II-65
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-74
2.3.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-74
2.3.2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-77
2.3.3 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-78
2.3.4 Perhubungan	II-80
2.3.5 Komunikasi dan Informatika	II-91
2.3.6 Sosial	II-92
2.3.7 Ketenagakerjaan	II-94
2.3.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-95
2.3.9 Lingkungan Hidup	II-96
2.3.10 Koperasi dan UMKM.....	II-97
2.3.11 Energi dan Sumber Daya Mineral	II-98
2.3.12 Penanaman Modal.....	II-99
2.3.13 Kepemudaan dan Olahraga	II-100



2.3.14	Pariwisata.....	II-101
2.3.15	Perikanan dan Kelautan	II-102
2.3.16	Pertanian.....	II-104
2.3.17	Perdagangan.....	II-105
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-106
2.4.1	Kerjasama Daerah	II-106
2.4.2	BUMD	II-112
2.4.3	Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan	II-113
2.4.4	Nilai Tukar Petani.....	II-114
2.4.5	Angka Kriminalitas	II-116
2.5	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku	II-117
2.6	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Provinsi Maluku	II-147
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1	Pendapatan Daerah	III-2
3.1.2	Belanja Daerah	III-6
3.1.3	Pembiayaan Daerah	III-9
3.2	Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah.....	III-11
3.2.1	Pendapatan Daerah	III-11
3.2.2	Belanja Daerah.....	III-14
3.3	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2026.....	III-18
3.3.1	Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2024.....	III-18
3.3.2	Arah Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2025 -2026.....	III-19
3.4	Arah Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah 2025 – 2026	III-22
3.4.1	Arah Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 - 2026.....	III-25
3.4.2	Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif 2025 - 2026	III-26
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	IV-12



4.3	Isu Strategis.....	IV-29
4.3.1	Isu Strategis Global	IV-29
4.3.2	Isu Strategis Nasional.....	IV-36
4.3.3	Isu Strategis Daerah.....	IV-39
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
6.2	Tema Pembangunan dan Program Prioritas	VI-5
6.2.1	Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah	VI-6
6.2.2	Program Prioritas	VI-7
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VI-1
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2	Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah	VII-2
7.2.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	VII-3
7.2.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	VII-8
7.2.3	Urusan Pilihan	VII-20
7.2.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	VII-29
7.2.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	VII-31
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	VIII-1
8.1.1	Indikator Kinerja Makro Pembangunan	VIII-1
8.1.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-2
8.1.3	Indikator Kinerja Kunci	VIII-2
BAB IX	PENUTUP	IX-1





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 - 2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diisyaratkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang berkesinambungan sehingga diharapkan dapat meneruskan capaian kinerja pembangunan yang belum optimal. Dokumen perencanaan pembangunan daerah bersifat transisi, sehingga diperlukan sebagai pedoman bagi pejabat kepala daerah untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026 selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026.

Mengingat pentingnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026 dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan, sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 - 2026, maka RPD diharapkan dapat menjamin kualitas proses penyusunan dan kuantitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsive terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026 ini menjadi hal yang penting dan strategis sebagai pedoman teknis/operasional penyusunan RKPD tahun 2025 – 2026. Dengan adanya RPD ini diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen Rencana Kerja OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan



proses penyusunan RKPD tahun 2025 - 2026 dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Demikian dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026 disampaikan, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, Maret 2024



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan RPD dengan Dokumen Lainnya	I-7
Gambar 2. 1	Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	II-51
Gambar 2. 2	Piramida Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2023	II-53
Gambar 2. 3	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Milyar Rp)	II-55
Gambar 2. 4	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2023	II-59
Gambar 2. 5	PDRB per Kapita Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Juta Rp)	II-60
Gambar 2. 6	PDRB Per Kapita per Kabupaten Provinsi Maluku Tahun 2023	II-60
Gambar 2. 7	Indeks Gini Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	II-61
Gambar 2. 8	Indeks Gini per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	II-62
Gambar 2. 9	Laju Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual Tahun 2018-2023	II-63
Gambar 2. 10	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2018-2023	II-64
Gambar 2. 11	Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-64
Gambar 2. 12	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2023	II-66
Gambar 2. 13	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2023	II-66
Gambar 2. 14	Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-67
Gambar 2. 15	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2018-2023	II-68
Gambar 2. 16	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2023	II-69
Gambar 2. 17	Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2023	II-70
Gambar 2. 18	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2023	II-71
Gambar 2. 19	Usia Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2018-2023	II-72
Gambar 2. 20	Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2023	II-72
Gambar 2. 21	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	II-75
Gambar 2. 22	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Maluku Tahun 2018-2023	II-76
Gambar 2. 23	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2022	II-76
Gambar 2. 24	Tingkat Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	II-77
Gambar 2. 25	Jumlah Penerima Bantuan/Pemberdayaan Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022	II-92
Gambar 2. 26	Perkembangan IKG di Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	II-93
Gambar 2. 27	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Tahun 2018-2023	II-95



Gambar 2. 28	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Tahun 2018-2023.....	II-95
Gambar 2. 29	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Maluku Tahun 2018-2022.....	II-96
Gambar 2. 30	Kontribusi Sub-Sektor Perikanan Terhadap PDRB Maluku	II-104
Gambar 3. 1	Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	III-5
Gambar 3. 2	Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	III-6
Gambar 3. 3	Proporsi Komponen Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	III-9
Gambar 6. 1	Peta Keterkaitan Antar Wilayah Pengembangan dalam Gugus Pulau.....	VI-29
Gambar 6. 2	Kerangka Pikir Perumusan Arah Kebijakan Kewilayahan.....	VI-30





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.....	II-3
Tabel 2.2	Kondisi Dataran di Provinsi Maluku.....	II-4
Tabel 2.3	Formasi Batuan Pulau Buru.....	II-7
Tabel 2.4	Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon	II-10
Tabel 2.5	Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Tengah.....	II-11
Tabel 2.6	Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Timur	II-14
Tabel 2.7	Formasi Batuan Kepulauan Kei	II-16
Tabel 2.8	Formasi Batuan Kepulauan Aru	II-17
Tabel 2.9	Formasi Batuan Kepulauan Tanimbar	II-18
Tabel 2.10	Formasi Batuan Kepulauan Babar.....	II-19
Tabel 2.11	Formasi Batuan Pulau Moa dan Pulau Damer	II-20
Tabel 2.12	Formasi Batuan Pulau Wetar	II-21
Tabel 2.13	Kondisi Iklim di Provinsi Maluku Tahun 2022.....	II-24
Tabel 2.14	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Tahun 2022.....	II-25
Tabel 2.15	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Maluku	II-30
Tabel 2.16	Sistem Perkotaan di Provinsi Maluku	II-35
Tabel 2.17	Sistem Arahkan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Maluku.....	II-36
Tabel 2.18	Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan & Tingkat Pemanfaatan	II-44
Tabel 2.19	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Maluku Tahun 2022	II-45
Tabel 2.20	Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi Maluku	II-46
Tabel 2.21	Data Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Maluku	II-47
Tabel 2.22	Lokasi Potensi Energi Arus Laut di Provinsi Maluku.....	II-49
Tabel 2.23	Area Penambangan Liar di Provinsi Maluku	II-50
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2023.....	II-52
Tabel 2.25	Jumlah Penduduk Menurut Umur di Provinsi Maluku Tahun 2023.....	II-52
Tabel 2.26	Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Maluku tahun 2018-2022	II-55
Tabel 2.27	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Maluku Tahun 2018-2022.....	II-57
Tabel 2.28	Indikator Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2018-2023	II-64
Tabel 2.29	Jumlah Sarana Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2020-2022	II-73
Tabel 2.30	Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Maluku Tahun 2020-2022...	II-73



Tabel 2.31	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau	II-77
Tabel 2.32	Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Listrik menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2022.....	II-78
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik	II-79
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	II-79
Tabel 2.35	Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-80
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023	II-81
Tabel 2.37	Data Pembangunan Pelabuhan di Provinsi Maluku Tahun 2019-2022.....	II-81
Tabel 2.38	Rencana Pembangunan Infrastruktur Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2025-2029	II-83
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika	II-91
Tabel 2.40	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2018-2022.....	II-97
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Tahun 2022-2023.....	II-97
Tabel 2.42	Capaian Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022-2023.....	II-99
Tabel 2.43	Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi Provinsi Maluku Tahun 2018-2022.....	II-100
Tabel 2.44	Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Maluku Tahun 2018-2022.....	II-102
Tabel 2.45	Produksi Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2018-2022	II-102
Tabel 2.46	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Maluku	II-103
Tabel 2.47	Komoditi Unggulan Subkategori Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2018-2022.....	II-105
Tabel 2.48	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kontribusi Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Provinsi Maluku Tahun 2018-2022.....	II-106
Tabel 2.49	Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain.....	II-107
Tabel 2.50	Pelaksanaan Kerja Sama dengan non Pemerintah.....	II-110
Tabel 2.51	Realisasi Kontribusi PAD BUMD Provinsi Maluku Tahun 2020-2022.....	II-112
Tabel 2.52	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Provinsi Maluku Tahun 2018-2022.....	II-114
Tabel 2.53	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku Tahun 2018-2023.....	II-116
Tabel 2.54	Jumlah Kejadian Kejahatan yang Dilaporkan Provinsi Maluku Tahun 2018-2022.....	II-116



Tabel 2.55	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku.....	II-117
Tabel 2.56	Capaian SPM Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022	II-148
Tabel 2.57	Capaian SPM Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2019-2022	II-153
Tabel 2.58	Capaian SPM Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2019	II-154
Tabel 2.59	Capaian SPM Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2020	II-154
Tabel 2.60	Capaian SPM Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2021	II-155
Tabel 2.61	Capaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2022	II-156
Tabel 2.62	Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku	II-158
Tabel 2.63	Capaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Tahun 2019-2022.....	II-159
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	III-2
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Juta Rupiah)	III-4
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah).....	III-8
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	III-10
Tabel 3.5	Rasio Kemandirian Keuangan dari Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	III-12
Tabel 3.6	Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	III-13
Tabel 3.7	Ruang Fiskal Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	III-13
Tabel 3.8	Rasio Belanja Pegawai Provinsi Maluku Tahun 2019-2023	III-15
Tabel 3.9	Rasio Belanja Barang dan Jasa Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	III-16
Tabel 3.10	Rasio Belanja Modal Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	III-17
Tabel 3.11	Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.....	III-19
Tabel 3.12	Target Pendapatan dan Belanja Provinsi Maluku Tahun 2024.....	III-20
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026	III-21
Tabel 3.14	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026	III-27
Tabel 3.15	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026.....	III-28
Tabel 3.16	Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026	III-29



Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku.....	IV-24
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.....	V-5
Tabel 5.2	Keterkaitan IKU Daerah dan IKU OPD.....	V-10
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.....	VI-1
Tabel 6.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD Provinsi Maluku ...	VI-15
Tabel 6.3	Strategi, Arah Kebijakan dan Fokus Wilayah Pembangunan Kabupaten/Kota.....	VI-31
Tabel 6.4	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi	VI-35
Tabel 8.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.....	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.....	VIII-5



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di tahun 2024. Sejalan dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka pemilu kepala daerah serentak secara nasional baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kebijakan tersebut berdampak pada kekosongan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Maluku. Kondisi tersebut berdampak pada sisi perencanaan bagi Provinsi Maluku yaitu tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Maluku harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025- 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 atau RPD Tahun 2025-2026. Selain itu seluruh perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Dokumen RPD Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau perkada kemudian akan menjadi pedoman bagi Pj. Gubernur Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026. Dokumen RPD Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman penyusunan RKPD periode yang sama, demikian



pula dengan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan Renja PD. Proses penyusunan RPD Tahun 2025-2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Persiapan penyusunan; 2) Penyusunan rancangan; 3) Pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik; 4) Perumusan rancangan akhir; 4) Fasilitasi rancangan Akhir RPD ke Kementerian Dalam Negeri; dan 5) Penetapan Perkada RPD.

Penyusunan dokumen RPD dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan dokumen Renstra PD. Secara substansi, penyusunan RPD Tahun 2025-2026 tetap memperhatikan beberapa hal antara lain: 1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025 ; 2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024, hingga Tahun 2023; 3) Isu-isu strategis yang berkembang 4) Kebijakan nasional; dan 5) Regulasi yang berlaku. Selain itu, perumusan isu strategis dan kebijakan Rancangan RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 juga memperhatikan keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang dinilai masih relevan di Maluku hingga tahun 2026. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan pada proses persiapan penyusunan rancangan awal RPD, didapatkan beberapa isu strategis yang masih relevan di Maluku sampai dengan tahun 2026. Isu strategis Maluku yang utama adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, serta pendapatan per kapita masyarakat yang masih rendah jika dibandingkan nasional dan provinsi lain terutama provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi. Isu kesejahteraan masyarakat tersebut terkait dengan isu perekonomian daerah, kualitas sumberdaya manusia keberlanjutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Dengan memperhatikan gambaran isu tersebut maka dalam RPD Tahun 2025-2026 dirumuskan isu strategis Provinsi Maluku adalah 1) Sumber Daya Manusia yang berdaya saing; 2) Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah; 3) Pembangunan ekonomi



yang inklusif dan berkelanjutan; 4) Kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana; serta 5) Optimalisasi Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, berdasarkan isu strategis tersebut dan tetap memperhatikan berbagai kebijakan nasional dan amanat regulasi, dengan menggunakan instrumen pohon kinerja dan cascading maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Maluku Tahun 2025-2026. Tema Pembangunan Daerah Maluku diarahkan pada upaya mewujudkan “Maluku Yang Maju dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat tujuan daerah yaitu: 1) Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, produktif, berdaya saing dan berkarakter berbasis budaya inklusif; 2) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan; 3) Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kepulauan secara merata; serta 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berprinsip Good Governance. RPD Tahun 2025-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RPD Tahun 2025-2026 juga menjadi pedoman penyusunan RKPD untuk periode tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



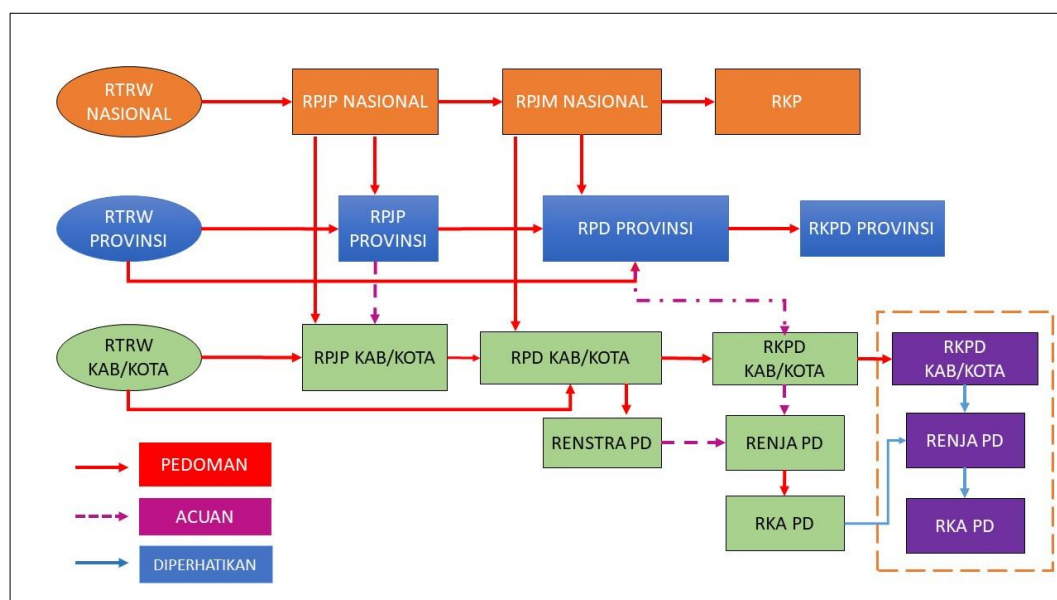
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 13;
20. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103 Tahun 2020); dan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPD tidak berbeda dengan RPJMD terkait posisinya dengan regulasi lainnya. RPD Tahun 2025-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional,

provinsi, maupun kabupaten/kota. Dokumen RPD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN dan RTRW Provinsi Maluku. RPD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra PD, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Gambaran keterkaitan RPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPD dengan Dokumen Lainnya



Sumber: Bappeda Provinsi Maluku, 2024

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPD Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan RPD Tahun 2025-2026 adalah merumuskan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2025-2026 yang



akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPD Tahun 2025-2026 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Maluku selama kurun waktu 2025- 2026;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Kabupaten/Kota;
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Provinsi Maluku yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2026; serta
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Inmendagri Nomor 03 Tahun 2023 dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dokumen RPD Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; Latar Belakang; Dasar hukum penyusunan; Hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah serta dokumen



rencana pembangunan antar daerah; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Memuat Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah; dan Aspek Pelayanan Umum.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2019-2024 (dari tahun 2019 hingga tahun 2023) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada BAB II; dan Isu strategi Daerah.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026, serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome serta indikatornya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan cascading pada bab sebelumnya.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat kerangka pendanaan seluruh program perangkat daerah, dan daftar program perangkat



daerah dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pencapaian pembangunan yang optimal merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang relevan sehingga mampu merumuskan berbagai kebijakan dalam menuntaskan segala permasalahan pembangunan yang terjadi selama ini. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Provinsi Maluku. Sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, keseluruhan potensi sumber daya tersebut akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 "Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang Terkandung Di Dalamnya dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat". Melihat hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berusaha untuk memberdayakan setiap elemen pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu poin penting dalam perumusan berbagai kebijakan dalam rencana pembangunan daerah adalah ditelaahnya kembali berbagai data dan informasi pembangunan sebelumnya yang merupakan salah satu komoditi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah agar terjaga relevansi antara program dan kegiatan pembangunan dengan permasalahan yang ingin dihadapi. Ketepatan rumusan dalam memilih kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode pembangunan harus terimplementasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai acuan perumusan perencanaan pembangunan daerah ini, maka disusunlah gambaran umum kondisi daerah Provinsi Maluku sebagai potret dari hasil pembangunan daerah selama ini yang tersaji sebagai berikut:

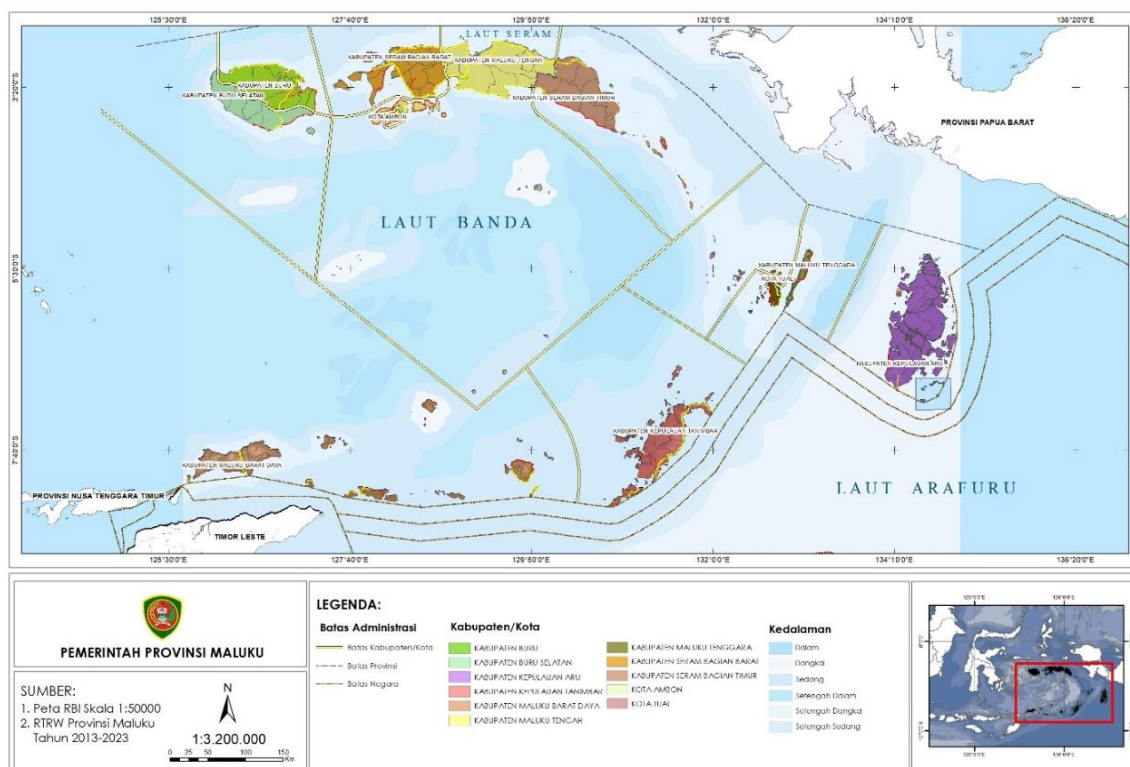
2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Maluku merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi geografis Provinsi Maluku adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil. Provinsi Maluku sendiri terletak di antara $2^{\circ}30'$ - 9° Lintang Selatan dan 124° - 136° Bujur Timur. Provinsi Maluku terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan luas wilayah 54.185 km². Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 1.392 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 km.

Peta 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Maluku





B. Letak Geografis

Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Ibukota Kabupaten/Kota	Jumlah	
				Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kab. Maluku Tengah	7.953,81	Masohi	18	196
2	Kab. Maluku Tenggara	1.031,81	Langgur	11	193
3	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.465,79	Saumlaki	10	89
4	Kab. Buru	4.932,32	Namlea	10	82
5	Kab. Seram Bagian Timur	6.429,88	Bula	15	198
6	Kab. Seram Bagian Barat	5.033,38	Piru	11	92
7	Kab. Kepulauan Aru	8.152,42	Dobo	10	119
8	Kab. Maluku Barat Daya	4.581,06	Tiakur	17	118
9	Kab. Buru Selatan	3.780,56	Namrole	6	81
10	Kota Ambon	298,61	Ambon	5	50
11	Kota Tual	254,39	Tual	5	30
MALUKU		46.914,03	Ambon	118	1.248

Catatan: Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2022

Secara administrasi, Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Laut Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan, Pulau Papua di sebelah timur dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Secara geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni ALKI 3. Wilayah Kepulauan Maluku berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan kawasan Australia serta



Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga ke depannya perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang bagian selatan Indonesia.

C. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan.

Tabel 2. 2 Kondisi Dataran di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Dataran Rendah	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kepulauan Tanimbar	Tanimbar	1.100	Pulau Tanimbar
2	Kepulauan Aru	Dataran Aru	1.200	Kepulauan Aru
3	Seram Bagian Timur	Masiwang	5.000	Pulau Seram
4	Maluku Tengah	Seram Selatan	4.000	Pulau Seram
		Pasahari	40.000	Pulau Seram
5	Seram Bagian Barat	Dataran Kawa	10.000	Pulau Seram
		Eti	600	Pulau Seram
		Kairatu	1.300	Pulau Seram
6	Buru dan Buru Selatan	Waeapo	14.000	Pulau Buru
		Wai Kating	1.500	Pulau Buru
		Wai Kumu	1.250	Pulau Buru
		Wai Mala	1.250	Pulau Buru
		Rana	1.250	Pulau Buru
		Samalagi	1.000	Pulau Buru
		Wai Lo	500	Pulau Buru
JUMLAH			83.950	

Sumber: RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

a) Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%.



Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.

- b) Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)

Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak di tengah Pulau Seram.

- c) Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter.



d) Kepulauan Aru

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 meter.

e) Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya

Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.



D. Kondisi Geologi

Karakteristik geologi Provinsi Maluku adalah terdiri dari batuan sedimen, batuan metamorfik dan batuan beku dengan penyebaran yang hampir merata di setiap gugus pulau. Hal ini dipengaruhi oleh klasifikasi umur pulau/kepulauan yang terbentuk pada 50-70 juta tahun yang lalu, pada periode Neogeon sampai Paleocene, kendati Pulau Seram telah berusia 3000 juta tahun yang terbentuk pada periode Achracium. Karakteristik tersebut juga dipengaruhi oleh letak Maluku diantara lempeng bumi Indo-Australia, Pasifik, Laut Filipina dan Laut Banda. Secara umum kondisi geologi Provinsi Maluku dapat dirincikan sebagai berikut:

a) Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Buru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Formasi Batuan Pulau Buru

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lumpur. Tersebar di sepanjang pantai, terutama di lembah sungai yang besar yaitu Wa Apu, Wa Mala, Wa Kuma dan Wa Duna.
2	Qd: Endapan Danau	Kerikil, pasir, lanau, lempung, gambut. Terdapat di sebelah barat Danau Rana.
3	Qt: Endapan Undak	Bongkah, kerikil, pasir, lanau dan lempung. Bongkah umumnya terdiri atas kuarsa, kuarsit, sekis, filit, batu gamping dan batu pasir. Terdapat di daerah perbukitan rendah di sepanjang pantai utara dan pantai selatan. Di daerah pantai utara bagian timur, satuan ini terdiri atas pasir yang berselingan dengan lanau dan beberapa sisipan gambut.
4	Ql: Batu Gamping Terumbu	Batu gamping terumbu bioherma dan biostroma, berkembang baik di daerah pantai utara bagian timur.
5	Pl: Formasi Leko	Konglomerat polimik, batu pasir dan batu gamping.
6	Tpav: Batuan Gunung Api Ambelau	Lava andesit berongga dan piroklastika bersusunan andesit. Terdapat di Pulau Ambelau di Tenggara Pulau Buru berupa perbukitan yang tertindih tak selaras oleh batu gamping terumbu



No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
		(Ql).
7	Tpa: Andesit	Andesit biotit umumnya lapuk, tersebar di daerah pantai selatan Pulau Buru antara kampung Tifu dengan Mefa.
8	Tmfv: Formasi Ftau	Lava, breksi gunung api dan tuf bersusunan andesit.
9	Tmh: Formasi Hotong	Batu pasir, serpih, lempung, napal, batu lanau, batu gamping dan konglomerat.
10	Tmw: Formasi Wakatin	Batu gamping koral berongga dan kadang-kadang terhablurkan.
11	Tomw: Formasi Waeken	Napal, napal pasiran, kalsilitit dan konglomerat.
12	MTk: Formasi Kuma	Kalsilitit, rijang, napal dan konglomerat.
13	JKd: Diabas	Singkapan yang baik terdapat di tepi pantai Tanjung Keramat.
14	Jm: Formasi Mefa	Batuan gunung api bawah laut, terdiri atas lava dan tuf.
15	TRd: Formasi Dalan	Batu pasir, serpih, batu lanau dan konglomerat. Konglomerat bersifat aneka bahan dan berkomponen kuarsa, sekis, filit dan batu sabak. Satuan terutama melampar di bagian barat Pulau Buru, menempati daerah pegunungan.
16	TRg: Formasi Ghegan	Batu gamping dolomitan, kalkarenit, serpih dan napal.
17	Pzr: Kompleks Rana	Filit, batu sabak, arkosa malih, grewake malih dan pualam
18	Pzw: Kompleks Wahlua	Sekis, filit, arkosa malih, kuarsit dan pualam.

Sumber: Peta Geologi Lembar Buru, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Poros lipatan pada batuan sedimen Pra-Tersier, mulanya berarah sesuai dengan pola arah cekungan yaitu barat laut-tenggara. Lipatan terbentuk akibat gaya memadat yang berarah timur laut-barat daya. Akibat proses tektonik kemudian, bersamaan dengan pelipatan dan pengangkatan pada akhir Tersier, membuat poros lipatan arahnya berubah pada barat-timur disebabkan oleh gaya memadat berarah utara-selatan.

Sesar turun banyak ditemukan, antara lain di sekitar Sungai Apu, sekitar Danau Rana, selatan Teluk Bara dan sekitar Kampung Mageswain. Danau Rana merupakan lekukan tektonik yang dibatasi oleh sesar turun yang diduga masih aktif. Sesar mendatar umumnya berarah timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Sesar yang berarah



timur laut-barat daya, pergerakannya berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Sesar yang berarah barat laut-tenggara mengikuti arah gerak jarum jam. Kedua sistem sesar tegak itu seumur dan sejenis, terbentuk oleh gaya memadat yang berarah lebih kurang utara-selatan. Sesar Wae Geren yang menyamping kiri panjangnya mencapai 63 km memanjang dari Danau Rana sampai Kampung Waperan di pantai timur laut. Sesar ini diduga terus memanjang melalui bawah laut, sebagaimana ditunjukkan oleh sangat curamnya batimetri gawir bawah laut di utara kampung tersebut.

Di tepi selatan Danau Rana, sesar ini berubah jadi sesar turun, bagian utaranya merupakan bongkah yang menurun. Sepanjang sesar, terutama yang di timur Danau Rana, ditemukan jalur terbreksikan dan kadang-kadang milonit batuan malihan. Pantai selatan Pulau Buru dalam keadaan menurun, sebagaimana terciirikan oleh tebing pantai yang terjal dan sempit dan endapan aluvium hanya ditemukan di muara Wae Mala dan Wae Kuma. Pantai yang sempit dan terjal itu merupakan jalur sesar turun. Kegempaan Pulau Buru relatif rendah jika dibandingkan dengan Pulau Seram dan sekitarnya, dengan pusat gempanya yang dangkal sampai sedang.

b) Pulau Seram dan Sekitarnya (Kabupaten Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Timur dan Kota Ambon)

a. Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 4 Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon

No	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lempung, lanau, pasir kerikil, kerakal dan sisa tumbuhan.
2	TRJk: Formasi Kanikeh	Perselingan batu-pasir, serpih dan lanau, dengan sisipan konglomerat dan batu gamping.
3	TRJm: Formasi Manusela	Batu gamping mengandung koral, kalsilutit dan batu gamping oolit.
4	TQf: Formasi Fufa	Perselingan batu gamping, batu pasir, batu lanau dan lempung di bagian bawah. Batu pasir dan konglomerat di bagian atas.
5	Ql: Konglomerat	Konglomerat aneka bahan dengan tersingkap baik di daerah Lisabata Barat dan di sepanjang pantai selatan, membentuk perbukitan rendah dan landai.
6	Tmkv: Batuan Gunung Api Kelang	Lava, tuf, breksi gunung api dan aglomerat.
7	Tpav: Batuan Gunung Api Ambon	Lava breksi gunung api, breksi tuf dan tuf.
8	Pzta: Kompleks Taunusa	Sekis, kuarsit, genes, amfibolit, pualam dan filit.
9	PTRt: Kompleks Tehoru	Filit, batu sabak, batu gamping terpualamkan dan sedikit sekis.
10	TRS: Batuan Malihan Saku	Batu sabak, grewake meta dan konglomerat meta dengan sisipan batu gamping.
11	Jku: Batuan Ultramafik	Harsburgit, dunit, serpentininit dan sedikit gabro.
12	Jkg: Batuan Mafik	Gabro, plagiogabro dan diorit.
13	Ti(g): Granit Manipa	Umumnya terdiri dari granit biotit. Di Pulau Manipa batuan ini menerobos satuan filit (Batuan Malihan Tehoru) dengan menunjukkan gejala sentuhan.
14	Ti(d): Granit Ambon	Granit biotit, granit kordierit biotit tersingkap baik di Tanjung kampung Ema, Kp. Mahia dan sedikit Kp. Alang, kesemuanya terletak di Pulau Ambon. Seri, pantai selatan Pulau Ambon, di Sungai Resi dekat
15	Tmpu: Kompleks Uli	Batuan banchuh terdiri dari berbagai jenis batuan yang berukuran dari beberapa centimeter hingga beberapa meter tercampur di dalam massa dasar lempung. Kompleks Uli ini mirip dengan Kompleks Salas di Seram Timur.

Sumber: Peta Geologi Lembar Buru, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Sesar turun umumnya berarah barat laut-tenggara dan timur laut-barat daya, terdapat di Seram Barat, Pulau Manipa dan Pulau Ambon. Teluk Ambon dibatasi oleh sesar turun yang berarah timur laut-barat daya dan merupakan jalur terban yang cukup besar. Sesar turun yang memotong batuan Plistosen di timur Kawa (Seram Barat) dan di Pulau Ambon



diduga masih giat sampai sekarang. Sistem sesar di sekitar Pulau Ambon mungkin merupakan kelanjutan lajur sesar mendatar mengiri yang memanjang dari Teluk Soleman melalui ujung timur Pegunungan Taunusa. Sesar geser yang berarah timur laut-barat daya umumnya berupa sesar mendatar sinistral. Sedangkan yang berarah barat laut-tenggara biasanya berupa sesar geser dekstral. Sesar naik umumnya berarah timur-barat dengan bidang sesar miring ke selatan. Sesar naik di utara Piru diduga menerus ke arah barat, melalui pantai utara Pulau Babi sampai utara Pulau Kelang.

Proses tektonik ini menyebabkan terjadinya batuan gunung api pada jalur magma Uliaser (Haruku, Saparua dan Nusalaut). Gunung api Kelang diduga keluar melalui lajur rekahan dalam karena letaknya yang terpisah dari jalur magma Uliaser. Unsur-unsur struktur yang terbentuk akibat proses tektonik tersebut adalah sesar naik, sesar mendatar dan sesar turun. Kegempaan di daerah ini cukup tinggi dengan kedalaman 0-99 Km kekuatan sampai 7,0 pada skala Richter.

b. Seram Bagian Tengah (Kabupaten Maluku Tengah)

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Tengah

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lanau, lumpur, kerikil dan kerakal. Sebarannya di daerah pantai dan sekitar muara sungai-sungai besar, seperti Sungai Kawa, Sungai Lamasin, sekitar Teluk Elpaputih, dataran rendah bagian utara sebelah timur Teluk Saleman. Di daerah dataran



No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
		rendah tersebut, endapan aluvium sering bercampur dengan humus dan gambut, terutama di daerah yang berawa
2	Ql: Batu Gamping Korallh	Batu gamping terumbu membentuk undak-undak pantai. Di sebelah barat Teluk Soleman (Tanjung Pulu Tujuh) terdapat enam buah undak, mencapai ketinggian 300 m, di sebelah selatan Masohi terdapat tujuh buah undak mencapai ketinggian 400 m lebih di atas permukaan laut.
3	Qt: Endapan Teras	Konglomerat dengan komponen kuarsa susu, rijang merah, sekis, filit, batu pasir dengan semen lempung pasiran dan pasir gampingan.
4	TQf: Formasi Fufa	Batu pasir, napal, lanau, lempung, konglomerat, batu gamping dan gambut.
5	Tpw: Formasi Wahai	Napal, napal tufan dan sisipan batu gamping.
6	Tpav: Batuan Gunung Api Ambon	Lava, breksi vulkanik, breksi tuf dan tuf.
7	Tmps: Komplek Salas	Secara litologi kompleks ini terdiri dari massa dasar lempung bersisik dan bongkah-bongkah asing dan asal.
8	Toml: Formasi Lisabata	Batu gamping, batu gamping pasiran, batu pasir, napal dan serpih.
9	Tpeh: Formasi Hatuolo	Sepih, napal, batu gamping dan lensa rijang.
10	Ks: Formasi Sawai	Kalsilit, serpih, batu lumpur dan rijang.
11	TRJm: Formasi Manusela	Batu gamping, rijang, kalsilit, sisipan napal dan batu gamping oolit.
12	TRJk: Formasi Kanikeh	Perulangan antara batu pasir, batu lanau, serpih, rijang dan konglomerat.
13	TRs: Komplek Saku	Batu sabak, grewakemalih, arkosamalih, batu gamping dan konglomerat malih.
14	PTRt: Komplek Tehoru	Filit, batu sabak, sekis, psammitmeta dan batu gamping terpualamkan.
15	Pzta: Komplek Taunusa	Sekis, genes, amfibolit, kuarsit, filit dan pualam.



No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
16	Jku: Komplek Batuan Beku Basa Ultramafik	Gabro, plagioklas, gabro hornblenda, serpentinit, harzburgit, dunit dan lherzolit.

Sumber: Peta Geologi Lembar Masohi, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Sebagian besar batuan telah terlipat kuat dan mengalami deformasi. Arah jurus perlapisan pada batuan sedimen Pra Miosen umumnya berarah timur-barat dengan kemiringan umum ke arah selatan. Kemiringan bidang perlapisan tersebut umumnya 30°-60°, sebagian 79°-90°, bahkan ada yang terbalik. Dalam formasi Hatuolo (Tpeh), Formasi Sawai (Ks) dan Formasi Lisabata (Toml) dijumpai sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal terdapat di sebelah utara Pegunungan Manusela. Sesar geser umumnya berarah timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara sedangkan sesar naik umumnya berarah timur-barat.

Proses tektonik ditafsirkan telah mengakibatkan ketidakselarasan antara Kompleks Saku (TRs) dengan Formasi Kanikeh (TRJk). Proses tektonik ini diduga didominasi oleh gerakan menurun akibat tarikan (rifting) yang terus berlangsung bersamaan dengan proses sedimentasi Formasi Kanikeh (TRJk) yang dicirikan oleh korok-korok riolit dalam formasi tersebut, perubahan berangsur antara Kompleks Saku dengan Formasi Kanikeh serta adanya hubungan ketidakselarasan antara Kompleks Saku dengan Formasi Kanikeh. Tektonik (Miosen Tengah-Pliosen) menyebabkan terjadinya kegiatan gunung api pada jalur Magma Uliaser (Haruku, Saparua, Nusa Laut) sesar naik, sesar datar dan sesar normal.

c. Seram Bagian Timur



Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian

Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Timur

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lanau, pasir dan kerikil, terdapat di daerah dataran sepanjang Sungai Bobot dan Sungai Masiwang serta di daerah pantai utara sedangkan daerah yang berawa sekitar Wae (sungai) Semos, batuan ini bercampur dengan lempung, lumpur hitam dan humus.
2	Ql: Terumbu Koral Terangkat	Batu gamping koral, berongga, berstruktur terumbu. Satuan ini menindih Formasi Fufa secara tak selaras. Sebarannya terdapat di sekitar pantai dan tanjung di Pulau Parang, Pulau Akat, Pulau Seram Rai, Pulau Seram Laut, Kepulauan Gorong dan Kepulauan Watubela.
3	Qpf: Anggota Batu Gamping Formasi Fufa	Batu gamping mengandung banyak kepingan koral dan ganggang. Umumnya menunjukkan hubungan menjemari dengan Formasi Fufa (Qpf). Tersingkap di dekat Fufa, di bagian timur pulau dan di sepanjang Sungai Bobot, Sungai Wasiwang dan Sungai Semos.
4	Qpf: Formasi Fufa	Batu pasir halus, batu lanau dan lensa konglomerat serta gambut. Perlapisan hampir mendatar atau bersudut kemiringan kecil. Satuan ini tersingkap di sekitar Sungai Masiwang dan daerah Bula.
5	Tpw: Formasi Wahai	Napal berlapis tipis sampai setebal lebih dari 1 m, pada bagian atas, di banyak tempat dijumpai sisipan batu gamping pasir dan batu pasir halus, tersingkap di sekitar Sungai Bobot dan Sungai Masiwang.
6	Tmps: Kompleks Salas	Berbagai macam bongkahan atau kepingan yang berasal dari batuan sedimen, batuan beku dan batuan malihan, berukuran dari beberapa cm sampai melebihi 10 m.
7	Toms: Formasi Selagor	Batu gamping, di beberapa tempat kalsilitit, napal dan bersisipan serpih. Di banyak tempat dijumpai cermin sesar pada napal dan tersingkap di sekitar Gunung Selagor.
8	Teh: Formasi Hatuolo	Serpih pasir berlapis baik dengan sisipan napal dan lensa rijang yang mengandung radiolaria. Batuan ini terlipat kuat dan pada umumnya tergerus serta terkekarkan.
9	Ks: Formasi Sawai	Kalsilitit di beberapa tempat ditemukan sisipan tipis rijang.
10	KTn: Kompleks Nif	Kalsilitit, serpih dan napal yang tak dapat dipisahkan. Satuan ini telah terlipat kuat dan tergontengkan. Litologinya dapat dibandingkan dengan Formasi Sawai, Formasi Hatuolo dan Formasi Selagor.
11	TRJm: Formasi Manusela	Batu gamping berlapis baik di bagian bawah dan makin ke atas per lapisannya makin kabur. Dijumpai lapisan tipis rijang yang berwarna kelabu sampai kehitaman. Lokasi tipe formasi ini terletak di Pegunungan Manusela.
12	TRJk: Formasi Kanikeh	Perulangan antara batu pasir, batu lanau dan batu lempung, kompak dan keras. Batuan ini tersingkap di bagian tengah pulau dan di dekat pantai, daerah selatan Gunung Selagor, Kepulauan Gorong dan Watubela.



No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
13	Pzta: Kompleks Kabipoto	Sekis mika, sekis tremolit aktinolit, sekis klorit, batu pualam terdaunkan, sekis epidot, sekis amfibol dan genes.
14	Jku: Batuan Ultramafik	Serpentinit, piroksenit dan dunit tersingkap di sebelah Tenggara dan Selatan Pulau Seram, Pulau Tibor, Pulau Watubela dan Pulau Gorong.

Sumber: Peta Geologi Lembar Bula dan Watubela, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Sebagian besar batuan di Lembar Bula, telah terlipat kuat dan tercenangga. Arah sumbu lipatan berkisar dari Barat-Timur sampai Barat Laut-Tenggara. Pada umumnya besar sudut kemiringannya melebihi 30°, hanya di beberapa tempat lebih kecil. Di selatan Bula sumbu lipatannya hampir sejajar dengan garis pantai. Pada umumnya besar sudut kemiringannya kurang dari 30°. Struktur perdaunan (foliasi) dijumpai pada batuan malihan dengan arah yang tidak teratur. Sesar yang dijumpai adalah sesar naik, sesar turun dan sesar geser jurus. Sesar naik arah jurusnya lebih kurang barat laut-tenggara dengan kemiringan ke arah barat daya. Sesar turun mempunyai arah jurus yang umumnya hampir serupa dengan arah jurus sesar naik. Sedangkan sesar geser arah jurusnya berlawanan dengan jurus sesar naik yakni timur laut-barat daya.

Pada kejadian tektonik yang terakhir menghasilkan sesar naik. Sesar ini mengakibatkan munculnya batuan ultramafik di atas batuan yang lebih muda. Pada fase tektonik ini juga, batuan bancuh (Kompleks Salas) terbentuk dan di beberapa tempat disertai pembentukan olistostrom (sebagai hasil sekunder) disusul pembentukan sesar sekunder.

- c) Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan Kepulauan Aru (Kabupaten Aru)



a. Kepulauan Kei

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Kei dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Formasi Batuan Kepulauan Kei

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qc: Endapan Pantai	Pasir, kerikil dan lumpur. Tersebar di kepulauan Tayandu.
2	Qk: Formasi Kei Kecil	Batu gamping terumbu terdiri atas koral, moluska, ganggang dan briozoa. Umumnya membentuk perbukitan rendah bergelombang, medan kars dan perbukitan rendah berlereng terjal.
3	Qpo: Formasi Ohoinol	Biokalkarenit yang tidak padat berselingan dengan napal. Menjemari dengan Formasi Kei Kecil, menindih tidak selaras Formasi Weryahan dan membentuk perbukitan rendah bergelombang.
4	Tpw: Formasi Weryahan	Napal dan batu gamping berlapis baik. Umur pliosen, diendapkan dalam lingkungan laut dangkal dan tebal 40 m.
5	Tomw: Formasi Meduar	Batu gamping terumbu dan napal. Napal mengandung sedikit foraminifera kecil sedangkan batu gamping terumbu umumnya berongga, menjemari dengan Formasi Tamangil dan menindih tak selaras Formasi Elat.
6	Tot: Formasi Tamangil	Batu gamping tersusun dari foraminifera bentos dalam matriks mikrit.
7	Tee: Formasi Elat	Kalkarenit napalan dengan sisipan napal.
8	Tey: Formasi Yamtimur	Napal bersisipan kalkarenit dan berlapis baik.
9	pTg: Kompleks Batuan Malihan	Genes-felspar-kuarsa-biotit-muscovit.
10	Tpm: Kompleks Tanjung Matot	Bongkahan kalkarenit, kalkarenit pasiran, dolomit, grewak.

Sumber: Peta Geologi Lembar Kepulauan Kei dan Tayandu, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Di lembar ini paling tidak telah terjadi tiga kali arogenesis. Orogenesa pertama melipat Formasi Elat dan



Yamtimur yang kedua melipat formasi-formasi itu lebih kuat dan Formasi Weduar. Orogenesa terakhir menyebabkan Formasi Weryahan ikut terlibat.

b. Kepulauan Aru

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Aru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Formasi Batuan Kepulauan Aru

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lumpur, pasir, granula dari pecahan koral dan batuan.
2	Qt: Formasi Tanah Merah	Batu pasir kuarsa, setempat lempungan dengan sisipan konglomerat dan batu lanau karbonan.
3	TQw: Formasi Wasir	Napal dan batu lumpur gamping berselingan dengan batu gamping bioklastik.
4	Tpmj: Anggota Jambulenga Formasi Manumbai	Napal, setempat pasir, terdapat batu gamping bioklastik lempungan.
5	Tpml: Formasi Manumbai	Batu gamping coquina, berselingan dengan kalkarenit dengan sisipan setempat pasir.
6	Tmk: Formasi Koba	Kalkarenit kapuran hingga napalan. Setempat bersisipan napal pasir.

Sumber: Peta Geologi Lembar Aru, Maluku Tenggara

Struktur dan Tektonika

Pola struktur dasar laut sebelah Utara Kepulauan Aru berarah Utara-Selatan atau Utara-Timur Laut dan Selatan-Barat Daya. Struktur geologi yang dijumpai di Kepulauan Aru terutama sesar turun dan kelurusan. Sesar berarah timur laut-barat daya menyesarkan Formasi Koba dan Formasi Manumbai. Kelurusan berkembang baik di kedua formasi tersebut, juga berarah timur laut-barat daya. Perlapisan batuan umumnya mendatar atau hampir mendatar. Di bagian Pulau Wasir, Pulau Ujir dan pantai barat Pulau Wokam, batuan terlipat lemah dengan sumbu lipatan berarah Timur Laut-Barat Daya.

d) Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya



a. Kepulauan Tanimbar

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Tanimbar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Formasi Batuan Kepulauan Tanimbar

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lumpur, pasir dan kerikil.
2	Qs: Formasi Saumlaki	Batu gamping koral, padat, setempat terbreksikan, bagian bawah konglomerat dengan komponen batu gamping dan cangkang fosil.
3	QTb: Formasi Batilembuti	Napal dan napal kapuran.
4	Tmbm: Anggota Napal, Formasi Batimafudi	Napal bersisipkan batu gamping pasiran.
5	Tmb: Formasi Batimafudi	Perselingan batu gamping pasiran, napal, batu pasir gampingan.
6	Tpt: Formasi Tangustabun	Perselingan antara lempung, tufa kaca, rijang, batu pasir kuarsa dan batu gamping.
7	M:Kompleks Molu	Terdiri dari batu pasir kuarsa, batu gamping, napal, batu gamping kristal, batu gamping oolit, batu gamping berfosil spiriferina, rijang, sekis, andesit, piroksen, basal amigdal, diorit hornblenda, trakit porfir dan tufa.

Sumber: Peta Geologi Lembar Kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara

Struktur dan Tektonika

Gerakan tektonik yang kuat mengakibatkan beberapa satuan/formasi menjadi terlipat dan tersesarkan. Perlipatan yang dapat diamati mempunyai arah hampir sejajar dengan poros Pulau Yamdena yaitu Timur Laut-Barat Daya. Di pulau Yamdena bagian Barat, perlipatan itu dapat digolongkan terbuka, sedang di bagian Timur tertutup.

b. Kepulauan Babar

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Babar dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 10 Formasi Batuan Kepulauan Babar

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Kerikil, kerakal, pasir, lanau dan lumpur, mengandung sisa tumbuhan, koral dan cangkang kerang, hasil endapan sungai dan pantai.
2	Qk: Konglomerat	Konglomerat aneka bahan dengan komponen fragmen ultrabasa, gabro, diabas, andesit, basal, batu pasir kuarsit, filit, batu lempung, batu gamping malih dan batu gamping terumbu yang direkat karbonat dan limonit, bersisipan batu pasir konglomeratan.
3	Qpg: Batu Gamping Koral	Batu gamping koral, bagian bawah berlapis baik dan bagian atas pejal.
4	TQp: Batu Pasir Kuarsa	Batu pasir kuarsa dan napal pada bagian bawah satuan.
5	Tmpb: Batuan Bancuh	Bancuh mengandung bongkahan asal batuan malihan (pPs), batu gamping Permo-Trias (PTRg), serpih Jura (Js) dan Ofiolit (Of), berasosiasi dengan poton.
6	Js: Serpih	Serpih dan serpih lanauan dengan sisipan batu lempung, batu lanau, batu pasir dan batu gamping.
7	PTRg: Batu Gamping Krinoid	Batu gamping krinoid, berlapis baik, napal mengandung fosil yang rusak dan sukar dikenali, serpih mengandung bintal oksida besi, batu pasir litik berangsur menjadi batu gamping pasiran dan terlipat kuat.
8	PPs: Batuan Malihan	Sekis-klorit-kuarsa, sekis klorit-kuarsa-kalsit, sekis klorit epidot, sekis klorit-biotit, amfibolit, batu gamping malih dan filit, diduga asal sedimen klastika dan batu gamping.
9	Of: Ofiolit	Serpentit, dunit, gabro, diabas dan lava basal.

Sumber: Peta Geologi Lembar Babar Maluku Tenggara

Struktur dan Tektonika

Struktur geologi di daerah ini terdiri dari sesar normal dan sungkup, lipatan, kekar, perdaunan dan diapir. Sesar Sungkup diduga terjadi bersamaan dengan terbentuknya bancuh. Sesar normal berarah Barat-Timur dan Barat Laut-Tenggara.



c. Pulau Moa dan Pulau Damer

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Moa dan Pulau Damer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11 Formasi Batuan Pulau Moa dan Pulau Damer

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Pasir, kerikil dan kerakal mengandung pecahan ganggang, coral dan moluska, endapan pantai.
2	Qgp: Batu Gamping Korai	Batu gamping terumbu, setempat membentuk undak-undak, sisipan tufa gampingan berbatu apung.
3	Tmcp: Batu Gamping Klastik	Batu gamping klastika.
4	TRgp: Batu Gamping Berlapis	Batu gamping klastika berlapis baik.
5	PTRgp: Batu Gamping Merah	Batu gamping klastika, setempat bersisipan tipis serpih dan batu pasir. Satuan ini disetarakan dengan Formasi Maubisse di Timor.
6	Ps: Serpih	Serpih dengan sisipan batu pasir, sebagian gampingan.
7	Qv: Breksi Gunung Api	Breksi Vulkanik bersusunan andesit sampai basal, tuf dan bersisipan napal tufan.
8	Tv: Lava	Lava bersusunan andesit sampai basal.
9	PTof: Batuan Ultrabasa	Wherlit, serpentinit dan dunit. Terubah kuat.
10	PPm: Batuan Malihan	Sekis bersisipan genis, filit dan batu gamping malih.
11	Tmpb: Satuan Bancuh	Satuan ini terdiri dari bermacam bongkah batuan beku, batuan sedimen dan batuan malihan yang terkandung dalam massa-dasar serpih tergerus.

Sumber: Peta Geologi Lembar Wetar Timur, Nusa Tenggara

Struktur dan Tektonika

Pulau-pulau Leti, Moa dan Lakor terletak pada jalur busur luar Banda tak bergunung api dan pulau-pulau Romang, Damar, Teun, Nila dan Serua berada pada jalur busur dalam Banda. Struktur geologi yang terdapat di lembar ini terdiri dari sesar, lipatan, kekar dan perdaunan. Pada Busur dalam Banda terjadi sesar normal dan sesar miring sedangkan pada Busur luar Banda, sesar terdiri dari sesar mendatar mengiri dan sesar normal. Kejadian ini menyebabkan



teraktifkan kembali struktur tua yakni dengan terjadinya pengangkatan dan terbentuknya batuan bancuh.

d. Pulau Wetar

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Wetar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 12 Formasi Batuan Pulau Wetar

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Kerakal, kerikil, pasir, lanau, berupa endapan sungai dan pantai.
2	Ql: Batu Gamping Koral dan Breksi Koral	Satuan ini tersebar di pinggir pantai Pulau Wetar.
3	QTv: Batuan Gunung Api Tua	Lava, breksi dan tuf berbatu apung.
4	Tmpa: Formasi Alor	Lava dan breksi bersusunan andesit sampai basal, bersisipan batu pasir dan tuf.
5	Tmn: Formasi Naumatang	Lava dasit, breksi, aglomerat bersusunan dasit, disisipi batu pasir tufan, tuf dan batu pasir gampingan.
6	Tm (di,gd,gr,da): Batuan Terobosan	Diorit (di), granodiorit (gd), granit (gr) dan dasit (da).
7	Tmvs: Batuan Gunung Api Riolit Sakir	Lava riolit.
8	Tmt: Formasi Tihu	Breksi, lava dan tuf bersusunan andesit basal.
9	Ttgd: Granodiorit Tamenang	Granodiorit bertekstur porfir.

Sumber: Peta Geologi Lembar Wetar Timur, Nusa Tenggara

Struktur dan Tektonika

Termasuk dalam Busur Banda Bergunung Api, akan tetapi gunung api yang masih giat tidak dijumpai. Struktur geologi yang terdapat di daerah ini berupa sesar dan lipatan yang lemah. Sesar di daerah ini memiliki dua arah utama yaitu Timur Laut-Barat Daya dan hampir Timur-Barat atau sejajar pulau. Sesar-sesar tersebut berupa sesar geser sinistral dan sesar turun.



E. Hidrologi

1) Kepulauan Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Sungai yang terdapat di Kepulauan Buru umumnya merupakan sungai hujan. Beberapa sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau) yaitu Wae Koa, Wae Nunga, Wae Lihang, Wae Mahu, Wae Tibiki, Wae Lua, Wae Aga, Wae Walo, Wae Lumara, Wae Fogi, Wae Kea, Wae Nalut, Wae Namsina, Wae Sea, Wae Ura, Wae Waplau, Wae Perang, Wae Netat, Wae Rosi, Wae Mangit, Wae Pure, Wae Pait, Wae Wamlana, Wae Nibe dan Wae Poti.

2) Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur)

Sungai yang terdapat di Pulau Seram umumnya merupakan sungai hujan. Beberapa sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau) yaitu Wae Matakabo, Wae Bobo, Wae Bali, Wae Lofin, Wae Kobi, Wae Samal, Wae Sariputih, Wae Isai, Wae Mual, Wae Usa, Wae Tuluamang, Wae Kawa, Wae Myaka, Wae Kuhu, Wae Sapalewa, Wae Utu, Wae Sala, Wae Tala, Wae Ela, Wae Maitihu dan Wae Palu.

3) Kepulauan Kei (Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan Kepulauan Aru



Kondisi hidrologi yang diamati adalah kondisi sungai (besar dan kecil) yang diharapkan dapat menjadi potensi air bagi kehidupan masyarakat di kawasan kepulauan Kei dan Kepulauan Aru. Kondisi sungai yang ada di kawasan Kepulauan Kei merupakan sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau), yaitu sungai Evu, Semawi, Uf, Holay, Watuan, Ur, Weduar. Selain itu di Kepulauan Aru juga terdapat selat atau sering disebut sungai, yaitu Sungai Maikor dan Sungai Warkoi.

4) Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya

Sungai yang terdapat di Wilayah Kepulauan Tanimbar sebagian besar merupakan sungai tadah hujan dan umumnya dengan pola aliran memancar dan hanya berair di musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau kondisinya kering atau tidak berair. Adapun sungai-sungai di Kepulauan Tanimbar antara lain: Sungai Maktian, Selwasan, Wetar, Latdalam, Tamrian, Batmafuti, Lakalway, Wesor, Sinmai, Kamlili, Wemusin, Sahlan, Waslieta, Tepa, Tutuwawang, Yaltubung, Sabir, Linwau dan Arnau.

F. Kondisi Klimatologi

Iklim di Provinsi Maluku dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kepulauan Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan. Berdasarkan data klimatologi di 10 stasiun meteorologi di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa rata-rata temperature sempat



mencapai 38,4°C di Seram Bagian Timur dan 35,2°C di Maluku Tengah. Sedangkan rata-rata kelembaban yang pernah mencapai titik tertinggi hingga 100 persen berada di Seram Bagian Timur, Kota Ambon dan Kepulauan Tanimbar. Di beberapa daerah memiliki curah hujan yang cukup tinggi, bahkan mencapai lebih dari 1.000 mm di Kota Ambon. Begitupula dengan hari hujan yang sempat mencapai hampir setiap hari selama sebulan yakni di Kota Tual dan Kota Ambon. Berikut kondisi iklim di Provinsi Maluku secara terperinci:

Tabel 2. 13 Kondisi Iklim di Provinsi Maluku Tahun 2022

Stasiun/Daerah	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)
Mathilda Batlayeri Saumlaki	20 – 34,4	50 – 100	0 - 20	997,6 – 1.012,8	21,7 – 784,3	5 - 29
Dumatubun Langgur (Tual)	18,8 – 34,0	86,2 - 100	0 - 25	998,7 – 1.010,7	109,1 – 540,3	17 – 24
Amahai (Maluku Tengah)	21,5 – 33,8	83,3 - 99	0 – 28	1.000,6 – 1.013,8	91,5 – 1672,8	12 – 30
Banda Neira (Maluku Tengah)	21,8 – 33,0	54 - 100	0 - 25	999,6 – 1.013,0	141,4 – 567,3	17 – 24
Namlea	21,6 – 33,8	52 - 100	0 - 20	998,8 – 1.010,7	34,5 – 265,6	4 - 16
Dobo	23,2 – 32,1	72 - 92	1 - 10	1.004,6 – 1.013,0	97,5 – 374,6	10 - 27
Seram Bagian Barat	19,0 – 34,0	53 - 100	0 - 15	1.001,1 – 1.013,4	41,8 – 1083,4	12 - 28
Seram Bagian Timur	22,4 – 38,7	58 - 100	0 - 28	1.001,6 – 1.014,1	74,9 – 774,7	12 - 25
Pattimura Ambon	23,2 – 32,5	51 - 100	0 – 10,3	1.004,7 – 1.013,9	54,6 – 1.220,9	12 - 29
Maritim Ambon	23,0 – 34,8	53 - 90	0 – 24	1.001,7 – 1.012,9	78,7 – 960,8	11 - 28

Sumber: Provinsi Maluku Dalam Angka 2023

G. Penggunaan Lahan

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik



Indonesia Nomor : 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 seluas 3.919.617 Ha, yang terdiri dari Hutan Konservasi seluas 429.538 Ha (10,96%), Hutan Lindung 627.256 Ha (16,00%), Hutan Produksi Terbatas 894.258 Ha (22,81%), Hutan Produksi Tetap 643.699 Ha (16,42%) dan Hutan Produksi Konversi 1.324.866 Ha (33,80%). Sedangkan areal penggunaan lain seluas 1.498.799 Ha. Berdasarkan data Maluku Dalam Angka tahun 2022 terdapat perubahan luas areal hutan karena telah dilakukan tata batas Kawasan oleh BPKH, sehingga rincian kawasan hutan menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 14 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Luas Hutan	Hutan Konservasi (HL)	Hutan Lindung (HL)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Hutan Produksi Konversi (HPK)
Kota Ambon	9.511	-	9.511	-	-	-
Maluku Tengah	618.659	175.766	134.233	179.406	28.522	100.732
Buru	427.434	6.849	108.166	109.951	106.912	95.556
Buru Selatan	345.142	-	73.118	101.652	90.768	79.604
Maluku Tenggara	47.142	18.017	6.438	2.399	2.966	17.322
Kota Tual	11.755	-	9.173	987	-	1.595
Kepulauan Tanimbar	419.467	77.199	13.010	78.165	112.045	139.048
Maluku Barat Daya	334.950	51.168	34.774	4.584	71.262	173.162
Seram Bagian Barat	414.405	32.219	124.699	156.045	9.810	91.632
Seram Bagian Timur	513.196	1.216	107.880	261.069	27.162	115.869
Kepulauan Aru	777.956	67.104	6.254	-	194.252	510.346
MALUKU	3.919.617	429.538	627.256	894.258	643.699	1.324.866

Sumber : Maluku Dalam Angka 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase luas kawasan hutan yang terbesar berada pada Kabupaten Aru



dengan luas 777.956 Ha dan luas kawasan hutan terkecil berada pada Kota Ambon dengan luas 9.511 Ha. Luasan kawasan hutan terbesar adalah Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) sebesar 1.324.866 Ha atau 34% dari luas Kawasan Hutan, 38% Hutan Produksi Konversi berada di Kabupaten Kepulauan Aru atau seluas 510.346 Ha. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Provinsi Maluku sebesar 894.258 Ha atau 23% dari Luas Kawasan Hutan. 29,31% HPT berada di Kabupaten Seram Bagian Timur atau seluas 261.069 Ha. Luas Hutan Produksi Tetap di Provinsi Maluku tercatat sebesar 643.699 Ha atau 16% dari Luas Kawasan Hutan. Dari luasan Hutan Produksi Tetap 30% berada di Kepulauan Aru atau seluas 194.252 Ha. Dari luas kawasan hutan tersebut telah memenuhi luas minimum sebagaimana yang dipersyaratkan (minimum 30% luas daratan). Dengan luasan tersebut diharapkan akan memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat baik dari segi konservasi, lindung dan produksi.

H. Wilayah Rawan Bencana

Maluku memiliki kekhususan dalam hal kerawanan bencana. Beberapa fakta menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepulauan Maluku ditinjau dari aspek tektonik, berada pada pertemuan tiga lempeng bumi yakni lempeng Eurasia yang meliputi antara lain Pulau Seram, Buru, Ambon dan pulau-pulau sekitarnya yang bergerak relatif ke arah tenggara, berinteraksi dengan lempeng Hindia, Australia yang relatif bergerak ke arah Utara dengan kecepatan 10 cm/tahun dan lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat dengan kecepatan 12 cm/tahun, zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk palung yang mempunyai



kedalaman sekitar 4.500-7.000 Meter yang dikenal dengan nama Zona Tumbukan atau Zona Subduksi, akibat dari benturan tersebut terbentuklah patahan-patahan (sesar) yang berpotensi menimbulkan ancaman bencana alam seperti Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api dan bencana lainnya.

2. Secara klimatologis wilayah Provinsi Maluku memiliki pola musim yang berbeda di setiap daerah. Pulau Ambon, Lease, Banda dan Seram hampir memiliki pola musim yang sama, dimana musim hujan terjadi pada bulan April sampai dengan September dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Wilayah Pulau Buru, Tual, Saumlaki dan Geser hampir memiliki pola musim yang sama yakni musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Dari perbedaan pola musim yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku maka untuk setiap daerah tentunya memiliki potensi bencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, abrasi dan lain-lain yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana fisik, maupun penderitaan manusia yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku

3. Daerah rawan bencana di Provinsi Maluku meliputi 11 Kabupaten/Kota yakni Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Lease, Kepulauan Banda, Pulau Seram, Pulau Ambon, Kawasan Pulau Buru dan sekitarnya, kawasan Pulau Wetar dan sekitarnya serta jenis ancaman yang berbeda seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi dan Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang, Abrasi, Epidemik dan Wabah penyakit, Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan Kecelakaan Laut. Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Maluku dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15 Jenis Bencana di Provinsi Maluku Tahun 2016-2021

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian		
	2019	2020	2021
Gempa Bumi	10	1	8
Banjir dan Tanah Longsor	18	11	37
Angin Puting Beliung	7	5	19
Gelombang Pasang	1	0	5
Abrasi Pantai	1	0	0
Kebakaran	2	2	0
Konflik Sosial	0	0	1
Wabah Penyakit	0	1	0
Kekeringan	1	0	0
Total	40	20	70

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

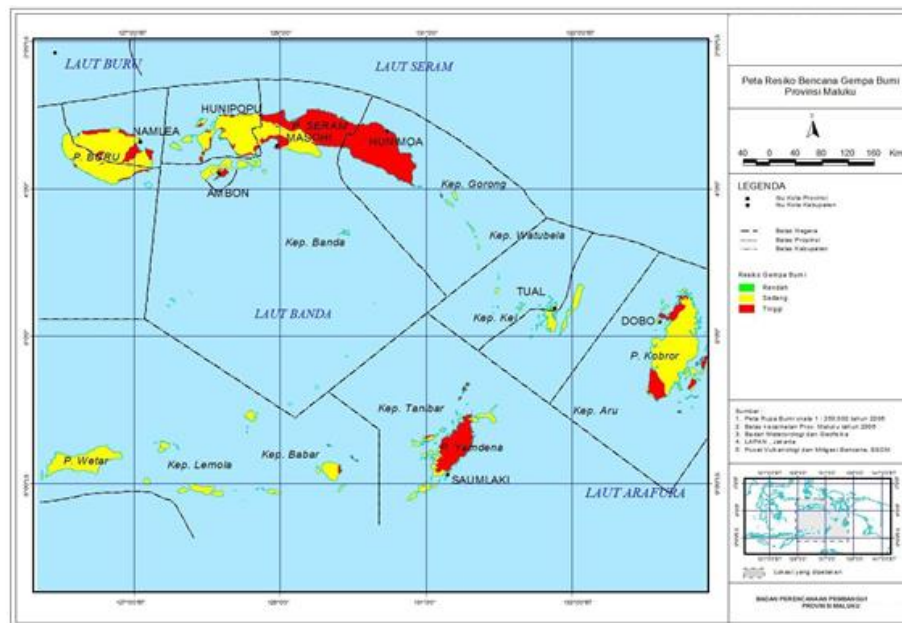
Kawasan-kawasan rawan bencana yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Maluku 2013-2033 sebagai berikut:

1. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan data kegempaan yang dimiliki BMKG stasiun Ambon, gempa tektonik berskala besar dan kecil sebanyak 2.736 gempa sejak tahun 2009-2012 yang dirasakan 98 kejadian (2 kali diatas 7 SR). Di samping merusak 8 infrastruktur

umum dan 39 pemukiman rumah, gempa juga menimbulkan korban luka 12 orang serta kepanikan dalam masyarakat. Berikut wilayah Provinsi Maluku yang rawan terhadap bencana gempa bumi:

Peta 2. 2 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi Maluku



Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

2. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Berdasarkan perhitungan kemiringan pantai sejauh 1.500 meter dari garis pantai maka ditetapkan:

- Kawasan pantai dengan kemiringan kurang dari 50 merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi;
- Kawasan pantai dengan kemiringan antara 50-300 ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan sedang;
- Kawasan pantai dengan kemiringan lebih besar 300 ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan rendah.



Berdasarkan data BPBD Provinsi Maluku 2013 dalam profil mitigasi bencana Provinsi Maluku menyebutkan bahwa kejadian tsunami di antaranya terjadi di Namlea pada tanggal 2 November 2005 yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan 5,7 skala Richter pada kedalaman 13 Km. Tsunami juga terjadi pada tanggal 14 Maret 2006 yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan 6,7 Skala Richter dengan kedalaman 30,6 Km. Selanjutnya Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 16 Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km ²)
		Rendah (Km ²)	Sedang (Km ²)	Tinggi (Km ²)	
1	Maluku Tengah	70.56	412.10	741.96	1224.62
2	Maluku Tenggara dan Kota Tual	55.92	201.03	565.61	822.56
3	Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya	145.87	846.87	1794.77	2787.51
4	Buru dan Buru Selatan	65.94	263.64	421.88	751.46
5	Seram Bagian Barat	64.15	261.82	461.13	787.10
6	Seram Bagian Timur	12.33	274.56	616.39	903.28
7	Kepulauan Aru	0.00	738.27	2003.15	2741.42
8	Ambon	19.56	49.51	53.62	122.69
Jumlah Total		434.33	3.047.80	6.658.51	10.140.64

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

3. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2009-2012 telah terjadi 185 kali peristiwa banjir dan tanah longsor di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal atau hilang 74 orang, luka-luka 367 orang, mengungsi 15.845 orang, rumah rusak 5.789.



4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Di Provinsi Maluku terdapat 9 buah gunung api aktif, terdiri dari 7 buah tipe A dan 2 buah Tipe B. Kawasan rawan letusan gunung api di Provinsi Maluku meliputi Pulau Gunung Api, Pulau-Pulau Teon, Nila, Serua dan Pulau Damer. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 1830-2011 telah terjadi 2 kali peristiwa letusan gunung api pada bulan Mei tahun 1988 dengan korban meninggal 3 orang. Selain itu, meletusnya Gunung Api Banda yakni pada tahun 1989. Selanjutnya pada bulan Januari 1993 dengan jumlah korban meninggal 1 orang, luka-luka 12 orang serta korban menderita sejumlah 3.000 orang.

5. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Sejumlah kejadian tinggi gelombang perairan yang merusak talud penahan ombak pernah terjadi di Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pulau Haruku pada bulan Mei 2011 yang mengakibatkan 1 talud pengaman pantai mengalami kerusakan. Kejadian tinggi gelombang perairan lainnya terjadi di pantai Natsepa, Suli pada bulan Juni 2011 yang menyebabkan patahnya talud penahan ombak sepanjang 8 meter.

Dalam hal gelombang pasang di Provinsi Maluku juga sangat terkait dengan peristiwa kecelakaan transportasi laut. Kondisi laut di musim barat dan musim timur gelombang air laut naik yang sangat mengganggu transportasi di laut dikaitkan dengan kapal-kapal yang belum mempunyai alat pendeteksi gelombang air laut serta belum dilengkapi peralatan penyelamatan (perahu karet, pelampung). Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2010-2012 telah



terjadi 31 kali peristiwa kecelakaan transportasi di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal atau hilang 107 orang, luka-luka 48 orang.

6. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2011-2012 telah terjadi 76 kali peristiwa angin puting beliung di Provinsi Maluku dengan korban meninggal atau hilang sebanyak 7 orang dan 1.068 rumah rusak.

7. Kawasan Rawan Bencana Konflik Sosial

Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2011-2012 telah terjadi 28 kali peristiwa konflik sosial di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal 33 orang, luka-luka 401 orang, mengungsi 4.771 orang, rumah rusak 1.275.

I. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Maluku diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Maluku guna membangun Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada perikanan (budidaya dan tangkap), pertanian (perkebunan rempah-rempah), pariwisata (pariwisata bahari, sejarah dan budaya) dan pertambangan untuk peningkatan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana. Rencana struktur ruang Provinsi Maluku dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau dan Pintu Jamak (*Multy Gate*) yang diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat



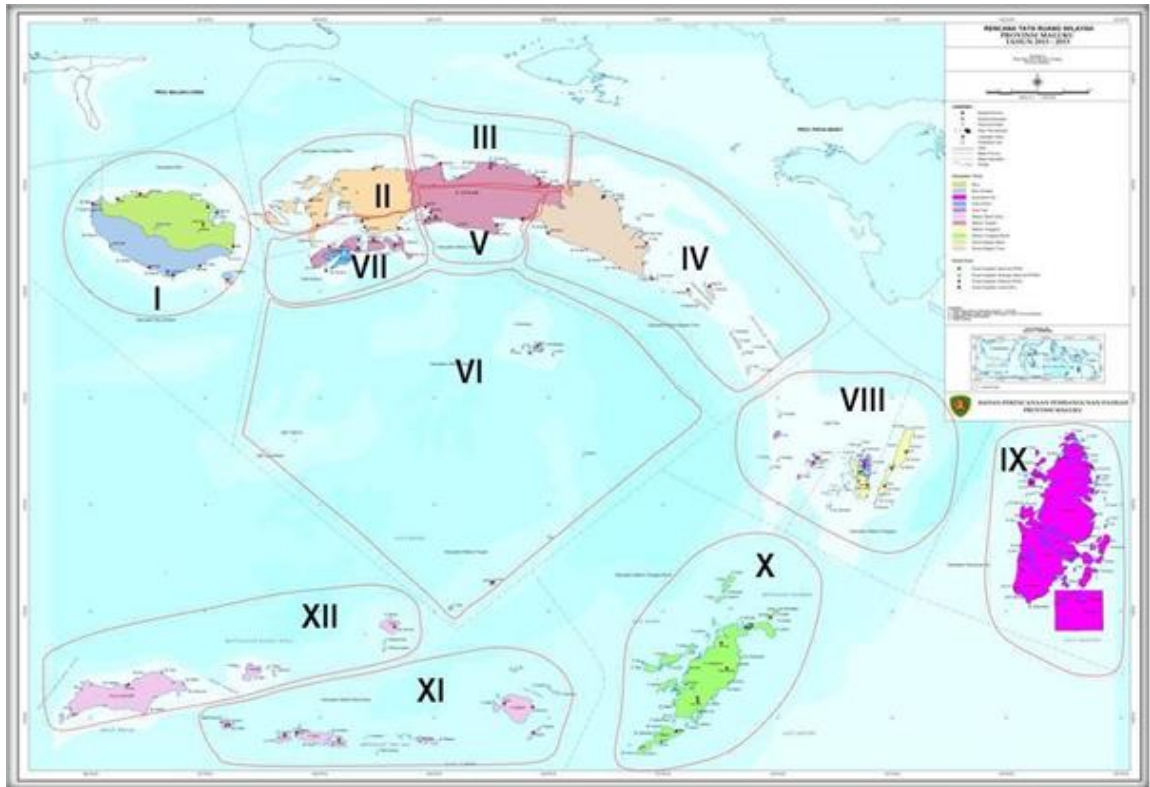
Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air secara terpadu di setiap Gugus Pulau.

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam implementasi pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan pada konsep Gugus Pulau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku, yaitu:

- a. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru;
- b. Gugus Pulau II meliputi Wilayah Seram Barat;
- c. Gugus Pulau III meliputi Wilayah Seram Utara;
- d. Gugus Pulau IV meliputi Wilayah Seram Timur;
- e. Gugus Pulau V meliputi Wilayah Seram Selatan;
- f. Gugus Pulau VI meliputi Wilayah Kepulauan Banda, P. Teon, P. Nila dan P. Serua;
- g. Gugus Pulau VII meliputi Wilayah Pulau Ambon dan PP. Lease;
- h. Gugus Pulau VIII meliputi Wilayah Kepulauan Kei;
- i. Gugus Pulau IX meliputi Wilayah Kepulauan Aru;
- j. Gugus Pulau X meliputi Wilayah Kepulauan Tanimbar;
- k. Gugus Pulau XI meliputi Wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa, Lakor dan Damer;
- l. Gugus Pulau XII meliputi Wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetar.

Secara spasial yang ditunjukkan dengan peta, konsep pengembangan wilayah Maluku dengan gugus pulau dapat dilihat pada gambar berikut:

Peta 2.3 Peta Gugus Pulau di Provinsi Maluku



Sumber: RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033

PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Maluku. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Provinsi Maluku meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Provinsi Maluku mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.



Tabel 2. 17 Sistem Perkotaan di Provinsi Maluku

No	Kabupaten /Kota	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
1	Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	-	-	Saumlaki
2	Maluku Barat Daya	-	Tiakur dan Wonreli	Ilwaki
3	Maluku Tenggara	-	Langgur	-
4	Maluku Tengah	-	Masohi dan Wahai	-
5	Buru	-	Namlea	-
6	Buru Selatan	-	Kepala Madang dan Namrole	-
7	Kep. Aru	-	-	Dobo
8	Seram Bagian Barat	-	Kairatu dan Dataran Honipopu	-
9	Seram Bagian Timur	-	Werinama, Bula dan Dataran Hunimua	-
10	Ambon	Ambon	-	-
11	Tual	-	Tual	-

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Maluku yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, yaitu Yamtel, Namsel, Tubyal, Waenetat, Ilath, Waplau, Airbuaya, Sawa, Wamlana, Kubalahin, Basalale, Kayeli, Teluk Bara, Leksula, Waisama, Wailua, Biloro, Elfule, Fena Fafan, Taniwel, Waisala, Hunitetu, Latu, Kamal, Luhu, Tomalehu Timur, Dan Uwen Pantai, Amahai, Banda Naira, Sahulau, Saparua, Pelauw, Hila, Ameth, Laimu, Tehoru, Tulehu, Kobisonta, Makariki, Geser, Kilalir, Atiahu, Wermaf Kampung Baru, Weiketam Baru, Tamher Timur, Air Kasar, Kilmuri, Pulau Panjang, Miran, Elat, Weduar, Holath, Ohoira, Rumat, Larat, Adaut, Lorulung, Seira, Romean, Wunlah, Alusi Kelaan, Adodo Molo, Tutukembong, Weet, Wulur,



Tepa, Letwurung, Serwaru, Lelang, Jerol, Benjina, Marlasi, Batulei, Koijabi, Longgar, Meror.

Tabel 2. 18 Sistem Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1.	Maluku Tengah	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Pulau Ambon-Seram
2.	Maluku Tenggara	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional WS Provinsi Kepulauan Kei-Aru WS Provinsi
3.	Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional - Pelabuhan Nasional - Bandar Udara Tersier	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Yamdena-Wetar
4.	Buru	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategi Nasional Pulau Buru WS Provinsi
5.	Seram Bagian Timur	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
6.	Seram Bagian Barat	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram



No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
		Nasional		
7.	Kepulauan Aru	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terrestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional WS Provinsi Kepulauan Kei-Aru
8.	Maluku Barat Daya	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terrestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Yamdena-Wetar
9.	Buru Selatan	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terrestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Buru WS Provinsi
10.	Ambon	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Kolektor Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional - Pelabuhan Internasional - Bandar Udara Tersier	- Jaringan Terrestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon- Seram
11.	Tual	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terrestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru WS Provinsi

Sumber : RTRWN Tahun 2008, RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Strategi pengembangan struktur ruang nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Sebagai



upaya mewujudkan strategi pengembangan wilayah nasional, Provinsi Maluku mengemban peran sebagai Provinsi yang Berciri Kepulauan didukung oleh keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan kolektor primer. Dua jaringan transportasi di Provinsi Maluku juga didukung oleh jaringan transportasi laut, pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan terestrial dan jaringan satelit serta peningkatan kualitas jaringan sumber daya air melalui ketersediaan air baku yang bersumber dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang merupakan WS strategis nasional di Maluku.

Tabel 2. 19 Sistem Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
1	Maluku Tengah	- Cagar Alam Tanjung Sial - Cagar Alam Laut Banda - Taman Nasional Manusela - Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo - Taman Wisata Alam Laut Banda	- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata) - Kawasan Andalan Laut Banda (Perikanan, pertambangan, pariwisata)	- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram - Kawasan Laut Banda
2	Maluku Tenggara	- Cagar Alam Daab	- Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)	
3	Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	- Suaka Margasatwa Tanimbar - Cagar Alam Pulau Nuswotar	- Kawasan Kei sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI



No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
		- Cagar Alam Pulau Larat - Cagar Alam Tafermaar	- Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya (Perikanan laut, pertambangan, pariwisata)	
4	Buru	- Cagar Alam Masbait - Cagar Alam Masarete	- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)	
5	Seram Bagian Timur		- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
6	Seram Bagian Barat	- Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa - Cagar Alam Gunung Sahuwai - Taman Wisata Alam Laut Pulau Kassa - Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya	- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
7	Kepulauan Aru	- Suaka Margasatwa Pulau Baun - Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara - Suaka Margasatwa Pulau Kobror	- Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI



No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
8	Maluku Barat Daya	- Cagar Alam Bekau Huhun	- Kawasan Kei Sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau, Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI
9	Buru Selatan		- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)	
10	Ambon	-	-	-
11	Tual		- Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau, Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)	

Sumber: RTRWN Tahun 2008, RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Maluku diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis. Kawasan perikanan dan pertanian yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensial pertanian, tanaman pangan, komoditas padi dan sagu, kawasan berpotensi perkebunan cengkeh, pala, kelapa, kakao, pohon kayu putih, jambu mete, kopi, dan vanili. Sektor unggulan pertanian diarahkan pada kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kota Ambon, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan komoditas perikanan dengan pengembangan kawasan berpotensi perikanan budidaya dan pengembangan



kawasan berpotensi perikanan tangkap dan Kawasan Pengembangan Pariwisata diarahkan pada 11 Kabupaten/Kota.

Pengembangan kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan pertanian, kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan, kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan pengembangan komoditas perikanan diarahkan dengan meningkatkan dukungan ketersediaan dan kehandalan serta daya jangkau infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi, peningkatan kualitas dan cakupan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan ketersediaan infrastruktur energi sehingga peran dan fungsi Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dan sebagai Lumbung Ikan Nasional dapat terwujud. Kawasan yang berpotensi untuk diarahkan sebagai pengembangan komoditas pertambangan meliputi pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral Mangan dan Nikel diarahkan pada Kabupaten Maluku Tengah dan pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan kawasan pariwisata diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapatan masyarakat lokal yang diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumberdaya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang.



Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan. Wilayah pesisir Provinsi Maluku mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dan pembangunan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Wilayah ini mengandung berbagai sumberdaya dan potensi ekonomi seperti aneka jenis ikan dan obyek wisata. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir Provinsi Maluku menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

J. Potensi Sumber Daya Alam

1) Perikanan

Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan yang cukup besar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) dan Tingkat



Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dari 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni WPP 714, WPP 715 dan WPP 718, total potensi sumberdaya ikan Provinsi Maluku sebesar 4.386.836 ton per tahun (36,5% dari total potensi perikanan Nasional).

Tabel 2. 20 Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan & Tingkat Pemanfaatan

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia		Jenis Ikan				Udang Panaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi	Total
		Pelagis Kecil	Pelagis Besar	Demersal	Karang						
WPP 714	Potensi (Ton)	22.881	370.653	292.000	121.326	6.472	724	1.145	4.705	13.460	1.033.366
	JTB (Ton)	156.017	259.457	204.400	60.663	3.236	362	879	3.294	9.422	697.730
	Tingkat Pemanfaatan	0,7	0,7	0,7	1,1	1	1,7	1,55	0,6	0,5	
		156.017	259.457	204.400	133.459	6.472	1231	1.775	2.823	6.730	772.364
WPP 715	Potensi (Ton)	443.944	74.908	80.226	105.336	5.295	1217	336	157	3.874	715.293
	JTB (Ton)	310.761	52.436	56.158	52.668	3.707	609	235	110	2.712	479.396
	Tingkat Pemanfaatan	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7	1,2	0,7	0,7	0,9	
		310.761	52.436	56.158	136.937	3.707	1460	235	1.010	3.487	566.191
WPP 718	Potensi (Ton)	836.973	818.870	876.722	29.845	62.842	1187	1.498	775	9.212	2.637.564
	JTB (Ton)	669.579	655.096	701.378	23588	50.274	950	1.198	620	7.370	2.110.053
	Tingkat Pemanfaatan	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,28	
		426.856	810.681	587.404	31.934	54.044	1.151	1.273	597	11.791	1.925.732
								Maluku : 4.386.836 Nasional : 12.011.125 Persentasi : 36,5%			

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

2) Perkebunan

Provinsi Maluku memiliki 3 (tiga) komoditas unggulan perkebunan yakni cengkeh, pala dan kelapa yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Komoditas kelapa dapat ditemui di semua kabupaten/kota dengan luas areal sebesar 114.634,44 Ha dengan total produksi tahun 2020 sebesar 105.036,35 Ton, dimana Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur



merupakan kontributor utama produksi kelapa di Maluku. Untuk komoditas perkebunan cengkeh, Pada tahun 2021 Provinsi Maluku memiliki luas areal untuk tanaman cengkeh sebesar 44.566,89 Ha dengan produksi sebesar 20.769,60 ton. Sebaran tanaman cengkeh meliputi 9 kabupaten/kota yang di Maluku, kecuali Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru. Sementara itu, komoditas perkebunan pala dengan luas areal sebesar 35.358,06 Ha pada tahun 2021, produksi pala di Maluku sebesar 5.574,00 ton. Kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah merupakan kabupaten-kabupaten dengan produksi pala terbesar di Maluku.

Tabel 2. 21 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Maluku Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Luas Areal (Ha)			Produksi (Ton)		
	Kelapa	Cengkeh	Pala	Kelapa	Cengkeh	Pala
Kepulauan Tanimbar	17.316,77	-	13	19.399,8	-	1,82
Maluku Tenggara	23.110,18	20,45	2.969	21.364	7,65	416,65
Maluku Tengah	20.905,83	18.757,97	12.276,5	20.198,05	9.905,23	2.531,17
Buru	4.984,85	1.313,41	1.410,34	3.852,8	450,05	128,39
Kepulauan Aru	3,066,98	0,33	23	1.802,15	0,03	4,20
Seram Bagian Barat	8.281,10	7.520,55	3.394,5	8.416,10	3.255,85	322,88
Seram Bagian Timur	18.470,39	10.102,50	9.963,39	16.979,3	5.406,20	1.363,85
Maluku Barat Daya	6.504,20	218,38	1.515,96	5.777,4	86,40	231,18
Buru Selatan	9.524	5.607,70	2.954,3	8.066,40	2.299,60	537
Kota Ambon	2.311,70	1.501	1.763	1.615,10	373,40	342,32
Kota Tual	949,74	36,09	97,47	305,79	11,30	21,60
Maluku	115.325,74	45.078,38	36.381,06	107.776,89	21.435,31	5.901,06

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2023

3) Pariwisata

Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia memiliki berbagai keistimewaan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Keistimewaan tersebut tidak hanya dari

segi aspek historis yang dimiliki tetapi juga berbagai keindahan alam serta keunikan lokal baik tradisi, budaya serta masyarakatnya.

Potensi daya tarik wisata Provinsi Maluku dalam keseluruhan area atau lingkup kabupaten yang ada beranekaragam. Potensi obyek dan daya tarik Maluku yang menjadi andalan sampai saat ini serta dikenal luas adalah obyek dan daya tarik alam dan budaya serta peninggalan sejarah. Obyek tersebut berupa pulau-pulau kecil dan pantai eksotik yang indah serta bangunan peninggalan kebudayaan di masa lalu. Obyek dan daya tarik wisata budaya tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota. Kondisi daya tarik wisata budaya dan sejarah sampai saat ini sudah beberapa yang dikembangkan.

Tabel 2. 22 Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi Maluku

No	Lokasi	Potensi Wisata				Jumlah
		Bahari	Alam	Sejarah/ Budaya	Buatan	
1.	Kota Ambon	40	13	50	-	103
2.	Kab. Maluku Tengah	53	12	50	1	116
3.	Kab. Maluku Tenggara	36	12	28	-	76
4.	Kab. MTB	18	6	16	-	40
5.	Kab. Kepulauan Aru	25	26	30	6	87
6.	Kab. Seram Bagian Barat	32	45	47	-	124
7.	Kab. Seram Bagian Timur	17	16	10	-	43
8.	Kab. Buru	17	9	18	6	50
9.	Kab. Buru Selatan	7	2	6	-	15
10.	Kab. MBD	19	48	98	-	165
11.	Kota Tual	16	2	6	1	25



No	Lokasi	Potensi Wisata				Jumlah
		Bahari	Alam	Sejarah/ Budaya	Buatan	
JUMLAH		280	191	359	14	844

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab/Kota se-Maluku, 2019

4) Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Maluku digambarkan sebagai berikut:

a. Ketenagalistrikan

- Sistem ketenagalistrikan di Provinsi Maluku terdiri dari 8 sistem kelistrikan dengan beban di atas 2 MW adalah Sistem Ambon – 53 MW, Sistem Masohi-Waipia-Liang – 6,4 MW, Sistem Kairatu-Piru – 2,2 MW, Sistem Namlea-Mako – 7,5 MW, Sistem Saparua – 1,5 MW, Sistem Langgur – 7,6 MW, Sistem Dobo – 3,1 MW, Sistem Saumlaki 2,8 MW.
- Jumlah desa yang belum berlistrik sebanyak 228 desa dari total jumlah desa di Provinsi Maluku sebanyak 1242 desa.
- Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik bagi industri serta pemenuhan rasio ketersediaan daya listrik masih diperlukan pembangunan pembangkit baru.

b. Energi Baru Terbarukan

Provinsi Maluku memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, panas bumi, biomassa dan gelombang laut. Berdasarkan inventarisasi, potensi tersebut adalah sebagai berikut :



Energi Air : Potensi energi air terinventarisasi di Pulau Seram sebesar 217,4 MW, Pulau Buru sebesar 15 MW. Potensi ini perlu dikaji lebih jauh untuk mendapatkan data lengkap dan detail, sehingga dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Tabel 2. 23 Data Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Maluku

No	Sumber Air		Lokasi			Perkiraan Daya (Kw)
	Nama Sungai	Induk Sungai	Desa	Kec.	Kab.	
1	Wae Mala	Wae Mala	Masohi	Amahai	Malteng	2.100
2	Wae Pia	Wae Pia	Masohi	Amahai	Malteng	3.300
3	Nua - 1	Nua	Masohi	Amahai	Malteng	3.500
4	Nua - 2	Nua	Masohi	Amahai	Malteng	5.500
5	Wae Tala	Wae Tala	Masohi	Amahai	Malteng	21.300
6	Mala - 1	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	Sbb	14.600
7	Mala - 2	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	Sbb	7.500
8	Liocopa	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	Sbb	1.500
9	Rivapa - 2	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	Sbb	1.900
10	Nala	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	Sbb	2.800
11	Kawanenu	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	Sbb	2.400
12	Aru	Wae Mala	Kairatu	Kairatu	Sbb	1.800
13	Kukureha	Wae Mala	Piru	Piru	Sbb	600
14	Eti	Wae Mala	Piru	Piru	Sbb	2.400
15	Isal - 1	Isal	Wahai	Wahai	Malteng	9.900
16	Isal - 2	Isal	Wahai	Wahai	Malteng	60.000
17	Isal - 3	Isal	Wahai	Wahai	Malteng	4.300
18	W. Toen	W. Toen	Tehoru	Tehoru	Malteng	5.100
19	W. Lasa	W. Lasa	Tehoru	Tehoru	Malteng	5.700
20	W. Kawa - 1	W. Kawa	Tehoru	Tehoru	Malteng	12.300
21	Napusu Loku	Napusu Loku	Tehoru	Tehoru	Malteng	13.300
22	Jahe	Jahe	Tehoru	Tehoru	Malteng	4.600
23	Walala - 1	Walala	Tehoru	Tehoru	Malteg	3.500
24	Lau	Lau	Tehoru	Tehoru	Malteng	12.400
25	Nasulu - 1	Nasulu	Tehoru	Tehoru	Malteng	5.700
26	Nasulu - 2	Nasulu	Tehoru	Tehoru	Malteng	4.000
27	Walala - 2	Walala	Tehoru	Tehoru	Malteng	5.400
28	Waetina	Waetina	Waetina	Namrole	Buru Selatan	12.000

Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2019

Energi Surya : Berdasarkan letak geografis dan strategis, hampir seluruh daerah di Indonesia berpotensi untuk

dikembangkan PLTS dengan daya mencapai 4 kWh/m². Kawasan timur Indonesia berpotensi penyinaran sekitar 5,1 kWh/m²/hari dengan variasi bulanan sekitar 9%.

Energi Bayu : Berdasarkan analisis potensi angin dan pemetaan energi angin yang telah dilakukan oleh kementerian ESDM di wilayah kawasan timur Indonesia termasuk wilayah Maluku terinventarisir diantaranya di Ambon (15 MW), Kei Kecil (5 MW) dan Saumlaki (5 MW) Di lokasi Ambon sedang dilakukan pengembangan oleh pengembang listrik swasta dengan daya 17 MW.

Energi Panas Bumi : Potensi energi panas bumi di Maluku telah teridentifikasi yaitu di daerah Waisekat (14 MWe), Wapsalit – Waeapo (30 MWe), Batabual (25 MWe), Larike (25 MWe), Tawiri (25 MWe), Tulehu (100 MWe), Oma – Haruku (30 MWe), Saparua (25 MWe), Nusalaut (25 MWe), Tehoru (35 MWe), Banda Naira (33MWe), Pohon Batu (50 MWe), Kelapa Dua (25 MWe), Warmong (30 MWe) dan Esulit (25MWe). Lokasi yang telah memiliki izin adalah Tulehu (2 x 10 MW) yang sekarang telah memasuki tahap pengembangan.

Energi Arus Laut : Potensi energi arus laut teridentifikasi di tiga lokasi di Kabupaten Kepulauan Aru dan satu lokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 2. 24 Lokasi Potensi Energi Arus Laut di Provinsi Maluku

No.	Lokasi Potensi	Kecamatan	Kabupaten
1	Selat Manumbai	Aru Tengah	Kepulauan Aru
2	Selat Barakai	Aru Tengah	Kepulauan Aru
3	Selat Sir - Sir	Aru Tengah	Kepulauan Aru
4	Haya Pulau	Waesela	Seram Bagian Barat

Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2019

5) Mineral dan Batubara

Kegiatan pertambangan bahan galian meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Maluku, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada maraknya pertambangan tanpa izin. Penertiban area penambangan liar sampai dengan akhir Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 25 Areq Penambangan Liar di Provinsi Maluku

No.	Uraian	Jumlah Lokasi	Luas (Ha)
1.	Area Penambangan Liar	4	460
2.	Area Penambangan Liar Yang Diterbitkan	2	110
3.	Area Penambangan Liar Yang Belum Diterbitkan	2	350

Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2019

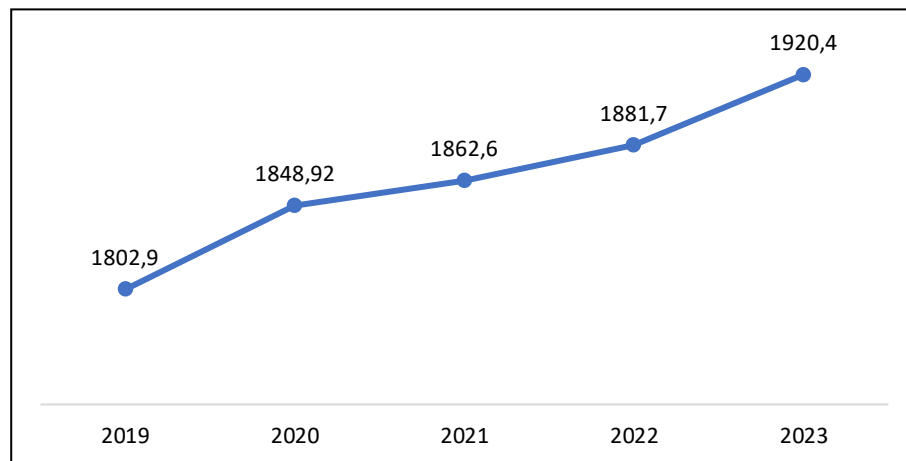
6) Minyak dan Gas

Upaya pengembangan potensi sumber daya minyak dan gas (migas) di Provinsi Maluku terus dilaksanakan. Terdapat tiga wilayah kerja migas di Maluku yakni wilayah kerja Bula, Non Bula dan Masela. Pengembangan ini tentu menjadi salah satu penyumbang terhadap perekonomian di Maluku mengingat pemerintah daerah memiliki kesempatan mengelola *Participating Interest (PI)* sebesar 10 persen dari blok migas di wilayah Maluku.

2.1.2 Kondisi Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana

pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.



Gambar 2. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

Penambahan jumlah penduduk di Maluku cukup signifikan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk sebanyak 1.773.776 jiwa dan meningkat hingga mencapai 1.881.727 jiwa pada tahun 2022. Dari keseluruhan total penduduk di Maluku, sebagian besar tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang mencapai 424.050 jiwa atau sekitar 22,69 persen. Adapun ibukota Maluku yakni Kota Ambon memiliki jumlah penduduk sebanyak 348.225 jiwa atau sekitar 18,51 persen.

Jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya (**Tabel 2.26**), maka pertumbuhan penduduk di Provinsi Maluku selama setahun terakhir (2020-2022) mencapai 1,01 persen dimana pertumbuhan penduduk tertinggi dialami oleh Kota Tual dengan capaian 3,11 persen disusul oleh Kabupaten Buru Selatan sebesar 2,33 persen.



Provinsi Maluku memiliki kepadatan penduduk mencapai 41 penduduk per km². Sebagai ibukota provinsi, Kota Ambon memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yakni 1.516,21 penduduk per km² disusul Kota Tual yang mencapai 389,04 penduduk per km². Adapun *sex ratio* Maluku mencapai 102,4 yang mengindikasikan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Namun pola ini tidak berlaku pada Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon dan Kota Tual dimana *sex ratio* berada di bawah angka 100 yang mengindikasikan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 2. 26 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2023

Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk 2020-2023	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
Kepulauan Tanimbar	128 648	1,35	6,70	29,04	102,4
Maluku Tenggara	124 968	0,94	6,51	122,92	99,3
Maluku Tengah	436 090	1,01	22,71	52,83	102,2
Buru	140 462	1,27	7,31	28,57	104,4
Kepulauan Aru	107 367	1,65	5,59	13,26	106,2
Seram Bagian Barat	222 449	1,55	11,58	44,40	104,3
Seram Bagian Timur	144 818	1,63	7,54	25,29	103,4
Maluku Barat Daya	85 807	1,55	4,47	18,85	104,9
Buru Selatan	79 455	1,76	4,14	21,60	105,0
Ambon	358 826	1,10	18,68	1.516,21	99,8
Tual	91 572	1,23	4,77	389,04	99,7
MALUKU	1 920 462	1,27	100,00	41,61	102,4

Sumber: Maluku Dalam Angka Tahun, 2024

Jika dilihat dari kelompok umur, maka terlihat bahwa penduduk terbesar berada pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 181.249 jiwa dan disusul oleh kelompok umur di atasnya (20-24 tahun) sebanyak 178.543 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 31.872 jiwa dan disusul oleh penduduk berumur 75 tahun ke atas sebanyak 31.872 jiwa.

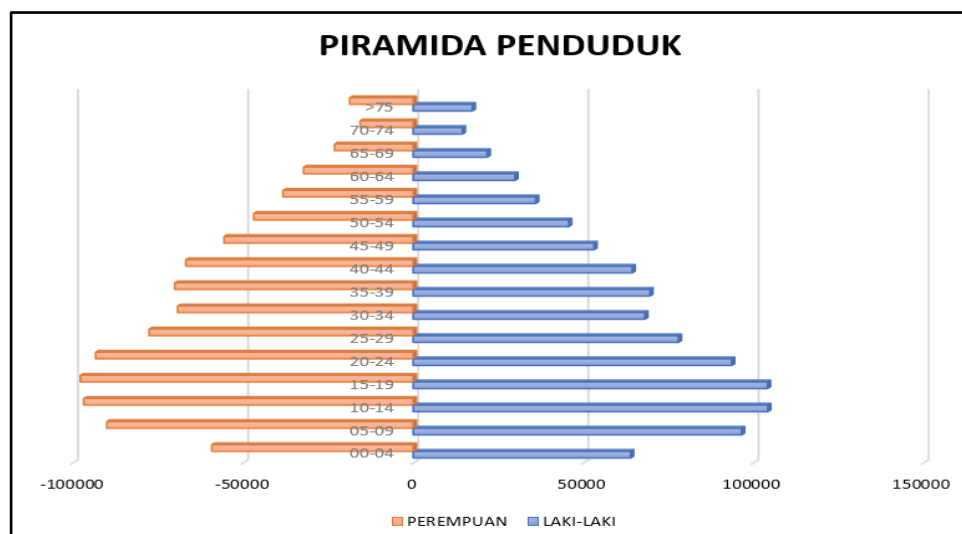


Tabel 2. 27 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Provinsi Maluku Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
0-4	90.743	86.889	177.632
5-9	77.740	74.883	152.623
10-14	83.162	78.687	161.849
15-19	94.148	87.101	181.249
20-24	92.187	86.356	178.543
25-29	88.953	84.577	173.530
30-34	81.280	78.699	159.979
35-39	72.202	71.350	143.552
40-44	64.174	64.331	128.505
45-49	56.038	56.995	113.303
50-54	47.540	48.727	96.267
55-59	39.033	40.293	79.326
60-64	30.867	32.133	63.000
65-69	22.837	23.969	46.806
70-74	15.423	16.449	31.872
75+	15.253	17.443	32.696
TOTAL	971.580	948.882	1.920.462

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).



Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

Jika dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam bentuk piramida penduduk, terlihat bentuk ekspansif pada piramida penduduk Maluku. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk pada usia muda cukup banyak, dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi, mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya program yang mengarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan (utamanya jangka panjang).

2.2 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

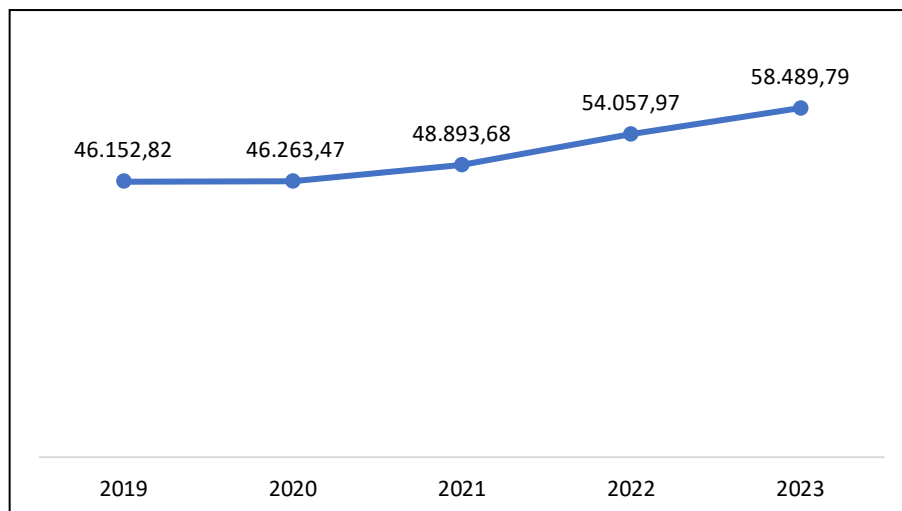
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, *income per*

kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.



Gambar 2. 3 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Milyar Rp)

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 43,04 trilyun rupiah dan meningkat cukup signifikan hingga mencapai lebih dari 48,64 trilyun rupiah pada tahun 2021. Peningkatan ini tentu saja merupakan progress positif pada



pembangunan ekonomi Maluku sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 28 Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Maluku tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,35	24,00	23,07	23,40	23,85
B	Pertambangan dan Penggalan	2,29	2,20	2,41	2,61	1,85
C	Industri Pengolahan	5,19	5,11	5,44	5,72	6,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,09	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	0,41	0,41	0,39	0,39
F	Konstruksi	7,80	7,85	7,92	7,70	7,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,71	13,23	13,28	13,31	13,57
H	Transportasi dan Pergudangan	5,25	4,53	4,84	5,19	5,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,70	1,57	1,53	1,48	1,45
J	Informasi dan Komunikasi	2,98	3,04	3,14	31,3	3,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	4,13	4,25	4,14	4,06
L	Real Estate	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26
M,N	Jasa Perusahaan	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,56	22,86	22,71	22,12	21,51
P	Jasa Pendidikan	5,75	5,81	5,77	5,58	5,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,14	2,25	2,28	2,30	2,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,66	1,64	1,60	1,60	1,63
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

Jika melihat struktur ekonomi Provinsi Maluku, maka akan terlihat dominasi sektor pembangunan perekonomian daerah adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 23,85 persen pada tahun 2023; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 21,51 persen dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,57 persen. Sedangkan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah pada

perekonomian maluku adalah kategori pengadaan listrik dan gas (0,10%) dan kategori real estate (0,26%).

Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, terlihat dari dominasi lapangan usaha, bahwa sektor unggulan yang berkontribusi cukup penting bagi perekonomian daerah adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selain dominasi lapangan usaha, potensi pada ketiga kategori tersebut cukup menjanjikan dalam pengelolaan pembangunan ekonomi wilayah ke depan, sehingga perlu kebijakan yang relevan dan khusus untuk mengembangkannya.

Selama lima tahun terakhir struktur perekonomian Maluku di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, di antaranya pertanian, kehutanan, dan perikanan; administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan jaminan social wajib; dan jasa pendidikan.

Tabel 2. 29 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Maluku Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,42	1,71	0,75	5,72	5,66
B	Pertambangan dan Penggalian	- 4,50	-0,78	-2,26	-1,09	1,45
C	Industri Pengolahan	2,69	-2,31	11,53	12,29	16,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,26	6,18	6,08	4,39	9,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,62	1,22	4,04	1,79	5,45
F	Konstruksi	7,54	-0,72	4,93	3,34	4,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,84	-4,41	4,41	6,72	6,68
H	Transportasi dan Pergudangan	5,16	-13,36	6,14	5,39	4,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66	-7,69	2,01	3,99	3,38
J	Informasi dan Komunikasi	3,76	1,04	6,29	6,98	5,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,61	7,57	3,54	-0,82	4,35



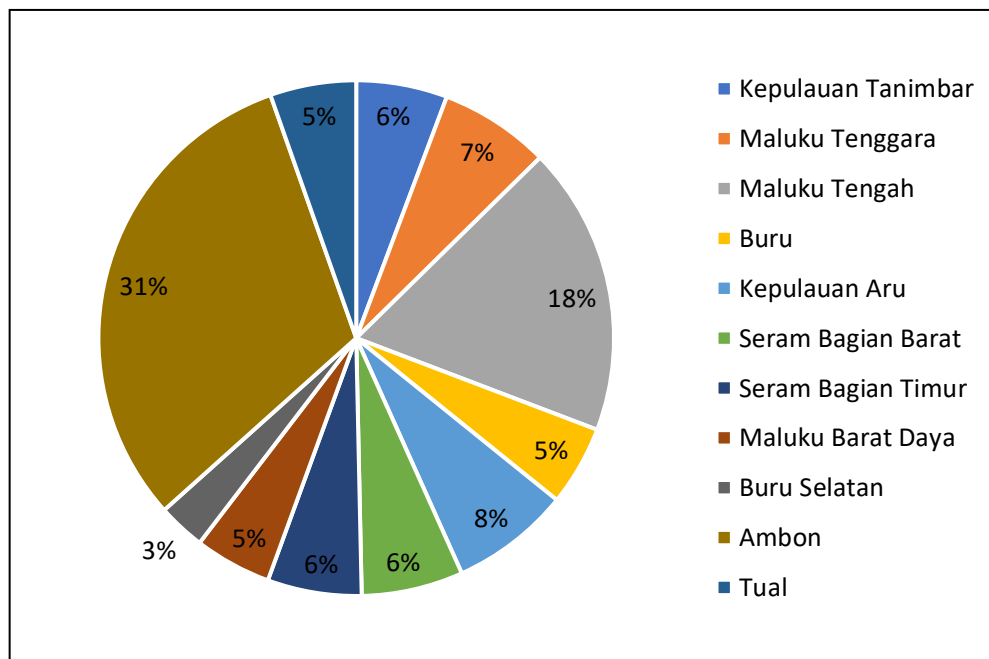
Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
L	Real Estate	1,49	-0,22	4,88	3,92	4,04
M,N	Jasa Perusahaan	5,09	-1,21	4,02	6,47	4,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,69	-0,04	3,48	4,01	1,63
P	Jasa Pendidikan	6,61	-0,04	3,81	5,48	3,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,92	4,46	5,61	7,42	8,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,37	-2,21	1,91	6,45	5,34
PDRB		5,41	-0,91	3,63	5,31	5,21

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya perekonomian di Provinsi Maluku tumbuh tidak stabil. Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang mulai muncul pada semester pertama tahun 2020, maka hal tersebut mengganggu kestabilan perekonomian baik skala mikro maupun makro. Hal ini sangat terlihat dari pertumbuhan ekonomi Maluku yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 dengan capaian -0,91 persen. Kategori lapangan usaha yang cukup mendominasi yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan ekonomi -4,41 persen. Bahkan kategori lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan ekonomi -0,04 persen. Meskipun begitu, masih terdapat kategori dominan pada struktur ekonomi Maluku yang bertahan tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan yang signifikan yakni kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan capaian pertumbuhan ekonomi 1,70 persen pada hal pada tahun-tahun sebelumnya berada pada kisaran 5 persen. Kemudian mengalami peningkatan sekitar 3-5 persen di tahun 2021-2023

Kategori lapangan usaha yang tumbuh secara signifikan di

tahun 2023 yakni Jasa Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan dan pengadaan listrik dan gas.

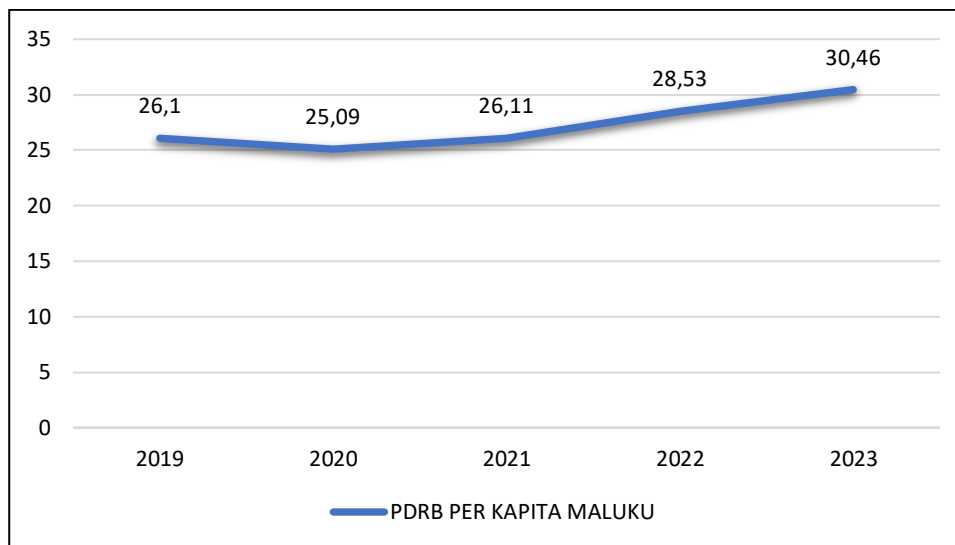


Gambar 2. 4 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

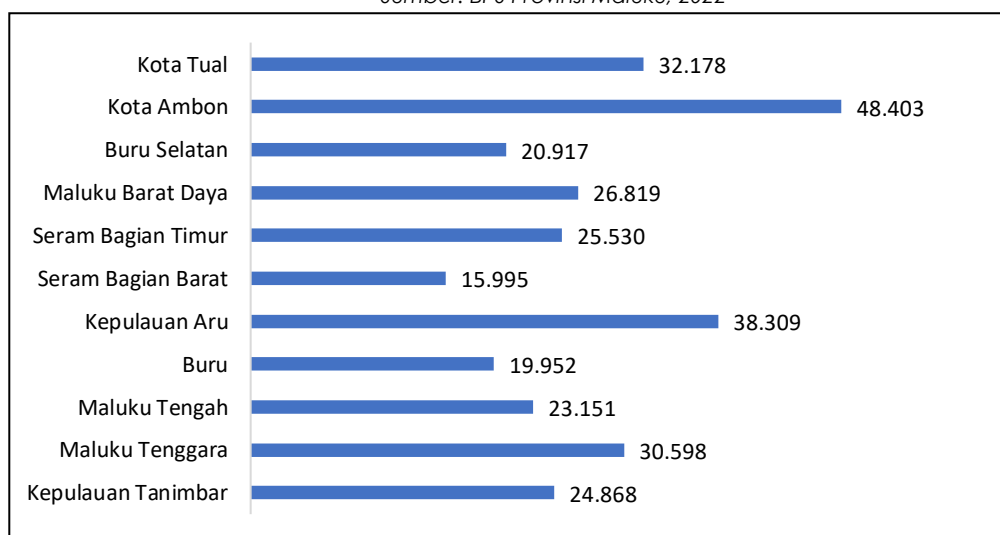
B. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita di Provinsi Maluku dalam 5 tahun terakhir mengalami tren peningkatan pada tahun 2019-2023 akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 besarnya PDRB Perkapita maluku sebesar 26,10 rupiah dan pada tahun 2020 PDRB Perkapita Maluku mengalami penurunan menjadi 25,09 juta rupiah. Hal ini di sebabkan karna dalam kondisi Covid 19. Secara rata-rata besarnya PDRB Perkapita Maluku dalam periode lima tahun terakhir tercatat sebesar 30,46 juta rupiah.



Gambar 2. 5 PDRB per Kapita Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Juta Rp)

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022



Gambar 2. 6 PDRB Per Kapita per Kabupaten Provinsi Maluku Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

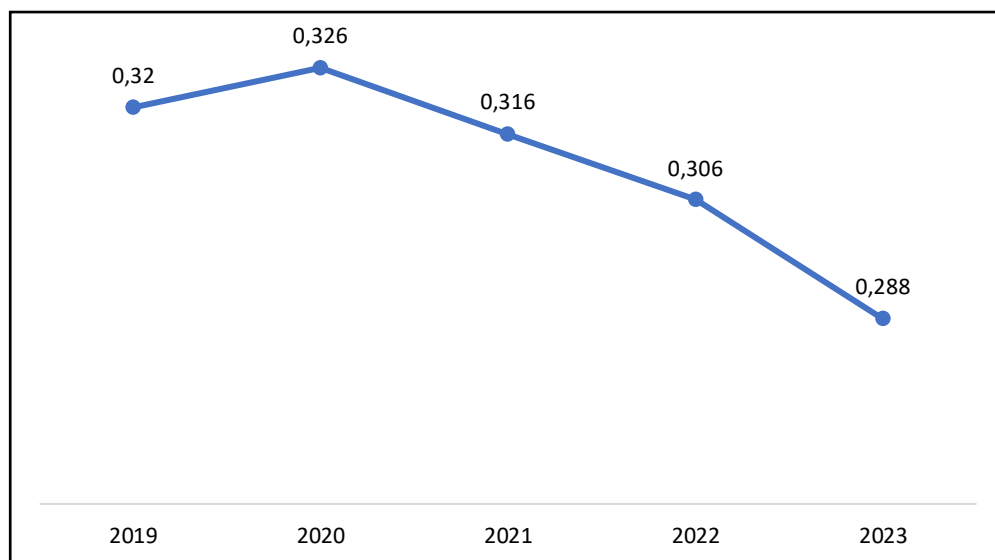
C. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Maluku adalah sulitnya



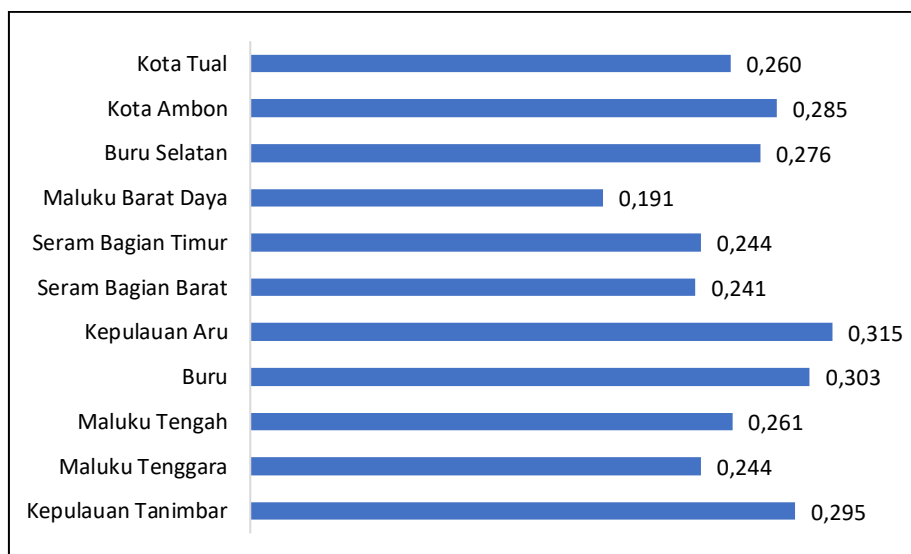
kondisi geografis wilayah, terlebih cukup banyaknya pulau-pulau yang berpenghuni.

Pola fluktuatif capaian indeks gini terjadi semenjak tahun 2019 dimana indeks gini saat itu sebesar 0,320. Seiring pelaksanaan pembangunan daerah, indeks gini mengalami fluktuasi dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan kemudian menurun secara terus menerus dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Meskipun begitu, capaian ini berada pada kategori sedang sehingga pemerintah masih perlu merumuskan kebijakan strategis untuk mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan dan melebarnya kesenjangan/ketimpangan wilayah.



Gambar 2. 7 Indeks Gini Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

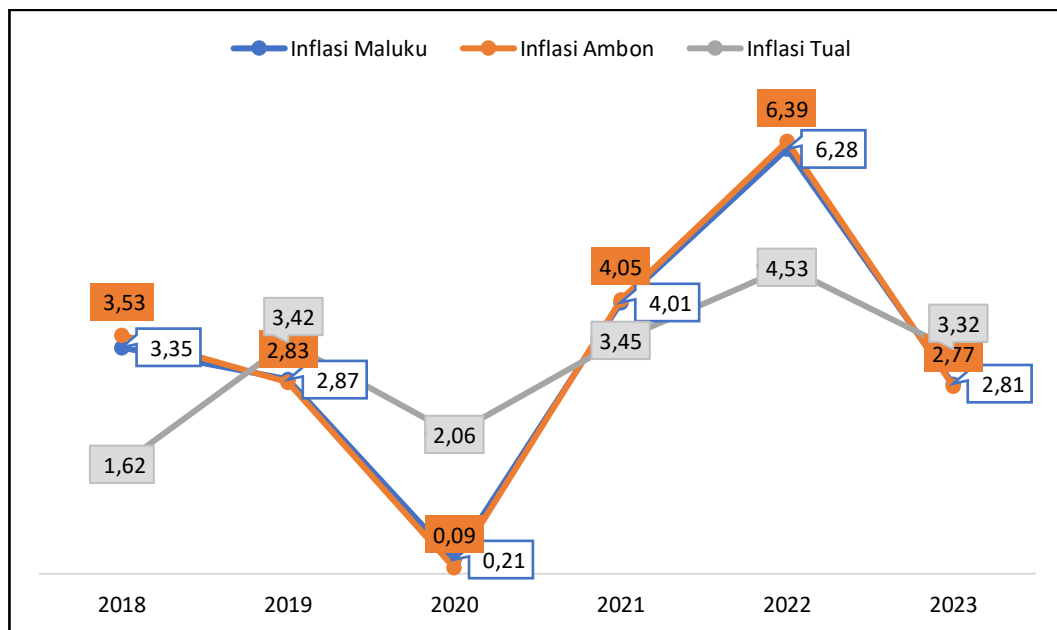
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023



Gambar 2. 8 Indeks Gini per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

D. Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi merupakan salah satu indikator dalam perencanaan pembangunan satu daerah atau wilayah. Dengan inflasi dapat diukur persentase kenaikan harga barang/jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat sehingga perlu adanya kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah. Di Provinsi Maluku, laju inflasi dihitung oleh dua wilayah yakni Kota Ambon dan Kota Tual. Perkembangan inflasi gabungan 2 kota umumnya mengalami fluktuatif. Inflasi di Kota Ambon selama 5 tahun mengalami kontraksi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39 kemudian turun menjadi 2,77 pada tahun 2023. Sedangkan inflasi Kota Tual tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4,53 dan turun menjadi 3,32 pada tahun 2023.



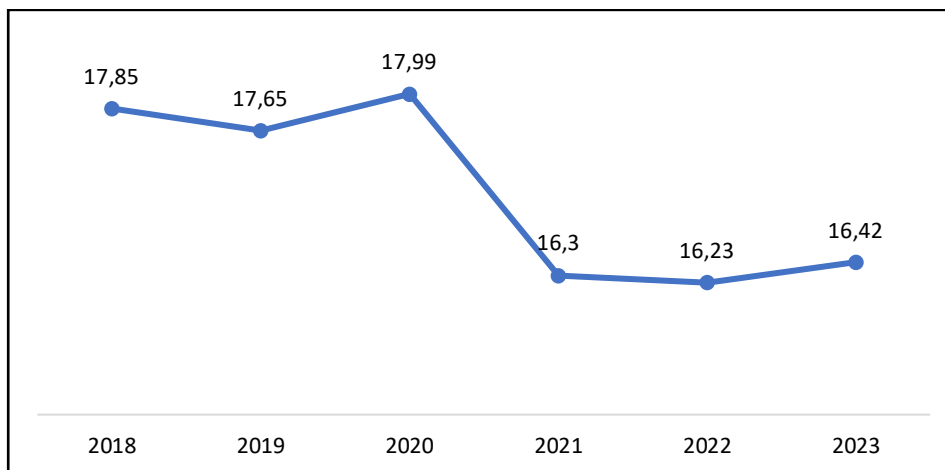
Gambar 2. 9 Laju Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

E. Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Provinsi Maluku tergolong tinggi dimana angka kemiskinan mencapai 16,42 persen pada tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan hingga tahun 2022 memiliki progress positif dimana terjadi penurunan di setiap tahun yang mengimplementasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan.



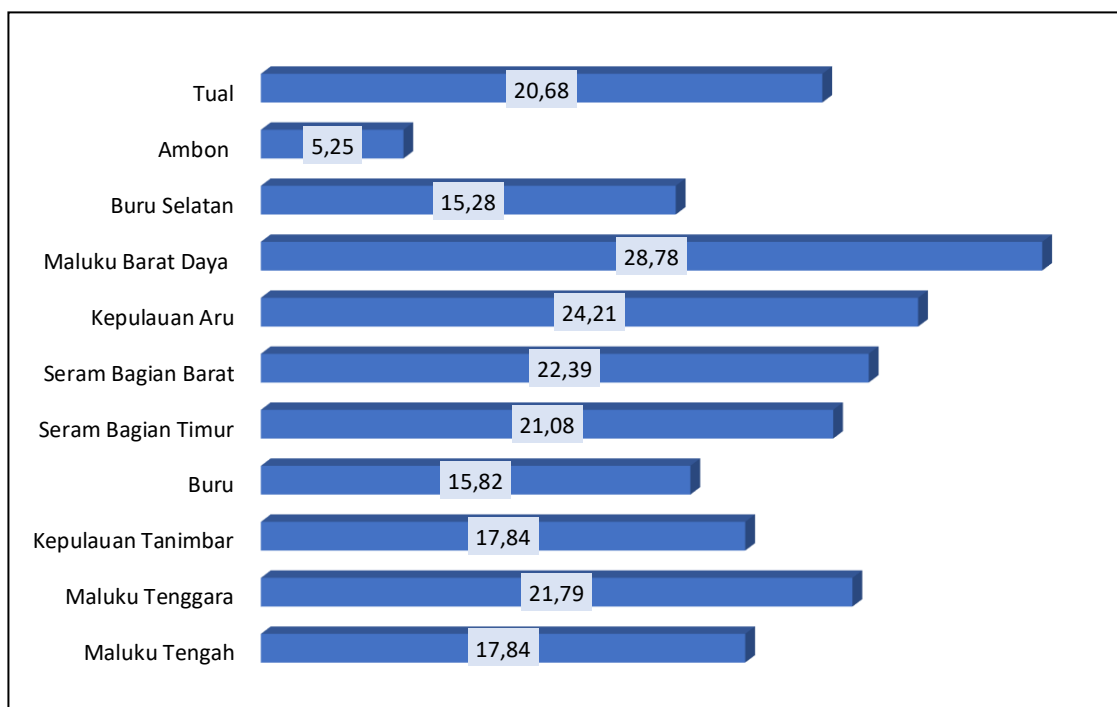
Gambar 2. 10 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

Tabel 2. 30 Indikator Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	474.176	545.855	573.685	605.909	672.456	684.020
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	317,84	319,51	322,40	294,97	296,66	301,61
Tingkat Kemiskinan (Maret)	17,85	17,65	17,99	16,30	16,23	16,42

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023



Gambar 2. 11 Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023



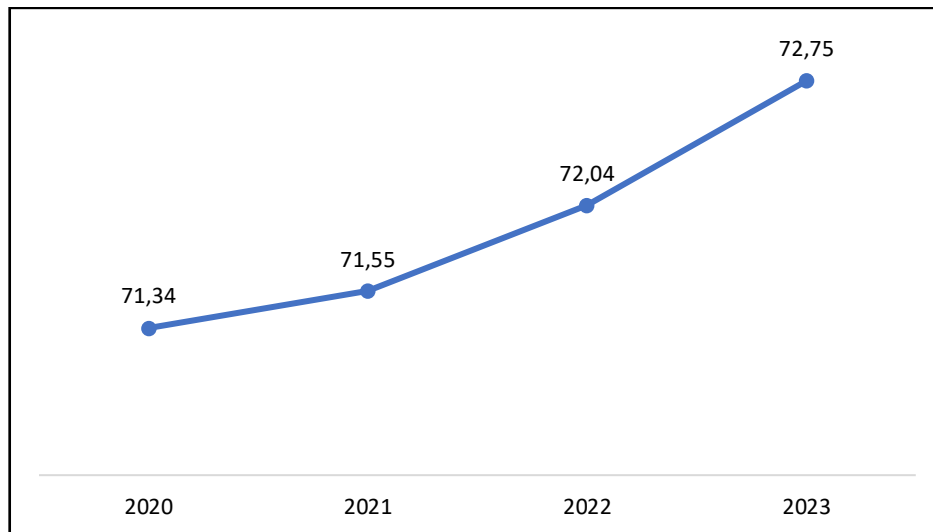
2.2.2 Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

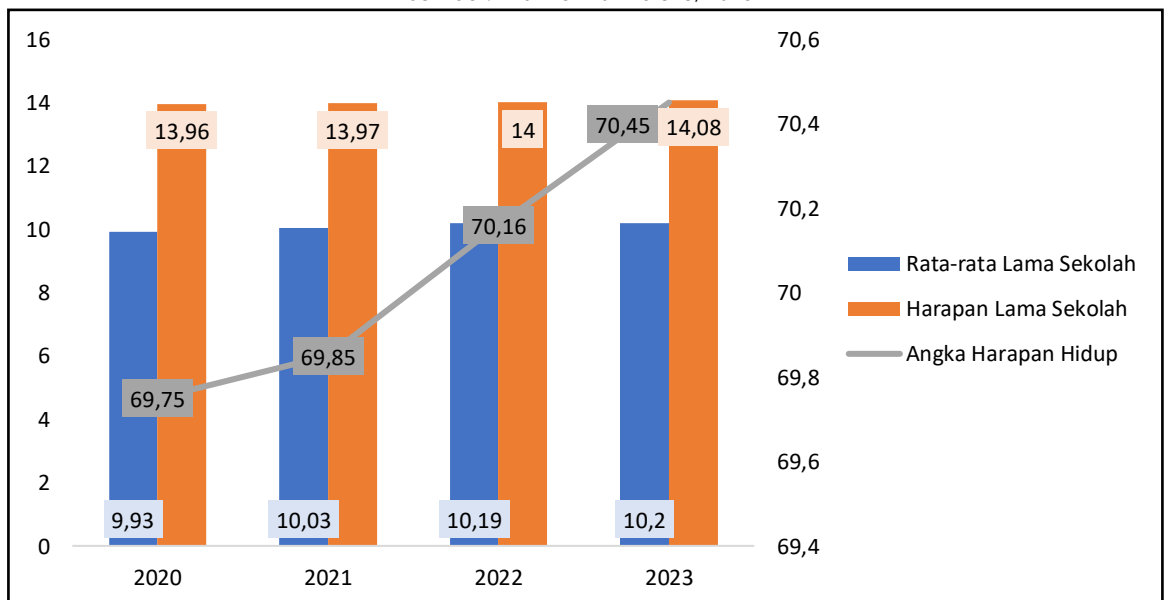
Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Peningkatan perkembangan pembangunan manusia secara umum di suatu wilayah dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mencerminkan capaian kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM merupakan indikator yang disusun oleh Angka Harapan Hidup sebagai Indeks Kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Indeks Pendidikan dan Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebagai Indeks Hidup Layak.

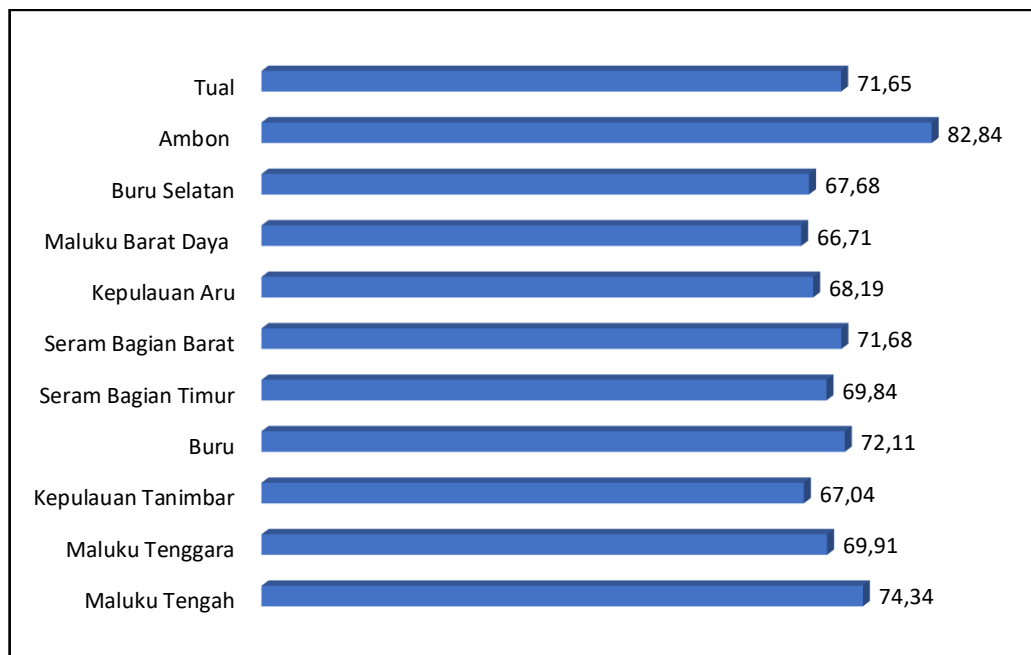
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku mengalami peningkatan pada kurun waktu empat tahun terakhir dimana pada tahun 2020 IPM Maluku sebesar 71,34 dan meningkat menjadi 72,75 pada tahun 2023.



Gambar 2. 12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023



Gambar 2. 13 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023



Gambar 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

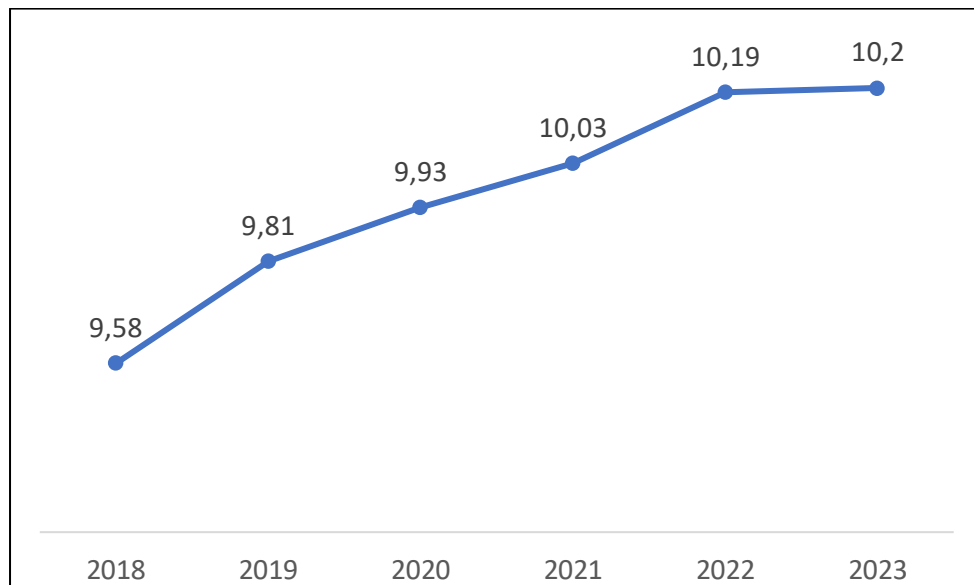
B. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

a) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun

ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.



Gambar 2. 15 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Maluku mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah sebesar 9,58 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 10,2 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, sempat mengenyam bangku pendidikan hingga 10,2 tahun atau secara rata-rata telah menduduki jenjang pendidikan hingga SMA kelas 2 Semester pertama. Angka rata-rata lama sekolah paling tinggi berada di Kota Ambon yang mencapai 12,22 Tahun dan Kota Tual yang mencapai 10,66 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah berada di Kabupaten Buru Selatan dengan capaian hanya 8,23 tahun.



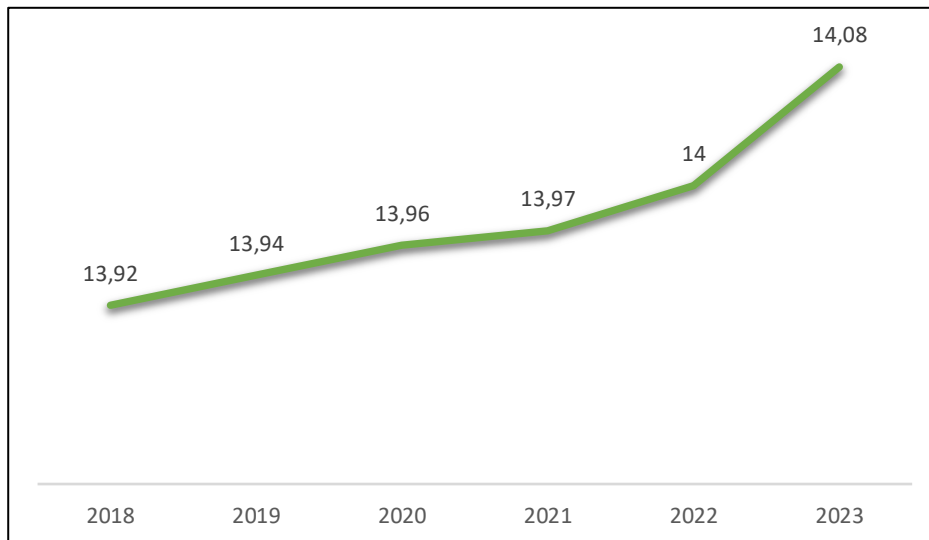
Gambar 2. 16 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

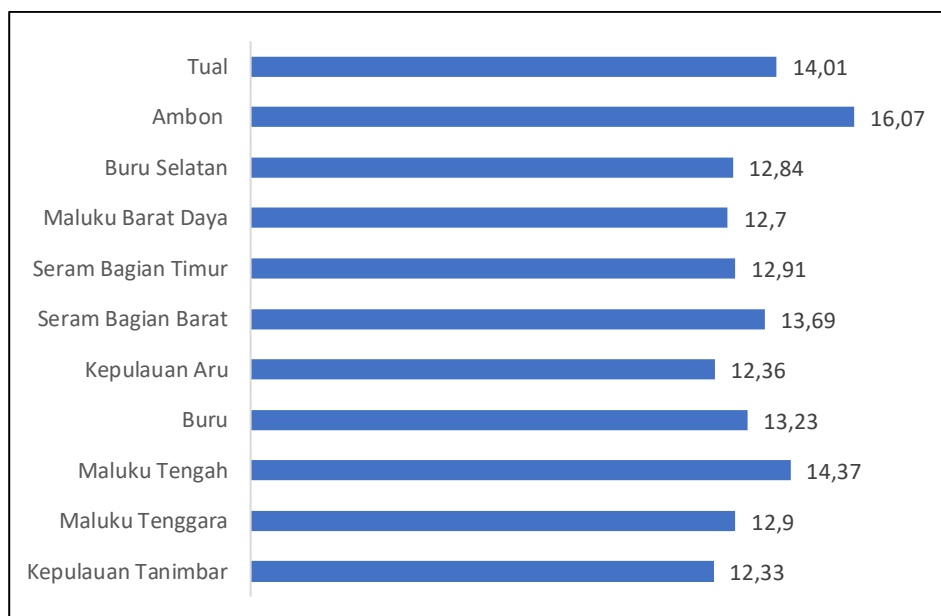
Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, capaian harapan lama sekolah juga mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya meskipun lebih landai pergerakannya.



Gambar 2. 17 Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

Pada tahun 2018, harapan lama sekolah di Maluku sebesar 13,92 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 14,08 tahun pada tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah (kurang lebih 7 tahun) memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 14,08 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester ke empat.



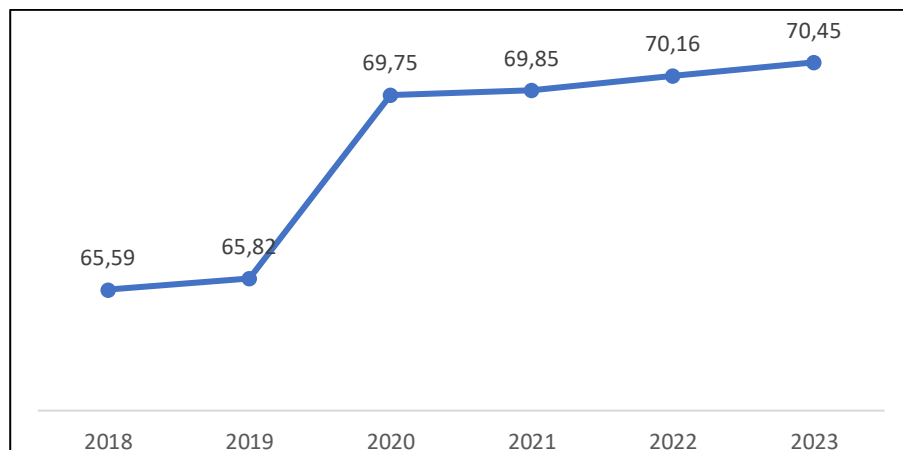
Gambar 2. 18 Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

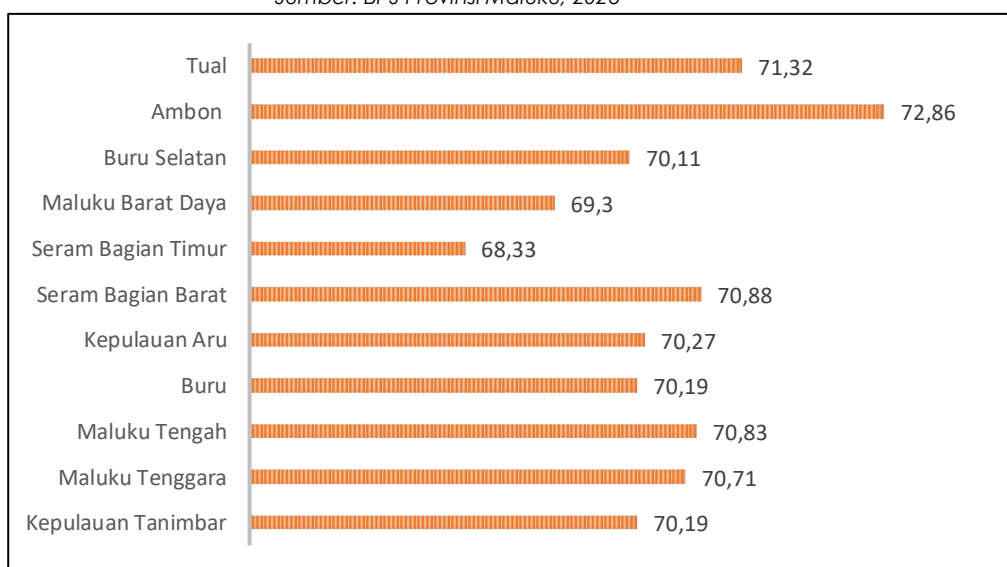
C. Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Dari capaian angka harapan hidup Maluku terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat Maluku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini harus terus diupayakan program strategis pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal cakupan dan pemerataan layanan kesehatan. Usia harapan hidup Maluku meningkat hingga mencapai 70,45 tahun pada tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022, akan memiliki kesempatan hidup hingga berumur 70 tahun.



Gambar 2. 19 Usia Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2018-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023



Gambar 2. 20 Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Jika melihat perbandingan antar kabupaten/kota, maka terlihat bahwa angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Ambon yang mencapai 72,86 tahun dan diikuti oleh Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah dengan masing-masing capaian angka harapan hidup sebesar 71,32 tahun dan 70,88 tahun. Adapun angka harapan hidup terendah berada di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan capaian sebesar 68,33 tahun.

Apabila ditinjau dari infrastruktur kesehatan misalnya Puskesmas, Rumah Sakit dan Sarana Kefarmasian, setiap daerah di



Provinsi Maluku sudah memiliki infrastruktur kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.31 Jumlah Sarana Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2020-2022

Sarana Kesehatan	2020	2021	2022
Puskesmas	215	222	228
Rumah Sakit	26	27	30
Sarana Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	306	329	329

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2023

Jumlah puskesmas di Provinsi Maluku dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan dasar, puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Pada Tahun 2020-2022 jumlah rumah sakit umum sebanyak 27 unit dan rumah khusus sebanyak 1 unit, yang terbagi menjadi 4 unit Rumah Sakit Tipe B, 9 unit Rumah Sakit Tipe C, dan 14 Unit Rumah Tipe D. Sedangkan sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya yakni Pedagang Besar Farmasi (PBF) Apotek, Toko Obat dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK).

Selain sarana kesehatan, tenaga kesehatan juga berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 32 Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Maluku Tahun 2020-2022

Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022
Tenaga Medis	1.135	1.091	821
Tenaga Perawat	5.205	5.733	8.468
Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi	1.595	1.709	1.618
Tenaga Farmasi	376	686	465

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023



2.3 Aspek Pelayanan Umum

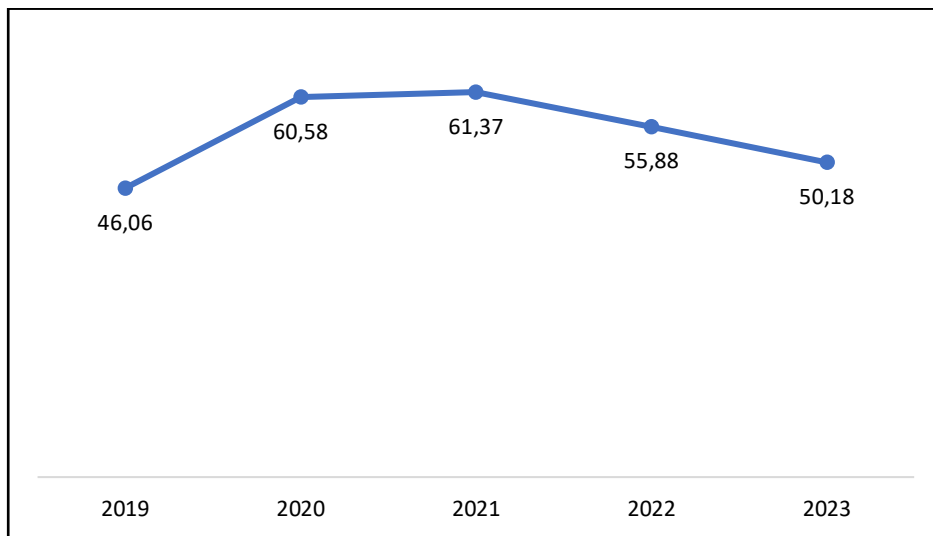
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Provinsi Maluku yang berhubungan dengan penentuan permasalahan pembangunan hingga kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasinya.

2.3.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan terutama pelayanan terhadap masyarakat akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur di Provinsi Maluku sendiri masih belum optimal kesediaannya. Hal ini menjadikan hambatan tersendiri bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sebagai wilayah kepulauan, konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga capaian pembangunan terkait konektivitas wilayah ini dapat terus ditingkatkan. Perbaikan konektivitas wilayah juga dengan konsistens dalam mengelola jaringan jalan melalui rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan rutin untuk menjaga layanan jalan agar kemantapan jalan selama umur

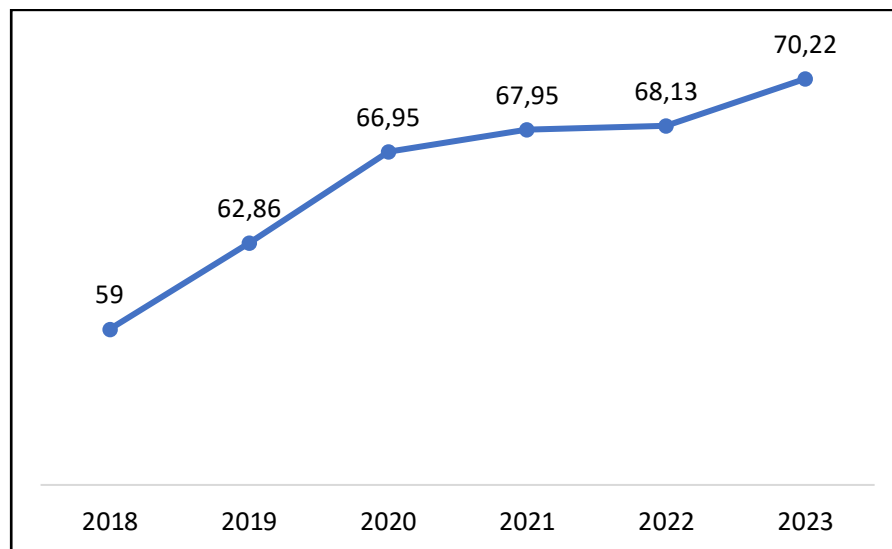
yang rencanakan. Berikut tingkat kemantapan jalan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.



Gambar 2. 21 Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Provinsi Maluku, 2023

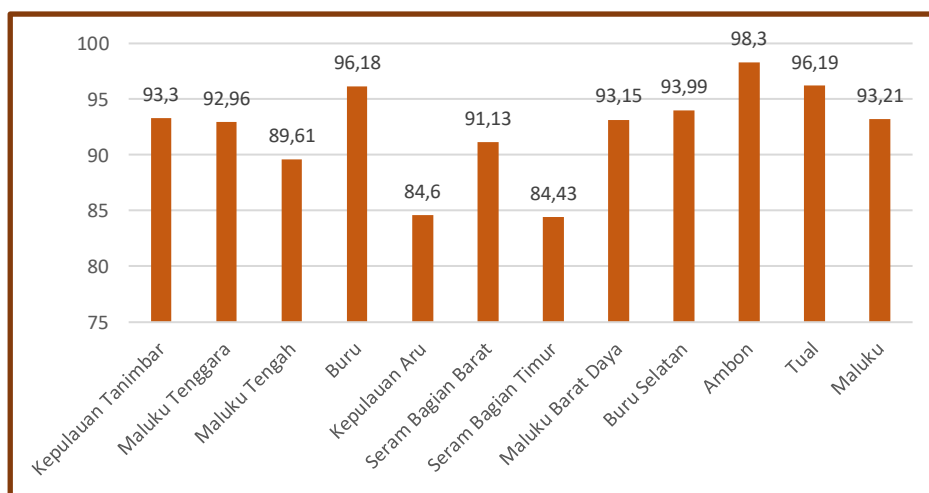
Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tingginya luasan pemukiman kumuh.

Salah satu indikator penting dalam melihat kesehatan lingkungan, khususnya pada perumahan layak huni dan kawasan permukiman layak adalah adanya sanitasi yang layak bagi masyarakat. Secara umum, terjadi peningkatan cukup signifikan pada kurun waktu empat tahun terakhir dimana pada tahun 2018 persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 59 persen dan meningkat cukup signifikan hingga mencapai 70,22 persen pada tahun 2023.



Gambar 2. 22 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Maluku Tahun 2018-2023
Sumber: Dinas PUPR Provinsi Maluku, 2023

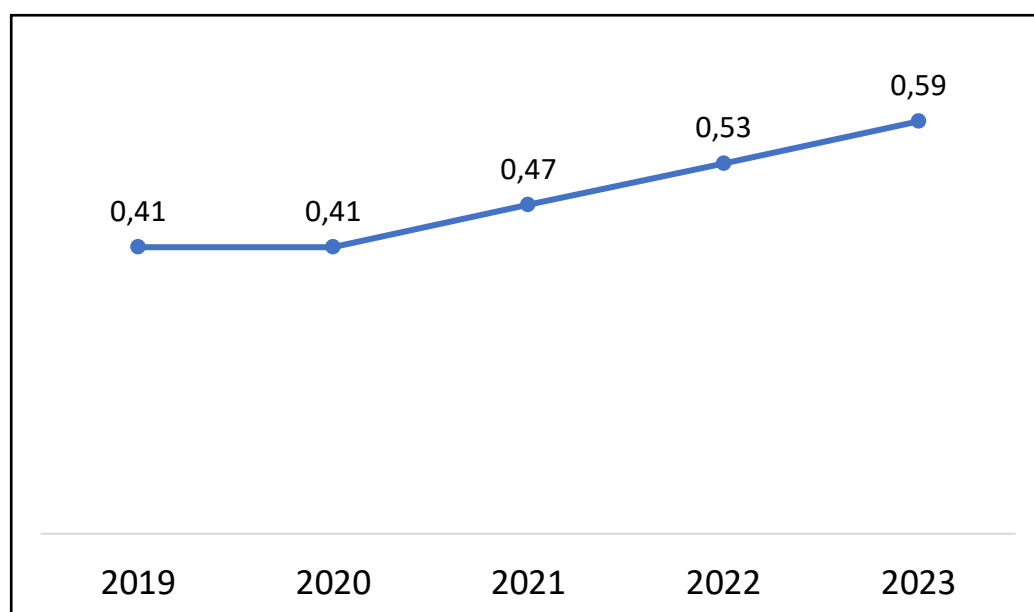
Secara umum, akses kepada sumber air minum layak masih belum optimal dilakukan dalam perwujudan pembangunan Maluku. Terlihat capaian rumah tangga di Maluku yang memiliki akses air minum layak pada tahun 2022 hanya sebesar 93,21 persen. Adapun persebarannya terlihat bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan wilayah yang memiliki rumah tangga dengan akses air minum bersih terendah dengan capaian 84,43 persen dan disusul oleh Kepulauan Aru sebesar 84,60 persen.



Gambar 2. 23 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2022
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

2.3.2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Provinsi Maluku adalah pemenuhan rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan rakyat dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudahan dalam akses hunian yang layak dan terjangkau dengan prasarana umum dapat dilihat dari persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU di Provinsi Maluku.



Gambar 2. 24 Tingkat Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Prasarana permukiman juga dapat terlihat dari akses hunian layak dan terjangkau. Berikut rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Maluku.

Tabel 2. 33 Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau

Indikator	2021	2022	2023
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	60,69	60,66	63,61

Sumber: BPS-RI, Susenas 2023



Selain itu, prasarana permukiman juga terlihat dari hunian yang telah menikmati fasilitas listrik, khususnya dari PLN dimana secara umum di Provinsi Maluku sebanyak 91,83 persen rumah tangga yang telah menikmati fasilitas listrik PLN dan 4,32 persen listrik Non PLN. Wilayah yang paling banyak persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas listrik adalah Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 22,37 persen dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan capaian rumah tangga yang tidak menggunakan listrik sebesar 15,74 persen.

Tabel 2. 34 Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Listrik menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Total
Kepulauan Tanimbar	95,55	3,74	0,72	100
Maluku Tenggara	96,84	1,34	1,82	100
Maluku Tengah	98,07	0,00	1,93	100
Buru	98,74	0,00	1,26	100
Kepulauan Aru	46,21	22,58	31,21	100
Seram Bagian Barat	97,21	0,39	2,40	100
Seram Bagian Timur	82,15	2,93	14,92	100
Maluku Barat Daya	69,18	29,35	1,47	100
Buru Selatan	82,93	8,89	8,18	100
Ambon	99,69	0,09	0,22	100
Tual	91,88	6,42	1,70	100
Maluku	93,15	3,21	3,64	100

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

2.3.3 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat adalah salah satu indikator terselenggaranya kondisi dinamis dan tercapainya tujuan nasional. Pembangunan dan tujuan nasional telah tercapai bila telah terjadi keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terciptanya ketentraman yang dalam proses mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk



pelanggaran hukum dan segala bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat.

2.3.3.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan utama Badan Kesatuan Bangsa dan politik adalah stabilitas sosial dan politik dan terjaminnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah suatu keadaan kondusif dibidang sosial dan politik dalam menjalankan tugas pemerintahan sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program-program yang optimal. Sehingga dalam mengoptimalkan hal itu maka dapat dilakukan dengan kegiatan pembinaan politik dalam daerah serta pembinaan LSM atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator	Capaian					OPD
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Dalam Daerah	2	2	3	3	3	KESBANGPOL
Jumlah Kegiatan Pembinaan LSM, ORMAS, dan OKP	-	-	1	1	1	KESBANGPOL

Sumber: Bakesbangpol Maluku, 2024

2.3.3.2 Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Adapun capaian kinerja indikator pada tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut.

Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

INDIKATOR	CAPAIAN					OPD
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Polisi PamongPraja	225	226	224	233	235	SATPOL PP



INDIKATOR	CAPAIAN					OPD
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Linmas	0	0	0	636	2789	SATPOL PP
Jumlah POS SISKAMLING	0	0	0	0	0	SATPO PP

Sumber: Bakesbangpol Maluku, 2024

2.3.3.3 Bencana Daerah

Dari sisi kebencanaan, terlihat bahwa risiko bencana di Provinsi Maluku cukup tinggi bahkan berada di atas rata-rata angka Nasional. Hal ini dikarenakan Provinsi Maluku memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi dengan 12 jenis potensi ancaman bencana yakni banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, serta kegagalan teknologi. Meskipun begitu, berbagai program peningkatan ketahanan dalam menghadapi bencana terus dilaksanakan untuk mengantisipasi dan meminimalisir korban akibat bencana yang terjadi.

Tabel 2. 37 Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku	160,5	160,35	160,35	160,84	162,47
Indeks Risiko Bencana Nasional	145,85	144,02	141,65	138,81	135,56

Sumber: BPBD Maluku, 2024

2.3.4 Perhubungan

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur ini dikhususkan pada pengembangan transportasi yang diarahkan untuk membuka isolasi wilayah Provinsi Maluku. Berikut capaian kinerja urusan perhubungan dalam sektor transportasi Provinsi Maluku Tahun 2019-2023.



Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi	Persen	22,49	-12,30	16,01	-34,11	-3,24
2	Pertumbuhan Lintasan Angkutan Penyeberangan Perintis	Persen	3,03	2,94	1,43	-12,68	0,00
3	Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis	Persen	0	0	228,57	0,00	4,35

Sumber: BPBD Maluku, 2023

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Provinsi Maluku yang berdaya saing diperlukan peningkatan kualitas pelayanan transportasi, utamanya pada konektivitas jaringan, keselamatan perjalanan dan kualitas layanan angkutan.

Tabel 2. 39 Data Pembangunan Pelabuhan di Provinsi Maluku Tahun 2019-2022

Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
		2019	2020	2021	2022
Terbangunya Pelabuhan Penyeberangan	Unit	30	30	28	29
Terbangunya Pelabuhan Laut	Unit	68	68	68	68
Terbangunya Tambatan Perahu	Unit	19	19	20	20
Terbangunya Bandar Udara	Unit	13	13	13	13
Terbangunya Terminal	Unit	8	8	8	8
Terbangunya Kapal Penyeberangan	Unit	24	24	24	24
Terbangunya Kapal Laut	Unit	22	22	22	23
Penambahan AKDP	Unit	743	743	916	963
Tersedianya jaringan perintis:					
Lalu Lintas Angkutan Jalan	Trayek	29	31	33	51
Penyeberangan	Lintasan	58	58	58	58
Laut	Trayek	22	23	25	24
Udara	Rute	11	11	11	13

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan perkembangan pembangunan dalam urusan bidang Perhubungan di Provinsi Maluku. Penambahan Angkutan Kota Dalam Provinsi meningkat secara positif dari tahun 2019 sebanyak 743 menjadi 963 trayek pada



tahun 2022. Sejalan dengan itu, peningkatan lalu lintas angkutan jalan juga mengalami peningkatan dari 29 trayek menjadi 51 trayek pada tahun 2022. Konektivitas antar pulau dari semua sub sektor baik darat, laut dan udara menjadi konsen utama dalam penanganan sistem transportasi di Maluku yang berkesinambungan dalam gugusan kepulauan. Adapun rencana pembangunan infrastruktur perhubungan tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Tabel 2. 40 Rencana Pembangunan Infrastruktur Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2025-2029

No	Bidang	Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan		Lokasi (Kabupaten/Kota)	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		Vol.	Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	APBD	APBN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	DARAT												
		1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	KKT	2025	2026				APBD		1 Paket	
		2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	SBB		2026	2027			APBD		1 Paket	
		3	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Pulau Ambon, Pulau Saparua)	Maluku Tengah	2025	2026				APBD		2 Paket	
		4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional	Maluku Tenggara	2025	2026					APBN	1 Paket	
		5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (Balai Pengujian)	AMBON	2025						APBN	1 Paket	
		6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (Balai Pengujian)	BURU		2026					APBN	1 Paket	
		7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan	ARU			2027				APBN	1 Paket	



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026**

No	Bidang	Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan		Lokasi (Kabupaten/Kota)	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		Vol.	Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	APBD	APBN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Bermotor (Balai Pengujian)										
		8	Mobil Uji Kendaraan Portable	SBB	2025						APBN	1 Paket	
		9	Mobil Uji Kendaraan Portable	MBD	2025						APBN	1 Paket	
		10	Mobil Uji Kendaraan Portable	BURU		2026					APBN	1 Paket	
		11	Mobil Uji Kendaraan Portable	ARU		2026					APBN	1 Paket	
		12	Rehabilitasi Terminal Tipe B	BURU	2025	2026				APBD		1 Paket	
2.	PENYEBERANGAN												
		1	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Banda Neira	Maluku Tengah	2025	2026	2027				APBN	1 Unit	
		2	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Luhu	SBB	2025	2026	2027				APBN	1 Unit	
		3	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Wakal	Maluku Tengah	2025	2026	2027				APBN	1 Unit	
		4	Pengadaan Kapal Penyeberangan Kapasitas 1500 GT	MBD	2025						APBN	1 Unit	



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026**

No	Bidang	Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan		Lokasi (Kabupaten/Kota)	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		Vol.	Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	APBD	APBN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Letti	MBD	2025	2026					APBN	1 Unit	
		6	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Letwurung	MBD	2025	2026					APBN	1 Unit	
		7	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lakor	MBD	2025	2026					APBN	1 Unit	
		8	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kisar	MBD	2025	2026					APBN	1 Unit	
		9	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Ilwaki	MBD	2025	2026					APBN	1 Unit	
		10	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bara	BURU	2025	2026					APBN	1 Unit	
		11	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Airmanang	SBT	2025	2026				APBD		1 Unit	
3.	LAUT												
		1	Pembangunan Pelabuhan Ambon New Port	Maluku Tengah	2025	2026	2027				APBN	1 Unit	
		2	Pembangunan Pelabuhan Laut NILA	Maluku Tengah	2025	2026	2027				APBN	1 Unit	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

No	Bidang	Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan		Lokasi (Kabupaten/Kota)	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		Vol.	Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	APBD	APBN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	Pembangunan Pelabuhan Laut PULAU GOROM	SBT	2025	2026	2027				APBN	1 Unit	
		4	Pembangunan Pelabuhan Laut BATU MERAH	MBD	2025	2026	2027				APBN	1 Unit	
		5	Peningkatan Fasilitas Bongkar Muat Pelabuhan Laut LETI	MBD	2025	2026					APBN	1 Paket	
		6	Peningkatan Fasilitas Bongkar Muat Pelabuhan Laut MAHALETA	MBD	2025	2026					APBN	1 Paket	
		7	Peningkatan Fasilitas Bongkar Muat Pelabuhan Laut TEPA	MBD	2025	2026					APBN	1 Paket	
		8	Peningkatan Fasilitas Bongkar Muat Pelabuhan Laut DAMER	MBD	2025	2026					APBN	1 Paket	
		9	Peningkatan Fasilitas Bongkar Muat Pelabuhan Laut PIRU	SBB	2025	2026					APBN	1 Paket	
		10	Peningkatan Fasilitas Bongkar Muat Pelabuhan Laut ELAT	Maluku Tenggara	2025	2026					APBN	1 Paket	
		11	Peningkatan Fasilitas Bongkar Muat Pelabuhan Laut LARAT	KKT	2025	2026					APBN	1 Paket	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

No	Bidang	Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan		Lokasi (Kabupaten/Kota)	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		Vol.	Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	APBD	APBN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		12	Peningkatan Fasilitas Lapangan Penumpukan dan Gudang Pelabuhan Laut DOBO	ARU	2025	2026					APBN	1 Paket	
		13	Peningkatan Fasilitas Lapangan Penumpukan dan Gudang Pelabuhan Laut LARAT	KKT	2025	2026					APBN	1 Paket	
		14	Peningkatan Fasilitas Lapangan Penumpukan dan Gudang Pelabuhan Laut PIRU	SBB	2025	2026					APBN	1 Paket	
		15	Perluasan Area Pelabuhan Laut DOBO	ARU	2025	2026					APBN	1 Paket	
		16	Perluasan Area Pelabuhan Laut ELAT	Maluku Tenggara	2025	2026					APBN	1 Paket	
		17	Perluasan Area Pelabuhan Laut LARAT	KKT	2025	2026					APBN	1 Paket	
		18	Pembangunan Tambatan Perahu Lebetawi	TUAL	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		19	Pembangunan Tambatan Perahu Sanahuni	SBB	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

No	Bidang	Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan		Lokasi (Kabupaten/Kota)	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		Vol.	Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	APBD	APBN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20	Pembangunan Tambatan Perahu Tahalopu	SBB	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		21	Pembangunan Tambatan Perahu Moa	MBD	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		22	Pembangunan Tambatan Perahu Laitutun	MBD	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		23	Pembangunan Tambatan Perahu Welora	MBD	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		24	Pembangunan Tambatan Perahu Luang Timur	MBD	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		25	Pembangunan Tambatan Perahu Jabulanga	ARU	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		26	Pembangunan Tambatan Perahu Warloy	ARU	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		27	Pembangunan Tambatan Perahu Hokmar	ARU	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		28	Pembangunan Tambatan Perahu Lutur	ARU	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		29	Pembangunan Tambatan Perahu Wahangulangula	ARU	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		30	Pembangunan Tambatan Perahu Batu Putih	KKT	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026**

No	Bidang	Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan		Lokasi (Kabupaten/Kota)	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		Vol.	Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	APBD	APBN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		31	Pembangunan Tambatan Perahu Makatian	KKT	2025	2026	2027			APBD		1 Unit	
		32	Pengadaan Rambu-Rambu Navigasi Namlea	BURU	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
		33	Pengadaan Rambu-Rambu Navigasi Selat Manumbai	ARU	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
		34	Pengadaan Rambu-Rambu Navigasi Selat Barakay	ARU	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
		35	Pembangunan Pelabuhan Laut Meror	Aru	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
		36	Pembangunan Pelabuhan Laut Lewa/Daai	MBD	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
		37	Pembangunan Pelabuhan Laut Batu Merah	MBD	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
		38	Pembangunan Pelabuhan Laut Banda Eli	Maluku Tenggara	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
		39	Rehabilitasi Pelabuhan Laut Wunlah	KKT	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
		40	Pembangunan Pelabuhan Laut Labobar	KKT	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
4.	Pengembangan (Antar Moda)												



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026**

No	Bidang	Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan		Lokasi (Kabupaten/Kota)	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		Vol.	Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	APBD	APBN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	Perpanjangan Runaway Bandar Udara Pattimura	AMBON	2025	2026					APBN	1 Paket	
		2	Pembangunan Bandar Udara Tapa	MBD		2026	2027	2028	2029		APBN	1 Paket	
		3	Pembangunan Bandar Udara Gorom	SBT	2025	2026	2027	2028			APBN	1 Paket	
		4	Pembangunan Bandar Udara Wetar	MBD	2025	2026					APBN	1 Paket	
		5	Pembangunan Ruang Tunggu VIP Room dan Gedung Kargo Bandar Udara KAREL SADSUITUBUN-LANGGUR	Maluku Tenggara	2025	2026					APBN	2 Paket	
		6	Pengembangan Bandar Udara Moa	MBD	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
		7	Pengembangan Bandar Udara Jhon Becker Kisar	MBD	2025	2026	2027				APBN	1 Paket	
		8	Pembangunan Pengaman Kawasan Bandar Udara	ARU	2025						APBN	1 Paket	
		9	Pembangunan Jalur Kereta Api Pulau Seram (Sarana/Prasarana Perkeretaapian)	Maluku Tengah, SBB, SBT			2027	2028	2029		APBN	1 Paket	



2.3.5 Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja Pembangunan pada bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Maluku dapat diukur menggunakan tiga (3) indikator. Gambaran terkait capaian indikator pada bidang komunikasi dan informatika dapat dilihat lebih jelas pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	
			Target	Realisasi
Komunikasi dan Informatika				
1.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	40,91
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah provinsi	Persen	72,92	72,92

Sumber: Dinas Kominfo, 2024

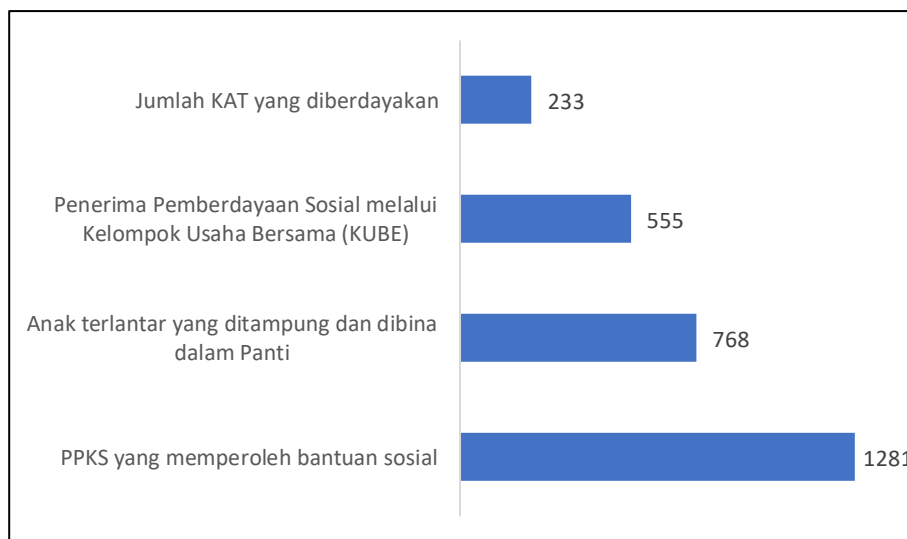
Dari ketiga indikator tersebut ditahun 2023 hanya satu (1) indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yakni indikator Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada pada Dinas Kominfo sehingga penyediaan layanan akses internet belum dapat melayani seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Sedangkan pada dua (2) indikator lainnya ditahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini didorong oleh upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota.



2.3.6 Sosial

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku, pemerintah daerah melalui stakeholder terkait berupaya untuk memberikan bantuan secara merata dan berkualitas terhadap masyarakat yang layak menerima bantuan pemerintah. Hal ini dilakukan guna memberi kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk lebih berdaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terlihat dari gambar di bawah ini bahwa terdapat 159 PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2020. Selain itu terdapat 93 anak terlantar yang ditampung dan dibina di dalam panti sehingga akan memiliki kesempatan lebih baik bagi masa depannya. Adapun jumlah KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang diberdayakan sebanyak 47 komunitas dan terdapat pula 15 penerima pemberdayaan sosial melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama).



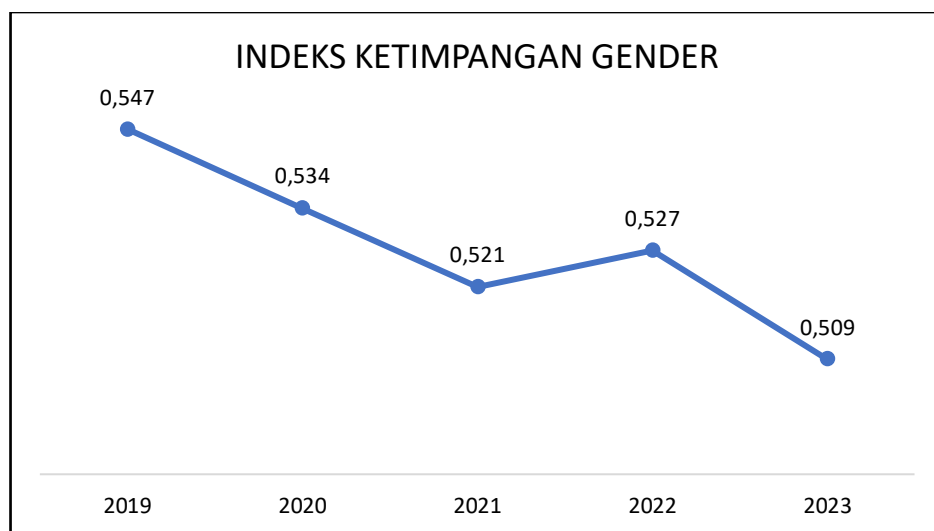
Gambar 2. 25 Jumlah Penerima Bantuan/Pemberdayaan Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku, 2023

Dalam isu sosial untuk mengukur kondisi kesetaraan dan ketimpangan gender di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Indeks



Ketimpangan Gender. Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Maluku sebesar 0,509, turun sebanyak 0,018 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,527. Penurunan sebesar 0,018 poin tahun ini sedikit lebih besar dibandingkan penurunan IKG pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,013 poin. Selain itu, penurunan IKG Maluku pada tahun 2023 ini memperbaiki sedikit kenaikan IKG pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,006 poin. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir, IKG Maluku kesetaraan gender di Maluku masih fluktuatif dikarenakan masih terjadi kenaikan pada tahun 2019 dan 2022. Tetapi IKG Maluku menunjukkan penurunan yang signifikan jika dilihat dari tahun 2019 ke 2023 yaitu turun sebesar 0,038 poin. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah.



Gambar 2. 26 Perkembangan IKG di Provinsi Maluku Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

Penurunan IKG Maluku tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator pada ketiga dimensinya, pada dimensi kesehatan reproduksi indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) yang berhasil ditekan turun, juga dimensi

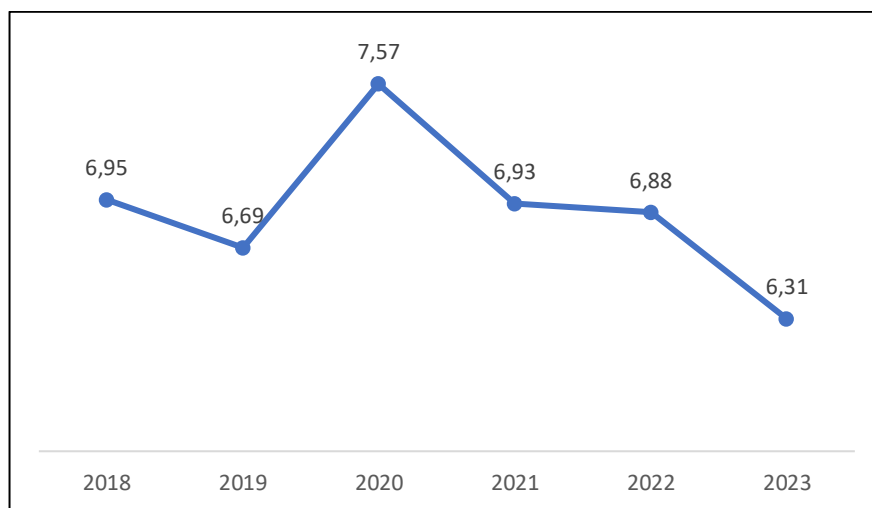


pemberdayaan dimana keterwakilan perempuan di legislatif meningkat dan dimensi pasar tenaga kerja pada tingkat partisipasi angkatan kerja semakin setara proporsi laki-laki dan perempuan.

2.3.7 Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan melihat angka pengangguran di suatu wilayah.

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku cukup berfluktuasi dimana pada tahun 2020 sempat mencapai titik tertinggi yakni 7,57 persen dan menurun hingga 6,31 persen di tahun 2023.



Gambar 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Tahun 2018-2023
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

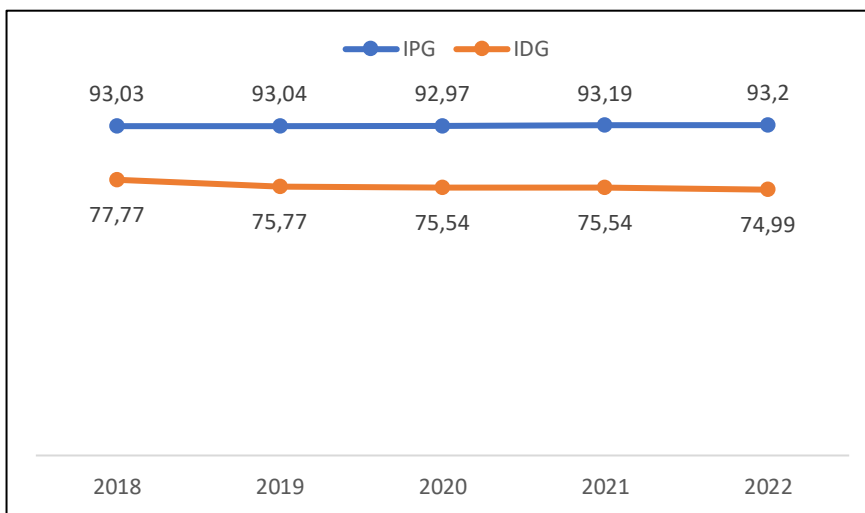
2.3.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan antar wilayah, dan tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah akan tercermin apabila nilai IPG sama dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang juga menunjukkan adanya pemerataan pembangunan antar wilayah dan kesetaraan gender. IPG Provinsi Maluku masih di atas rata-rata Nasional, berarti kondisi cukup rendahnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar gender, laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender Maluku berada di atas angka 90 dimana pada tahun 2021 mencapai titik tertinggi sebesar 93,19. Pola Indeks Pembangunan Gender meningkat di setiap tahunnya, namun di tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender pernah mengalami penurunan menjadi sebesar 92,97 yang disebabkan adanya penurunan pengeluaran per kapita terpilah gender. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender mengalami pola sebaliknya dimana



secara umum terjadi penurunan. Pada tahun 2018, Indeks Pemberdayaan Gender Maluku mencapai 77,77 dan menurun hingga mencapai 74,99 pada tahun 2022.



Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Maluku Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

2.3.9 Lingkungan Hidup

Salah indikator urusan lingkungan hidup adalah presentase penegakan hukum lingkungan. Kegiatan penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan selama tahun 2014-2017 dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi kasus lingkungan di daerah kabupaten/kota di Maluku. Dari hasil identifikasi dan verifikasi di daerah kabupaten/kota memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan yang muncul ke permukaan dapat ditangani oleh kabupaten/kota melalui mediasi dan rapat dengan pihak pemrakarsa/penanggung jawab perusahaan, pihak lembaga terkait maupun masyarakat yang terkena dampak/pihak pelapor. Dan kasus



lingkungan yang ada selama ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan belum sampai ke persidangan pengadilan.

Dalam hal kualitas lingkungan hidup, terjadi kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Maluku pada tahun 2021 yang mencapai 78,23 dimana angka ini merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 77,46. Selain itu, penurunan emisi gas rumah kaca juga mengalami kenaikan dimana tahun 2020 sebesar 24,99 persen dan mencapai 28,51 persen pada tahun 2022.

Tabel 2. 42 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	19,3	27,1	24,99	24,2	28,51
Laporan inventarisasi GRK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,9	74,34	76,86	78,23	77,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, 2023

2.3.10 Koperasi dan UMKM

Keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat khususnya anggota koperasi dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah koperasi di Provinsi Maluku setiap tahunnya mengalami peningkatan. Lebih lanjut perkembangan terkait koperasi terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	2023	
			Capaian	Target	Capaian
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Persentase koperasi aktif	%	66,94	67,64	67,70



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	2023	
			Capaian	Target	Capaian
2	Jumlah Pengukuran tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	13	15	15
3	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	3,30	4	5,82
4	Persentase Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang- undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel	%	70	70	136
5	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	%	86.95	92.06	92.25
6	Usaha Kecil yang menjadi wirausaha		1.718	25	604

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, seluruh indikator kinerja pembangunan pada bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ditahun 2023 telah mencapai bahkan melebihi target, dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini didorong oleh upaya-upaya pendampingan dan juga pelatihan pengelolaan manajemen koperasi bagi para anggota koperasi serta kerja sama dan kontribusi yang baik dari setiap UPTD maupun Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten/Kota.

2.3.11 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sepanjang tahun 2022-2023 urusan energi dan sumber daya mineral dilihat meliputi empat indikator antara lain, jumlah PETI yang tertibkan, persentase rumah tangga pengguna listrik, rasio elektrifikasi, dan jumlah rumah tangga sasaran. Gambaran capaian indikator Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel dibawah.



Tabel 2. 44 Capaian Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2022	2023	
			Realisasi	Target	Realisasi
Energi Sumber Daya Mineral					
1	Jumlah PETI yang ditertibkan	Lokasi	0	< 5	-
2	Presentase rumah tangga pengguna listrik	Rumah Tangga	274	390	371
3	Rasio Elektrifikasi	%	97,49	98	98,79
4	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)	RTS	592	371	374

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat, pada indikator jumlah PETI yang ditertibkan ditahun 2023 tidak dilaksanakan karena sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batubara, kewenangan Provinsi dialihkan semuanya ke Pusat. Selanjutnya, capaian pada indikator rasio elektrifikasi (98,79 persen) dan jumlah rumah tangga sasaran (374 RTS) ditahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan, ini merupakan bukti bahwa sebagian besar wilayah di Provinsi Maluku sudah teraliri listrik. Sedangkan pada indikator persentase rumah tangga pengguna listrik masih belum mencapai target ditahun 2023 namun capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022.

2.3.12 Penanaman Modal

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim



bagi investasi menjadi salah satu tujuan dalam mewujudkan keberhasilan penanaman modal.

Tabel 2. 45 Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi Provinsi Maluku Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Realisasi Proyek PMDN	25	23	1.953	1.179	1.537
Jumlah Realisasi Proyek PMA	10	16	24	54	82
Realisasi Investasi PMDN (Juta Rp)	1.013.489	283.166	6.560.765	2.939,70	610,9
Realisasi Investasi PMA (Juta Rp)	106.942	495	2.198.878	194,45	1.053,9

Sumber: Dinas PMPTSP Provinsi Maluku ,2023

Pada tahun 2018 jumlah proyek investasi PMDN di Maluku sebanyak 25 proyek meningkat 1.953 proyek di tahun 2020 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 1.537 proyek. Sementara nilai investasi PMDN yang telah direalisasikan pada tahun 2018 sebesar 1,01 triliun rupiah dan meningkat menjadi 6,56 Triliun rupiah pada tahun 2020 dan mengalami penurunan menjadi 610 miliar pada tahun 2022. Nilai investasi PMDN meningkat pada tahun 2020 dibandingkan dengan PMA (asing), dimana proyek investasi yang telah direalisasikan sejak tahun 2018-2022 yang mencapai 1.537 proyek.

2.3.13 Kepemudaan dan Olahraga

Untuk mendukung perkembangan olahraga di Maluku, maka ketersediaan sarana dan prasarana olahraga menjadi hal yang penting, perkembangan sarana prasarana olah raga selama kurun waktu 2016 – 2020 cenderung konstan, dimana jumlah stadion sepak bola sebanyak 3 unit, stadion atletik 1 unit, lapangan bulu tangkis sebanyak 5 unit, gedung olahraga sebanyak 8 unit, kolam renang mencapai 2 unit dan sasana tinju 5 unit. Pemuda merupakan salah satu



pemangku kepentingan yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan, jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi hingga tahun 2020 telah mencapai 451 lembaga/ organisasi, sehingga masih memiliki potensi yang besar untuk berperan aktif dalam pembangunan.

2.3.14 Pariwisata

Karakteristik wilayah yang sebagian besar berupa kepulauan, Provinsi Maluku memiliki potensi pariwisata yang cukup kaya dan sangat beranekaragam jenisnya, kekayaan alam, adat istiadat dan budaya yang beragam yang secara potensial menjadi daya tarik sebagai daerah dengan tujuan wisata. Dalam upaya meningkatkan Maluku sebagai daerah wisata pemerintah Provinsi Maluku melakukan berbagai langkah strategis seperti pengembangan dan pemasaran pariwisata Maluku. Pengembangan dan pemasaran serta adanya beberapa even penyelenggara kegiatan nasional di Maluku telah mendorong masuknya wisatawan mancanegara. Hal ini bertujuan agar pariwisata Maluku dapat menjadi andalan di masa mendatang serta memberi kontribusi terhadap ekonomi daerah termasuk juga pariwisata nasional.

Terjadi fluktuasi kunjungan wisata di Provinsi Maluku baik wisatawan mancanegara, nusantara maupun lokal. Namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kunjungan wisatawan pada tahun 2020 dan tahun 2021 menurun yang dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 sehingga beberapa Negara menerapkan *travel warning*. Selain itu juga keterbatasan transportasi memperparah kunjungan



wisatawan yang menurun, khususnya wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Tabel 2. 46 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Maluku Tahun 2018-2022

Wisatawan	2018	2019	2020	2021	2022
Mancanegara	7.341	13.153	2.010	1.450	5729
Nusantara	105.001	76.842	41.188	93.321	52162
Lokal	157.855	147.434	173.110	113.300	113766
Jumlah	270.197	237.429	216.308	208.071	171.657

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

2.3.15 Perikanan dan Kelautan

Produksi dan nilai produksi perikanan Provinsi Maluku mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun terakhir yakni tahun 2020, terjadi penurunan produksi ikan baik budidaya maupun perikanan tangkap. Penurunan ini cukup signifikan dimana mempengaruhi nilai produksi pada masing-masing kategori perikanan tersebut.

Terlihat dari tabel di bawah ini, bahwa jumlah produksi perikanan budidaya mengalami penurunan menjadi 278,13 ribu ton pada tahun 2022 dimana pada tahun 2021 sebanyak 294,23 ribu ton. Adapun pada perikanan tangkap juga memiliki pola yang sama dimana pada tahun 2022 terdapat 536,11 ribu ton ikan didapatkan menurun dari tahun 2021 yang mencapai 542,44 ribu ton. Meskipun jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya dari tahun 2021-2022 menurun, hal ini tidak berbanding dengan nilai produksi perikanannya.

Tabel 2. 47 Produksi Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Produksi Ikan Budidaya	000 Ton	667,56	620,84	200,81	294,23	278,13



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Nilai Produksi Ikan Budidaya	Juta Rp	3.144,76	1.815,40	948,40	679,97	1.729,66
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	000 Ton	543,447	557,530	523,261	542,44	536,11
4	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Juta Rp	8.313,74 3	6.165,59 9	5.572,38 8	12.734,062	13.820,52

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

Melihat produksi hasil perikanan Provinsi Maluku, harus disinkronkan dengan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Provinsi Maluku, diharapkan sub sektor perikanan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Berikut Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Maluku menurut Lapangan Usaha.

Tabel 2. 48 Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Maluku

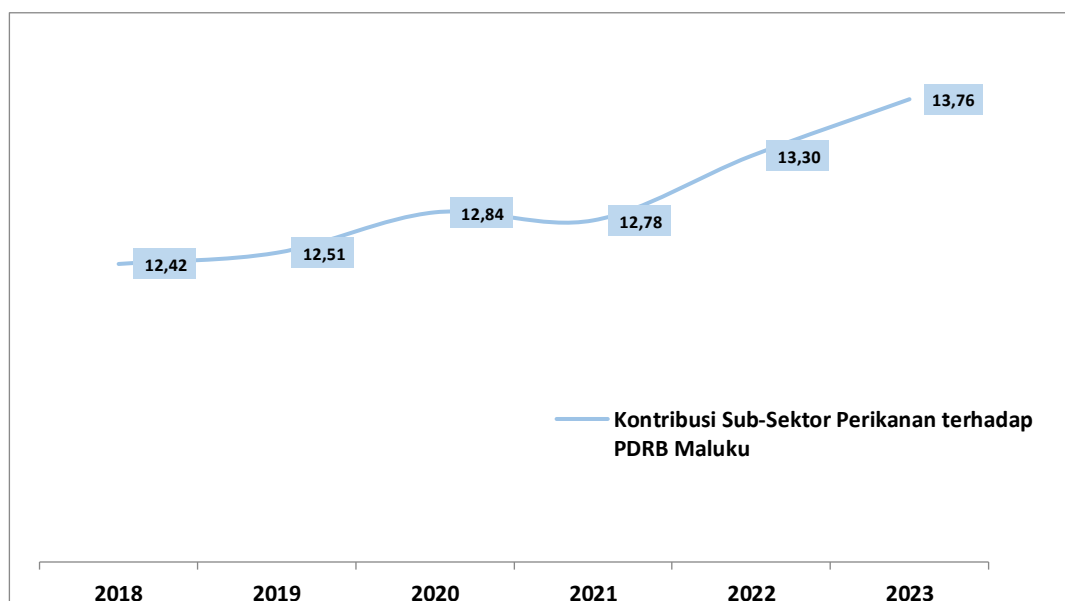
Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sub-Sektor Perikanan terhadap PDRB Maluku	12.42	12.51	12.84	12.78	13.30	13.76

Sumber: BPS, 2024

Tabel diatas menunjukan perkembangan kontribusi PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Berlaku lapangan usaha sub –sektor Perikanan dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku masih didominasi oleh kontribusi sektor pertanian dimana sub-sektor perikanan yang berkontribusi lebih besar. Capaian peningkatan sub-sektor perikanan dari tahun-ke tahun merupakan bagian komitmen dan tanggung jawab berbagai sektor terutama pelaku utama perikanan. Rata-rata capaian pada tahun 2018 sampai tahun 2023 sebesar 12,93 %, dengan laju pertumbuhan terbesar pada tahun 2022 terhadap tahun 2021 sebesar 0.55 % (**Gambar**).



Perkembangan kontribusi PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Berlaku lapangan usaha Sektor Pertanian (sub –sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) yang selama ini menunjukkan peningkatan harus disertai dengan peningkatan kontribusi Sektor Industri Pengolahan. Sehingga capaian peningkatan kontribusi tidak bertumpu pada sektor penyumbang bahan baku saja namun hasil olahannya menjadi *multiplier effect* bagi kontribusi sektor lainnya.



Gambar 2. 29 Kontribusi Sub-Sektor Perikanan Terhadap PDRB Maluku

2.3.16 Pertanian

Komoditas unggulan pada subsektor pertanian adalah pertanian tanaman pangan dan pertanian perkebunan. Pertumbuhan ekonomi pada kedua subsektor ini cukup fluktuatif di mana pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian tanaman pangan mengalami kontraksi di tahun 2021 hingga mencapai -6,70 persen, namun kembali mengalami pertumbuhan positif pada Tahun 2022



menjadi 4,58 persen dan pertanian tanaman perkebunan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 2,16 persen.

Tabel 2. 49 Komoditi Unggulan Subkategori Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral					
	a. Tanaman Pangan	1,68	3,75	0,90	-6,70	4,58
	b. Tanaman Perkebunan	7,46	7,12	3,26	1,45	2,16
2	Kontribusi Perekonomian					
	a. Tanaman Pangan	5,49	5,41	5,52	4,81	4,74
	b. Tanaman Perkebunan	3,49	3,51	3,68	3,66	3,56

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

2.3.17 Perdagangan

Perdagangan merupakan kategori terbesar ketiga dalam dominasi terhadap struktur ekonomi Maluku setelah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Distribusi kategori ini berada pada kisaran angka 13 persen dimana pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 13,41 persen. Kenaikan ini juga terlihat dari pada pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mencapai 6,72 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda konstruksi fluktuatif dalam lima tahun terakhir, bahkan sempat tumbuh 6,84 persen. Pada tahun 2020 sempat berkontraksi sebesar -4,41 persen. Namun pada tahun 2021 sudah kembali tumbuh positif 4,41 persen.



Tabel 2. 50 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kontribusi Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Provinsi Maluku Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	6,00	6,84	-4,41	4,41	6,72
2	Kontribusi Perekonomian Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	13,50	13,71	13,23	13,35	13,41

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Kerjasama Daerah

Kerjasama antar daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan dengan daerah perbatasan, daerah lain dan dengan lembaga untuk meningkatkan pelayanan publik. Berikut pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kerja sama daerah dengan swasta Tahun 2019-2022.



Tabel 2. 51 Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

No.	Sektor /Bidang	Lokasi	Nomor Loi/Mou/ Pks	Jangka Waktu (Masa Berlaku)	Maksud Dan Tujuan	Jenis Kerjasama	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan	6 (enam) Provinsi yakni Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Maluku	Surat Kuasa No. 523-110 Tahun 2021 Tanggal 10 September 2021	3 (Tiga) Tahun dari 2021 s/d 2023	1.Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	KSDD (Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain)	Masih berkoordinasi dengan 5 (Lima) Provinsi yang menandatangani Mou
					2.Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		



No.	Sektor /Bidang	Lokasi	Nomor Loi/Mou/ Pks	Jangka Waktu (Masa Berlaku)	Maksud Dan Tujuan	Jenis Kerjasama	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan	Provinsi Maluku dengan Sulaewesi Selatan	Nomor : 523/01/P KS/TKP/II/ DKP dan NO. 061/378/22K Tanggal 05 Februari 2022	3 (Tiga) Tahun dari 2022 s/d 2024	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	KSDD (Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain)	Tahapan Sosialisasi Kepada Dinas Perikanan Kabupaten/ Kota, Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Perikanan
					Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		
3.	Pengembangan Dukungan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja terhadap	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	Nomor : 420/4385 /2022 Dan No. 061/2662 /2022 Tanggal 07 September 2022	3 (Tiga) Tahun dari 2022 s/d 2024	Membantu Penyelenggaraan, Pengembangan Pendidikan Vokasi Sekolah Menengah Kejuruan	Kerja Sama Daerah	Tindak Lanjut dengan Magang bersama SMK Negeri 1 Tual, SMK Negeri 3 Tual dan SMK Negeri



No.	Sektor /Bidang	Lokasi	Nomor Loi/Mou/ Pks	Jangka Waktu (Masa Berlaku)	Maksud Dan Tujuan	Jenis Kerjasama	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
	SMK se-Maluku				(SMK) se-Maluku		1 Maluku Tenggara
					Meningkatkan hubungan antara para Pihak dengan Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja dan Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku		
4.	Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan di Indonesia	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, DKP Provinsi Maluku dan Rare Indonesia	Nomor SK Kepala Dinas Nomor : 061/2274 /23k Tanggal 5 Juni 2023	-	Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku	KSDLL (Kerja Sama Pemda dengan Lembaga di luar Negeri)	Biaya Program " Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan di Indoensia" di Provinsi Maluku
5.	Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , Satker Direktorat Jenderal Energi Baru,Terba	Nomor : 20/NH/B N.07/KPB /2021 Tanggal 28 Oktober 2021	-	Penggunaan Operasional PLTS Rooftop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	Kerja Sama Daerah	Sudah di Manfaatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sejak Agustus 2020



No.	Sektor /Bidang	Lokasi	Nomor Loi/Mou/ Pks	Jangka Waktu (Masa Berlaku)	Maksud Dan Tujuan	Jenis Kerjasama	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		rukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM					
6.	Pemnafaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Layanan Lingkup Tugas DKP Promal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	Nomor : 120.23/202 dan Nomor : 061/1229/20k Tanggal 18 Mei 2021	1 (Satu) Tahun sampai dengan Tanggal 18 Mei 2022	Mengefektifkan fungsi dan peran para PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan di Ambon melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Kerjasama Daerah	Sementara Proses Perpanjangan Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku

Tabel 2. 52 Pelaksanaan Kerja Sama dengan non Pemerintah

NO.	SEKTOR/ BIDANG	PENGELOLA/	NOMOR LOI /MOU/ PKS	JANGKA WAKTU (MASA BERLAKU)	MAKSUD DAN TUJUAN	JENIS KERJASAMA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemanfaatan Sarana Rantai	UD. Maulana dan Pelabuhan	Nomor : 35/PKS/P3-B/I/23k Tanggal	1 (satu) Tahun dari 25 Januari 2023 s/d 24	Menyediakan Produk Perikanan	KSDPK (Kerja Sama Daerah dengan	Sudah berjalan



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026**

NO.	SEKTOR/ BIDANG	PENGELOLA/	NOMOR LOI /MOU/ PKS	JANGKA WAKTU (MASA BERLAKU)	MAKSUD DAN TUJUAN	JENIS KERJASAMA	KET.
	Dingin (<i>Cold Storage</i>) Banda Kabupate n Maluku Tengah	Perikanan Pantai Banda	25 Januari 2023	Januari 2024	yang bermutu dan higiens kepada Konsumen dan Masyarakat	Pihak Ketiga)	
2.	Pengunaa n dan Pemanfaa tan <i>Cold Storage</i> Kapasitas 100 Ton dan ABF 5 Ton di Waai Kabupate n Maluku Tengah	PT. Celebes Ocean Fishery dan Cabang Dinas Gugus Pulau VII	Nomor : 061/001- GP.VII/I/2 023 Tanggal 09 Januari 2023	1 (Satu) Tahun dari Tanggal 09 Januari 2023 s/d 08 Januari 2024	Mengelola <i>Cold Storage</i> dalam penyedia an Produk perikanan yang bermutu dan higienis kepada Konsumen	KSDPK (Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga)	Sudah Berjalan
3.	Pemanfaa tan Pengelola an Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tbk.	PT. Bank Mandiri (Persro) Tbk. Maluku	Nomor : CEO.R10. Ar.MLK/02 5/2021 dan Nomor : 061/413/2 1k Tanggal 15 Februari 2021	1 (Satu) Tahun dari Tanggal 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023	Memberik an Pelayanan kepada Masyarak at dalam hal Transaksi Keuangan Mandiri	KSDPK (Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga)	Sementara Proses Penandata nganan Kontrak
4.	Pemanfaa tan Pengelola an Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT.Bank Danamon (Persero) Tbk. Tbk.	PT. Bank Danamon (Persero) Tbk. Maluku	Nomor : Adendum No. 2567/PKS/ TM/4/CRE M/0323Ta nggal 15 Maret 2023 dan Nomor : 0428/CRE M/TM/032 3 Tanggal 15 Maret 2023	1 (Satu) Tahun dari Tanggal 01 September 2023 s/d 31 Agustus 2024	Memberik an Pelayanan kepada Masyarak at dalam hal Transaksi Keuangan Mandiri	KSDPK (Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga)	Sudah Berjalan



NO.	SEKTOR/ BIDANG	PENGELOLA/	NOMOR LOI /MOU/ PKS	JANGKA WAKTU (MASA BERLAKU)	MAKSUD DAN TUJUAN	JENIS KERJASAMA	KET.
5.	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku	Yayasan Pusat Segitiga Karang (Coral Triangle Center Foundation)	Nomor : 523-350 Tahun 2022 dan No. 168/NK/PE MPROV MALUKU-CTC/VIII/2022	3 (Tiga) Tahun dari Tanggl 22 Agustus 2022 s/d 21 Agustus 2024	Mendukung Upaya Pengelolaan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Yang berkelanjutan	Kerja Sama Daerah dengan Organisasi Internasional (KSD/OI)	Sudah berjalan

2.4.2 BUMD

BUMD memiliki peran dan manfaat yang sangat sentral dalam pembangunan perekonomian daerah. Keberadaan BUMD ini juga bertujuan memaksimalkan pembangunan daerah sekaligus pembangunan ekonomi nasional, karena perannya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan asas-asas ekonomi yang sehat.

Dengan diberikannya tanggungjawab oleh pemerintah pusat dalam mengelola hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dibentuknya 4 BUMD yang ada di Provinsi Maluku yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada PAD. Berikut realisasi kontribusi PAD dari BUMD di Provinsi Maluku.

Tabel 2. 53 Realisasi Kontribusi PAD BUMD Provinsi Maluku Tahun 2020-2022

No	Nama BUMD	Realisasi Kontribusi PAD			
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PT. Bank Maluku Malut		37.641.787.486	39.848.849.705	22.070.596.202
2	Perumda Panca Karya		1.000.000.000	625.000.000	413.379.544



No	Nama BUMD	Realisasi Kontribusi PAD			
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
3	PT. Maluku Energi Abadi (Perseroda)	Belum didirikan	Belum berproduksi	Belum berproduksi	Belum berproduksi
4	PT. Dok dan Perkapalan Waiame		250.000.000	-	-

Sumber: Biro Ekonomi, 2023

2.4.3 Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Secara umum, pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan baik pengeluaran makanan maupun non makanan. Namun pola yang terlihat, konsumsi masyarakat terhadap kelompok



makanan lebih tinggi dibandingkan kelompok non makanan sehingga dapat diasumsikan masyarakat masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer.

Tabel 2. 54 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Provinsi Maluku Tahun 2018-2022

No	Rata-rata Pengeluaran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Makanan	491.426	507.218	532.135	536.327	589.485
2	Non Makanan	474.411	495.021	551.786	576.419	580.343
	Total Pengeluaran	965.837	1.002.239	1.083.921	1.112.746	1.169.828
3	Persentase Makanan	50,88	50,61	49,09	48,20	50,39
4	Persentase Non Makanan	49,12	49,39	50,91	51,80	49,61

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

2.4.4 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan indikator yang memberikan gambaran bagaimana kehidupan petani ditopang oleh usaha sektor pertaniannya. Nilai Tukar Petani memperlihatkan dua sisi kehidupan petani yaitu sisi pendapatan yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil penjualan produk pertaniannya dan sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) > 100 menunjukkan petani mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya jika NTP <100 menunjukkan petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibanding kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. NTP=100 menunjukkan petani mengalami impas, dimana kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, pendapatan petani sama besar dengan pengeluarannya.



Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Maluku dari tahun 2018–2023 selalu mencapai angka di atas 100, namun NTP semakin menurun dimana tahun 2020 hanya mencapai 98,56 dan tahun 2021 sebesar 97,53. Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian (It) yang tercatat menurun 0,39 persen dan peningkatan harga yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga serta biaya produksi (Ib) sebesar 0,29 persen.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 42 kecamatan di Provinsi Maluku pada Desember 2023, diketahui bahwa NTP Provinsi Maluku secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,46 persen dibanding November 2023, atau turun dari 106,35 pada November 2023 menjadi 105,86 pada Desember 2023. Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian (It) yang tercatat menurun sebesar 0,25 persen dan peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,21 persen.

Pada Desember 2023, NTN mengalami penurunan sebesar 0,58 persen. Hal ini terjadi karena Ib mengalami penurunan sebesar 0,13 persen dan penurunan It yang tercatat sebesar 0,46 persen. Penurunan It disebabkan oleh turunnya harga berbagai komoditas pada kelompok penangkapan laut (khususnya komoditas ikan ketamba, ikan terbang, lobster, ikan tenggiri, ikan kuwe, ikan baronang, dan ikan selar dan ikan ekor kuning) sebesar 0,46 persen. Sementara It pada kelompok penangkapan di perairan umum tidak mengalami perubahan.



Tabel 2. 55 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NILAI TUKAR PETANI (NTP)	100,94	100,27	98,56	97,53	103,88	105,86
NILAI TUKAR NELAYAN	107,37	114,75	100,44	102,35	116,01	113,37

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023

2.4.5 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, dan lain sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Jumlah tindak pidana kriminalitas dan penyelesaian tindak pidana kriminalitas di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 56 Jumlah Kejadian Kejahatan yang Dilaporkan Provinsi Maluku Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian yang Dilaporkan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Res Kepulauan Tanimbar	234	263	112	137	99
Res Maluku Tenggara	440	393	291	370	69
Res Maluku Tengah	231	250	143	258	246
Res Buru	117	186	162	189	158
Res Kepulauan Aru	156	162	163	200	164
Res Seram Bagian Barat	171	247	200	320	147
Res Seram Bagian Timur	69	102	77	67	110
Res Maluku Barat Daya	105	129	116	194	183
Resta Ambon	1.681	1.903	1.882	1.195	683

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2023



2.5 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku

Tabel 2. 57 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,50 (B)	58,49 (CC)	Belum mencapai target	70.00 (B)	72.50 (BB)	
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,1	72,75	Melewati target	70,39	70,69	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00-5,82	5,73	Sesuai Target	5,60-6,27	6,10-6,71	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,11	16,23	Melewati target	15,92	15,73	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,45	6,88	Melewati target	6,12	6,05	
6	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	22,58	28,51	Melewati target	23,4	24,22	
7	Indeks Williamson	Poin	0,319	0,401	Belum mencapai target	0,285	0,25	
8	Indeks Gini	Poin	0,31	0,306	Melewati target	0,3	0,295	
9	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Poin	80,5	75,73	Belum mencapai target	80,75	81	
10	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	54	55,33	Melewati target	54,5	55	



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00-5,82	5,73	Sesuai Target	5,60-6,27	6,10-6,71	
2	Tingkat Inflasi	Persen	2,04-3,80	6,28	Belum mencapai target	2.10-3.24	2,09-2,99	
3	PDRB ADHB	Juta Rp	52.355,41	52.692,06	Melewati target	54.824,33	57.293,24	
4	PDRB PER KAPITA	Juta Rp	26,38	28,53	Melewati target	26,94	27,5	
5	Indeks Gini	Poin	0,31	0,306	Melewati target	0,3	0,295	
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	16,11	16,23	Belum mencapai target	15,92	15,73	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,45	6,88	Belum mencapai target	6,12	6,05	
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,5	1,01	Belum mencapai target	0,5	0,5	
9	Pengeluaran Perkapita	Jumlah	1.113.825	1.169.828	Melewati target	1.161.389	1.196.209	
10	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,1	72,75	Melewati target	70,39	70,69	
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,50 (B)	58,49 (CC)	Belum mencapai target	70.00 (B)	72.50 (BB)	



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
12	Nilai SAKIP	Poin	70,00 (B)	60,35 (B)	Belum mencapai target	72,50 (BB)	75,00 (BB)	
13	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,92	0	N/A	3,96	4	
14	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	3,3	0	N/A	3,35	3,4	
15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	70,5	58,13	Belum mencapai target	71	71,5	
16	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Poin	66,5	60,2	Belum mencapai target	71,65	76,95	
17	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	54	55,33	Melewati target	54,5	55	
18	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Poin	93,49	93,2	Belum mencapai target	93,74	94	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76,59	77,69	Melewati target	76,87	77,16	
20	Indeks Williamson	Poin	0,319	0,401	Belum mencapai target	0,285	0,25	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
	PENDIDIKAN							
1	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	Persen	98,56	79,03	Belum mencapai target	98.91	99.18.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	100	-		100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
3	Rasio Guru terhadap murid Pendidikan Menengah	Rasio	01.20	01.20	Sesuai Target	01.20	01.20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	KESEHATAN							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6	7	Belum mencapai target	6	6	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	7	8	Belum mencapai target	7	7	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	4	6	Belum mencapai target	4	4	Dinas Kesehatan
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	123	62	Melewati target	121	119	Dinas Kesehatan
5	Cakupan Penanganan komplikasi kebidanan	Persen	45	3,45	Belum mencapai target	50	55	Dinas Kesehatan
6	Persalinan di fasilitas kesehatan (PF)	Persen	54	58,38	Melewati target	67	60	Dinas Kesehatan
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	72,5	66	Belum mencapai target	74,3	76,2	Dinas Kesehatan
8	AFP rate per 100.000 penduduk	Angka	>2	>2	Sesuai Target	>2	>2	Dinas Kesehatan
9	Temuan Kasus TB Baru	Persen	80	47,4	Belum mencapai target	85	100	Dinas Kesehatan
10	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	<0.2	<0,3	Belum mencapai target	<0.2	<0.2	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
11	Jumlah puskesmas pembantu dengan luas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah	530	458	Belum mencapai target	540	550	Dinas Kesehatan
12	Jumlah puskesmas dengan luas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah	300	228	Belum mencapai target	325	350	Dinas Kesehatan
13	Cakupan Pelayanan ANC (6 kali)	Persen	79	34,34	Belum mencapai target	81	83	Dinas Kesehatan
14	Cakupan pelayanan nifas	Persen	75	78,7	Melewati target	80	85	Dinas Kesehatan
15	Cakupan penanganan komplikasi neonatal	Persen	35	2,23	Belum mencapai target	37	39	Dinas Kesehatan
16	Cakupan Kunjungan balita	Persen	55	75,36	Melewati target	60	65	Dinas Kesehatan
17	Cakupan puskesmas mampu melaksanakan penjangkauan kesehatan anak usia sekolah	Persen	79	78,14	Belum mencapai target	82	85	Dinas Kesehatan
18	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Kesehatan
19	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Fasyankes	Persen	85	55,44	Belum mencapai target	90	95	Dinas Kesehatan
20	Krisis Kesehatan	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Kesehatan
21	Cakupan Asi Eksklusif	Persen	56	46	Belum mencapai target	59	62	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
22	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	94	66	Belum mencapai target	94,5	95	Dinas Kesehatan
23	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Madya	Jumlah	148	158	Melewati target	154	165	Dinas Kesehatan
24	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	7	4,9	Melewati target	6,5	6	Dinas Kesehatan
25	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengendalian konsumsi rokok pada penduduk 10 - 18 tahun	Jumlah	7	7	Sesuai Target	9	11	Dinas Kesehatan
26	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	Persen	69	78,7	Melewati target	71	73	Dinas Kesehatan
27	Prevalensi Balita Stunting	Persen	23	8,3	Melewati target	22	20	Dinas Kesehatan
28	Annual Paracite Incidence (API)	Persen	1,1	0,64	Melewati target	1	0,8	Dinas Kesehatan
29	Slide Postivity Rate (SPR	Persen	<5	<5	Sesuai Target	<5	<5	Dinas Kesehatan
30	Puskesmas yang Melaksanakan Tatalaksana Program ISPA sesuai Standar	Persen	65	18,18	Belum mencapai target	70	75	Dinas Kesehatan
31	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persen	27	19,8	Belum mencapai target	29	31	Dinas Kesehatan
32	Persentase ODHA yang Mendapat Pengobatan ARV	Persen	55	56,55	Melewati target	55	55	Dinas Kesehatan
33	Prevalensi Ibu Hamil Anemia	Persen	18	14,51	Melewati target	17	16	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
34	Ketersediaan Obat dan Vaksin	Persen	93	94	Melewati target	94	95	Dinas Kesehatan
35	Sistem Kewaspadaan Dini	Persen	80	95	Melewati target	80	80	Dinas Kesehatan
36	Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan screening PTM Prioritas	Persen	45	5,15	Belum mencapai target	70	90	Dinas Kesehatan
37	Persentase penyandang hipertensi yang Tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Persen	43	0	N/A	63	90	Dinas Kesehatan
38	Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	Persen	36	0	N/A	58	90	Dinas Kesehatan
39	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan terpadu PTM di ≥ 80 % puskesmas	Jumlah	7	2	Belum mencapai target	9	11	Dinas Kesehatan
40	Cakupan Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Persen	70	63,72	Belum mencapai target	75	80	Dinas Kesehatan
41	Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak	Persen	24	11,45	Belum mencapai target	26	28	Dinas Kesehatan
42	Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persen	11	9	Belum mencapai target	14	17	Dinas Kesehatan
43	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persen	80	45,49	Belum mencapai target	90	100	Dinas Kesehatan
44	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0,8	0,7	Melewati target	0,8	0,8	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
45	Cakupan Vitamin A pada Bayi dan Balita	Persen	82	73,95	Belum mencapai target	84	86	Dinas Kesehatan
46	Cakupan Pelayanan Balita (D/S)	Persen	69	67,2	Belum mencapai target	71	73	Dinas Kesehatan
47	Prevalensi Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kalori	Persen	16	16,2	Belum mencapai target	15	14	Dinas Kesehatan
48	Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Beryodium	Persen	83	71,41	Belum mencapai target	87	91	Dinas Kesehatan
49	Campak Dosis Kedua	Persen	61,9	73,6	Melewati target	67,2	72,6	Dinas Kesehatan
50	Rumah Sakit yang Terakreditasi Utama	Jumlah	5	3	Belum mencapai target	11	13	Dinas Kesehatan
51	Rasio Dokter dengan Penduduk	Angka	37	40	Melewati target	38	39	Dinas Kesehatan
52	Rasio Dokter Spesialis dengan Penduduk	Angka	8	11	Melewati target	9	10	Dinas Kesehatan
53	Rasio Dokter Gigi dengan Penduduk	Angka	13	4	Belum mencapai target	14	15	Dinas Kesehatan
54	Rasio Bidan dengan Penduduk	Angka	97	141	Melewati target	98	99	Dinas Kesehatan
55	Rasio Perawat dengan Penduduk	Angka	225	345	Melewati target	230	235	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
56	Rasio Apoteker dengan Penduduk	Angka	17	17	Sesuai Target	18	19	Dinas Kesehatan
57	Rasio Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan Penduduk	Angka	37	45	Melewati target	38	73	Dinas Kesehatan
58	Pengunaan Obat Generik di Puskesmas	Persen	97	98	Melewati target	98	99	Dinas Kesehatan
59	Penggunaan Obat Generik di Rumah Sakit	Persen	74	76	Melewati target	76	78	Dinas Kesehatan
60	Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap	Persen	40	43	Melewati target	42,5	45	Dinas Kesehatan
61	Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit	Persen	50	52,5	Melewati target	52,5	55	Dinas Kesehatan
62	Penggunaan Obat Rasional	Persen	76	76	Melewati target	79	82	Dinas Kesehatan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten	Persen	50	75	Melewati target	75	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Akses Air Minum Layak	Persen	87,26	89,44	Melewati target	87,52	87,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Capaian Sanitasi	Meter	923	2044	Melewati target	923	1456	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Persen	0	0	Sesuai Target	0	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Presentase Kemantapan Jalan	Persen	62,37	55,88	Belum mencapai target	63,22	64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Persen	70	71	Melewati target	85	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Tata Ruang Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	persen	80,3	100	Melewati target	88,33	97,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dapat Dilayani Jaringan Irigasi	Persen	42,5	42,85	Melewati target	43,1	43,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
2	Presentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
3	Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	100	0	Belum mencapai target	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 – 15 Ha yang Ditangani	Persen	100	68,21	Belum mencapai target	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
5	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	0,53	0,53	Sesuai Target	0,59	0,65	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Satpol PP
2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Indeks risiko bencana di daerah	Poin	160,15	162,47	Melewati target	160,05	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	SOSIAL							
1	Cakupan penerbitan pengumpulan sumbangan lintas daerah	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Sosial
2	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Sosial
3	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Sosial
4	Presentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Sosial



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
5	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Sosial
6	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Sosial
7	Presentase cakupan penanganan bencana alam dan sosial	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Sosial
8	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Sosial
9	Presentase cakupan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Sosial
10	Cakupan pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
	TENAGA KERJA							
1	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Persen	60	54,54	Belum mencapai target	80	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	2,53	0,18	Belum mencapai target	3,75	5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	8,20	2,43	Belum mencapai target	8,50	8,70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	Persen	7,9	7,6	Belum mencapai target	8,50	9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
	Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)							
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan	Persen	45	22,5	Belum mencapai target	63	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	0	7,75	Melewati target	0	0	DP3A
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	27,05	23,26	Melewati target	27,5	30	DP3A
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	45	32,52	Belum mencapai target	52	65	DP3A
4	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	45	53,33	Melewati target	47	50	DP3A
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	44	40,63	Belum mencapai target	46	48	DP3A
6	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian	Persen	22	5,7	Belum mencapai target	23	25	DP3A
7	Rasio KDRT	Persen	0,36	0,01	Melewati target	0,35	0,35	DP3A
8	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	18	55	Melewati target	21	25	DP3A



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
9	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	60	39	Belum mencapai target	65	70	DP3A
10	Cakupan Layanan Rehabilitas Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitas Sosial Terlatih bagi Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	60	0,4	Belum mencapai target	65	70	DP3A
11	Cakupan Penegakkan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persen	0	89	Melewati target	0	0	DP3A
12	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	40	45	Melewati target	45	50	DP3A
13	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persen	28	24	Belum mencapai target	30	32	DP3A
14	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persen	30	0,4	Belum mencapai target	30	35	DP3A
15	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	2	19	Belum mencapai target	1,50	1,50	DP3A
16	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	55	63,01	Melewati target	58	60	DP3A
17	Cakupan kab/kota yang mengelola sistem data gender dan anak	Persen	82	82	Sesuai Target	82	91	DP3A



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
18	Presentase Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	45,45	18,18	Belum mencapai target	72,72	100,00	DP3A
19	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	40	55	Melewati target	45	50	DP3A
20	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	40	8,23	Belum mencapai target	45	50	DP3A
21	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	60	2	Belum mencapai target	75	75	DP3A
22	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Persen	0	3,93	Belum mencapai target	0	0	DP3A
	PANGAN							
1	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	11	15	Melewati target	11	11	Dinas Ketahanan Pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	70	70,7	Melewati target	75	75	Dinas Ketahanan Pangan
3	Persentase Pengawasan Pangan Segar yang aman dan bermutu	Persen	70	70,58	Melewati target	75	80	Dinas Ketahanan Pangan
4	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	0	48,3	Belum mencapai target	25,4	23,7	Dinas Ketahanan Pangan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
	PERTANAHAN							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	0	N/A	100	100	Biro Pemerintahan
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	45	0	N/A	50	60	Biro Pemerintahan
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	Persen	1	0	N/A	1	1	Biro Pemerintahan
	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76,59	77,69	Melewati target	76,87	77,16	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	33,33	77,78	Melewati target	33,33	33,33	Dinas Lingkungan Hidup
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							
1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Ratio	0,80	0,84	Melewati target	0,85	0,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	Persen	100	0,82	Belum mencapai target	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Rasio pasangan ber-Akte Nikah	Ratio	100	100	Sesuai Target	100	100	Dinas Kependudukan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
								dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	3	3	Sesuai Target	3	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Status Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Sesuai Target	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	23,96	23,52	Belum mencapai target	26,47	29,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase Penurunan Desa Mandiri	Persen	13,96	0	N/A	20,24	29,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	45,99	34,72	Melewati target	46,27	46,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,89	2,52	Melewati target	2,87	2,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
3	Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter	Persen	40,68	94,38	Melewati target	41,68	42,68	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PERHUBUNGAN							
1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi	Persen	9	-34,11	Belum mencapai target	9	9	Dinas Perhubungan
2	Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun -Pertumbuhan Trayek, Angkutan Penyeberangan, Persentasi Pelabuhan Laut yang Terbangun, -Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis - Pertumbuhan Trayek Angkutan Udara Perintis	Persen	48,83	49,83	Melewati target	49,95	51,07	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase pemanfaatan Jaringan TIK	Persen	80	88,8	Melewati target	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan	Persen	83,33	0	N/A	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	70	66,94	Belum mencapai target	70	70	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Jumlah Pengukuran tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	0	0	Sesuai Target	0	0	Dinas Koperasi dan UMKM



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
3	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	Persen	3,34	3,3	Sesuai Target	4,6	0	Dinas Koperasi dan UMKM
4	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	91,78	86,95	Belum mencapai target	92,06	0	Dinas Koperasi dan UMKM
5	Persentase Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang- undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel	Persen	70	75	Melewati target	75	0	Dinas Koperasi dan UMKM
6	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	25	25	Sesuai Target	25	0	Dinas Koperasi dan UMKM
	PENANAMAN MODAL							
1	Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA	Jumlah	2	3	Melewati target	2	2	DPMPTSP
2	Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA)	Jumlah	250	35	Belum mencapai target	250	250	DPMPTSP
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	92	90,75	Belum mencapai target	92,5	93	DPMPTSP
4	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	Jumlah	50	181	Melewati target	50	50	DPMPTSP
5	Persentase pertumbuhan investasi	Persen	100	50,76	Belum mencapai target	100	100	DPMPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Tingkat Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persen	80	0	N/A	90	100	Dinas Pemuda dan Olahraga



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
2	Tingkat Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		80	0	N/A	90	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Tingkat Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	80	0	N/A	90	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
	STATISTIK							
1	Jumlah Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Persen	47,62	0	N/A	47,62	47,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PERSANDIAN							
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat	Persen	20	0	N/A	20	20	Dinas Komunikasi dan Informatika
	KEBUDAYAAN							
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	65	14	Belum mencapai target	68	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PERPUSTAKAAN							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	58	56,88	Belum mencapai target	62	65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	19	49,77	Melewati target	20	21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-	Persen	50	75	Melewati target	75	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kea							
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan	Persen	32	33	Melewati target	35	38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PILIHAN							
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	544,4007	536.112,62	Belum mencapai target	555.288,76	566394,534	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	208922,7	278134,47	Melewati target	213.101,18	217363,202	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	70%	27,27	Belum mencapai target	75	80	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PARIWISATA							
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	387.567	387.567	Sesuai Target	408055	430089	Dinas Pariwisata
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	7400	7.422	Melewati target	8880	10656	Dinas Pariwisata
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	380167	380.167	Sesuai Target	399175	419433	Dinas Pariwisata
4	Kontribusi ekonomi Kreatif terhadap PDRB Maluku	Persen	1,55	1,49	Belum mencapai target	1,5	1,51	Dinas Pariwisata



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
	PERTANIAN							
1	Nilai Tukar Petani	%	102,30	102,5	Melewati target	102,5	102,7	Dinas Pertanian
2	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	10,43	9,77	Belum mencapai target	10,49	10,54	Dinas Pertanian
	KEHUTANAN							
1	Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi	Hektar	1000	355,62	Belum mencapai target	275	300	Dinas Kehutanan
2	Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)	Jumlah	15	14	Belum mencapai target	21	23	Dinas Kehutanan
3	Persentase Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB	Persen	0,53	0,54	Melewati target	0,53	0,53	Dinas Kehutanan
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
1	Jumlah PETI yang ditertibkan	Jumlah	<5	3	Sesuai Target	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	274	274	Sesuai Target	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Rasio Elektrifikasi	%	97,49	0	N/A	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Jumlah	592	592	Sesuai Target	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
	PERDAGANGAN							
1	Jumlah Perizinan Jenis Bahan Berbahaya	Jenis	2	2	Sesuai Target	2	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit	1	0		1	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	persen	3,5-4	7,73	Melewati target	3,5-4	3,5-4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Jumlah realisasi jenis pupuk bersubsidi	Jenis	2	0	N/A	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	10	0	N/A	10	19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Persentase Penanganan Konsumen	Persen	75	79,88	Melewati target	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	Persen	75	79,88	Melewati target	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Persentse Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persen	6	6	Sesuai Target	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	PERINDUSTRIAN							
1	Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas	USD (Juta)	35	40,5	Melewati target	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
2	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Orang	35,719	0	N/A	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	Persen	10	0	N/A	10	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	100	0	N/A	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
TRANSMIGRASI								
1	Jumlah Kelompok masyarakat kawasan transmigrasi yang berdaya saing	Kelompok	5	5	Sesuai Target	10	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Jumlah Kawasan/Unit Pemukiman Transmigrasi yang siap dibangun	Kawasan	1	0	N/A	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Persentase Pertumbuhan kawasan transmigrasi	Persen	0	0	N/A	40	40	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PENUNJANG URUSAN								
PERENCANAAN								
1	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Status Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD, RKPDP yang Tepat Waktu	Ya/Tidak	Ya	Tidak	Belum mencapai target	Ya	Ya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
3	Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	97	Belum mencapai target	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	89	Belum mencapai target	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	KEUANGAN							
1	Jumlah Pengelolaan barang milik daerah	Dokumen	2	2	Sesuai Target	2	2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan	Persen	85,00	97,73	Melewati target	85,00	90,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Tingkat kepatuhan terhdap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	55	74,39	Melewati target	55,00	60,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah	Persen	100	97,73	Belum mencapai target	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	Persentase terlaksannya program pengelolaan pendapatan daerah	Persen	100	0	Tidak ada data	100	100	Badan Pendapatan Daerah
	PENGAWASAN							



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
	KEPEGAWAIAN							
1	Persentase PNS yang Terpetakan Kompetensinya	Persen	100	100	Sesuai Target	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
2	Persentase PNS yang meningkat Kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar	Persen	100	100	Sesuai Target	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
3	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang Terevaluasi Kinerjanya	Persen	100	100	Sesuai Target	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
4	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	100	Sesuai Target	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	Persen	100	100	Sesuai Target	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
6	Persentase Pelayanan Kasus Kepegawaian	Persen	100	100	Sesuai Target	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Persentase OPD yang mengumpulkan LAKIP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Biro Organisasi
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Poin	63	61,03	Belum mencapai target	65	68	Biro Organisasi
3	Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD)		100	-	N/A	100	100	Biro Pemerintahan



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
4	Persentase kebijakan kesra yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Biro Kesra
5	Persentase produk hukum yang disahkan	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Biro Hukum
6	Persentase Penurunan Inflasi Daerah	Persen	3,00	2,27	Belum mencapai target	5,00	5,00	Biro Ekonomi
7	Maturitas UKPBJ	Level	Level 3	Level 3	Sesuai Target	Level 3	Level 3	Biro Administrasi Pembangunan
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	55	65	Melewati target	55	60	Biro Administrasi Pembangunan
	SEKRETARIAT DPRD							
1	Indeks Kepuasan Anggota Dewan	Poin	94	92	Belum mencapai target	96	97	Sekretariat DPRD
	PENGADAAN							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	20	-	N/A	20	20	Biro Administrasi Pembangunan
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60	-	N/A	65	65	Biro Administrasi Pembangunan
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	44	-	N/A	46	48	Biro Administrasi Pembangunan
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
2	Provinsi Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sesuai Target	Inovatif	Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	99,91	Sesuai Target	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PENGELOLAAN PERBATASAN							
1	Persentase pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Badan Perbatasan
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG							
1	Persentase Pelayanan Penghubung	Poin	100	88,3	Belum mencapai target	-	-	Badan Penghubung
	MANAJEMEN KEUANGAN							
1	Assets management							
2	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	100	-0,01	Belum mencapai target	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	100	0,08	Belum mencapai target	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Apakah ada daftar asset tetap	Ya/Tidak	Ya	-		Ya	Ya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap	Ya/Tidak	Ya	Ya	Sesuai Target	Ya	Ya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan	Ya/Tidak	Ya	Ya	Sesuai Target	Ya	Ya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/tidak	Ya	Tidak	Belum mencapai target	Ya	Ya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	5	0,08	Belum mencapai target	5	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	100	-	Tidak ada data	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persen	100	-	Tidak ada data	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	INSPEKTORAT DAERAH							
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, Itjen dan Inspektorat	Persen	90	74,9	Belum mencapai target	95	100	Inspektorat
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Level	B	B	Sesuai Target	B	BB	Inspektorat
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengawasan	Nilai	B	N/A		B	BB	Inspektorat



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
4	Persentase Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD) kab/kota yang mendapat nilai minimal tinggi	Persen	100	100	Sesuai Target	0	0	Inspektorat
5	Persentase Implementasi MCP Korsupgah dan Stranas	Persen	82	73,49	Belum mencapai target	85	88	Inspektorat
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Jumlah Pembinaan Separatisme, Radikalisme Dan Tindak Kriminalitas	Persen	100	100	Sesuai Target	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Aspek Hak-Hak Politik	Persen	70	70	Sesuai Target	75	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Aspek Kebebasan Sipil	Persen	87	87	Sesuai Target	89	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Persentase Lembaga Demokrasi	Persen	74	74	Sesuai Target	77	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Jumlah Koordinasi Dengan Instansi Terkait	Jumlah	12	12	Sesuai Target	13	14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Jumlah Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan,Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba	Pembinaan	4	1	Belum mencapai target	4	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Jumlah Pembinaan Terhadap Paham Keagamaan Bermasalah	Jumlah	11	2	Belum mencapai target	13	16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (RPJMD 2019-2024)		Ket.	Target		OPD
			2022			2023	2024	
			Target	Capaian				
8	Jumlah Pembinaan Kamtramtibmas	Jumlah	16	1	Belum mencapai target	18	20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



2.6 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Provinsi Maluku

A. Dinas Sosial

Tabel 2. 58 Capaian SPM Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output	Jmlh . Total Yang Harus dilayani	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)
URUSAN SOSIAL															
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	151	168	0	111,26	-	-	,-	151	0	100	151	0	100



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output	Jmlh . Total Yang Harus dilayani	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1049	1428	705	136,13	93	956	8,9	994	100	94,76	768	281	73,21
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50	50	0	100,0	65	0	130	50	0	100,00	50	0	100



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output	Jmlh . Total Yang Harus dilayani	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban	Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1513	5130	-	339,1	2013	-	133	750	763	49,6	1500	13	99,14



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output	Jmlh . Total Yang Harus dilayani	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)	Jmlh. Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	(%)
	Bencana daerah provinsi														

Sumber: Dinas Sosial, 2023



Penanganan SPM di Tahun 2019 & 2020 masih menggunakan dana APBN. Sementara untuk target pada Penyandang Disabilitas Terlantar dan Anak Terlantar menggunakan data klien di dalam panti maupun di luar panti. Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak tersedianya Panti Sosial Untuk Gelandangan Pengemis. Kegiatan ini telah diakomodir untuk dilaksanakan di tahun 2022. Sedangkan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah melebihi target di tahun 2019 & 2020 dikarenakan terjadinya Bencana Gempa Bumi, banjir dan Longsor di beberapa Kabupaten di Provinsi Maluku serta penanganan selama pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku.



B. Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel 2. 59 Capaian SPM Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2019-2022

No	KAB/KOTA	JENIS LAYANAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	TAHUN	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	9	10	11
1	KOTA AMBON	PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	APBD	Rp600.000.000,00	2019	100	PERMENDAGRI NOMOR 100 TAHUN 2018
2	KOTA AMBON dan KAB. SERAM BAGIAN BARAT	PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA		Rp790.000.000,00	2020	100	
3	KOTA AMBON dan KAB. SERAM BAGIAN BARAT	PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA		Rp1.710.000.000,00	2021	100	
		REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					
4	KOTA AMBON	REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA		Rp2.434.000.000,00	2022	98	PERMENDAGRI NOMOR 059 TAHUN 2021
TOTAL				Rp10.854.000.000,00	-		

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2023



C. Dinas Kesehatan

Tabel 2. 60 Capaian SPM Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2019

No.	Indikator	Program	2019					
			Target	Capaian	%	Anggaran		
						Alokasi	Realisasi	%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Penanggulangan Krisis Kesehatan	1.114.341 orang	541.626 orang	49	Rp. 200.000.000	Rp. 0	0
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	239 orang	239 orang	100	Rp. 254.630.000	Rp. 7.800.000	3

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2. 61 Capaian SPM Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2020

No.	Indikator	Program	2020					
			Target	Capaian	%	Anggaran		
						Alokasi	Realisasi	%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Penanggulangan Krisis Kesehatan	1.842.910 orang	1.842.910 orang	100	Rp. 4.968.971.500	Rp. 3.862.142.275	78



No.	Indikator	Program	2020					
			Target	Capaian	%	Anggaran		
						Alokasi	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1. Penyelidikan Epidemiologi Kasus Dicarded Campak, AFP dan PD3I Lainnya 2. Assistensi Teknis Kewaspadaan Dini Respon KLB	113.012 orang	113.012 orang	100	Rp. 56.050.000	Rp. 6.494.800	12

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2. 62 Capaian SPM Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2021

No.	Indikator	Program	2021					
			Target	Capaian	%	Anggaran		
						Alokasi	Realisasi	%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Penanggulangan Krisis Kesehatan	33.139 orang	33.139 orang	100	Rp. 197.160.000	Rp. 7.910.000	4
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (Covid-19)	9.066 orang	9.066 orang	100	Rp. 46.846.983.604	Rp. 17.280.536.385	37

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023



Tabel 2. 63 Capaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	Indikator	Program	2022					
			Target	Capaian	%	Anggaran		
						Alokasi	Realisasi	%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Penanggulangan Krisis Kesehatan	17.493 orang	17.493 orang	100	Rp. 229.300.000	Rp. 29.550.000	13
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	4.540 orang	4.540 orang	100	Rp. 328.520.000	Rp. 99.200.000	30

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023



Adapun permasalahan dalam hal pencapaian indikator SPM Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, antara lain:

1. Tahun 2019 realisasi anggaran 0 disebabkan karena dana yang digunakan adalah dari sub kegiatan lain dan capaian target 49% karena penetapan target pada awal tahun menggunakan data perkiraan jumlah penduduk per Provinsi Maluku.
2. Penetapan KLB oleh pemerintah daerah sehingga anggaran KLB tidak bisa digunakan kalau tidak ada penetapan KLB sehingga realisasi anggarannya kecil.
3. Masyarakat menolak diimunisasi ketika terjadi kasus KLB PD3I (penyakit yang dapat dicega dengan imunisasi) karena alami trauma pasca Covid-19
4. Lamanya bantuan logistik dari Pusat untuk penanganan krisis kesehatan di daerah.
5. Penetapan target per indikator menggunakan data perkiraan, karena tidak ada data yang pasti terkait krisis dan KLB.



D. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2. 64 Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				Target	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	22	3	4	5	52	7	8
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	0	10	20	50	75	100
2	Akses Air Minum Layak	%	77,67	86,74	87	87,26	87,52	87,78
3	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	0	10	20	50	75	100
4	Capaian Sanitasi	M	0	11218	1213	923	923	1456
5	Akses sanitasi layak	%	68,67	69,67	70,84	71,25	72,34	73,44

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023



E. Dinas Pendidikan

Tabel 2. 65 Capaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian /Output	Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan															
			Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Jmlh · Haru s dilayani	Jmlh Terlayani	Belum Terlayani	%	Jmlh · Haru s dilayani	Jmlh Terlayani	Belum Terlayani	%	Jmlh · Haru s dilayani	Jmlh. Terlayani	Blm Terlayani	%	Jmlh · Haru s dilayani	Jmlh. Terlayani	Blm Terlayani	%
URUSAN PENDIDIKAN																		
1	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah warga negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Atas	104.800	69.748	35.052	33 %	104.800	69.464	35.336	34 %	123.736	77.560	46.176	37 %	122.798	69.789	53.009	43 %
2	Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah warga negara Usia 16-18 Tahun	104.800	22.021	82.779	79 %	104.800	22.212	82.588	79 %	123.736	28.170	95.566	91 %	122.798	21.440	101.358	83 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian /Output	Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan															
			Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Jmlh Harus dilayani	Jmlh Terlayani	Belum Terlayani	%	Jmlh Harus dilayani	Jmlh Terlayani	Belum Terlayani	%	Jmlh Harus dilayani	Jmlh. Terlayani	Blm Terlayani	%	Jmlh Harus dilayani	Jmlh. Terlayani	Blm Terlayani	%
		yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Kejuruan																
3	Pendidikan Khusus	Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan	1.850	872	978	53 %	1.850	872	978	53 %	1.551	862	689	37 %	1.551	878	673	43 %



N o	Indikat or Kinerja / Jenis Layan an SPM	Indikato r Pencap aian /Output	Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan															
			Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Jmlh · Haru s dilay ani	Jmlh Terla yani	Belu m Terla yani	%	Jmlh · Haru s dilay ani	Jmlh Terlayani	Belu m Terla yani	%	Jmlh · Haru s dilay ani	Jmlh. Terlaya ni	Blm Terla yani	%	Jmlh · Haru s dilay ani	Jmlh. Terlay ani	Blm Terlay ani	%
		kan khusus																

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023





BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang terimplementasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Disisi lain, keuangan daerah sebagai *instrument fiscal* pemerintah daerah tidak terlepas atau merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil Pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena daerah diperhadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan dalam mengalokasikan belanja untuk Pembangunan dan pelayanan masyarakat. Terkait dengan itu, maka untuk dapat melakukan analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah dimasa datang diperlukan analisis pelaksanaan APBD (keuangan daerah) pada tahun-tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah (APBD) Provinsi Maluku dari tahun 2019 – 2023 menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Hal ini ditandai dengan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku yang pada tahun 2019 realisasi mencapai 97,39% dari



target yang ditetapkan, meningkat di tahun 2020 menjadi 99,57% dan kemudian terus menurun hingga tahun 2023 mencapai 96,64%. Sebaliknya realisasi Belanja Daerah cenderung meningkat dari sisi pencapaian target. Jika pada tahun 2019 realisasi Belanja Daerah mencapai 92,69% dan terus meningkat menjadi 93,60% di tahun 2023. Hanya pada tahun 2020 yang realisasi Belanja Daerah hanya sebesar 81,96%, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut dunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Gambaran tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama tahun 2019 – 2023 dapat diikuti pada table berikut ini.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	LEBIH / KURANG
PENDAPATAN DAERAH					
1	2019	3.192.391,11	3.108.914,88	97,39	- 83.476,23
2	2020	3.059.108,36	3.045.825,25	99,57	- 13.283,11
3	2021	3.308.412,06	3.268.117,20	98,78	- 40.294,86
4	2022	2.997.776,44	2.915.515,47	97,26	- 82.260,97
5	2023	3.145.336,79	3.039.622,42	96,64	- 105.714,37
BELANJA DAERAH					
1	2019	3.208.657,73	2.974.061,95	92,69	- 234.595,77
2	2020	3.643.376,32	2.986.139,75	81,96	- 657.236,57
3	2021	4.154.801,12	3.818.867,10	91,91	- 335.934,02
4	2022	3.263.936,90	3.053.175,36	93,54	- 210.761,54
5	2023	3.159.942,83	2.957.860,67	93,60	- 202.082,16
PEMBIAYAAN PENERIMAAN					
1	2019	16.266,61	28.473,55	175,04	12.206,94
2	2020	863.926,48	338.326,48	39,16	- 525.600,00
3	2021	852.389,06	851.689,06	99,92	- 700,00
4	2022	294.939,16	294.939,16	100,00	0,00
5	2023	152.779,27	152.779,27	100,00	0,00
PEMBIAYAAN PENGELUARAN					
1	2019	-	-		
2	2020	32.800,00	32.775,00	99,92	- 25,00
3	2021	6.000,00	6.000,00	100,00	-
4	2022	28.778,70	4.500,00	15,64	- 24.278,70
5	2023	138.172,23	138.172,23	100,00	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2022 (Audited), 2023 (Unaudited)

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai



kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Transfer Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah/Bantuan, Dana Darurat dan Pendapatan lainnya dari Pemerintah.

Kinerja pendapatan daerah selama tahun 2019 – 2023 sangat berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 Pendapatan Daerah telah mencapai 3.192,96 milyar rupiah menurun di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan kembali meningkat di tahun 2021. Realisasi Pendapatan Daerah secara umum selama tahun 2019 – 2023 menurun dari 3192,96 milyar rupiah menjadi 3.039,62 milyar rupiah atau turun 2,23% dalam 4 tahun terakhir ini. Penurunan realisasi pendapatan daerah ini terutama disebabkan oleh berkurangnya realisasi pendapatan Dana Transfer dari pemerintah yang selama 4 tahun terakhir ini terjadi penurunan sebesar 8,68%. Penurunan pendapatan transfer ini telah menyebabkan menurunnya proporsi Dana Transfer yang selama ini mendominasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dari 84,36% pada tahun 2019 menjadi 78,79% di tahun 2023. Penurunan pendapatan transfer ini tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 16,27% sebagai akibat dari menurunnya alokasi Dana Transfer



Khusus (DAK) yang turun sebesar 39,21%.

Sebaliknya, realisasi Pendapatan Asli Daerah justru mengalami peningkatan selama periode 2019 – 2023 yaitu dari 482,81 milyar rupiah pada tahun 2019 meningkat menjadi 664,60 milyar rupaiah di tahun 2023 atau telah terjadi peningkatan sebesar rata-rata 7,71% selama kurun waktu 4 tahun terakhir ini. Dari seluruh komponen PAD, Pajak Daerah yang konsisten menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang meningkat sebesar 20,33%.

Gambaran tentang kinerja Pendapatan daerah dalam empat tahun terakhir ini dapat diikuti pada table berikut ini.

Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Juta Rupiah)

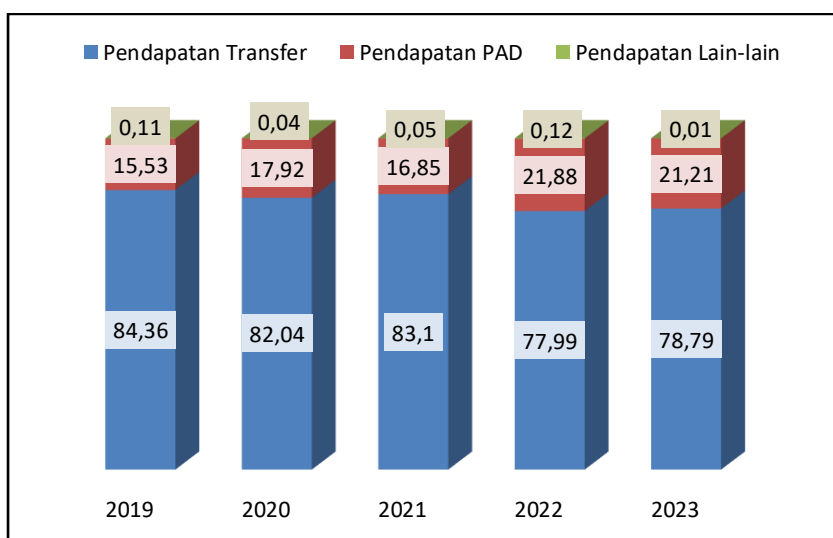
NO	URAIAN	TAHUN					Pertumb
		2019	2020	2021	2022	2023	
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	482.805,59	545.752,87	550.808,91	637.948,96	644.603,16	33,51
	Pajak Daerah	361.093,16	382.358,28	414.045,98	498.236,26	528.238,16	46,29
	Retribusi Daerah	79.640,68	94.079,86	29.668,99	19.936,70	31.420,27	-60,55
	Bagi Hasil Laba	-	38.891,79	40.248,85	22.733,98	45.399,71	16,73
	Lain2 PAD yg sah	42.071,75	30.422,94	66.845,10	97.042,03	39.545,02	-6,01
II.	PENDAPATAN TRANSFER	2.622.545,72	2.498.865,07	2.715.750,13	2.273.932,60	2.394.794,49	-8,68
	Bagi Hasil Pajak dan SDA	79.371,48	77.036,18	74.059,73	75.925,69	71.981,70	-9,31
	DAU	1.699.714,81	1.524.466,22	1.524.362,74	1.524.401,86	1.578.790,92	-7,11
	DAK	843.459,43	897.362,67	1.108.154,65	673.605,05	744.021,87	-11,79
	Dana Insentif Daerah	-	-	9.173,01	-	-	
III.	LAIN - LAIN PENDAPATAN YG SAH	3.563,57	1.207,31	1.558,15	3.633,92	224,78	-93,69
	Hibah	3.563,57	1.207,31	1.558,15	3.633,92	224,78	-93,69
	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	3.108.914,88	3.045.825,25	3.268.117,20	2.915.515,47	3.039.622,42	-2,23

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2019 – 2022 (Audited), 2023 (Unaudited)

Jika dilihat dari tren prosentasi masing-masing komponen pendapatan daerah Provinsi Maluku selama tahun 2019 – 2023 maka telah terjadi penurunan tren proporsi Pendapatan Transfer dari Pemerintah. Sebaliknya Pendapatan Asli Daerah justru mengalami tren peningkatan proporsi dari

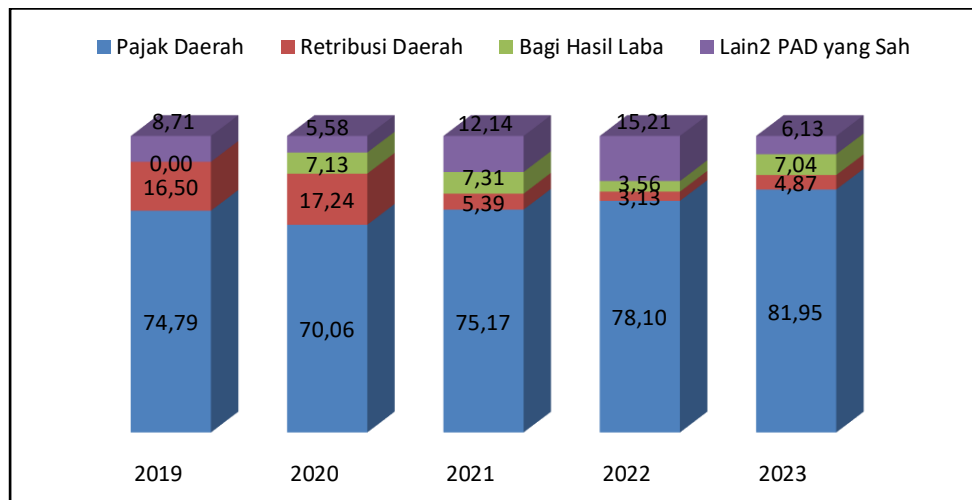
15,53% di tahun 2019 meningkat menjadi 21,21% di tahun 2023. Dari gambaran proporsi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan dari luar masih cukup tinggi. Namun demikian upaya-upaya untuk terus meningkatkan PAD telah memberikan dampak yang cukup berarti yang ditandai dengan semakin meningkatnya proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah.

Gambar 3. 1 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023



Jika ditelisik lebih jauh, khususnya pada realisasi PAD maka selama periode 2019 – 2023, terlihat bahwa proporsi komponen pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PAD dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2019 proporsi penerimaan Pajak Daerah mencapai 74,79% meningkat menjadi 81,95%. Sementara itu, untuk komponen Retribusi Daerah. Bagi Hasil Laba Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah proporsinya berfluktuasi selama periode ini.

Gambar 3. 2 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2023



3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diperuntukan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan bukan Pelayanan Dasar. Dalam mengalokasikan belanja daerah diprioritaskan untuk memdandani urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Untuk urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan belanja sesuai kebutuhan daerah. Sedangkan untuk urusan pilihan alokasi belanja disesuaikan dengan prioritas daerah serta potensi yang dimiliki.

Belanja daerah diklasifikasikan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.



Belanja Operasi merupakan belanja untuk keperluan rutin pemerintah daerah dan memberi manfaat jangka pendek yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal merupakan belanja yang dialokasikan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap maupun asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Belanja modal ini dapat berupa modal tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan jalan serta asset tetap lainnya. Belanja Tidak Terduga diperuntukan untuk mendanai keperluan-keperluan mendesak dan urgen yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan Belanja Transfer diperuntukan bagi penganggaran belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah lain serta belanja bagi hasil kepada pemerintah daerah lain/dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam 5 tahun terakhir ini realisasi belanja daerah sangat fluktuatif dan cenderung menurun. Jika pada tahun 2019 realisasi belanja daerah mencapai 2.974,06 milyar rupiah, sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 2.957,86 milyar. Selama periode 2019 – 2023 realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 3.818,87 milyar rupiah atau terjadi peningkatan realisasi belanja sebesar 27,89% dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan pada tahun tersebut Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 dari Pemerintah sebesar 700 milyar rupiah, sehingga terjadi peningkatan anggaran belanja daerah dari 3.643,38 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 4.154,80 milyar rupiah di tahun



2021 atau naik 14,04%. Gambaran tentang realisasi belanja daerah selama 5 tahun terakhir ini dapat diikuti pada Tabel 3.3 berikut ini.

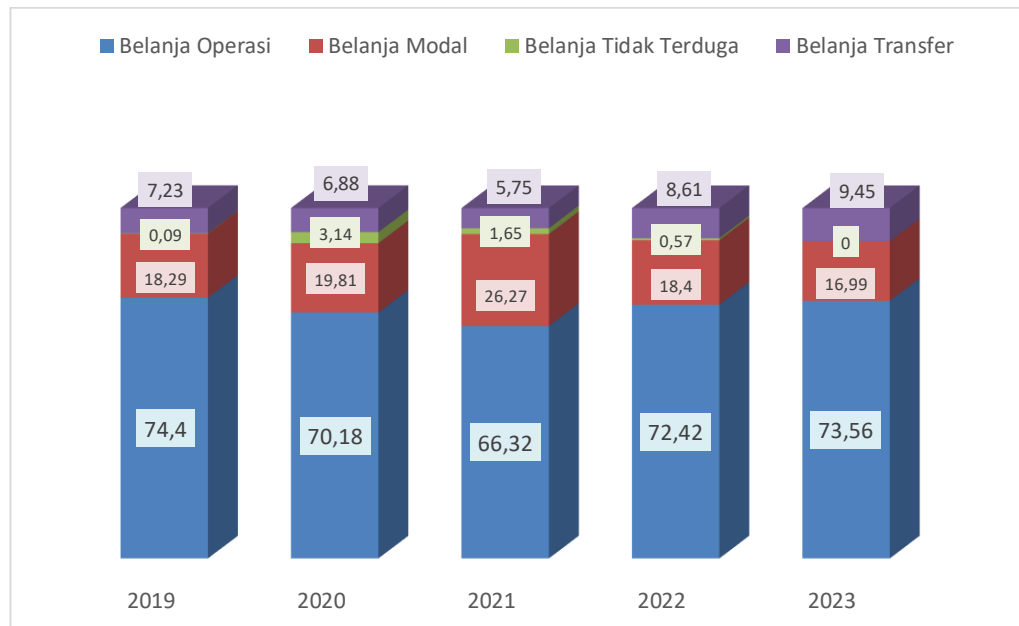
Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

NO.	URAIAN	TAHUN					TUMBUH (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
I.	BELANJA OPERASI	2.212.673,00	2.095.676,28	2.532.850,64	2.210.972,75	2.175.709,86	-1,67
	Belanja Pegawai	978.490,39	948.885,40	953.797,76	1.020.252,52	1.014.729,18	3,70
	Belanja Barang	695.841,68	673.020,75	995.571,81	1.028.190,20	950.493,39	36,60
	Belanja Bunga	-	1.295,00	8.128,61	1.264,22	1.011,37	-21,90
	Belanja Subsidi	-	-	323,59	488,17	254,57	-21,33
	Belanja Hibah	538.310,92	471.393,32	571.365,27	151.872,11	203.941,77	-62,11
	Belanja Bantuan Sosial	30,00	1.081,81	3.663,61	8.905,54	5.279,57	17498,58
II.	BELANJA MODAL	543.819,81	591.452,18	1.003.241,93	561.815,85	502.641,93	-7,57
	Belanja Modal Tanah	16.451,19	8.329,00	33.977,68	1.517,57	6.236,59	-62,09
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.502,20	142.270,43	158.549,63	102.302,89	104.072,47	47,62
	BM Bangunan dan Gedung	147.419,35	153.051,64	200.748,94	290.634,63	232.746,21	57,88
	BM Jalan, irigasi dan Jaringan	300.031,06	250.172,22	607.004,43	165.583,66	155.997,25	-48,01
	BM Aset Tetap Lainnya	9.416,01	37.628,89	2.961,23	1.777,11	2.167,50	-76,98
	BM Aset Lainnya	-	-	-	-	1.421,91	0,00
III.	BEALNJA TIDAK TERDUGA	2.551,25	93.681,26	63.047,80	17.420,25	-	-100,00
	Belanja Tidak Terduga	2.551,25	93.681,26	63.047,80	17.420,25	-	-100,00
IV.	BELANJA TRANSFER	215.017,90	205.330,03	219.726,74	262.966,51	279.508,88	29,99
	Belanja Bagi hasil Kab/Kota	209.617,27	205.330,03	212.850,34	258.748,21	279.508,88	33,34
	Belanja Bantuan Keuangan	5.400,63	-	6.876,40	4.218,30	-	-21,89
	JUMLAH BELANJA	2.974.061,95	2.986.139,75	3.818.867,10	3.053.175,36	2.957.860,67	-0,54

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini belanja daerah didominasi untuk belanja operasi yaitu mencapai berkisar 70 – 74% dari total belanja daerah. Dari belanja operasi tersebut hampir 50%-nya diperuntukan bagi belanja pegawai yang merupakan belanja gaji dan tunjangan ASN dan DPRD serta Tambahan Penghasilan Pegawai. Selama periode ini belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai kecuali di tahun 2022 yang proporsi belanja Barang dan Jasa lebih besar dari belanja Pegawai. Untuk Belanja Modal selama periode ini rata-rata mencapai 19,95% dari total belanja daerah. Hanya di tahun 2021 yang proporsi belanja modal mencapai 26,27% dikarenakan adanya pinjaman PEN yang Sebagian besar belanja kegiatan PEN diperuntukan untuk belanja modal.

Gambaran tentang proporsi belanja daerah selama 5 tahun terakhir ini dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 3. 3 Proporsi Komponen Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023



Untuk belanja modal selama tahun 2019 – 2021 belanja Modal didominasi oleh belanja modal Jalan dan Jaringan Jalan yang rata-rata mencapai 52,66% per tahun. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 realisasi belanja modal dominasinya bergeser ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu mencapai 51,73% dan 46,30%.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian



Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Selama ini sumber utama Penerimaan Pembiayaan Daerah didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Selama periode 2019 - 2023 SiLPA menjadi sumber utama penerimaan pembiayaan daerah dan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun 2020 dan 2021 penerimaan pembiayaan daerah selain dari SiLPA juga bersumber dari Penerimaan Pinjaman Daerah dalam rangka PEN akibat pandemi Covid -19. Selama periode 2019 – 2023 Penerimaan pembiayaan tertinggi di capai pada tahun 2021 yaitu 851,69 milyar rupiah atau naik 151,74% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, prosentase kenaikan di tahun 2021 ini masih lebih rendah dari kenaikan tahun 2020 yang sebesar 1.088,21% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. 4 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

NO.	URAIAN	TAHUN					TUMBUH (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
I.	PEMBIAYAAN PENERIMAAN	28.473,55	338.326,48	851.689,06	294.939,16	152.779,27	436,57
	SiLPA	28.473,55	163.326,48	343.328,07	294.939,16	152.779,27	436,57
	Pinjaman Daerah		175.000,00	508.360,99	-	-	190,49
	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-			
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	32.775,00	6.000,00	4.500,00	138.172,23	321,58
	Penyertaan Modal	-	32.775,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	-95,42
	Pembayaran Pokok Utang	-				136.672,23	
	PEMBIAYAAN NETTO	28.473,55	305.551,48	845.689,06	290.439,16	14.607,04	-48,70

Dari sisi pengeluaran pembiayaan selama periode 2019 – 2023 hanya diperuntukan untuk Penyertaan Modal bagi BUMD kecuali di tahun 2023 yang pengeluaran pembiayaan selain



diperuntukan bagi penyertaan modal kepada BUMD juga digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman PEN yang jatuh tempo.

3.2. Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah

Analisis Kesehatan keuangan dilakukan dengan menghitung rasio Kesehatan keuangan daerah dari sisi penerimaan yaitu Kemandirian keuangan daerah dan ruang fiskal. Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari pemerintah pusat. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah terwujud dari kondisi fiskal daerah yang sehat yakni pada pendapatan daerah yang memadai, belanja daerah yang berkualitas, dan pembiayaan yang memadai dan digunakan secara bijaksana.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan pada aspek pendapatan daerah diukur melalui seberapa besar peran PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam nilai rasio kemandirian keuangan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Pada periode tahun 2019-2023 nilai rasio kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Maluku berfluktuasi. Pada tahun 2019, rasio kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Maluku mencapai 15,53 persen yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mendapatkan pendapatan secara mandiri dari



sumber pendapatan sendiri. Nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai 21,21 persen pada tahun 2023. Rasio kemandirian keuangan Maluku tertinggi dicapai pada tahun 2022 yang mencapai 21,88 persen karena nilai pendapatan PAD meningkat seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sedangkan pendapatan total justru mengalami penurunan akibat penurunan Dana Transfer Pemerintah yaitu DAK sebesar 39,21 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. 5 Rasio Kemandirian Keuangan dari Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Total (Rp .000.000)	Pendapatan Asli Daerah (Rp .000.000)	Rasio Kemandirian Keuangan (%)
2019	3.108.914,88	482.805,59	15,53
2020	3.045.825,25	545.752,87	17,92
2021	3.268.117,20	550.808,91	16,85
2022	2.915.515,47	637.948,96	21,88
2023 *)	3.039.622,42	644.603,16	21,21

Selain dari aspek PAD terhadap total pendapatan, kemandirian keuangan juga tercermin dari kemampuan mendanai belanja pemerintah yang secara kuantitatif terlihat pada struktur keuangan pemerintah daerah yakni pada rasio antara jumlah penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap jumlah pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019 rasionya mencapai 1,05 dan meningkat di tahun 2020 menjadi 1,12 dan kemudian terus menurun sampai tahun 2023 menjadi



1,03. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Tahun	Total Pendapatan (Rp.juta)	Penerimaan Pembiayaan (Rp.juta)	Total Penerimaan (Rp.juta)	Total Belanja (Rp.juta)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp.juta)	Total Pengeluaran (Rp.juta)	Rasio
2019	3.108.914,88	28.473,55	3.137.388,43	2.974.061,95	-	2.974.061,95	1,05
2020	3.045.825,25	338.326,48	3.384.151,72	2.986.139,75	32.775,00	3.018.914,75	1,12
2021	3.268.117,20	851.689,06	4.119.806,26	3.818.867,10	6.000,00	3.824.867,10	1,08
2022	2.915.515,47	294.939,16	3.210.454,63	3.053.175,36	4.500,00	3.057.675,36	1,05
2023*	3.039.622,42	152.779,27	3.192.401,69	2.957.860,67	138.172,23	3.096.032,89	1,03

*) 2023 (unaudited)

Meskipun kemampuan mendanai belanja daerah yang masih fluktuatif, dan cenderung menurun selama periode 2019 – 2023 namun ruang fiskal Pemerintah Provinsi Maluku meskipun berfluktuasi namun mengalami tren peningkatan. Ruang Fiskal dapat menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program atau kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan Ruang Fiskal ini diperoleh dengan mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Ruang fiskal daerah ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Ruang Fiskal Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Tahun	Total Pendapatan (Rp.Juta)	Pendapatan Hibah (Rp.Juta)	DAK (Rp.Juta)	Belanja Pegawai (Rp. Juta)	Ruang Fiskal (%)
2019	3.108.914,88	3.563,57	843.459,43	978.490,39	41,28
2020	3.045.825,25	1.207,31	897.362,67	948.885,40	39,34
2021	3.268.117,20	1.558,15	1.108.154,65	953.797,76	36,86
2022	2.915.515,47	3.633,92	673.605,05	1.020.252,52	41,78
2023*)	3.039.622,42	224,78	744.021,87	1.014.729,18	42,13



**) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 (unaudited)*

Ruang fiskal Daerah Provinsi Maluku cenderung meningkat dari 41,28 persen pada 2019 menjadi 42,13 persen di tahun 2023. Kondisi ruang fiskal Provinsi Maluku sempat mengalami penurunan dimasa pandemi Covid-19 menjadi 39,34 persen pada 2020 dan menurun lagi menjadi 36,86 persen pada tahun 2021. Namun berkat upaya-upaya pemerintah yang terarah dan tepat dalam menangani pandemi covid serta dampaknya sehingga kondisi keuangan daerah kembali membaik di tahun 2022 dan 2023.

3.2.2. Belanja Daerah

Di sisi belanja daerah, analisis kemandirian keuangan dilakukan dengan melihat bagaimana kualitas belanja Pemerintah Provinsi Maluku. Kualitas ini dapat tercermin melalui rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja barang dan jasa terhadap total belanja, dan rasio belanja modal per total belanja. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur seperti belanja pegawai.

Belanja pegawai merupakan belanja operasional terbesar pada Pemerintah Provinsi Maluku. Namun demikian jika dilihat dari rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah, tren pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi dan cenderung semakin meningkat.



Semakin tinggi rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah menunjukkan semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai pada APBD. Angka ini juga menunjukkan bahwa belanja pegawai di Provinsi Maluku sudah melampaui ketentuan pemerintah mengenai batas maksimal belanja pegawai pada APBD yakni setinggi-tingginya 30 persen dari total belanja daerah.

Tabel 3. 8 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Tahun	Belanja Pegawai (Rp.Juta)	Total Belanja (Rp.Juta)	Rasio Belanja Pegawai (%)
2019	978.490,39	2.974.061,95	32,90
2020	948.885,40	2.986.139,75	31,78
2021	953.797,76	3.818.867,10	24,98
2022	1.020.252,52	3.053.175,36	33,42
2023*)	1.014.729,18	2.957.860,67	34,31

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 (unaudited)

Dalam konteks belanja daerah, pemerintah daerah merupakan salah satu pelaku ekonomi di samping sektor swasta, sektor rumah tangga, dan luar negeri. Belanja pemerintah (*government spending*) dapat menjadi penggerak mesin ekonomi daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan demikian kebijakan penggunaan APBD untuk menggerakkan ekonomi menunjukkan semakin berkualitasnya belanja suatu pemerintah daerah.

Kualitas belanja pemerintah dapat diukur dari penggunaan APBD untuk belanja modal, barang, dan jasa.



Penggunaan ini tercermin melalui rasio belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio menunjukkan semakin negatif pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja barang dan jasa pada periode 2019 – 2023 rata-rata mencapai 27,56 persen dari total belanja APBD dengan tren menunjukkan peningkatan. Rasio yang tertinggi terjadi pada 2022 dikarenakan pengalihan Belanja Tidak Terduga ke barang dan jasa untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Rasio belanja barang dan jasa daerah ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 3. 9 Rasio Belanja Barang dan Jasa Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Tahun	Belanja Barang & Jasa (Rp.Juta)	Total Belanja (Rp.Juta)	Rasio Belanja Barang & Jasa (%)
2019	695.841,68	2.974.061,95	23,40
2020	673.020,75	2.986.139,75	22,54
2021	995.571,81	3.818.867,10	26,07
2022	1.028.190,20	3.053.175,36	33,68
2023*)	950.493,39	2.957.860,67	32,13

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 (unaudited)

Sedangkan untuk rasio belanja modal dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Rata-rata rasio Belanja modal Pemerintah Provinsi Maluku pada periode 2019-2023 sebesar 19,95 persen dari total belanja APBD. Belanja modal Pemerintah Provinsi Maluku digunakan untuk penambahan aset yang prioritas dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat. Pada periode ini aset tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku cukup untuk memenuhi



penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku diutamakan pada pemeliharaan aset yang sudah dimiliki. Biaya pemeliharaan aset tersebut sebagian besar dikeluarkan melalui belanja barang dan jasa untuk pemeliharaan. Selain itu belanja modal yang merupakan belanja produktif juga diarahkan melalui bantuan keuangan infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 3. 10 Rasio Belanja Modal Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Tahun	Belanja Modal (Rp.Juta)	Total Belanja (Rp.Juta)	Rasio Belanja Modal (%)
2019	543.819,81	2.974.061,95	18,29
2020	591.452,18	2.986.139,75	19,81
2021	1.003.241,93	3.818.867,10	26,27
2022	561.815,85	3.053.175,36	18,40
2023 *)	502.641,93	2.957.860,67	16,99

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 (unaudited)

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dalam konteks pembiayaan daerah adalah kemampuan daerah untuk menutup defisit APBD tanpa bergantung dari dana APBN. Hal tersebut karena dalam hal APBD mengalami defisit tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut. Tabel 3.13 menunjukkan surplus/defisit pada APBD Pemerintah Provinsi Maluku dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2023. Surplus/defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Besaran defisit yang ditunjukkan dengan nilai negatif menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah, atau dengan kata lain belanja lebih besar dari pendapatan.



Selama periode tahun 2019 – 2023 Provinsi Maluku mengalami dua kali defisit APBD yaitu pada Tahun 2021 sebesar Rp 550,75 Miliar atau sebesar 16,85 persen dan Tahun 2022 sebesar Rp 137,66 Miliar atau sebesar 4,72 persen jika dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun bersangkutan. Nilai ini masih di bawah batas defisit maksimal APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan bagi daerah dengan kategori kapasitas fiskal sangat tinggi yakni sebesar 5% untuk tahun 2019 dan 4,5% untuk tahun 2020.

Tabel 3. 11 Surplus/Defisit APBD Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Tahun	Total Pendapatan (Rp.Juta)	Total Belanja (Rp.Juta)	Surplus/Defisit (Rp.Juta)
2019	3.108.914,88	2.974.061,95	134.852,93
2020	3.045.825,25	2.986.139,75	59.685,49
2021	3.268.117,20	3.818.867,10	-550.749,91
2022	2.915.515,47	3.053.175,36	-137.659,89
2023 *)	3.039.622,42	2.957.860,67	81.761,76

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 (unaudited)

Upaya untuk menutup defisit APBD yang terjadi adalah melalui pembiayaan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sumber penerimaan pembiayaan yang dapat menjadi alternatif pendanaan antara lain SiLPA tahun sebelumnya, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Di antara alternatif sumber penerimaan pembiayaan tersebut SiLPA merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman karena SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan. SiLPA terbentuk karena ada selisih lebih realisasi penerimaan



dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jika dibandingkan dengan total pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku maka diperoleh rasio SiLPA. Rasio SiLPA terhadap pendapatan selain menggambarkan besaran belanja yang tertunda pelaksanaannya pada tahun sebelumnya juga dapat menggambarkan jumlah realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang lebih besar dari proyeksinya. Tabel 3.12 menunjukkan jumlah SiLPA Pemerintah Provinsi Maluku pada periode 2019 hingga 2023.

Tabel 3. 12 Rasio SiLPA terhadap Total Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

Tahun	SiLPA (Rp.Juta)	Total Pendapatan (Rp.Juta)	Rasio
2019	28.473,55	3.108.914,88	0,009
2020	163.326,48	3.045.825,25	0,054
2021	343.328,07	3.268.117,20	0,105
2022	294.939,16	2.915.515,47	0,101
2023 *)	152.779,27	3.039.622,42	0,050

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 (unaudited)

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2026

3.3.1. Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan. Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya shock pada kondisi keuangan daerah terutama pendapatan daerah. Namun demikian, diharapkan tahun 2024 pendapatan daerah ditargetkan mulai pulih dan mengalami peningkatan. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 6,10 – 6,71 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2019-2023, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Maluku tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,20 triliun rupiah. PAD



ditargetkan sebesar 757,45 milyar rupiah, pendapatan transfer sebesar 2,44 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 420,00 juta rupiah.

Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar 3,18 triliun rupiah, terdiri dari Belanja Operasi sebesar 2,47 trilyun rupiah; Belanja Modal sebesar 406,58 milyar rupiah; Belanja Tidak Terduga sebesar 10 miliar rupiah; dan Belanja Transfer sebesar 290,06 milyar rupiah.

Tabel 3. 13 Target Pendapatan dan Belanja Provinsi Maluku Tahun 2024

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1.	PAD	757.451.808.188,00
1.1.	Pajak Daerah	526.164.095.518,00
1.2.	Retribusi Daerah	29.984.560.000,00
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	63.050.867.181,00
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	138.252.285.489,00
2.	Pendapatan Transfer	2.441.784.793.000,00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.441.784.793.000,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	420.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	3.199.656.601.188,00
1.	Belanja Operasi	2.471.125.726.992,00
2.	Belanja Modal	406.582.066.488,00
3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
4.	Belanja Transfer	290.060.442.231,00
5	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	3.177.768.235.711,00
6	Surplus (defisit)	21.888.365.477,00

3.3.2. Arah Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2025 -2026

Memperhatikan perkembangan ekonomi global, asumsi-asumsi makro ekonomi nasional dan daerah di tahun 2024 serta dengan melihat performa realisasi pendapatan daerah di tahun 2023 maka pendapatan daerah diharapkan lebih meningkat di tahun-tahun medatang melalui serangkaian kebijakan dan upaya Ekstensifikasi maupun Intensifikasi potensi



dan sumber-sumber pendapatan yang ada.

Pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar 3,18 trilyun rupiah sedikit lebih rendah dari target pendapatan tahun 2024 yang sebesar 3,20 trilyun rupiah atau turun 0,49 persen. Sedangkan untuk tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3,25 trilyun rupiah atau naik 2,10 persen dari tahun 2025. Gambaran tentang pendapatan daerah tahun 2025 dan 2026 dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3. 14 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)		
		TAHUN 2025	TAHUN 2026	Bertambah/ Berkurang
1		2	3	4
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH		707.506.204.020	713.948.965.038	6.442.761.018
1	Pajak Daerah	533.646.437.867	536.314.670.056	2.668.232.189
2	Retribusi Daerah	25.112.397.551	26.136.926.380	1.024.528.829
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.549.368.602	24.549.368.602	-
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124.198.000.000	126.948.000.000	2.750.000.000
PENDAPATAN TRANSFER		2.553.886.677.000	2.609.396.931.000	55.510.254.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.553.886.677.000	2.609.396.931.000	55.510.254.000
	Bagi Hasil Pajak dan SDA	74.487.407.000	76.559.718.000	2.072.311.000
	Dana Alokasi Umum	1.697.345.287.000	1.745.328.476.000	47.983.189.000
	Dana Alokasi Khusus	782.053.983.000	787.508.737.000	5.454.754.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		250.000.000	300.000.000	50.000.000
1	Pendapatan Hibah	250.000.000	300.000.000	50.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		3.261.642.881.020	3.323.645.896.038	62.206.279.832

Sumber: Bapenda Provinsi Maluku, 2023 (hasil analisis)



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa target pendapatan Provinsi Maluku untuk tahun 2025 dan 2026 masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah yaitu pada kisaran 78 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) masih merupakan komponen terbesar dari pendapatan transfer pemerintah yang kemudian diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan di tahun 2025 - 2026, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi:

- a. Perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan terkait Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- b. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah
- c. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah



- d. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment
- e. Law enforcement/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui peningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital, memiliki integritas, dan menambah SDM pada JFU tertentu, serta memperluas pelayanan yang berbasis digital.
- g. Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD
- h. Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam rangka pertukaran informasi dan data dengan instansi vertikal dan lembaga terkait.
- i. Perbaikan tata kelola (penatausahaan, pengamanan, sertifikasi) asset daerah
- j. Peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah sebagai prasyarat untuk memperoleh dana insentif fiscal.

2. Ekstensifikasi:

- a. Identifikasi peluang sumber-sumber penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perluasan basis dan potensi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

3.3.3. Arah Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah 2025 – 2026

Kebijakan belanja daerah Provinsi Maluku tahun 2025-



2026 utamanya diarahkan pada pencapaian tujuan daerah untuk mewujudkan Maluku yang maju dan sejahtera serta untuk keberlanjutan pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) Daerah Provinsi Maluku dengan fokus utama pada pencapaian sasaran daerah Provinsi Maluku, antisipasi terhadap dampak tantangan dinamika geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global, serta kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam, Sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Sebagaimana arah kebijakan belanja daerah tersebut, maka struktur belanja daerah Maluku tahun 2025-2026 sebagai berikut.

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai termasuk belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk



mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;

- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk dukungan pelaksanaan pilkada serentak, menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.



2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset; Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau



- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa) meliputi:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Untuk itu, proyeksi kebutuhan belanja daerah tahun 2025 – 2026 secara indikatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 15 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	TAHUN 2025	TAHUN 2026	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI & MODAL	2.885.061.357.307	2.942.561.223.925	57.499.866.618
BELANJA TAK TERDUGA	15.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000
BELANJA TRANSFER	299.909.298.081	301.408.844.571	1.499.546.491
JUMLAH BELANJA	3.199.970.655.388	3.263.970.068.496	63.999.413.109

Sumber: TAPD Provinsi Maluku 2023, (hasil analisis)

Tabel di atas menunjukkan bahwa belanja daerah tahun



2025 -2026 di proyeksikan sebesar 3,20 dan 3,24 trilyun rupiah, lebih tinggi dari target tahun 2024 yang sebesar 3,18 trilyun rupiah. Peningkatan belanja ini sejalan dengan peningkatan proyeksi pendapatan daerah yang diharapkan bersumber dari Dana Transfer Pemerintah.

3.3.4. Arah Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2025 - 2026

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan untuk Tahun 2025 – 2026 hanya direncanakan untuk pembayaran pokok pinjaman PEN kepada PT. SMI yang setiap tahunnya di angsur sebesar 136,67 milyar rupiah. Proyeksi pembiayaan daerah Maluku tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3. 16 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026

URAIAN		JUMLAH		
		TAHUN 2025	TAHUN 2026	Bertambah/ (Berkurang)
1		2	3	4
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		75.000.000.000	50.000.000.000	(25.000.000.000)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000	50.000.000.000	(25.000.000.000)
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		136.672.225.632	136.672.225.632	-
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	136.672.225.632	136.672.225.632	-
2	Penyertaan modal			
PEMBIAYAAN NETTO		(61.672.225.632)	(86.672.225.632)	(25.000.000.000)

Sumber: TAPD Provinsi Maluku, 2023 (hasil analisis)

3.3.5. Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif 2025 - 2026

Berdasarkan analisis kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kerangka pendanaan daerah Maluku secara indikatif untuk tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 17 Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)		
		TAHUN 2025	TAHUN 2026	Bertambah/ Berkurang)
1		2	3	4
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH		707.506.204.020	713.948.965.038	6.442.761.018
1	Pajak Daerah	533.646.437.867	536.314.670.056	2.668.232.189
2	Retribusi Daerah	25.112.397.551	26.136.926.380	1.024.528.829
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.549.368.602	24.549.368.602	-
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124.198.000.000	126.948.000.000	2.750.000.000
PENDAPATAN TRANSFER		2.553.886.677.000	2.609.396.931.000	55.510.254.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.553.886.677.000	2.609.396.931.000	55.510.254.000



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)		
		TAHUN 2025	TAHUN 2026	Bertambah/ Berkurang)
1		2	3	4
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		250.000.000	300.000.000	50.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		3.261.642.881.020	3.323.645.896.038	62.206.279.832
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI & MODAL		2.885.061.357.307	2.942.561.223.925	57.499.866.618
BELANJA TAK TERDUGA		15.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000
BELANJA TRANSFER		299.909.298.081	301.408.844.572	1.499.546.490
JUMLAH BELANJA		3.199.970.655.388	3.236.970.068.496	63.999.413.108
SURPLUS/DEFISIT		61.672.225.632	59.675.827.542	1.996.398.090
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		75.000.000.000	50.000.000.000	(25.000.000.000)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000	50.000.000.000	(25.000.000.000)
2	Pencairan dana cadangan			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		136.672.225.632	136.672.225.632	
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	136.672.225.632	136.672.225.632	
2	Penyertaan modal			
PEMBIAYAAN NETTO		(61.672.225.632)	(86.672.225.632)	(25.000.000.000)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0	0	0

Sumber: TAPD Provinsi Maluku, 2023 (hasil analisis)



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 -2026, dilakukan awal melalui proses mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah dengan menganalisis data dan informasi pembangunan daerah, serta memperhatikan capaian kinerja, baik capaian kinerja makro daerah maupun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang telah tersaji pada bab sebelumnya, dimana dari hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah kemudian akan dirumuskan isu strategis daerah dengan memperhatikan lingkungan strategis (internal & eksternal) dan juga memperhatikan kebijakan yang ada.

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama tahun 2025 – 2026 oleh karenanya analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian penting untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk hal tersebut maka pada bab ini akan menguraikan permasalahan-permasalahan yang mencakup empat aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing serta permasalahan menurut urusan pemerintahan daerah dan isu-isu strategis baik global nasional maupun isu strategis pembangunan daerah.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika perhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk didalamnya`.



Penuntasan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu dari esensi tujuan pembangunan daerah, sehingga upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah yang dimana mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2019-2024. Permasalahan pembangunan daerah Provinsi Maluku dianggap masih relevan dalam dua tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut :

4.1.1 Belum Optimalnya Akses dan Layanan Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan memperlihatkan bahwa angka harapan hidup (AHH) Provinsi Maluku tahun 2023 sebesar 70,45 tahun, juga lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Nasional 77,94 tahun. Angka Harapan Hidup Provinsi Maluku yang masih rendah menunjukkan bahwa kinerja pembangunan sektor kesehatan yang belum maksimal yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum optimalnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita, masih rendahnya Rasio Dokter Per Satuan Penduduk, dan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan belum optimal.

Keterbatasan aksesibilitas menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelayanan fasilitas kesehatan hingga menyentuh masyarakat pelosok. Dengan demikian, masih banyak warga di daerah pelosok yang belum tersentuh pelayanan fasilitas kesehatan secara maksimal.



4.1.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Masih Tinggi

Sampai dengan saat ini kemiskinan di Provinsi Maluku masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Provinsi Maluku yang masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Pada Maret 2023 persentase penduduk miskin di Maluku sebesar 16,42 persen, naik 0,19 persen daripada bulan september 2022, dan lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 9,36 persen.

Melihat dari persentase penduduk miskin berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku didominasi oleh penduduk yang berada di perdesaan sebesar 26,4 persen atau 258,28 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan sebesar 5,49 persen atau 43,33 ribu orang sementara tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari daerah perkotaan.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia Timur, maka angka kemiskinan di Maluku juga termasuk tinggi di mana kemiskinan Maluku berada di peringkat keempat terbawah setelah Papua (26,03%), Papua Barat (20,49%), dan Nusa Tenggara Timur (19,96%).

Gambaran dari masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Maluku sangat dipengaruhi oleh permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan serta permasalahan infrastruktur dasar yang belum merata pada setiap wilayah kepulauan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

4.1.3 Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran daerah yang diukur dengan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada tahun 2023 mencapai



6,31 Persen dan berada diatas rata-rata nasional dan tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia Timur. Merujuk pada data BPS tahun 2023 terlihat bahwa masih tingginya tingkat pengangguran Provinsi Maluku tersebut terutama disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Disamping itu ketersediaan Pendidikan vokasional belum mampu menciptakan *link and macth* antara kurikulum vokasional dengan kebutuhan dunia industri. Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan mempunyai pola distribusi yang hampir sama dari tahun ke tahun. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas , yaitu sebesar 31,46 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 17,30 persen. Hal ini menggambarkan kondisi pasar kerja Provinsi Maluku saat ini sebagian besar diisi oleh mereka dengan pendidikan rendah. Selain itu, ketersediaan kesempatan kerja dari pengelolaan kegiatan dan sektor ekonomi yang masih berorientasi padat modal dari pada padat karya dan adanya kondisi ekonomi nasional dan daerah yang tidak stabil.

Penyerapan tenaga kerja tahun 2023 utamanya pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menyerap tenaga kerja sebesar 31,60 persen diikuti oleh sektor administrasi pemerintah dan jasa sebesar 21,60 persen. Dibandingkan Agustus 2022, kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,40 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan terbesar yaitu sebesar (1,94 persen poin).

4.1.4 Belum Meratanya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek kunci bagi keberhasilan pembangunan olehnya itu tantangan pendidikan yang relevan dan berdaya saing terus menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan



masyarakat. Pendidikan yang belum merata di Maluku menjadi salah satu masalah yang dihadapi. faktor yang menyebabkan pendidikan di maluku kurang merata adalah kemiskinan, SDM (sumber daya manusia), rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi dan sarana prasarana sekolah.

Mutu pendidikan di Maluku masih tertinggal jika dibandingkan dengan mutu pendidikan provinsi lainnya. Disparitas kualitas dan aksesibilitas pendidikan baik di desa tidak sebanding dengan pendidikan di kota, masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta tenaga pengajar yang jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan di kota. Untuk itu permasalahan Pendidikan yang dihadapi harus mulai dicarikan solusinya, kualitas pendidikan di Maluku belum merata.

Angka rata-rata lama sekolah provinsi maluku pada tahun 2022 sebesar 14 tahun dengan kata lain bahwa lamanya sekolah hanya sampai SMP, Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Maluku yaitu masih rendahnya pemeratan akses layanan Pendidikan dan masih rendahnya angka partisipasi murni masyarakat.

Berdasarkan data susenas pada tahun 2021 penduduk Maluku yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 508,78 ribu jiwa (27,13%). Kemudian sebanyak 244,71 ribu jiwa (13,05%) penduduk di provinsi dengan Ibu Kota Ambon tersebut yang merupakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Terdapat pula 339,21 ribu jiwa (18,09%) penduduk Maluku yang telah menamatkan Sekolah Dasar (SD). Sementara, 274,72 ribu jiwa (14,65%) yang belum tamat SD. Ada pula 368,03 ribu jiwa (19,62%) yang tidak atau belum sekolah. Berdasarkan data BPS terdapat 450 jiwa (0,02%) penduduk Maluku adalah lulusan S3, sebanyak 5,24 ribu jiwa (0,28%) yang berpendidikan hingga S2, dan 98,93 ribu jiwa (5,27%) yang merupakan lulusan S1.

Angka partisipasi sekolah di terendah terjadi pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat yakni sebesar 79,9 persen, selain itu akses pendidikan di maluku masih perlu mendapat perhatian, sehingga dapat



meningkatkan angka kelulusan pada jenjang perguruan tinggi atau dapat melanjutkan sekolah. Sementara dari sisi kualitas guru dan komitmen mengajar terdapat lebih dari 50 persen guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dan persentase Gedung sekolah dalam keadaan baik masih di bawah 30 persen

4.1.5 Ekonomi Maluku Masih Mengandalkan Sektor Primer

Kinerja ekonomi Maluku pada kuartal III tahun 2023 mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 5,69 persen dimana pertumbuhan ini terjadi hampir pada sebahagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peran dominan pada perekonomian Maluku juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,96 persen. Ekonomi provinsi maluku sejatinya mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, namun kontribusi sektor utama belum cukup signifikan untuk meningkatkan perekonomian daerah hal ini dikarenakan masih tingginya ketergantungan daerah pada sektor pertanian dan perikanan mengakibatkan rendahnya nilai tambah yang diperoleh daerah.

Kondisi lain yakni sebagian besar penduduk masih bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya lapangan pekerjaan di sektor lain, minimnya kualifikasi pendidikan, dan minimnya akses terhadap kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, sektor primer masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka

Kebijakan transformasi struktur perekonomian merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan modernisasi kegiatan ekonomi dan merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan perekonomian. Transformasi struktur perekonomian adalah proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa yang pada masing-masing sektor mengalami perubahan yang berbeda.

Pada umumnya, transformasi yang terjadi pada negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri,



atau terjadinya transformasi dari sektor primer kepada sektor non primer (sekunder dan tersier). Struktur perekonomian adalah besar *share* lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian maka dapat diketahui konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah. Seiring berjalannya waktu akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian yang ditandai dengan pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonomi dalam hal ini Transformasi ekonomi adalah titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari *lower productivity* ke *higher productivity* atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sektor tersebut.

Seiring dengan kebijakan transformasi yang digalakan Beberapa sektor unggulan di Provinsi Maluku adalah perikanan, pertanian, pariwisata dan ESDM di mana permasalahan pada urusan pemerintahan tersebut harus menjadi perhatian bagi *stakeholder* bersangkutan. Pada sektor perikanan di mana Maluku kaya akan sumber daya laut, namun masih memiliki kendala yakni dalam pengolahan dan pemasaran hasil ikan serta ketersediaan sarana prasarana memadai bagi nelayan. Hal ini tentu saja menjadikan kesejahteraan nelayan tidak maksimal pencapaiannya. Adapun hal yang sama juga dialami oleh sektor pertanian dengan permasalahan pada pengolahan produk yang memiliki nilai tambah beserta pemasarannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya hilirisasi sehingga terwujud integrasi antara sektor industri dengan pertanian maupun perikanan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, kebijakan yang harus didorong oleh pemerintah daerah adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor primer. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan teknologi dan infrastruktur yang mendukung sektor



primer, meningkatkan akses terhadap pasar serta memberikan dukungan yang lebih besar pada sektor primer.

4.1.6 Infrastruktur Belum Merata Dan Memadai Serta Konektivitas Antar Pulau Yang Masih Rendah

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam suatu wilayah. Hal tersebut menjadi suatu “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Provinsi Maluku mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, khususnya daerah terpelosok/terpencil.

Salah satu kendala pembangunan Provinsi Maluku yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah termasuk penyediaan infrastruktur prasarana sarana utilitas umum. Masih minimnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Maluku menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah juga masih belum optimal dikarenakan permasalahan kondisi geografis.

Salah satu tugas pokok aparaturnya pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan hingga pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada pula kinerja pelayanan aparaturnya pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain: kinerja dalam perencanaan pembangunan, administrasi keuangan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Segala bentuk kinerja aparaturnya tersebut akan membuahkan hasil optimal manakala terdapat ketersediaan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan merata ke seluruh wilayah Maluku sebagai wilayah kepulauan.



Capaian infrastruktur terkait perumahan dan permukiman masih belum optimal diwujudkan di Maluku. Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak maluku (76,77%) berada di bawah angka Nasional yang mencapai 80,29 persen pada tahun 2021. Selain itu, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau juga berada di bawah angka Nasional yang mencapai 60,69 persen. Secara umum, akses terhadap sanitasi layak dan hunian layak di Maluku di bawah rata-rata Indonesia Bagian Timur, namun sumber air minum layak di Maluku sudah cukup baik dibandingkan wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman layak penting kiranya menjadi salah satu concern dalam menentukan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

4.1.7 Kesenjangan Antara Wilayah masih Tinggi

Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,401 dari tahun 2021 dengan nilai indeks 0,396(kesenjangan tinggi). Hal ini menunjukkan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Maluku belum merata pencapaiannya, ditandai dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dalam menjamin kelancaran distribusi barang dan mobilitas manusia antar daerah, masih kurangnya peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan mengoptimalkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Provinsi Maluku. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi wilayah tertentu, alokasi investasi yang tidak merata, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah berdampak pada semakin tingginya tingkat ketimpangan dan perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi geografis antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar provinsi. Disamping itu, jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir belum optimal, interkonektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum



optimal, infrastruktur transportasi, pertanian, dan energi pada daerah-daerah kepulauan dan terpencil juga belum optimal.

Sedangkan untuk capaian Indeks Infrastruktur Provinsi Maluku Tahun 2022 mencapai 81,51 yang diukur dari komponen komposit yang capaiannya yang masih minim antara lain: Kemantapan Jalan (62,37), Rasio Elektrifikasi (97,49) dan Rasio Jaringan Irigasi (42,5).

4.1.8 Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Serta Ancaman Bencana

Belum optimalnya pengintegrasian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekologi dalam menyelaraskan upaya –upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk keterpeliharaan kualitas lingkungan dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) diukur berdasarkan 3 indikator komposit yang harus diperhatikan yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2020 capaian IKLH hanya sebesar 77,69, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas tutupan lahan. Intensitas dan efektivitas reboisasi, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan belum optimal, koordinasi dan sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah belum optimal.

Dari segi kebencanaan, berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Provinsi Maluku memiliki indeks risiko tinggi, yakni dengan nilai indeks dari 160.84 pada tahun 2022 naik menjadi 162.47. Berdasarkan Data DIBI BNPB dan BPBD Provinsi Maluku, dalam 10 tahun terakhir terdapat 158 kejadian bencana. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak adalah banjir. Sedangkan jenis bencana dengan dampak terbesar adalah gempabumi. Berdasarkan KRB Provinsi Maluku tahun 2022, hasil rekapitulasi tingkat risiko dengan kelas tinggi adalah bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, Likuefaksi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Letusan



Gunungapi Banda Api, Letusan Gunungapi Wurlali, Kekeringan, Tanah Longsor dan Tsunami memiliki tingkat risiko. Berdasarkan hasil pengukuran.

4.1.9 Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

Berdasarkan data Menpan indeks reformasi birokrasi maluku pada tahun 2022 pencapaiannya "CC". Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Maluku secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Selain itu organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi masih lebih rendah dibanding dengan provinsi lainnya Adapun permasalahan pembangunan pada tata Kelola pemerintahan yaitu :

1. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dimana pada tahun 2022 nilai SAKIP Provinsi Maluku hanya bernilai B, hal ini disebabkan karena hal-hal berikut : penyusunan indikator tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome dan belum sepenuhnya mengacu pada sasaran RPJMD, cascading kinerja antara sasaran dengan program/kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara optimal, kualitas laporan kinerja di tingkat pemerintah daerah dan OPD belum optimal, dan masih lemahnya evaluasi SAKIP perangkat daerah.
2. Masih Rendahnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Pengukuran kepuasan terhadap pelayanan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Sebagai gambaran hasil capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2021 dengan kategori nilai "B". (3,51-4). Hal ini disebabkan oleh dukungan dalam pelaksanaan 6 (enam) aspek penilaian pelayanan publik yang meliputi : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi



Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Walaupun demikian, dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik,

4.2 Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

4.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib

4.2.1.1 Yang Terkait Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

- 1) Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;
- 2) Belum optimalnya aksesibilitas, sarana & prasarana & peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Terbatasnya Kuantitas & Rendahnya Kualitas Guru;
- 4) Belum meratanya distribusi guru baik kuantitas maupun kualitas;
- 5) Terbatasnya pendidikan berbasis kompetensi, potensi wilayah dan budaya lokal;
- 6) Dampak negatif informasi dan teknologi terhadap peserta didik menurunkan minat belajar;
- 7) Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter.

B. Urusan Kesehatan

- 1) Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan tertentu;
- 2) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
- 3) Belum optimalnya implementasi pelayanan kesehatan gugus pulau di kabupaten/kota;
- 4) Masih ada ancaman penyakit menular maupun tidak menular, serta meningkatnya penyakit degeneratif;



- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- 6) Rendahnya Gerakan SUN (*Scaling Up Nutrition*) untuk perbaikan gizi masyarakat karena dukungan lintas sektor terkait yang belum memadai.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Rendahnya kemantapan jalan;
- 2) Terbatasnya Aksesibilitas dan konektivitas inter dan antar pulau;
- 3) Rendahnya rasio jaringan irigasi;
- 4) Rendahnya akses air minum layak;
- 5) Rendahnya akses masyarakat kepulauan terhadap air bersih;
- 6) Terbatas infrastruktur perumahan yang mendukung sektor Pendidikan;
- 7) Kurangnya kesadaran produk tata ruang yang telah disusun sebagai produk yang berkekuatan hukum;
- 8) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Rendahnya rasio rumah layak huni;
- 2) Rendahnya rasio permukiman layak huni;
- 3) Masih tingginya backlog.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

- 1) Masih terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;
- 2) Masih terbatasnya kegiatan pembinaan politik daerah kepada masyarakat oleh parpol;
- 3) Masih rendahnya rasio jumlah Linmas, rasio jumlah Pos Siskamling dan rasio jumlah Polisi Pamong Praja;



- 4) Masih terbatasnya cakupan patroli petugas Satpol PP; dan
- 5) Provinsi Maluku rentan terhadap Bencana Alam.

F. Urusan Sosial

- 1) Masih tingginya penyandang masalah social yang terkait dengan rehabilitasi sosial dasar, penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial serta rendahnya pemberian perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;
- 2) Masih tingginya penyandang masalah fakir miskin dan orang tidak mampu;
- 3) Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial termasuk pemberian pelayanan bagi orang dengan HIV/Aids (ODA) dan korban Napza (narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya);
- 4) Belum optimal penanganan Komunitas Adat Terpencil;
- 5) Kualitas data kemiskinan masih rendah dan terbatasnya penjangkauan masyarakat miskin dan orang tidak mampu;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan (PFM dan OTM);
- 7) Belum adanya pelayanan satu pintu dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 8) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah.

4.2.1.2 Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Terbatasnya lapangan kerja;
- 2) Kualitas dan daya saing pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- 3) Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan lapangan kerja baru sesuai potensi wilayah;



- 4) Kurangnya data perencanaan dan informasi peluang kerja dalam dan luar negeri;
- 5) Belum terbangunnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (Terutama Pendidikan Tinggi dan Vokasi)

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
- 2) Belum optimal perencanaan penganggaran berbasis gender;
- 3) Masih Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan;
- 5) Belum optimalnya peran media massa dan elektronik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 6) Kurangnya pemahaman komprehensif terhadap isu gender.

C. Urusan Pangan

- 1) Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan nilai ketahanan pangan;
- 2) Belum adanya/terupdatenya pemetaan potensi daerah rawan pangan;
- 3) Belum adanya sistem dan mekanisme distribusi pangan sesuai peta rawan pangan;
- 4) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pangan;
- 5) Rendahnya inovasi dan kreatifitas pengolahan dan pemanfaatan keragaman pangan;
- 6) Belum adanya penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.



D. Urusan Pertanahan

- 1) Adanya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

E. Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Belum adanya pemetaan potensi kerusakan lingkungan;
- 2) Terbatasnya SDM Lingkungan;
- 3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan;
- 4) Kurangnya pengawasan lingkungan hidup;
- 5) Belum adanya program Pendidikan Masyarakat tentang lingkungan hidup;
- 6) Belum optimalnya gerakan dan budaya masyarakat bersih lingkungan;
- 7) Belum optimalnya kerjasama antara institusi dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan;
- 2) Tingginya tingkat pertumbuhan kependudukan.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa & tata kelola pemerintahan desa dan/atau negeri.
- 2) Rendahnya kapasitas SDM masyarakat desa dan/atau negeri.
- 3) Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antar pemerintah. (perencanaan dan penganggaran)
- 4) Terbatasnya data indikator dan potensi serta informasi pembangunan desa dan/atau negeri



- 5) Belum adanya pembangunan desa berbasis kearifan lokal. (model)
- 6) Belum optimalnya pendekatan untuk percepatan pembangunan desa menjadi desa berkembang dan mandiri di setiap gugus pulau.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga;
- 2) Masih rendahnya persentase akseptor KB yang aktif;
- 3) Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

I. Urusan Perhubungan

- 1) Belum optimalnya integrasi sistem transportasi yang berbasis kepulauan
- 2) Terbatasnya sarana & prasarana perhubungan yang berbasis kepulauan
- 3) Kurangnya SDM Perhubungan.
- 4) Kurangnya pemahaman pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi

J. Urusan Komunikasi dan Informasi

- 1) Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di kab/kota ;
- 2) Terbatasnya kualitas dan kapasitas telekomunikasi;
- 3) Terbatasnya penyebaran media informasi pada masyarakat;
- 4) Terbatasnya siaran TVRI Ambon ke masyarakat di kab/kota;
- 5) Rendahnya kualitas SDM komunikasi dan informasi;
- 6) Kurangnya pengawasan dalam penyalahgunaan media informasi;
- 7) Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola informasi (peran masyarakat sebagai jurnalis lokal).



K. Urusan Koperasi dan UKM

- 1) Belum optimalnya manajemen koperasi & UKM;
- 2) Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap permodalan;
- 3) Rendahnya Inovasi & adopsi teknologi dan pengembangan disain produk;
- 4) Terbatasnya jaringan pasar industri kecil & kemitraan usaha;
- 5) Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
- 6) Terbatasnya kualitas SDM pelaku usaha ;
- 7) Kurang partisipasinya masyarakat dalam mengembangkan koperasi.

L. Urusan Penanaman Modal

- 1) Iklim investasi belum kondusif (keamanan, infrastruktur, dukungan masyarakat promosi, regulasi)
- 2) Belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 3) Terbatasnya SDM pengelola urusan penanaman modal
- 4) Belum optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Terbatasnya sarana & prasarana pengembangan pemuda dan olah raga;
- 2) Belum Optimalnya pembinaan kepemudaan;
- 3) Belum Optimalnya pembinaan & peningkatan prestasi olahraga;
- 4) Terbatasnya tenaga pelatih professional;
- 5) Belum optimalnya manajemen organisasi pemuda & olah raga;
- 6) Belum berkembangnya organisasi keolahragaan di tingkat desa dan/atau negeri.

N. Urusan Statistik

- 1) Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengolahan data statistik.



- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan data statistik.

O. Urusan Persandian

- 1) Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi dalam urusan persandian;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana persandian.

P. Urusan Kebudayaan

- 1) Masih rendahnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;
- 3) Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya;
- 4) Rendahnya minat masyarakat dalam mempelajari budaya daerah dan penyelamatan aset budaya.

Q. Urusan Perpustakaan

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola perpustakaan;
- 2) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas bangsa;
- 3) Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional;
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan;
- 5) Terbatasnya koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan;
- 6) Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

R. Urusan Kearsipan

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola kearsipan;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan;
- 3) Belum optimalnya penataan tertib arsip;
- 4) Belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkat provinsi dan kab/kota.



4.2.1.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan wilayah pesisir untuk budidaya perikanan;
- 2) Terbatasnya sarana prasarana perikanan budidaya, tangkap & pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
- 3) Rendahnya produktivitas & daya saing usaha kelautan & perikanan pasca panen;
- 4) Rendahnya pengawasan sumber daya kelautan (*illegal unreported unregulated fishing*);
- 5) Kurangnya pembinaan terhadap kelompok nelayan;
- 6) Tingginya kerusakan kawasan pesisir & ekosistemnya;
- 7) Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan antara nelayan, pemerintah dan pengusaha;
- 8) Rendahnya pemahaman budaya maritim;
- 9) Lunturnya implementasi kearifan lokal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 10) Belum adanya pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasis ekosistem dan konektivitas antar sumber daya, sosial dan ekonomi;
- 11) Belum optimalnya inisiasi, pencadangan dan penetapan serta pengelolaan dan pencadangan Kawasan-kawasan lindung/konservasi pesisir dan laut;
- 12) Belum adanya transformasi bisnis dan praktek perikanan berkelanjutan.

B. Urusan Pariwisata

- 1) Masih kurangnya kolaborasi masyarakat, pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan pariwisata;
- 2) Rendahnya kualitas SDM pengelola & pelaku usaha pariwisata;



- 3) Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata berskala internasional;
- 4) Rendahnya promosi dan daya saing pariwisata;
- 5) Belum dikembangkan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata;
- 6) Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan daya tarik wisata tahunan;
- 7) Belum adanya transformasi bisnis dan praktek-praktek pariwisata bertanggung jawab dan berkelanjutan.

C. Urusan Pertanian

- 1) Rendahnya produktivitas pangan strategis & pangan lokal
- 2) Terbatasnya infrastruktur pertanian (gudang, irigasi, dll).
- 3) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi & informasi, pasar dan permodalan.
- 4) Alih fungsi lahan pertanian masih cukup tinggi;
- 5) Pemberdayaan terhadap kelompok petani terbatas & belum tepat sasaran
- 6) Terbatasnya SDM penyuluh pertanian
- 7) Belum optimalnya manajemen sumber daya pertanian
- 8) Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian antara petani, pemerintah dan pengusaha
- 9) Terbatasnya bantuan kepada petani (bibit, pupuk, peralatan)
- 10) Rendahnya pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah (pala, cengkih, kelapa dan coklat)

D. Urusan Kehutanan

- 1) Masih tingginya klaim masyarakat adat atas hak ulayat pada kawasan hutan & penggunaan kawasan hutan non prosedural;
- 2) Tingginya kerusakan ekosistem mangrove & lahan kritis yang luas tersebar di kab/kota;



- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan (SDH);
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan perhutanan sosial;
- 5) Rendahnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;
- 6) Masih tingginya penebangan liar & peredaran kayu ilegal;
- 7) Belum ditetapkannya tata batas antar Kawasan hutan;
- 8) Adanya potensi usaha pertambangan pada kawasan hutan lindung.

E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Belum tercapainya cakupan rasio elektrifikasi 100%;
- 2) Tingginya penambangan sumber daya mineral secara ilegal;
- 3) Belum optimalnya diversifikasi dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- 4) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang dampak penambangan ilegal;
- 5) Terbatasnya SDM pengelolaan sumberdaya mineral;
- 6) Lemahnya sistem monitoring pengelolaan tambang hulu ke hilir.

F. Urusan Perdagangan

- 1) Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global;
- 2) Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis;
- 3) Belum adanya sistem resi gudang yang mendukung stabilitas harga;
- 4) Belum adanya pusat promosi daerah;
- 5) Belum adanya pasar induk terpadu provinsi.

G. Urusan perindustrian

- 1) Masih kurangnya dukungan terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah;
- 2) Terbatasnya Industri berbasis sumberdaya lokal;
- 3) Belum ditetapkannya kawasan industri berbasis potensi;
- 4) Terbatasnya SDM terkait industri;



- 5) Belum adanya kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan industri di Maluku.

H. Urusan Transmigrasi

- 1) Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.
- 2) Kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mempersiapkan transmigran baik di daerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi.
- 3) Belum optimalnya kota terpadu mandiri transmigrasi.
- 4) Kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal disekitar kawasan transmigrasi.



Tabel 4. 1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku

NO	INDIKATOR	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	IPM	Belum meratanya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Masih rendanya angka rata-rata lama sekolah terutama pada jenjang pendidikan SMA	• Kepemilikan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan untuk jenjang SMA yang belum memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan • Akses pendidikan yang sulit dijangkau terutama pada jenjang SMA yang berada pada pusat-pusat pemerintahan • Banyaknya penduduk yang belum menyelesaikan Pendidikan wajib belajar 9 dan 12 tahun
			Belum tercapainya target harapan lama sekolah	• Tenaga kependidikan belum terpenuhi secara maksimal dan merata terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan • Sebaran sekolah yang tidak merata dan tidak menjangkau daerah-daerah terpencil
		Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan kepada masyarakat	Masih rendahnya capaian usia harapan hidup	• Belum meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas • Ketimpangan pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan Asas • rendahnya ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan untuk masyarakat



NO	INDIKATOR	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
				• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat • Masih tingginya angka stunting • Angka Kematian Ibu dan Kematian bayi yang masih tinggi
		Masih tingginya tingkat pengangguran	Masih tingginya ketimpangan pengeluaran per kapita kabupaten/kota	• Tidak tersedianya lapangan usaha produktif bagi masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan
2	Angka Kemiskinan	Masih tingginya angka kemiskinan	Jumlah penduduk miskin yang tinggi	• Jumlah penduduk rentan miskin yang tinggi • Angka pengangguran yang masih tinggi tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. • Masih rendahnya kualitas data kemiskinan
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Masih tingginya tingkat pengangguran	Pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat rendah sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya	• Jumlah Angkatan Kerja yang Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja. • Mutu Tenaga Kerja yang Relatif Rendah / ketidaksesuaian antara keterampilan dan pendidikan para pencari kerja dengan kebutuhan lapangan kerja • Rendahnya pemberian skills pada usia produktif agar dapat mandiri sektor-sektor usaha mikro, sektor



NO	INDIKATOR	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
				usaha kecil, dan sektor usaha menengah • Akses untuk pengembangan kompetensi terbatas
4	Indeks Gini	Kesenjangan antar wilayah masih tinggi	Masih tingginya ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat	• Akses masyarakat terhadap lapangan kerja yang layak masih terbatas • Adanya kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar sektor serta antar daerah
	Indeks Williamson		Daerah relatif tertinggal merupakan daerah-daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya dibawah rata-rata	• Tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonominya berada di bawah rata-rata. • Kontribusi masing-masing daerah terhadap pemerataan pembangunan wilayah belum merata • Masih kurangnya peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan mengoptimalkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Maluku
5	Pertumbuhan Ekonomi	Ekonomi maluku yang masih mengandalkan sektor Primer	Pertumbuhan sektor unggulan belum maksimal (Industri pengolahan pada	• Produksi dan Produktivitas masih rendah • Rendahnya pengembangan nilai tambah hasil sumberdaya alam



NO	INDIKATOR	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			sektor primer, pariwisata, ekraf dan UMKM	• Masih kurangnya pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha • sarana dan prasarana pendukung pariwisata terbatas • kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Maluku • Pembangunan sektor industri pengolahan masih belum optimal
		Infrastruktur belum merata dan memadai serta konektivitas antar pulau yang masih rendah	Belum optimalnya Pemerataan pembangunan antara wilayah dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Konektivitas & Aksesibilitas antar wilayah maupun Kawasan Strategis Provinsi belum terhubung dengan baik
6	Inflasi		Rantai Pasok yang belum efektif dan efisien guna menjaga suplai	• Kerentanan kenaikan harga eceran komoditas bahan pokok dan barang penting akibat keterbatasan ketersediaan • Kerentanan kenaikan harga eceran komoditas bahan pokok dan barang penting akibat kenaikan biaya distribusi
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan	Belum efektifnya kualitas penyelenggaraan	• Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur • Belum optimalnya penataan dan penguatan kelembagaan



NO	INDIKATOR	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			kinerja Instansi pemerintahan Daerah	• Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah. • Kurang optimalnya pengawasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	• Pembangunan Kurang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan • Rusaknya sistem ekologi mulai dari hutan hingga pencemaran air, dan tanah akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aspek lingkungan.



4.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah guna mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

4.3.1 Isu Strategis Global

4.3.1.1 Perang Rusia - Ukraina

Perang Rusia – Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 menuai berbagai dampak global. Dampak pertama yang dirasakan oleh Indonesia berasal dari sektor perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia yang terganggu akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan menurunnya ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor gandum dan memiliki potensi menaikkan harga bahan pangan berbahan dasar gandum. Keterbatasan transfer energi dari Rusia ke benua Eropa juga memberikan dampak pada meningkatnya biaya produksi barang-barang dari Eropa utamanya produk teknologi tinggi. Selain itu, dampak berikutnya adalah risiko perlambatan ekonomi global akibat lonjakan inflasi. Kondisi inflasi yang tinggi tersebut akan



direspons dengan kenaikan suku bunga secara global sehingga risiko perlambatan ekonomi tersebut mencuat dan menjadi ancaman perekonomian global di tahun 2023 dan akan berefek setidaknya hingga 2 tahun berikutnya. Dalam hubungan perdagangan Rusia- Indonesia, impor terbesar Indonesia dari Rusia yaitu rod besi baja(bahan baku baja) sebesar 486 ribu ton dengan nilai USD326 juta sepanjang tahun 2021. Impor itu menjadi yang terbesar dan berikutnya adalah pupuk buatan sebesar 974,32 ribu ton dengan nilai USD326,03 juta. Walaupun pada tahun 2021 neraca perdagangan Rusia – Indonesia meningkat, namun di tahun 2023 antisipasi terhadap ketidakstabilan perekonomian global perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi khususnya pada bidang pertanian yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Provinsi Maluku.

4.3.1.2 Sustainable Development Goals/SDGs

Tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas dengan MDGs, terdapat pada lebih ditekankan dan diprioritaskannya isu lingkungan global di dalam SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (Human Development), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya



(Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonom; (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development) berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Social Sustainability. Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;



- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

4.3.1.3 Ancaman Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara termasuk Indonesia. Krisis ekonomi global akan diperhadapkan dengan tiga tantangan perekonomian global saat ini terutama dipicu oleh volatilitas pasar keuangan dan tensi geopolitik di Timur Tengah. Risiko dan ketidakpastian global yang meningkat tersebut akan memberikan dampak *spillover* ke dalam negeri yang berpotensi mempengaruhi nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Pada pasar keuangan, periode September hingga Oktober 2023, *yield US Treasury* mengalami lonjakan hingga mencapai level di atas 5%, dan merupakan lonjakan yang pertama kali sejak 2007. Dalam konteks biasa Amerika Serikat [AS] *yield*-nya rendah karena suku bunga selama, terutama sejak *global financial crisis* dengan *rate policy* hanya 0,25% menjadikannya sangat rendah.

Pada kawasan di Eropa juga akan mengalami situasi yang tidak mudah dengan laju inflasi yang masih tinggi. Ditambah adanya perang



Ukraina vs Rusia dan sekarang Israel vs Hamas, maka harga minyak atau energi akan mengalami kenaikan. Kondisi ini akan menyebabkan berlanjutnya inflasi sehingga bank sentral Eropa diperkirakan cenderung agresif dalam menetapkan suku bunga kebijakan. Suku bunga di kawasan tersebut berpotensi naik dan berada pada level yang tinggi pada waktu yang cukup lama, sehingga ekonomi kawasan ini terancam mengalami resesi.

4.3.1.4 Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

4.3.1.5. Perubahan Iklim (Global Warming)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka



perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (*Nationally Determined Contribution-NDC*) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties (COP) 24* di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue*.

Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi, termasuk Provinsi Maluku di dalamnya.

4.3.1.6. Transformasi Digital

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada



sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Provinsi Maluku dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.



Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat tiga potensi wisata di Maluku yang menjadi fokus optimalisasi pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, sehingga diharapkan dapat memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

4.3.2 Isu Strategis Nasional

4.3.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045

Pemerintah saat ini sementara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional. Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJPN menetapkan Visi Indonesia 2025 - 2045, yaitu “Indonesia Emas 2045”. Mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan Dalam mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045 telah dirumuskan 8 Agenda Pembangunan, 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan.

Upaya mewujudkan cita-cita nasional dalam RPJPN diperkuat dengan kebijakan transformasi yang menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Tiga fokus utama transformasi ini meliputi **“Transformasi Sosial”, “Transformasi Ekonomi”, dan “Transformasi Tata Kelola”**. Ketiga transformasi ini dapat berjalan dengan baik dengan ditunjang oleh landasan stabilitas nasional yang kuat, yang meliputi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Selain itu, landasan transformasi



"Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi" juga diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan ke depan. Transformasi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut akan diterjemahkan ke dalam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang didukung penuh oleh pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kaidah pelaksanaan untuk kesinambungan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan kewilayahan, saat ini Indonesia masih dihadapkan pada isu ketimpangan antar wilayah khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi perlu diprioritaskan di wilayah yang berstatus *Lower-Middle Income*. Oleh sebab itu, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, dengan kontribusi KTI yang ditargetkan tinggi pada tahun 2045 sebesar **28,5%**, dari Wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan dengan memanfaatkan potensi besar di wilayah timur yang berupa pariwisata dan ekonomi kreatif di Wilayah Bali-Nusa Tenggara, serta perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Untuk memperbesar kontribusi KTI terhadap perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi harus tumbuh **7-8,1%**, Bali-Nusa Tenggara mesti tumbuh **5-7%**, Maluku **7-14%**, dan Papua tumbuh **6-7%**. Target pertumbuhan yang dihadapkan terjadi di masing-masing region di KTI menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan transformatif untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan pendekatan business as usual.

4.3.2.2. Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara substantif memberikan pengertian bahwa SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria akan tetapi SPM lebih dimaknasi secara kontekstual tentang Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap



Warga Negara secara minimal. Terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

- a. Pelayanan pendidikan menengah;
- b. Pelayanan pendidikan khusus;
- c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
- d. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
- e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
- i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
- j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;



- k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.

4.3.2.3. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG)

Dalam rangka mewujudkan prioritas nasional dalam pembangunan gizi di Indonesia sekaligus memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan pada target 2.2 dimana pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak stunting dan wasting di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Sedangkan dari sisi pangan, maka perwujudan dari program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan perlu segera dicapai. Kedua poin itulah yang menjadi dasar bagi penyusunan RAN PG, dimana memiliki kerangka pikir berupa strategi, yakni:

- 1) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi dan aman untuk keluarga;
- 2) Penguatan komunikasi perubahan perilaku untuk peningkatan pangan dan gizi;
- 3) Perbaikan konsumsi gizi keluarga;
- 4) Penguatan kelembagaan dan koordinasi pangan dan gizi

4.3.3 Isu Strategis Daerah

Perumusan isu strategis Provinsi Maluku dalam perencanaan pembangunan daerah untuk masa transisi pada periode pembangunan 2025 - 2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Provinsi Maluku maupun rancangan akhir RPJPN 2025 – 2045 yang telah



dikaji dan dianalisis permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada rencana pembangunan daerah Provinsi Maluku periode pembangunan 2025 - 2026 dijabarkan sebagai berikut.

4.3.3.1 SDM Yang Berdaya Saing

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi merupakan kebutuhan yang mutlak dan mendesak di era revolusi industri 4.0. Hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki dan harus terus menerus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan.

Salah satu kunci keberhasilannya adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, dengan menciptakan SDM yang memiliki kemampuan profesional serta kematangan pribadi dan saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Profesionalisme dapat turut untuk membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian SDM yang Tangguh, dimana kepribadian tersebut merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan SDM yaitu: Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya ; Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan; serta pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.



Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, pertama, adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah daerah dalam hal ini harus memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK serta merata di seluruh daerah kepulauan.

Untuk itu peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai Diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global perlu menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

Kepribadian dan karakter sumber daya unggul juga diperlukan Kerjasama *stakeholder* dalam mewujudkannya untuk itu penguatan peran Lembaga agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*) menjadi sangat penting.

4.3.3.2 Aksesibilitas dan konektivitas Antar Wilayah

Provinsi Maluku secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan didominasi oleh pulau kecil serta tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km² dan mempunyai luas laut mencapai 658.294,69 Km² atau



92,4% dibandingkan dengan luas daratan (terrestrial) yang luasnya hanya 54.184,96 Km² atau sekitar 7,6%. Karakteristik geografis tersebut menunjukkan bahwa potensi Provinsi Maluku dominasi akan karakteristik wilayah yang bercirikan kepulauan sebagai keunggulan komparatif terhadap wilayah provinsi lainnya. Potensi wilayah yang bercirikan kepulauan tidak hanya mencakup daratan tetapi juga laut beserta ekosistemnya. Selain itu, terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan perbatasan. Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota yang berbatasan laut dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste.

Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang masih menjadi tantangan besar pembangunan.

Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah. Dengan karakteristik wilayah kepulauan salah satu tantangan terbesar pembangunan di Provinsi Maluku adalah aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap wilayah Provinsi Maluku. Infrastruktur transportasi yang memudahkan mobilitas orang, barang dan jasa dalam rangka menurunkan biaya logistik dan produk hingga sampai ke tangan konsumen, yang juga mendukung pelayanan dasar. Konsep konektivitas kepulauan di Provinsi Maluku diharapkan menjadikan Provinsi Maluku yang terakses secara lokal,



terintegrasi secara nasional dan terhubung secara global. Untuk itu selain memperkuat aksesibilitas lokal, konektivitas dengan jaringan nasional dan global pun perlu diperhatikan, salah satunya dengan mempersiapkan pintu keluar di kawasan perbatasan sebagai salah satu pintu gerbang bagian selatan Indonesia.

4.3.3.3 Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sarat tergantung pada sumber daya alam yang berlimpah dan upah tenaga kerja yang murah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (*inclusive growth*) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan (*green growth*). Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Hill, Khan, Zhuang 2012: 2).

Menurut ADB (2011), ada beberapa alasan mengapa perekonomian harus inklusif yaitu:

1. Pertimbangan kesetaraan dan keadilan, pertumbuhan seharusnya terdistribusi dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
2. Pertumbuhan dengan ketimpangan yang persisten dapat membahayakan kondisi sosial, seperti orang miskin dan pengangguran lebih rentan masuk dalam aktivitas kriminal,



perempuan lebih rentan ke prostitusi, dan tenaga kerja anak yang tidak diharapkan.

3. Ketimpangan dalam hasil dan akses yang berkelanjutan dapat mengganggu stabilitas politik dan struktur sosial sehingga mengurangi potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Provinsi Maluku pada masa mendatang dalam upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonominya harus mendorong terwujudnya kebijakan Transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Transformasi dari ekonomi berbasis SDA tak terbaharukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbaharukan merupakan tantangan utama yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah dalam jangka menengah dan panjang. Proses menipisnya stok SDA tak terbaharukan merupakan hukum alam yang tidak dapat dicegah, sehingga transformasi menjadi suatu keharusan guna menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah Provinsi Maluku. Sektor non migas memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari sektor migas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor-sektor non pertambangan yang saat ini belum dimaksimalkan memiliki perilaku pertumbuhan alami yang menjanjikan.

Provinsi Maluku berfokus pada sektor unggulan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor primer yang seharusnya sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa) harus



lebih ditingkatkan dengan adanya inovasi hasil sektor tersebut. Diperlukan otoritas pengawasan pada tingkat daerah untuk mengurangi degradasi lingkungan hidup. Pemerintah bersama dengan pelaku pembangunan lainnya perlu melakukan kolaborasi untuk memperkuat produktivitas daerah. Berbagai upaya untuk pengembangan sektor-sektor unggulan non migas dan tambang perlu ditempuh, seperti pendekatan industri teknologi bersih melalui penerapan transformasi digital dan industrialisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan secara berkelanjutan; pembangunan rendah karbon melalui ekonomi sirkular; industri hijau; peningkatan ekowisata dan pariwisata

a. Peningkatan Keberdayaan ekonomi masyarakat

Masalah kesejahteraan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Provinsi Maluku dihadapkan dengan masalah kemiskinan dengan akar masalah yang sebagian berbeda-beda pada setiap daerah kabupaten/kota. Penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian pemerintah Daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dan masih terus dilaksanakan, antara lain upaya untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk kemandirian, meningkatkan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, serta penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak.

Pemerintah daerah juga terus berusaha untuk meningkatkan dan menguatkan partisipasi UMKM dan koperasi. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat membangkitkan perekonomian



masyarakat serta membuka lapangan kerja. Pengembangan usaha UMKM dan koperasi diarahkan juga untuk mengolah produk-produk lokal hasil pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, serta unggulan lainnya

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Pengembangan perekonomian daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Pembangunan Provinsi Maluku masih diperhadapkan dengan minimnya infrastruktur sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu layanan bagi masyarakat baik itu infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, telekomunikasi dan listrik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu, infrastruktur juga diarahkan ke kawasan-kawasan strategis yang mampu membangkitkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4.3.3.4. Kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan Bencana

Salah satu upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya adalah dengan meningkatkan mitigasi bencana alam, khususnya pada beberapa periode terakhir dimana mitigasi bencana sudah menjadi isu dan perbincangan nasional maupun internasional. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi



ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Beberapa potensi bencana yang dimiliki oleh Provinsi Maluku seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi dan Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang, Abrasi, Epidemik dan Wabah penyakit, Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan Kecelakaan Laut. Keseluruhan potensi bencana ini menjadikan pemerintah harus meningkatkan ketahanan bencana sekaligus meningkatkan kualitas penanggulangan dan pemulihan bencana.

Isu strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting karena komitmen dari pemerintah pusat berdasarkan ratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016 sesuai UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris, yang diimplementasikan melalui First Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan komitmen Indonesia untuk mengurangi reduksi emisi 29% dengan kemampuan sendiri dan target 38% - 41% jika dengan kerjasama internasional. Oleh karena itu, isu penting untuk Maluku yakni Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor energi, limbah, industri, pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan adaptasi perubahan iklim meliputi sektor perikanan, pariwisata, air bersih, pertanian/perkebunan, kehutanan, perhubungan laut, serta adaptasi bencana banjir dan longsor.

4.3.3.5. Optimalisasi reformasi birokrasi

Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfer budaya kerja yang baik. Sejalan dengan



pengelolaan pemerintahan dalam semangat otonomi daerah, dimana kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri yang secara garis besar terpisah dari kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pada implementasinya tak jarang ditemukan adanya ketidakselarasan penyelenggaraan pemerintahan/pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan yang secara tidak langsung berdampak pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat diantaranya tidak terintegrasinya konsep pengembangan wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan tidak selarasnya skenario/strategi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan kabupaten/kota.

Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat dan berbiaya tinggi. Diantaranya keadaan ini terjadi karena aparatur pemerintah masih memposisikan diri sebagai pihak yang "dilayani" bukan melayani. Permasalahan utama pelayanan publik terkait dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kualitas pelayanan tergantung pada pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) ke depannya.





BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kedepan. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan kedalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 khususnya tahap terakhir (kelima). Selain itu, tujuan dan sasaran yang dihasilkan juga mempertimbangkan penyelarasan indikator makro dalam RPJPN 2025 – 2045, evaluasi hasil RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

Rencana pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026 diarahkan untuk mencapai tema periodik yang diwujudkan melalui 4 (empat) tujuan. Keempat tujuan pembangunan dan sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, produktif, berdaya saing dan berkarakter berbasis budaya inklusif

Meningkatkan kaulitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, produktif, berdaya saing dan berkarter berbasi budaya yang inkulif dimaksud adalah SDM yang memiliki IPM tinggi dan terus meningkat serta tidak ada kabupaten/kota dengan IPM tertinggal (dibawah rata-rata nasional). Selain itu, menurunnya TPT sebagai dampak diserapnya tenaga kerja lulusan SMK/ sederajat keatas juga menjadi ukuran keberhasilan peningkatan daya saing SDM.



Tanpa inklusi, inisiatif untuk mewujudkan kesatuan keberagaman dan kesetaraan akan menjadi kurang efektif. Untuk melihat dampak positif dari keberagaman dan kesetaraan, kita harus menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif yang mendukung keberagaman dan kesetaraan terlebih dahulu olehnya itu perwujudan daya saing SDM dilakukan dengan pemerataan taraf pendidikan, pemerataan kesehatan, peningkatan usia harapan hidup, dan pemberdayaan gender.

Tujuan ini dijabarkan dalam 5 sasaran strategis meliputi :

- Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat kepulauan terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas
- Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kepulauan yang dilaksanakan secara inklusif dan terjangkau
- Sasaran 3 : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga
- Sasaran 4 : Mewujudkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan
- Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan

Tujuan 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil dan resilien dengan tidak mengandalkan pada sektor ekstraktif, sehingga perlunya dilakukan diversifikasi ekonomi (horizontal dan vertikal) pada sektor ekonomi unggulan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh. Pertumbuhan ekonomi yang



berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.

Tujuan ini dijabarkan dalam 8 sasaran strategis meliputi :

Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Produk

Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi

Sasaran 3 : Meningkatkan konektivitas antara wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata

Sasaran 4 : Meningkatnya kinerja pariwisata guna mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas dan ekonomi kreatif

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana

Sasaran 6 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Tujuan 3 : Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kepulauan secara merata

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Tujuan ini dijabarkan dalam 4 sasaran strategis meliputi :

Sasaran 1 : Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin



Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja

Sasaran 3 : Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis

Sasaran 4 : Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kondisi sosial budaya

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berprinsip Good Governance

Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan serta penerapan ASN yang profesional dalam mendukung pelayanan publik yang dilaksanakan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Tujuan ini dijabarkan dalam 1 sasaran strategis meliputi :

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang profesional karakteristik, berintegritas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

Keempat tujuan pembangunan daerah dijabarkan ke beberapa sasaran yang akan menjadi pedoman penyusunan prioritas pembangunan tahunan daerah dan akan dicapai sampai akhir tahun 2026. Penjabaran masing masing tujuan ke sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan target per tahun disajikan pada tabel berikut



Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026

Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, produktif, berdaya saing dan berkarakter berbasis budaya inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,55	72,04	72,75	73,8	74,72	75,63	75,63
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,19	93,20	93,74	93,47	93,58	93,7	93,7
Sasaran 1									
Meningkatnya akses masyarakat kepulauan terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	14,00	14,08	14,03	14,05	14,07	14,07
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,03	10,19	10,2	10,22	10,29	10,37	10,37
Sasaran 2 :									
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kepulauan yang dilaksanakan secara inklusif dan terjangkau	Usia harapan hidup	Tahun	66,09	66,45	70,45	69,88	70,85	71,82	71,82
Sasaran 3:									
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,67	55,33	54,5	57,67	58,11	58,97	58,97
	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks		0,498	0,451	0,408	0,364	0,32	0,32
Sasaran 4 :									
Mewujudkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	54,23	55,87	N/A	53,77	53,65	53,53	53,53



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sasaran 5 :									
Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,19	93,20	93,74	94,00	93,58	93,70	93,70
Tujuan 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,33	5,73	5,69	5,24	5,79	6,35	6,35
	Indeks Infrastruktur	%	76,64	81,51	84,61	87,22	90,82	93,3	93,3
	Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	24,2	28,51	23,4	24,57	24,17	23,77	23,77
	Tingkat Inflasi	%	4,01	6,28	2,81	2,09-2,99	2,08 - 3,66	2,89 - 3,84	2,89 - 3,84
	Indeks Wiliamson	Indeks	0,396	0,401	0,285	0,530	0,580	0,630	0,630
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	160,84	162,47	160,05	159,95	159,90	159,85	159,85
Sasaran 6 :									
Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Produk	LPE Sektor Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,84	5,72	5,66	5,29	5,81	6,34	6,34
Sasaran 7 :									
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi	LPE Lap. Usaha Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	%	4,88	15,78	N/A	17,77	21,03	24,30	24,30
	Nilai investasi PMA/PMDN	Triliun	3,1	1.664	3.478	2,38	2,6	2,8	3.987
Sasaran 8 :									
meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Rasio Konektivitas	Rasio	0,708	0,766	0,766	0,774	0,784	0,793	0,793
	Indeks Desa Membangun	%	0,6291	0,6527	0,6676	0,702	0,7322	0,7721	0,7721
	Indeks Infrastruktur (Bidang Ke-PUan)	Indeks	70,91	77,12	81,55	85,98	90,41	94,84	94,84
Sasaran 9 :									



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pembangunan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	%	3,12	6,49	6,5	6,51	6,52	6,53	6,53
Sasaran 10 :									
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	24,2	28,51	23,4	24,57	24,17	23,77	23,77
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	160,84	162,47	160,05	159,95	159,90	159,85	159,85
Sasaran 11 :									
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	%	62,15	60,2	64,37	71,65	72,75	79,03	79,03
Tujuan 3 : Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kepulauan secara merata	Tingkat Kemiskinan	%	17,87	16,23	16,42	15,88	15,47	15,07	15,07
	Indeks Gini	Indeks	0,316	0,306	0,288	0,286	0,278	0,269	0,269
Sasaran 12 :									
Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima bantuan sosial	%	44,68	41,19	43,63	45	47	50	50
Sasaran 13 :									
Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,93	6,88	6,31	6,28	6,06	5,84	5,84
Sasaran 14 :									
Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Modal Sosial	Indeks	77,73	n/a	n/a	79,80	80,43	82,33	82,33
Sasaran 15 :									



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kondisi sosial budaya	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,99	0,67	0,98	1,05	1,07	1,09	1,09
Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berprinsip Good Governance	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	cc	CC (58,49)	C (38,08)	BB (72,50)	BB (75,00)	BB (77,50)	BB (77,50)
Sasaran 16 :									
Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang profesional karakteristik, berintegritas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	cc	CC (58,49)	C (38,08)	BB (72,50)	BB (75,00)	BB (77,50)	BB (77,50)



Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Provinsi Maluku. Keterkaitan Kebijakan (IKU) daerah dengan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 5. 2 Keterkaitan IKU Daerah dan IKU OPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, produktif, berdaya saing dan berkarakter berbasis budaya inklusif		Indeks Pembangunan Manusia					
		Indeks Pembangunan Gender					
	Meningkatnya akses masyarakat kepulauan terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas	Harapan Sekolah Lama	Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan berdaya saing	Harapan Sekolah Lama	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	D. Pendidikan & Kebudayaan
		Rata-rata sekolah lama		Rata-rata sekolah lama	Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	
						Tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas	
			Meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat	Nilai Budaya Literasi	Mewujudkan budaya baca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Perpustakaan dan Arsip
					Meningkatkan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
	Meningkatnya derajat	Usia harapan hidup (UHH)	Meningkatnya jangkauan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
	kesehatan masyarakat kepulauan yang dilaksanakan secara inklusif dan terjangkau		pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat kepulauan yang dilaksanakan secara inklusif dan terjangkau			Angka kematian bayi	
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	
						Rasio Dokter terhadap Satuan Penduduk	
						Persentase Penanganan Krisis Kesehatan	
						Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB	
						Bed Occupation Rate (BOR)	
						Average Length Of Stay (ALOS)	
						Survei Kepuasan Masyarakat	
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan	Indeks Pembangunan Pemuda	Pengembangan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Meningkatnya peran pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter	Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
	prestasi olahraga					Persentase wirausaha Muda yang di fasilitasi	
		Indeks Pembangunan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	Meningkatnya pembangunan dan prestasi olahraga	Jumlah atlit berprestasi	
						Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai	
	Mewujudkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	D. Pendidikan & Kebudayaan
						Dimensi Warisan Budaya	
						Dimensi Ekspresi Budaya	
	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	DP3A
Indeks Ketimpangan gender (IKG)							
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi					
		Indeks Infrastruktur					
		Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca					
		Tingkat Inflasi					



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
		Indeks Wiliamson					
		Indeks Risiko Bencana					
	Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Produk	LPE Lap. Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi, Mutu, Produktivitas dan Daya Saing Hasil Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Pertanian
						Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	
						Produksi Komoditas Pertanian	
						Jumlah Kelompok Tani menerapkan Jaminan Mutu	
						Volume Ekspor	
						Cakupan Bina Kelompok Tani	
				LPE Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi, Mutu, Produktivitas dan Daya Saing Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan & Perikanan
						Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	
						Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	
						Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
						Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	
						Luas Kawasan Konservasi P3K yang Dikelola	
						Angka Konsumsi Ikan	
						Volume Ekspor	
				LPE Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Terwujudnya optimalisasi Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan	Jumlah Kelompok Pemanfaat Areal Perhutanan Sosial	Dinas Kehutanan
						Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi	LPE Lap. Usaha Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	Meningkatkan Kualitas dan Daya saing Industri dan Perdagangan	LPE Industri Pengolahan	Meningkatnya Hasil Produksi Industri Pengolahan	Volume dan Nilai Hasil Industri Pengolahan	Dinas Indag
				LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor	Meningkatnya Aktivitas Perdagangan	Volume dan Nilai Ekspor	
						Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan sepeda Motor	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
						Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	
						Presentase Pertumbuhan Koperasi dan UKM	
						Persentase Koperasi yang aktif	Dinas Koperasi & UKM
		Meningkatnya peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian	Nilai Realisasi Investasi		Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	DPMPTSP
						Jumlah Pelaku Usaha yang Naik Kelas	
		LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor				Jumlah Investor yang Berminat Berinvestasi	
						Jumlah Layanan Data Informasi Perijinan/NP yang Dipublikasikan	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Rasio Konektivitas	Mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau dengan peningkatan kinerja, sarana dan prasarana wilayah, penyelenggaraan transportasi dan telekomunikasi yang terkoneksi antar gugus pulau	Rasio Konektivitas	Meningkatkan Pembangunan dan Penguatan Sistem Transportasi untuk Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	D. Perhubungan
		Indeks Infrastruktur	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatan kondisi baik	Rasio kemantapan jalan provinsi	D.PUPR
					Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar berkualitas secara optimal dan merata	Cakupan Air Minum Layak	
						Cakupan Sanitasi Layak	
						Rasio Elektrifikasi	D. ESDM
				Rasio Elektrifikasi		Rasio Desa Berinternet	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
			Meningkatkan pemanfaatan ruang yang selaras dengan kebijakan tata ruang		Meningkatnya keselarasan pemanfaatan ruang yang sesuai kebijakan tata ruang	Tingkat Ketaatan Terhadap RTRW	D.PUPR
		Indeks Desa Membangun	Mewujudkan keberdayaan masyarakat di desa melalui pemberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	D. PMD
	Meningkatnya kinerja pariwisata guna mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas dan ekonomi kreatif	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatnya pendapatan daerah sektor pariwisata	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	Terlaksananya penataan destinasi dan meningkatnya fasilitas pariwisata pada kawasan-kawasan strategis baik kuantitas maupun kualitas	Lama tinggal wisatawan	D. Pariwisata
						Jumlah Kunjungan Wisatawan	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	D. Lingkungan Hidup
				Persentase Bauran Energi		Persentase Bauran Energi	D. ESDM
				Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi		Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	Dinas Kehutanan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
		Indeks Resiko bencana (IRB)	Meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Resiko bencana (IRB)	Meningkatnya kapasitas daerah menghadapi bencana	Indeks Resiko bencana (IRB)	BPBD
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan Daerah	Skor PPH	Tersedia Pangan yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	D. Ketahanan Pangan
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kepulauan secara merata		Tingkat Kemiskinan					
		Indeks Gini					
	Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima bantuan sosial	Meningkatnya kualitas sistem jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial	Menurunnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Dinsos
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan perumahan masyarakat	Luas permukiman kumuh	Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Rasio rumah layak huni	D. Perkim
	Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya angkatan kerja kualitas	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	D. NAKERTRANSI



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Modal Sosial	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Modal Sosial	Menciptakan Suasana Kondusif	Persentase Penanganan Perda dan Perkada	Satpol
						Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Satpol
						Persentase Konflik yang tertangani	Bakesbangpol
						Persentase Tindak Kriminal yang tertangani	Bakesbangpol
						Persentase Tingkat Kesadaran Masyarakat akan cinta tanah air	Bakesbangpol
						Persentase parpol penerima bantuan keuangan	Bakesbangpol
					Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi	Persentase peningkatan ormas yang terdaftar	Bakesbangpol
	Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penduduk dengan daya dukung dan daya	Laju Pertumbuhan Penduduk	Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung	Laju Pertumbuhan Penduduk	Mengendalikan kuantitas penduduk dan meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan	Total Fertility Rate (TFR)	Dukcapil
						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
	tampung lingkungan dan kondisi sosial budaya		lingkungan dan kondisi perkembangan sosial budaya			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	
						Status Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berprinsip Good Governance		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)					
	Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang profesional karakteristik, dan berintegrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai Sakip	Semua OPD
						Opini BPK	BPKAD
						Indeks Pelayanan Publik	Biro Organisasi, RSUD dan Bapenda
						Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPSTP
			Meningkatnya tingkat kematangan APIP	Level Maturitas SPIP	Meningkatnya tingkat kematangan APIP	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat
			Meningkatnya kualitas pelayanan DPRD	Persentase Fasilitasi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan DPRD	Persentase Fasilitasi DPRD	Sekretariat DPRD



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
			Meningkatnya kualitas pengoordinasian dan tindak lanjut kebijakan daerah	Persentase kebijakan daerah yang ditindaklanjuti	Meningkatnya kualitas pengoordinasian penyusunan dan tindak lanjut kebijakan daerah	Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
						Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklanjuti	
						Persentase pengoordinasian kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	
						Persentase pengoordinasian kebijakan daerah bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	
						Persentase pengoordinasian kebijakan daerah bidang pengadaan barang dan jasa	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
						Persentase pengoordinasian kebijakan daerah bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti	
						Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, dan bidang tata laksana	
						Persentase kebijakan daerah bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset dan tata usaha	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
						Persentase kebijakan daerah bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, bidang materi, dan komunikasi pimpinan dan bidang protokol	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kantor penghubung	Persentase pelayanan kantor penghubung	Meningkatnya kualitas pelayanan penghubung	Persentase pelayanan penghubung	Badan Penghubung
			Terwujudnya pengelolaan arsip	Nilai pengawasan kearsipan	Terwujudnya pengelolaan arsip	Nilai pengawasan kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
				Persentase implementasi rencana kelitbangan	Peningkatan implementasi dalam kelitbangan pembangunan	Persentase rencana kelitbangan yang diteliti	
				Predikat indeks inovasi daerah	Terwujudnya Provinsi Maluku yang Inovatif	Predikat indeks inovasi daerah	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
			Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Bappeda & BPKAD
			Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Meryt Provinsi Maluku	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Meryt Provinsi Maluku	BKD
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi Sumber Daya Aparatur	Nilai Akreditasi Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BPSDM
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Persentase pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	D. Kominfo
						Persentase pemanfaatan dan pengembangan layanan portal website	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
						Pemerintah Provinsi Maluku	



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun dalam menjamin pencapaian tujuan dan sasaran RPD dalam kurun waktu 2025 – 2026. Pembahasan pada Bab ini tidak terlepas dari permasalahan dan isu strategis yang dikemukakan pada bab IV dan serta tujuan, sasaran dan arah pembangunan daerah sebagaimana yang diuraikan pada pada Bab V dan Bab VI sehingga dapat dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026.

Strategi yang dipilih dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran saling berkaitan, maka satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Maluku periode tahun 2025 - 2026 dalam rangka mencapai sasaran RPD, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 6. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025-2026

TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 1 :		
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, produktif, berdaya saing dan berkarakter berbasis budaya inklusif		



TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat kepulauan terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	1. Peningkatan perluasan akses dan mutu jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah 3. Peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kepulauan yang dilaksanakan secara inklusif dan terjangkau	Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan	1. Peningkatan kuantitas & kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat. 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah 3. Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan standar
Sasaran 3 : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Pengembangan partisipasi generasi muda dan peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga
Sasaran 4 : Mewujudkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan	Mengembangkan, memanfaatkan serta membina kemajuan kebudayaan ditengah kemajemukan masyarakat	Penguatan tata kelola kebudayaan dengan fokus pada empat aspek yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	Mengoptimalkan Pengarustamaan Gender	Peningkatan kualitas hidup dan pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan
TUJUAN 2 :		



TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		
Sasaran 6 : Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Produk	Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah melalui penerapan teknologi tepat guna dan hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam	1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan. 2. Produk unggulan daerah untuk pengembangan industri strategis
Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi	Meningkatkan daya saing usaha	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran, serta Jaringan Usahanya
	Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi	Memberikan kemudahan berinvestasi melalui penyederhanaan layanan perizinan
Sasaran 8 : meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas	1. Akselerasi pengembangan peningkatan desa yang mandiri 2. Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
Sasaran 9 : Meningkatnya kinerja pariwisata guna mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas dan ekonomi kreatif	Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	Pengembangan potensi wisata unggulan daerah
Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan



TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 11 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan ketahanan pangan melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan berkelanjutan;	Peningkatan kapasitas produksi, keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman
TUJUAN 3 :		
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kepulauan secara merata		
Sasaran 12 : Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin	Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan	1. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; 2. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.
	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin;
Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja	Meningkatnya keterampilan, kompetensi SDM Tenaga Kerja dan penciptaan lapangan kerja
Sasaran 14 : Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
Sasaran 15 : Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung	peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan persebaran penduduk yang optimal yang	Pengumpulan dan pengolahan data kuantitas, dan persebaran mobilitas penduduk serta kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik tingkat pusat ataupun daerah.



TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
lingkungan dan kondisi sosial budaya	didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	
TUJUAN 4 :		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berprinsip Good Governance		
Sasaran 16 : Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang profesional karakteristik, berintegritas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Penerapan Inovasi Daerah	Melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien.
		1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan 3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 4. Peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan 5. Peningkatan Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 6. Peningkatan Pelayanan Dukungan Pelaksanaan Fungsi DPRD 7. Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran 8. Peningkatan Penerapan Manajemen ASN 9. Peningkatan Kualitas Kompetensi Aparatur

6.2. Tema Pembangunan dan Program Prioritas

Program prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2025 - 2026 merupakan program-program yang dapat dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam yang telah ditetapkan



dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku tahun 2025 - 2026 sekaligus pencapaian visi misi RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005- 2025. Selain itu program prioritas yang telah dirumuskan dan ditetapkan telah memperhatikan permasalahan dan isu strategis. Adapun tema dan prioritas pembangunan daerah serta program prioritas Provinsi Maluku tahun 2025 - 2026, selanjutnya pada penjelasan berikut.

6.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Secara khusus, tema pembangunan tahun 2025 - 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang dimuat dalam RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005 dan momentum/fodasi bagi perwujudan RPJPD 2025 – 2045.

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut: **“Maluku Maju dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kemaritiman”** untuk mewujudkan tema tersebut maka prioritas pembangunan diarahkan pada :

- a) Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata;
- b) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan perluasan lapangan kerja;
- c) Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan;
- d) Peningkatan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;



- e) Peningkatan Pembangunan infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- f) Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.

Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026 yang tersebar ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan ekonomi (*economic resource*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang, antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Berbicara daya saing, banyak aspek yang seyogianya menjadi perhatian. Perlu penataan dalam peningkatan daya saing daerah, seperti produktivitas, nilai tambah dan logistik. Terkait produktivitas, hal utama yang perlu ditata adalah kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan ketrampilan masih sangat dibutuhkan. Nilai tambah produk pun masih rendah, demikian juga logistik dalam kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang masih berbiaya tinggi/mahal harganya. Ketiga faktor ini (produktivitas, nilai tambah dan logistik) saling berkaitan



satu dengan lainnya. Persoalan produktivitas erat kaitannya dengan masalah rendahnya nilai tambah. Rantai produk atau jalur distribusi yang terlalu panjang disertai dengan minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses bisnis usaha juga menjadi salah satu penyebabnya. Dengan demikian strategi yang ingin dilaksanakan diantaranya :

1. Pengembangan industri berbahan baku sumber daya alam;
2. Pengembangan industri skala rumah tangga;
3. Peningkatan kapasitas SDM, bantuan sarana pendukung industri;
4. Akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha serta pengawasan;

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kuantitas pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan tingkat investasi. Investasi yang tinggi akan mendorong peningkatan produksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif pajak, dan memperkuat kerjasama dengan sektor swasta.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya atau proses untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kapasitas masyarakat untuk mengenali, menangani, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya non konstruktif yang memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi, merencanakan dan menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan potensi lokal dan fasilitas yang ada. Bahwasanya pemberdayaan



masayarakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka, namun lebih kepada bagaimana mereka mampu mengusahakan dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar pertumbuhan ekonomi naik dan mensejahterakan.

Sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan regional serta menjadi tumpuan pemerintah dalam pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata dengan berdasarkan pada kebudayaan merupakan suatu kolaborasi yang sangat strategis karena beragamnya kebudayaan dan pariwisata daerah-daerah di Indonesia dapat menjadi perintis utama dalam mencapai tujuan ekonomi. Salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya pariwisatanya yaitu Provinsi Maluku. Maluku dengan gugusan kepulauan yang sangat indah untuk dijadikan potensi pariwisata serta sarat dengan objek wisata sejarah zaman penjajahan dan kebudayaan lain turut memberikan daya tarik yang berbeda. Dalam upaya peningkatan investasi serta pengembangan pariwisata dan budaya daerah, terdapat permasalahan yang harus dihadapi, belum optimalnya daya dukung penanaman modal daerah, dan belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata termasuk infrastruktur penunjangnya.

2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan perluasan lapangan kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu percepatan pengentasan kemiskinan dan didukung dengan arah kebijakan peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu, peningkatan kualitas DTKS



(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), perwujudan ketersediaan pangan pokok daerah, pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM usia kerja. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan daerah, terkendalinya harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan angkatan kerja yang berdaya saing sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Maluku. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi ketiga Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

3. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan

Peningkatan Produktivitas dan nilai tambah produk dilakukan melalui penerapan teknologi tepat guna dan hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam dengan arah kebijakannya yakni Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan serta Produk unggulan daerah untuk pengembangan industri strategis. Sementara untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan berkelanjutan; dengan arah kebijakan Peningkatan kapasitas produksi, keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman



4. Peningkatan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Peningkatan layanan dasar terhadap jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga ke pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar, sehingga strategi yang ingin dilakukan diantaranya :

1. Penyediaan dan rehabilitasi sarana prasana pendidikan;
2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Bantuan penyelenggaraan pendidikan yang murah bagi siswa miskin;
4. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;



5. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;
6. Peningkatan jumlah dan kualitas dokter serta tenaga kesehatan lainnya;
7. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan

5. Peningkatan Pembangunan infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;

Dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan aksesibilitas serta sarana dan prasarana di wilayah Maluku, terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah dikarenakan masih tingginya ketimpangan pembangunan wilayah dan belum optimalnya konektivitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas dengan arah kebijakan akselerasi pengembangan pembangunan desa yang mandiri dan penguatan konektivitas antar wilayah. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mendukung peningkatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah serta mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian pada misi keempat Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau.



Pada wilayah Provinsi Maluku, lingkungan hidup menjadi suatu isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Isu lingkungan yang ada di wilayah Maluku di antaranya yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum optimal, alih fungsi lahan, serta kerentanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mengupayakan pengendalian lingkungan dalam pembangunan yang dilakukan, menemukan permasalahan, yaitu belum optimalnya peningkatan ketahanan lingkungan hidup dan belum optimalnya mitigasi dan ketahanan bencana.

6. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.

Optimalisasi reformasi birokrasi menuju good governance bertujuan untuk menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfer budaya kerja yang baik. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, inovatif dan berprinsip *good governance* maka kebijakan yang akan ditempuh yakni :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



2. Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
4. Peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan
5. Peningkatan Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Peningkatan Pelayanan Dukungan Pelaksanaan Fungsi DPRD
7. Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran
8. Peningkatan Penerapan Manajemen ASN
9. Peningkatan Kualitas Kompetensi Aparatur

6.2.2. Program Prioritas

Program Prioritas merupakan program yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2026 yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025 - 2026. Program prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026 beserta indikator kinerja disajikan pada tabel 6.2 berikut.



Tabel 6. 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD Provinsi Maluku

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan : 1 Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, produktif, berdaya saing dan berkarkter berbasis budaya inklusif											
		Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	72,75	74,72		75,63		
		Indeks Pembangunan Gender			Indeks	n/a	93,58		93,70		
	Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat kepulauan terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah			Tahun	14,08	14,05		14,07		
		Rata-rata lama sekolah			Tahun	10,20	10,29		10,37		
			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/Sederajat	%	79,9	79,49	481,055,624,964	79,46	497,236,558,528	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/Sederajat	%	66,16	66,34		66,71		Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Angka Partisipasi Kasar SLB	%						Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Angka Kelulusan Sekolah Menengah	%						Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	1:13	1:20	21,811,970,250	1:20	22,902,568,763	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Manusia	%						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kepulauan yang dilaksanakan secara inklusif dan terjangkau	Usia harapan hidup			Tahun	70,45	70,85		71,82		



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidu	Angka	69	113	156,572,577,195	110	156,903,044,507	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6/1000 kelahiran	6		5		
				Prevalensi Stunting pada Balita	%	26,1	19		17		
				Presentase Kab/Kota yang melakukan respon KLB/ Wabah	%	100	100		100		
				Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	100		100		
				Jumlah Kabupaten/ Kota yang Eliminasi Malaria	Jumlah	3	2		2		
				Persentase Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon	%	98	95		100		
				persentase Penduduk yang terlayani dengan Jaminan Kesehata	%	95	98		100		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Rasio dokter dengan Penduduk	%	41,8 : 100.000	40 : 100.000	26,042,177,760	41:100.000	28,047,582,154	Dinas Kesehatan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
			Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	18,8	19		20		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kab/ Kota dengan minimal 80% posyandu aktif	%	n.a	75		85		Dinas Kesehatan
	Sasaran 3 :Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda			Indeks	54,5	58,11		58,97		
		Indeks Pembangunan Olahraga			Indeks	0,451	0,467		0,478		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	%	98,12	100	4,605,000,000	100	7,550,000,000	Dinas Pemuda & Olahraga
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Tingkat Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	%	107,33	100	8,570,000,000	100	8,900,000,000	Dinas Pemuda & Olahraga
	Sasaran 4 : Mewujudkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan			Indeks	n.a	53,65		53,53		
			Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	68		810,337,500		850,854,375	Dinas Pendidikan & Kebudayaan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	n.a	28	926,100,000	30	972,405,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender			Indeks	93,74	93,58		98,70		
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	64,5	68	150,000,000	70	152,000,000	DP3A
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	100	22		25		
			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan Korban Kekerasan	%	100	55	483,333,334	65	490,583,333	DP3A
				Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan	%	100	50		60		DP3A
				Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	50		60		
				Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	60		70		



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
				Rasio KDRT	Rasio	0,01	0,25		0,15		
				Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Rasio	0,03	1		0,05		
			Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	45	51	483,333,333	51,5	490,583,334	
				Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	75	0		0		
				Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	18,53	23,2		25		
Tujuan 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan											
		Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	5,69	5,79		6,35		
		Indeks Infrastruktur			Indeks	84,61	90,82		93,3		
		Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			%	23,4	24,17		23,77		
		Tingkat Inflasi			%	2,81	2,08 – 3,66		2,89- 3,84		



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
		Indeks Wiliamson			Indeks	0,285	0,580		0,630		
	Sasaran 6 : Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Produk	LPE Sektor Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			%	5,66	5,81		6,34		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Pertanian	Ton	509 887.06		19,527,319,270		17,615,315,598	Dinas Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Komoditas Pertanian	Ton	509 887.06		8,984,368,537		8,749,914,659	Dinas Pertanian
			Program Pengelolaan Hutan	Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan	Jumlah	18	39	29,069,140,956	38	28,537,388,314	Dinas Kehutanan
				Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi (Ha)	Ha	364,24	67		73		
				Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibangun (Unit)	unit	-	30		40		
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	Angka	n.a	78	942.188.929	79	1.036.407.822	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	413878,61	511.435,90	38.104.528.550		38.104.528.550	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	224182,63	236	6.781.881.040	247	7.460.069.144	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikelola	Ha	2.053.582	2.053.582,18	4.239.092.000	2.198.747,25	4.663.001.200	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan	%	76,23	90	1.765.786.000	90	1.942.364.600	Dinas Kelautan dan Perikanan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
			Kelautan dan Perikanan	Perikanan terhadap Perundang							
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan		0	78	942.188.929	79	1.036.407.822	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Terlaksananya Perizinan Usaha Pertanian	%	100	100	129.400.000	100	149.995.066	Dinas Pertanian
			Program Pengelolaan Hutan	Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan	Lokasi	18	39	17.513.131.345	38	16.429.440.657	Dinas Kehutanan
				Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi	Ha	364,24	67	11.206.009.611	73	11.740.447.657	Dinas Kehutanan
				Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibangun	Unit	-	30	350.000.000	40	367.500.000	Dinas Kehutanan
	Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi	LPE Lap. Usaha Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan			%	n/a	21,03		24,30		
		Nilai investasi PMA/PMDN			Triliun Rupiah	3,478	3,799		3,987		
			Perencanaan dan pembangunan Industri	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Org	38.668	39.128	5,793,804,838	39.683	4,775,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	n/a	38,5	650.000.000	42,3	663.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Unit	n/a		150,000,000		200,000,000	Dinas Koperasi & UKM
			Pemberdayaan UMKM	Terlaksananya Perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Unit	70	90	1,160,500,000	100	1,276,550,000	Dinas Koperasi & UKM
			Pengembangan UMKM	Terciptanya UMKM yang unggul dan berdaya saing	Unit	70	90	220,008,000	100	242,008,800	Dinas Koperasi & UKM
			Program Pengembangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	92,5	93,5	303,519,900	94	150,369.000	Dinas. PTSP



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
			Iklim Penanaman Modal								
	Sasaran 8 :Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Rasio Konektivitas			Rasio	0,766	0,784		0,793		
		Indeks Wiliamson			Indeks	0,285	0,580		0,630		
		Indeks Infrastruktur			Indeks	84,61	90,82		93,3		
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa baik	%	2	5	750.000.000	7	800.000.000	DPMD
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	%	50,18	52	113,080,333,007	54	114,761,636,337	PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	77,79	80,65	8,038,604,295,00	82	8,174,879,136.70	PUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan RTRW	%	73	100	750,000,000	100	750,000,000	PUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi Jalan	%	3,24	9	6,845,000,000	9	6,279,750,000	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pertumbuhan Lintasan Angkutan Penyeberangan	%	0	1,64	9,770,000,000	3,23	10,258,500,000	
				Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis	%	4,35	5,26		5,00		



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
	Sasaran 9 : Meningkatnya kinerja pariwisata guna mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas dan ekonomi kreatif	Persentase PDRB Sektor Pariwisata			%	6,5	6,52		6,53		
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pertumbuhan Desa Wisata	%	3		2.428.558.800	37	6.000.000.000	Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	%	5	5	1.800.000.000	5	1.900.000.000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi di Provinsi Maluku	Orang	325	350	1.800.000.000	375	1.900.000.000	
	Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			%	23,4	24,17		23,77		
		Indeks Risiko Bencana			Indeks	160,05	159,90		159,85		
			Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,75	82,19	497.669.343	82,33	706.340.240	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penguana Listrik dan Rasio	Unit	77	150	1.000.000.000	200	1.015.000.000	Dinas ESDM



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
				Penurunan Emisi GRK Sektor Energi							
			Program Penanggulangan Bencana	Menurunnya Indeks risiko bencana di daerah	Indeks	160.03	159,90	1.270.475.798	159,85	1.289.532.935	BPBD
	Sasaran 11 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)			%	66,85	72,25		79,03		
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	75,09	76	1.549.293.472	77	1.649.520.999	Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan 3 : Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kepulauan secara merata											
		Tingkat Kemiskinan			%	16,42	15,47		15,07		
		Indeks Gini			%	0,288	0,278		0,269		
	Sasaran 12 : Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin	Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima bantuan sosial			Orang	43,63	47		50		
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang Mendapat Bantuan Sosial	%	94,00	100	4.330.807.255		4.330.807.255	Dinas Sosial
				Persentase Remaja Putus Sekolah, Anak Berhadapan dengan Hukum / Respons Kasus	%	n.a	100				
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Bantuan Sosial	%	n.a	100		100		Dinas Sosial
				Persentase Disabilitas Terlantar yang Mendapat Bantuan Sosial	%	n.a	100		100		



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan atau KAT yang Mendapat Bantuan Sosial	%	90	100	1.545.777.600	100	1.545.777.600	
			Program Kawasan Permukiman	Presentase permukiman yang tertata	%	98	100	5.939.000.000	100	6.330.000.000	Dinas Perkim
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	98	100	575.755.800	100	575.755.800	Dinas Sosial
	Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka			%	6,31	6,06		5,84		
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	0,48	0,48	190,000,000	0,48	210,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,25	0,18	700,000,000	0,18	725,000,000	
	Sasaran 14 : Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Modal Sosial			Indeks	n.a	80,43		82,33		
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan dalam rangka pencegahan, pengedaran dan penyalahgunaan narkoba	Jumlah	n.a	2	281,282,820	2	295,346,961	Kesbangpol
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	125.044.416	100	159.028.350	Satpol PP
	Sasaran 15 : Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penduduk dengan	Laju Pertumbuhan Penduduk			%	0,98	1,07		1,09		



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
	daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kondisi sosial budaya										
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	%	111	44,72	154,606,283	44,92	168.129,592	Dukcapil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam 1 Tahun	%	100	100	154,606,283	100	168,129,592	Dukcapil
Tujuan 3 : Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kepulauan secara merata											
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Indeks	n.a	BB		BB		
	Sasaran 16 : Meningkatnya penyelenggaran birokrasi pemerintah yang profesional karakteristik, berintegritas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Indeks	n.a	BB		BB		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Nilai	n.a	3,23		3,43		
			Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku	%	100	100	6.747.743.862	100	5.487.743.382	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah penelitian yang dihasilkan setiap tahun	Dok	3	100	2,213,612,765	100	2,328,205,102	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	Kondisi Awal	Target Kienerja dan Kerangka Pedanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok	11	100	7.759.514.584	100	7.874.106.885	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Dok	9	100	8.998.419.671	100	9.113.012.008	
			Program Pengawasan internal								
			Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengawasan	Indeks	3	-	3.050.858.582	-	3.096.621.460	Inspektorat
				Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	-	-	-	-	-	-
				Level Maturitas SPIP	Level	-	-	-	-	-	-
			Program pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	89,43	100	58.717.426.480,00	100	59.707.426.763,00	Sekretariat DPRD
			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	Poin	209,5	300	4.053.570.140	300	4.100.000.000	BKD
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	4,477,356,472	100	4,925,092,119	BPSDM



6.3 ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

6.3.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah

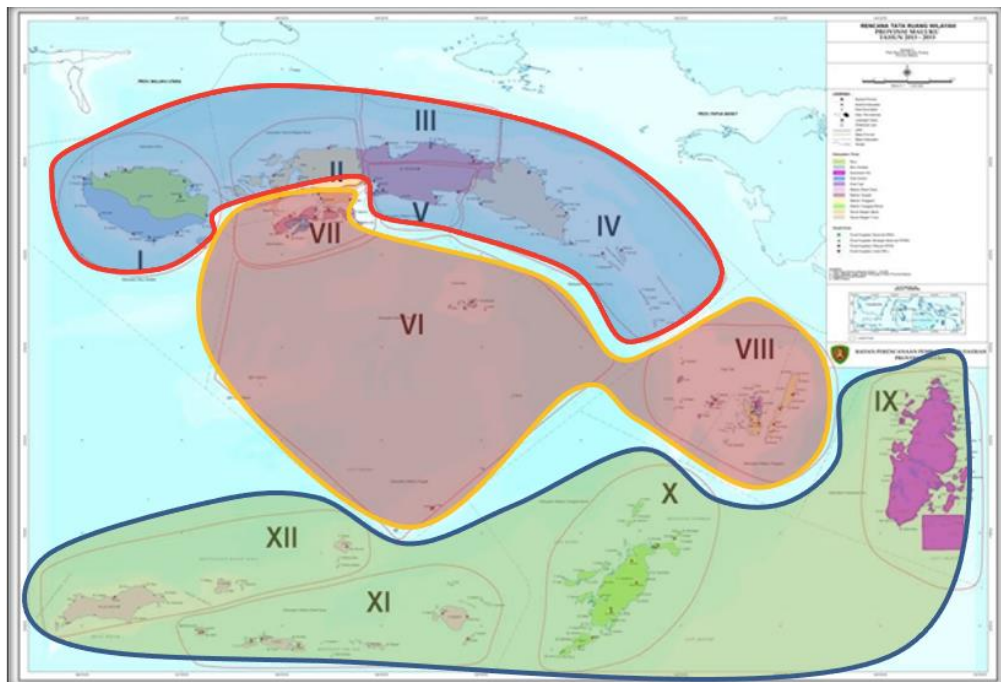
Kebijakan pengembangan wilayah berfungsi untuk menetapkan fokus pengembangan secara kewilayahan sesuai dengan karakteristik, potensi kewilayahan, ketersediaan daya dukung dan daya tampung pada fungsi kawasan yang mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan pembentukan gugus pulau, kebijakan pengembangan wilayah akan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antar wilayah di Provinsi Maluku. Strategi kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Maluku terdiri dari:

1. Pembagian 8 (delapan) Wilayah Pengembangan meliputi: Pulau Buru, Ambon dan Pulau-pulau Lease, Pulau Seram, Kepulauan Banda, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Maluku Barat Daya;
2. Penentuan keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan berdasarkan gugus pulau yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pengembangan wilayah sehingga kesenjangan pembangunan bisa dikurangi. Penentuan keterkaitan fungsional antar WP ini meliputi tiga bagian:
 - a. Kawasan yang terletak di gugus pulau I, II, III, IV, dan V mencakup WP Pulau Buru dan WP Pulau Seram menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan budidaya dengan tujuan ekonomis seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
 - b. Kawasan yang terletak di gugus pulau VI, VII, dan VIII mencakup WP Kepulauan banda, WP Ambon dan Pulau-pulau Lease, dan WP Kepulauan Kei menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata, kebudayaan, dan melibatkan pengembangan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kerentanan terhadap resiko bencana alam dan non alam, serta sedapat mungkin menghindari alih fungsi lahan lindung dan pertanian;

- c. Kawasan yang terletak di gugus pulau IX, X, XI, dan XII mencakup WP Kepulauan Aru, WP Kepulauan Tanimbar, dan WP Kepulauan Maluku Barat Daya menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan budidaya perikanan, peternakan, dan pertambangan. Kegiatan-kegiatan ini merupakan prioritas pembangunan Provinsi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tanpa harus mengorbankan fungsi-fungsi lingkungan.

Keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan ini dapat dilihat di gambar berikut.

Gambar 6. 1 Peta Keterkaitan Antar Wilayah Pengembangan dalam Gugus Pulau



Sumber: RTRW Provinsi Maluku setelah diolah, 2021

6.3.2 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan kepada berbagai faktor dan merupakan integrasi pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perumusan ini dibuat mempertimbangkan sinkronisasi kebijakan dan arah pengembangan di setiap Wilayah Pengembangan, dikaitkan dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033, RPJPD Provinsi Maluku, yang diselaraskan dengan program prioritas dan program pembangunan daerah serta program unggulan pimpinan daerah. Alur kerangka pikir perumusan arah kebijakan kewilayahan dirumuskan sebagaimana dalam gambar berikut ini:

Gambar 6. 2 Kerangka Pikir Perumusan Arah Kebijakan Kewilayahan



Kerangka Pikir Perumusan Arah Kebijakan Kewilayahan

Sumber: Hasil analisis, 2021

Dengan demikian strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam 2 tahun (2025 - 2026) mendatang secara umum diarahkan untuk mendukung:

1. Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di setiap Gugus Pulau;
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di setiap Gugus Pulau;
4. Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan menghadapi bencana;



5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah melalui kawasan budidaya; dan
6. Optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah.

Berikut ini adalah arah kebijakan yang telah disesuaikan dengan fokus wilayah pembangunan Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian gugus pulau,

Tabel 6. 3 Strategi, Arah Kebijakan dan Fokus Wilayah Pembangunan Kabupaten/Kota

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Peningkatan perluasan akses dan mutu jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Gugus I, II, III, IV, V, dan IX.
	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah	12 Gugus pulau
	Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar	12 Gugus pulau
	Peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat	12 Gugus pulau
Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan	Peningkatan kuantitas & kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	12 Gugus pulau
	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah	12 Gugus pulau
	Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan standar	12 Gugus pulau
Pengembangan partisipasi generasi muda dan peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga	12 Gugus pulau



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Mengembangkan, memanfaatkan serta membina kemajuan kebudayaan ditengah kemajemukan masyarakat	Penguatan tata kelola kebudayaan dengan fokus pada empat aspek yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	12 Gugus pulau
Mengoptimalkan Pengarustamaan Gender	Peningkatan kualitas hidup dan pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam Pembangunan	12 Gugus pulau
Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah melalui penerapan teknologi tepat guna dan potensi unggulan berbasis sumber daya alam	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan.	Gugus I, VII, IX, X, XI, XII
	Produk unggulan daerah untuk pengembangan industri strategis	Gugus II, III, IV, V
Meningkatkan daya saing usaha	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran, serta Jaringan Usahanya	12 Gugus pulau
	Memberikan kemudahan berinvestasi melalui penyerderhanaan layanan prima	Gugus II, III, IV, VI, VIII, IX, X
Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas	Akselerasi pengembangan peningkatan desa yang mandiri	12 Gugus pulau
	Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	12 Gugus pulau
Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	Pengembangan potensi wisata unggulan daerah	Gugus VI, VII, VIII,
Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan	12 Gugus pulau
Peningkatan ketahanan pangan melalui pembangunan	Peningkatan kapasitas produksi, keterjangkauan dan kecukupan	12 Gugus pulau



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan berkelanjutan;	pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman	
Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;	12 Gugus pulau
	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.	12 Gugus pulau
Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin;	12 Gugus pulau
Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja	Meningkatnya keterampilan, kompetensi SDM Tenaga Kerja dan penciptaan lapangan kerja	12 Gugus pulau
Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	12 Gugus pulau
peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan persebaran penduduk yang optimal yang didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengumpulan dan pengolahan data kuantitas, dan persebaran mobilitas penduduk serta kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik tingkat pusat ataupun daerah.	12 Gugus pulau
Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Penerapan Inovasi Daerah	Melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien.	12 Gugus pulau

Sumber: Diolah dari RTRW, 2023



6.3.3 Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW bertujuan untuk mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW Nasional dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan masyarakat. Dalam dokumen RTRW, dijelaskan secara rinci mengenai pembangunan berdasarkan zonasi di Provinsi Maluku selama 20 tahun ke depan yaitu dari 2013-2033. Kawasan strategis Provinsi di Provinsi Maluku meliputi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta lingkungan. Jenis kawasan strategis Provinsi di Provinsi Maluku yaitu :

1. Kawasan strategi dari Aspek Kepentingan Pertahanan dan Keamanan, yang meliputi :
 - a. Kepulauan Aru;
 - b. Kepulauan Tanimbar;
 - c. Kepulauan Babar;
 - d. Kepulauan Leti – Moa – Lakor;
 - e. Pulau Kisar;
 - f. Pulau Wetar;
 - g. Pulau Lirang
2. Kawasan strategi dari Aspek Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yang meliputi :
 - a. Kawasan Seram Barat (GP 2);
 - b. Kawasan Seram Selatan (GP 5);
 - c. Kawasan Seram Timur (GP 4);
 - d. Kawasan Seram Utara (GP 3);
 - e. Kawasan Pulau Buru (GP 1);
 - f. Kota Ambon (GP 7);
 - g. Kepulauan Tanimbar (GP 10);
 - h. Kepulauan Kei (GP 8);
 - i. Kawasan Bula (GP 4);



- j. Kawasan Benjina (GP 9);
- k. Zona Industri Seram Selatan (GP 5);
- l. Kawasan Ambon – Natsepa – Tulehu – Liang.

3. Kawasan Strategis dari Aspek Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi seluruh kawasan darat dan laut kabupaten/kota di Provinsi Maluku, terutama di :

- a. Teluk Ambon (GP 7);
- b. Kawasan Bula (GP 4);
- c. Kawasan Buru (GP 1);

Tabel 6. 4 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi

NO.	KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1.	Kepulauan Aru; Kepulauan Tanimbar; Kepulauan Babar; Kepulauan Leti – Moa – Lakor; Pulau Kisar; Pulau Wetar; dan Pulau Lirang	Pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Provinsi.	Mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman.
2	Kawasan Seram Barat (GP 2); Kawasan Seram Selatan (GP 5); Kawasan Seram Timur (GP 4); Kawasan Seram Utara (GP 3); Kawasan Pulau Buru (GP 1); Kota Ambon (GP 7); Kepulauan Tanimbar (GP 10);	Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA, SDM, dan sumber daya lainnya di kawasan kepulauan yang mencakup wilayah darat dan laut (perairan).	Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan.



NO.	KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
	Kepulauan Kei (GP 8); Kawasan Bula (GP 4); Kawasan Benjina (GP 9); Zona Industri Seram Selatan (GP 5); dan Kawasan Ambon – Natsepa – Tulehu – Liang.		
3	Teluk Ambon (GP 7); Kawasan Bula (GP 4); dan Kawasan Buru (GP 1);	Peningkatan fungsi lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan sekitarnya.	Mengendalikan kegiatan budi daya pada kawasan strategis yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan serta daya dukung lingkungan, termasuk pengendalian alih fungsi kawasan lindung.

Arah kebijakan pembangunan yang melingkupi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku dirumuskan untuk mendukung capaian lima indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB Perkapita.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama dua tahun ke depan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, struktur keuangan pemerintah daerah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui program/kegiatan.

Pelaksanaan pembangunan selama dua tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan sebagaimana tertuang dalam Bab III. Pendapatan daerah pada tahun 2025-2026 diproyeksikan mengalami fluktuasi sebagai dampak penerapan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD. Proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Maluku tahun 2025-2026 secara lengkap sebagaimana tabel berikut.



Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Provinsi Maluku Tahun
2025-2026

URAIAN PENDAPATAN DAERAH 1		JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2025 2	TAHUN 2026 3
PENDAPATAN ASLI DAERAH		707.506.204.020	713.948.965.038
1	Pajak Daerah	533.646.437.867	536.314.670.056
2	Retribusi Daerah	25.112.397.551	26.136.926.380
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.549.368.602	24.549.368.602
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124.198.000.000	126.948.000.000
PENDAPATAN TRANSFER		2.553.886.677.000	2.609.396.931.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.553.886.677.000	2.609.396.931.100
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		250.000.000	300.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		3.261.642.881.020	3.323.645.896.038
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI DAN MODAL		2.885.061.357.307	2.942.561.223.925
BELANJA TAK TERDUGA		15.000.000.000	20.000.000.000
BELANJA TRANSFER		299.909.298.081	301.408.844.571
JUMLAH BELANJA		3.199.970.655.388	3.263.970.068.496
SURPLUS/DEFISIT		61.672.225.632	59.675.827.542
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		75.000.000.000	50.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000	50.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		136.672.225.632	136.672.225.632
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	136.672.225.632	136.672.225.632

7.2 Rencana Program Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Maluku tahun 2025– 2026 didukung dengan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Provinsi Maluku. Rencana program yang ditetapkan menjadi program perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026 menjadi kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan,



7 (tujuh) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

7.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Rencana program perangkat daerah urusan pendidikan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengelolaan Pendidikan*
- b) *Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan*

B. Kesehatan

Rencana program perangkat daerah urusan kesehatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,*
- b) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*
- c) *Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman*
- d) *Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,*

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*
- b) *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*



- c) *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah*
- d) *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase*
- e) *Program Pengembangan Permukiman*
- f) *Program Penataan Bangunan Gedung*
- g) *Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya*
- h) *Program Penyelenggaraan Jalan*
- i) *Program Pengembangan Jasa Konstruksi*
- j) *Program Penyelenggaraan Penataan Ruang*

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program perangkat daerah urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengembangan Perumahan*
- b) *Program Kawasan Permukiman*
- c) *Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)*

E. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program perangkat daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*
- b) *Program Penanggulangan Bencana*
- c) *Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*



F. Sosial

Rencana program perangkat daerah urusan sosial yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pemberdayaan Sosial*
- b) *Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan*
- c) *Program Rehabilitasi Sosial*
- d) *Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*
- e) *Program Penanganan Bencana*
- f) *Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan*

7.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Rencana program urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Perencanaan Tenaga Kerja*
- b) *Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja*
- c) *Program Penempatan Tenaga Kerja*
- d) *Program Hubungan Industrial*
- e) *Program Pengawasan Ketenagakerjaan*

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*



- b) *Program Perlindungan Perempuan*
- c) *Program Peningkatan Kualitas Keluarga*
- d) *Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak*
- e) *Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)*
- f) *Program Perlindungan Khusus Anak*

C. Pangan

Rencana program perangkat daerah urusan pangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat*
- b) *Program Penanganan Kerawanan Pangan*
- c) *Program Pengawasan Keamanan Pangan*
- d) *Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan*

D. Pertanian

Rencana program perangkat daerah urusan pertanian yang akan dilaksanakan melalui *Program Penatagunaan Tanah*

E. Lingkungan Hidup

Rencana program perangkat daerah urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Perencanaan Lingkungan Hidup*
- b) *Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*
- c) *Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*



- d) *Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*
- e) *Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*
- f) *Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat*
- g) *Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat*
- h) *Program Pengelolaan Persampahan*
- i) *Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup*

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program perangkat daerah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pendaftaran Penduduk*
- b) *Program Pencatatan Sipil*
- c) *Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.*
- d) *Program Pengelolaan Profil Kependudukan*

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program perangkat daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Penataan Desa*
- b) *Program Peningkatan Kerjasama Desa*
- c) *Program Administrasi Pemerintahan Desa*
- d) *Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga*



Adat dan Masyarakat Hukum Adat

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengendalian Penduduk*
- b) *Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*
- c) *Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)*

I. Perhubungan

Rencana program perangkat daerah urusan perhubungan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)*
- b) *Program Pengelolaan Pelayaran*
- c) *Program Pengelolaan Perkeretaapian*

J. Komunikasi dan Informatika

Rencana program perangkat daerah urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik*
- b) *Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program perangkat daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*
- b) *Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi*



- c) *Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*
- d) *Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi*
- e) *Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)*
- f) *Program Pengembangan UMKM*

L. Penanaman Modal

Rencana program perangkat daerah urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*
- b) *Program Promosi Penanaman Modal*
- c) *Program Pelayanan Penanaman Modal*
- d) *Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*
- e) *Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*

M. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program perangkat daerah urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan*
- b) *Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan*
- c) *Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*

N. Statistik

Rencana program perangkat daerah urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah *Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*

O. Persandian



Rencana program perangkat daerah urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah *Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi*

P. Kebudayaan

Rencana program perangkat daerah urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengembangan Kebudayaan*
- b) *Program Pengembangan Kesenian Tradisional*
- c) *Program Pembinaan Sejarah*
- d) *Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya*
- e) *Program Pengelolaan Permuseuman*

Q. Perpustakaan

Rencana program perangkat daerah urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pembinaan Perpustakaan*
- b) *Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno*

R. Kearsipan

Rencana program perangkat daerah urusan kearsipan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengelolaan Arsip*
- b) *Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip*
- c) *Program Perizinan Penggunaan Arsip*

7.2.3 Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan



Rencana program perangkat daerah urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a) *Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*
- b) *Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*
- c) *Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*
- d) *Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*
- e) *Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan*

B. Pariwisata

Rencana program perangkat daerah urusan pariwisata yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*
- b) *Program Pemasaran Pariwisata*
- c) *Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*
- d) *Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

C. Pertanian

Rencana program perangkat daerah urusan pertanian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian*
- b) *Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian*
- c) *Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*
- d) *Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian*



- e) *Program Penyuluhan*
- f) *Program Perizinan Pertanian*

D. Kehutanan

Rencana program perangkat daerah urusan kehutanan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengelolaan Hutan*
- b) *Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*
- c) *Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan*
- d) *Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)*

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program perangkat daerah urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengelolaan Aspek Kegeologian*
- b) *Program Pengelolaan Mineral dan Batubara*
- c) *Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan*
- d) *Program Pengelolaan Ketenagalistrikan*

F. Perdagangan

Rencana program perangkat daerah urusan perdagangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan*
- b) *Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan*
- c) *Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*



- d) *Program Pengembangan Ekspor*
- e) *Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen*

G. Perindustrian

Rencana program perangkat daerah urusan perindustrian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Perencanaan dan Pembangunan Industri*

H. Transmigrasi

Rencana program perangkat daerah urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut *Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi*

7.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Rencana program perangkat daerah pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Penataan Organisasi*
- b) *Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah*
- c) *Program Kesejahteraan Rakyat*
- d) *Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*
- e) *Program Perekonomian dan Pembangunan*
- f) *Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa*
- g) *Program Kebijakan Administrasi Pembangunan*

B. Sekretariat DPRD

Rencana program perangkat daerah pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan



adalah melalui *Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD*

7.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

Rencana program perangkat daerah pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*
- b) *Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*

B. Keuangan

Rencana program perangkat daerah pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Pengelolaan Keuangan Daerah*
- b) *Program Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- c) *Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*

C. Kepegawaian

Rencana program perangkat daerah unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah melalui *Program Kepegawaian Daerah*

D. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program perangkat daerah unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah melalui *Program Pengembangan Sumber Daya Manusia*

E. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program perangkat daerah unsur penelitian dan



pengembangan yang akan dilaksanakan adalah melalui *Program Penelitian dan Pengembangan Daerah*

F. Pengelolaan Perbatasan

Rencana program perangkat daerah unsur pengelolaan Perbatasan yang akan dilaksanakan adalah melalui *Program Pengelolaan Perbatasan*

G. Penghubung

Rencana program perangkat daerah unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah melalui *Program Pelayanan Penghubung*

H. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program perangkat daerah pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Penyelenggaraan Pengawasan*
- b) *Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi*

I. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program perangkat daerah pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) *Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*
- b) *Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik*
- c) *Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*
- d) *Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya*



e) *Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial*

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu : *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*.

Secara rinci rencana program perangkat daerah pembangunan daerah tahun 2025- 2026 beserta indikator dan pagu indikatifnya dapat dilihat dalam Tabel 7.2 berikut.



Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2024		2025		2026		K	Rp		
				K	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			538.894.735.120		414.276.366.730		422.561.894.065		422.561.894.065	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	100		100		100		100		
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			20.773.305.000		18.139.781.000		18.502.576.620		18.502.576.620	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	01.20		01.20		01.20		01.20		
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			3.006.353.179		3.006.353.179		3.066.480.243		3.066.480.243	DINAS PERTANIAN
				Angka partisipasi sekolah	98,25%		98,75 %		98,90 %		98,90 %		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			154.913.578.261		156.392.577.195		159.520.428.739		159.520.428.739	DINAS KESEHATAN
				Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	116		113		110		110		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6		6		6		5		DINAS KESEHATAN
				Prevalensi Stunting pada Balita	20		19		17		17		DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/Kota yang melakukan respon KLB/ Wabah	100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
				Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
				Jumlah Kabupaten/ Kota yang Eliminasi Malaria	2		2		2		9		DINAS KESEHATAN
				Persentase Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon	90%		95%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
				Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengendalian konsumsi rokok pada penduduk 10 - 18 tahun	7		9		11		11		DINAS KESEHATAN
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	100%		100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
				persentase Penduduk yang terlayani dengan Jaminan Kesehatan	97%		98%		100%		100%		DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			18.932.067.300		26.042.177.760		26.563.021.315		26.563.021.315	DINAS KESEHATAN
				Rasio dokter dengan Penduduk	40 : 100.000		40 : 100.000		41 : 100.000		41 : 100.000		
				Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	18,18%		19%		20%		20%		DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			-		600.000.000		612.000.000		612.000.000	DINAS KESEHATAN
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial	N/A		60%		65%		65%		
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.451.442.274		1.095.000.000		1.116.900.000		1.116.900.000	DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/ Kota yang menerapkan kebijakan gernas	N/A		45%		65%		65%		DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/ Kota dengan minimal 80% posyandu aktif	N/A		75%		85%		85%		DINAS KESEHATAN
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			36.378.792.420		49.111.369.768		50.093.597.163		50.093.597.163	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Infrastruktur SDA yang tertangani	100%		100%		100%		100%		
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			5.954.521.700		8.038.604.295		8.199.376.381		8.199.376.381	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Penduduk Berakses Air Minum	78,3%		80,65%		82%		82%		
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			N/A		1.500.000.000		1.530.000.000		1.530.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Rasio Pelayanan Pengelolaan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	N/A		20 %		40 %		40 %		
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			3.450.285.000		4.657.884.750		4.751.042.445		4.751.042.445	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Rumah Tinggal Bersantasi	100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
	K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			10.680.633.220		14.418.854.847		14.707.231.944		14.707.231.944	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100%		100%		100,00 %		100%		
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			16.140.633.500		21.789.855.225		22.225.652.330		22.225.652.330	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Penataan Bagunan dan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan	100%		100%		100%		100%		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			77.321.789.899		113.080.333.007		115.341.939.667		115.341.939.667	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Kemantapan Jalan	51%		52%		54%		54%		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			425.000.000		573.750.000		585.225.000		585.225.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100%		100%		100%		100%		
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			599.992.300		750.000.000		765.000.000		765.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Ketaatan RTRW	100%		100%		100%		100%		
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			660.000.000		4.370.967.680		4.458.387.034		6.940.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%		100%		100%		100%		
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			6.890.000.000		6.550.000.000		6.681.000.000		6.330.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase pemukiman yang tertata	100%		100%		100%		100%		
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.100.000.000		3.169.986.004		3.233.385.724		5.340.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase lingkungan pemukiman kumuh	100%		100%		100%		100%		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.248.000.000		1.350.000.000		1.377.000.000		1.377.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Indeks risiko bencana di daerah	160,05		159,9		159,85		159,85		
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			6.931.609.578		7.031.609.578		7.172.241.770		7.172.241.770	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
	K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp			
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			44.999.900		125.044.416		127.545.304		127.545.304	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					100%			100%		100%			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			575.755.800		625.755.800		638.270.916		638.270.916	DINAS SOSIAL
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%		100%		100%		100		
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			103.020.000		103.020.000		105.080.400		105.080.400	DINAS SOSIAL
				Persentase Deportasi / Orang Terlarang	100%		100%		100%		100		
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			4.330.807.255		5.405.407.355		5.513.515.502		5.513.515.502	DINAS SOSIAL
				Persentase Anak Terlarang yang Mendapat Bantuan Sosial	100%		100%		100%		100%		
				Persentase Remaja Putus Sekolah, Anak Berhadapan dengan Hukum / Respons Kasus	N/A	-	100%	-	100%		100%		DINAS SOSIAL
				Persentase Lanjut Usia Terlarang yang Mendapat Bantuan Sosial	N/A	-	100%	-	100%		100%		DINAS SOSIAL
				Persentase Disabilitas Terlarang yang Mendapat Bantuan Sosial	N/A	-	100%	-	100%		100%		DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.545.777.600		1.545.777.600		1.576.693.152		1.576.693.152	DINAS SOSIAL
				Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan atau KAT yang Mendapat Bantuan Sosial	100%		100%		100%		100%		
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			866.980.000		866.980.000		884.319.600		884.319.600	DINAS SOSIAL
				Persentase Korban Bencana Alam yang Mendapat Bantuan Sosial	100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			136.938.400		136.938.400		139.677.168		139.677.168	DINAS SOSIAL
				Jumlah Sarana Prasarana Kesejahteraan Sosial (Kehsos)	100%		100%		100%		100%		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			-		102.750.000		104.805.000		104.805.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0%		20%		20%		20%		
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			-		606.958.500		619.097.670		619.097.670	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,00 %		0,18 %		0,18 %		0,18 %		
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			-		386.502.200		394.232.244		394.232.244	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	0.00 %		0,48%		0,48%		0,48%		
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			-		300.922.000		306.940.440		306.940.440	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0.00 %		7,6 %		7,6 %		7,6 %		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		0		1.117.421.100		1.139.769.522		1.139.769.522	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan		-	8,25%		8,25%		8,25%		
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			269.219.250		200.000.000		204.000.000		204.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	66,2		68		70		70		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD	20		22		25		25		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			507.325.500		519.367.834		529.755.191		529.755.191	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan Korban Kekerasan	32		55		65		65		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan	35		50		60		60		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	25		50		60		60		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50		60		70		70		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Rasio KDRT	0,35		0,25		0,15		0,15		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	1,5		1		0,05		0,05		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
	K	Rp					Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			581.179.200		175.000.000		178.500.000		178.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Meningkatnya Kualitas Keluarga	60		60,5		62,3		62,3		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			166.002.056		300.000.000		306.000.000		306.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Terwujudnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	90,9		91,2		91,2		91,2		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			465.634.380		380.000.000		387.600.000		387.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	100%		100%		100%		100%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			331.634.692		363.333.333		370.600.000		370.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	50		51		51,5		51,5		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	75		0	-	0		0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Rasio Kekerasan Terhadap Anak	20,3		23,2		25		25		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			50.000.000		70.000.000		71.400.000		71.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Persentase Daerah Rawan Pangan	23,70%		20 %		18 %		18%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			534.000.000		1.420.000.000		1.448.400.000		1.448.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	87			76				77		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										
			Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	75,00			75,5				76		
			Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	11			35				40		
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			162.500.000		165.000.000		168.300.000		168.300.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Persentase daerah rentan rawan pangan	23,70%		20%		18%		18%		
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			224.714.300		430.000.000		438.600.000		438.600.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Persentase pengawasan pangan segar yang aman dan bermutu	80%		80%		85%		85%		
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			250.000.000		636.728.949		649.463.528		649.463.528	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	100%		100%		100%		100%		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			-		1.500.000.000		1.530.000.000		1.530.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 poin		82,19 poin		82,33 poin		82,33 poin		
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			374.999.467		597.669.343		609.622.730		609.622.730	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 poin		82,19 poin		82,33 poin		82,33 poin		
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		130.000.078		165.889.781		169.207.577		169.207.577	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					77,16 poin		82,19 poin		82,33 poin		82,33 poin		
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		374.994.691		405.889.781		414.007.577		414.007.577	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					33,33%		33,33%		33,33%		33,33%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			100.000.600		290.000.000		295.800.000		295.800.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 poin		82,19 poin		82,33 poin		82,33 poin		
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100.000.010		165.889.781		169.207.577		169.207.577	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 poin		82,19 poin		82,33 poin		82,33 poin		
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			-		51.779.560		52.815.151		52.815.151	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 poin		82,19 poin		82,33 poin		82,33 poin		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000		102.000.000		102.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 poin		82,43 poin		82,60 poin		82,60 poin		
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			-		150.000.000		153.000.000		153.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 poin		82,19 poin		82,33 poin		82,33 poin		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			279.414.000		231.000.000		235.620.000		235.620.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	90		95		98		98		
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			150.000.000		138.606.283		141.378.409		141.378.409	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun	89%		92%		94%		94%		
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			-		96.606.283		98.538.409		98.538.409	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase OPD Yang telah melaksanakan Pemanfaatan Data Kependudukan	0%		16,22%		16,22%		16,22%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			100.312.000		113.000.000		115.260.000		115.260.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam 1 Tahun	100%		100%		100%		100%		
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA			100.000.000		350.000.000		357.000.000		357.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	75%		65%		70%		70%		
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			125.000.000		500.000.000		510.000.000		510.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase Kawasan Perdesaan yang berkembang	66%		65%		70%		70%		
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			199.999.750		750.000.000		765.000.000		765.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa baik	4%		5%		7%		7%		
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1.725.000.000		3.500.000.000		3.570.000.000		3.570.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase Jumlah Desa dengan Status IDM Mandiri	8,51%		10%		12%		12%		
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			-		152.000.000		155.040.000		155.040.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	46,23%		49,01%		52,62%		52,62%		
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			-		100.000.000		102.000.000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Total Fertility Rate (TFR)	2,46		2,45		2,40		2,72		
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			252.000.000		250.000.000		255.000.000		255.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter	42,68%		43,68%		44,68%		44,68%		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		716.535.640		6.170.000.000		6.293.400.000		6.293.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
			Rasio Konektivitas Provinsi	0,744		0,784		0,793		0,793		
			Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi	9 %		9 %		9 %		9 %		
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		1.669.443.000		9.770.000.000		9.965.400.000		9.965.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
			Rasio Konektivitas Provinsi	0,744		0,784		0,793		0,793		
			Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi	9 %		9 %		9 %		9 %		
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAPIAN				900.000.000		918.000.000		918.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
			Rasio Konektivitas Provinsi			0,784		0,793		0,793		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		2.420.000.000		2.500.000.000		2.550.000.000		5.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Terkelola			75%		75%		75%		
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		2.580.000.000		2.625.000.000		2.677.500.000		5.250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Persentase aplikasi informatika yang dikelola			20%		50%		50%		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		121.004.200		121.004.200		123.424.284		123.424.284	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase koperasi aktif	68,50%		68,50%		68,50%		68,50%		
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		53.995.800		53.995.800		55.075.716		55.075.716	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Terlaksananya pengukuran tingkat kesehatan koperasi	17 Unit		19 Unit		21 Unit		21 Unit		
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		3.260.650.000		3.255.516.000		3.320.626.320		3.320.626.320	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Peningkatan SDM Koperasi dan UKM	518 Orang		518 Orang		518 Orang		518 Orang		
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		175.000.000		175.000.000		178.500.000		178.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	80%		85%		90%		95%		
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			1.055.000.000		1.065.000.000		1.086.300.000		1.086.300.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Terlaksananya Perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	80 Unit		90 Unit		100 Unit		110 Unit		
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			200.080.000		200.080.000		204.081.600		204.081.600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Terciptanya UMKM yang unggul dan berdaya saing	80 Satuan		90 Unit		100 Unit		110 Unit		
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			300.184.950		303.519.900		309.590.298		309.590.298	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah pelaku usaha yang naik kelas	0		5 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha		
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			186.863.700		186.863.700		190.600.974		190.600.974	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah investor yang berminat berinvestasi	0		1 Investor		2 Investor		3 Investor		
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			120.468.950		150.950.000		153.969.000		153.969.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	93		93,5		94		94		
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			1.472.782.000		111.730.000		113.964.600		113.964.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Nilai realisasi investasi	2,38 Triliun Rupiah		2,6 Triliun Rupiah		2,8 Triliun Rupiah		2,8 Triliun Rupiah		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			25.265.000		30.150.000		30.753.000		30.753.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah layanan data informasi, perizinan/non perizinan yang dipublikasikan	0 data		3 data		3 data		3 data		
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			308.134.600		4.605.000.000		4.697.100.000		4.697.100.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Tingkat Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	100 %		100 %		100 %		100%		
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			5.313.239.900		8.570.000.000		8.741.400.000		8.741.400.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Tingkat Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	100 %		100 %		100 %		100 %		
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			350.000.000		1.000.000.000		1.020.000.000		1.020.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Tingkat Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 %		100 %		100 %		100 %		
	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			150.000.000		140.000.000		142.800.000		142.800.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase penyelenggaraan statistik sektoral			80%		80%		80%		
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			174.999.300		224.999.000		229.498.980		229.498.980	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase penyelenggaraan keamanan informasi di Provinsi Maluku			100 %		100 %		100 %		
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			771.750.000		1.533.917.896		1.564.596.254		1.564.596.254	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	70								
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			909.562.500		1.000.000.000		1.020.000.000		1.020.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10		12		14		14		
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			220.500.000		200.000.000		204.000.000		204.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Terlestarikannya Cagar Budaya	1 Data		1 Data		1 Data		Data		
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			882.000.000		1.250.000.000		1.275.000.000		1.275.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	26		28		34		34		
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2.854.556.250		1.467.500.000		1.496.850.000		1.496.850.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1		1		1		1		
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			393.247.740		506.100.000		516.222.000		516.222.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Indeks Pembangunan Literasi Manusia	73		83		93		93		
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			99.435.550		131.000.000		133.620.000		133.620.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	67		71		75		75		
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			299.506.300		190.000.000		193.800.000		193.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75%		100%		100%		100%		
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			30.989.584		50.000.000		51.000.000		51.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	83%		100%		100%		100%		
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			12.985.000		-				-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Terwujudnya tata perizinan dan penggunaan arsip secara baik	3		jumlah		jumlah		jumlah		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026		K	Rp	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL		3.853.720.000		6.032.000.000		6.152.640.000		6.152.640.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikelola	1.333.815,96 Ha		2.053.582,18 Ha		2.198.747,25 Ha			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		34.640.480.500		35.246.580.000		35.951.511.600		35.951.511.600	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	511.180,30		511.435,90		511.691,6		511.691,6	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		6.165.346.400		7.558.594.987		7.709.766.887		7.709.766.887	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Produksi Perikanan Budidaya	235,895		236		247		247	
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		1.605.260.000		2.175.817.500		2.219.333.850		2.219.333.850	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Peraturan	90 %		90%		90%		90 %	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		856.535.390		1.492.300.000		1.522.146.000		1.522.146.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Angka Konsumsi Ikan	70,77		78		79		79	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		2.428.558.800		6.000.000.000		6.120.000.000		6.120.000.000	DINAS PARIWISATA
				Lama tinggal wisatawan	Hari		4 hari		5 hari		5 hari	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		903.071.100		6.000.000.000		6.120.000.000		6.120.000.000	DINAS PARIWISATA
				Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara & Nusantara	%		429.214 Orang		453.255 Orang		453.255 Orang	
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		319.984.550		1.800.000.000		1.836.000.000		1.836.000.000	DINAS PARIWISATA
				Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif 17 Sub Sektor	%		5 %		5%		5%	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		374.995.400		1.800.000.000		1.836.000.000		1.836.000.000	DINAS PARIWISATA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
				Peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang		158 orang		158 orang		158 orang		
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			14.726.458.586		19.527.319.270		19.917.865.655		19.917.865.655	DINAS PERTANIAN
				Produksi Komoditas Pertanian	531.081,71		Ton		Ton		Ton		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			7.388.082.280		8.984.368.537		9.164.055.908		9.164.055.908	DINAS PERTANIAN
				Produksi Komoditas Pertanian	531.081,71		Ton		Ton		Ton		
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			300.289.700		391.330.285		399.156.891		399.156.891	DINAS PERTANIAN
				Terkendalnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100` %		100` %		100` %		100` %		
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			188.592.000		378.959.600		386.538.792		386.538.792	DINAS PERTANIAN
				Terkendalnya dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian	50 %		50 %		50 %		50 %		
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			79.480.000		129.400.000		131.988.000		131.988.000	DINAS PERTANIAN
				Terlaksananya Perizinan Usaha Pertanian	100 %		100 %		100 %		100 %		
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1.201.508.800		1.120.200.830		1.142.604.847		1.142.604.847	DINAS PERTANIAN
				Cakupan bina kelompok petani	97 %		97 %		97 %		97 %		
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			9.234.189.832		17.498.131.345		17.848.093.972		17.848.093.972	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan	18		39		38		95		
				Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi (Ha)	41		67		73		181		DINAS KEHUTANAN
				Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibangun (Unit)	-	-	30		40		70	-	DINAS KEHUTANAN
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			-		194.230.000		198.114.600		198.114.600	DINAS KEHUTANAN
				Angka persentase peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan	0,00 %		70%		72%		72%		
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			1.499.479.400		1.893.277.340		1.931.142.887		1.931.142.887	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah Unit Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosia	15		20		20		55		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026				
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan (Dokumen)			294.460.128		300.349.331		300.349.331	DINAS KEHUTANAN	
					0		1		2		3	413.414.762	
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			227.449.900		350.000.000		357.000.000		357.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
				Jumlah Peta Potensi Geologi dan Potensi Air Tanah	24		1		1		2		
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			249.999.600		450.000.000		459.000.000		459.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
				Jumlah IUP Terbit, dibina, dan diawasi	5 WIUP, 4 IUP (dibina dan diawasi)		5 WIUP, 5 IUP (dibina dan diawasi)		5 WIUP, 5 IUP (dibina dan diawasi)		10 WIUP, 10 IUP (dibina dan diawasi)		
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			383.774.100		1.200.000.000		1.224.000.000		1.224.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
				Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Penurunan Emisi GRK Sektor Energi	400		150 Rumah Tangga/ 0.045 Ton CO2eq		200 Rumah Tangga/ 0.06 Ton CO2eq		350 Rumah Tangga/ 0.06 Ton CO2eq		
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			377.000.000		1.200.000.000		1.224.000.000		1.224.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
				Rasio Elektrifikasi dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran	99/174		99.50/275 %/RTS		99.60/350 %/RTS		99.60/625 %/RTS		
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			49.918.000		75.000.000		76.500.000		76.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jenis Bahan Berbahaya	2 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			-		10.000.000.000		10.200.000.000		-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit		1 Unit		1 Unit		2 Unit		
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			1.472.500.000		500.000.000		510.000.000		-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase Stabiilitasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	3,5-4%		-		-		3,5-4%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026				
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
				Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Penting	-	-	4-5%		4-5%	-	4-5%	-	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			350.024.000		650.000.000		663.000.000		663.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	35 %		38,5%		42,3%		43,30 %		
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				-	615.000.000	-	627.300.000	-	627.300.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase Penanganan Konsumen	4 Laporan	223.124.000							
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Laporan Penanganan Konsumen	-	-	5 Laporan	75.000.000	5 Laporan	76.500.000	15 Laporan	76.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	100%	350.000.000	100 Persen	370.000.000	100 Persen	377.400.000	100 Persen	377.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku	6 Komoditi	87.240.000	-	-	-		6 Komoditi		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku	-	-	7 Komoditi	120.000.000	7 Komoditi	122.400.000	7 Komoditi	122.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Sampel hasil uji laboratorium komoditi potensial	-	-	100 Sampel	50.000.000	100 Sampel	51.000.000	200 Sampel	51.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					5.793.804.838		5.909.680.935		5.909.680.935	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	38.663 Orang		39,128 Orang		39,683 Orang		40.446 Orang		
				Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas	35 USD JUTA		38,5 USD JUTA		42,3 USD JUTA		42,3 USD JUTA		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			-		150.000.000		153.000.000		153.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah Kelompok masyarakat kawasan transmigrasi yang berdaya saing	0		10 Kelompok		10 Kelompok		10 Kelompok		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01		SEKRETARIAT DAERAH										
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			1.357.719.000		1.725.000.000		1.759.500.000		1.759.500.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Bidang Tatalaksana	100 %		100 %		100 %		100 %		
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			27.029.421.720		7.615.960.000		7.768.279.200		7.768.279.200	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100 %		100 %		100 %		100 %		
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			107.705.962.819		107.586.314.507		109.738.040.797		109.738.040.797	SEKRETARIAT DAERAH
				Pengoordinasian Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %		100 %		100 %		100 %		
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2.930.230.730		1.860.000.000		1.897.200.000		1.897.200.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Pengoordinasian Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100		100		100		100		
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			3.311.938.950		1.330.000.000		1.356.600.000		1.356.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Kebijakan Daerah Bidang Hukum yang ditindaklanjuti	100 %		100 %		100 %		100 %		
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			1.300.000.000		1.315.000.000		1.341.300.000		1.341.300.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	100 %		100 %		100 %		100 %		
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			800.543.000		1.427.100.000		1.455.642.000		1.455.642.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Pengoordinasian Kebijakan Daerah Bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %		100 %		100 %		100 %		
4	02		SEKRETARIAT DPRD										
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			58.717.426.488		48.564.455.457		49.535.744.566		118.424.853.243	SEKRETARIAT DPRD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
				Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %		100 %		100 %		100%		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	01		PERENCANAAN										
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			4.134.281.900		6.951.271.438		7.090.296.867		7.090.296.867	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Capaian Dokumen Perencanaan Daerah dan Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%		100%		100%		100%		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			2.675.860.300		6.555.840.975		6.686.957.795		6.686.957.795	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		
5	02		KEUANGAN										
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			611.464.000		621.464.000		633.893.280		633.893.280	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Efektivitas Pendapatan Daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			307.948.064.810		303.984.094.881,31		310.063.776.779		310.063.776.779	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Opini BPK			WTP		WTP		WTP		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				IPKD			75 Indeks		75 Indeks		75 Indeks		
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			147.577.000		250.000.000		255.000.000		255.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Pengelolaan Barang dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			896.825.960		1.323.081.362,07		1.349.542.989		1.349.542.989	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Opini BPK	WTP		WTP		WTP		WTP		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			3.569.103.500		4.156.542.450		4.239.673.299		4.239.673.299	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Efektivitas Pendapatan Daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	03		KEPEGAWAIAN										
	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.895.210.010		3.303.301.301		3.369.367.327		3.369.367.327	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
				Indeks Sistem Merit	280 point		300 point		300 point		300 point		
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			344.000.000		4.477.000.000		4.566.540.000		4.566.540.000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			858.768.300		3.773.029.466		3.848.490.055		3.848.490.055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Inovasi yang Terimplementasi	100 %		100 %		100 %		100 %		
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN										
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			4.436.043.862		360.000.000		367.200.000		367.200.000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
				Persentase pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku	100 %		100 %		100%		100 %		
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG										
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			990.806.044		2.394.031.192		2.441.911.816		2.441.911.816	BADAN PENGHUBUNG
				Persentase Pelayanan Pelayan Penghubung	100 %		100%		100%		100%		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6	01		INSPEKTORAT DAERAH										
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			9.855.000.000		7.975.000.000		8.134.500.000		8.134.500.000	INSPEKTORAT
				Persentase Pendampingan dan Konsultasi pada Objek Pengawasan	1		Level 3		Level 3		Level 3		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			3.520.000.000		3.100.000.000		3.162.000.000		3.162.000.000	INSPEKTORAT
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengawasan			3		3		3		INSPEKTORAT
				Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah			-		A Level		A Level		INSPEKTORAT
				Level Maturitas SPIP			Level 3		Level 3		Level 3		INSPEKTORAT
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			552.223.400		4.535.000.000		4.625.700.000		4.625.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			244.543.494.349		3.150.000.000		3.213.000.000		3.213.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Indeks Demokrasi Provinsi Maluku	80		85		90		90		
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			228.128.000		1.375.000.000		1.402.500.000		1.402.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait	14		14		14		14		
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			267.888.400		350.000.000		357.000.000		357.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah Pembinaan dalam rangka pencegahan, pengedaran dan penyalahgunaan narkoba	4		2		2		2		
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			357.799.000		1.150.000.000		1.173.000.000		1.173.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Jumlah Pembinaan Separatisme, Radikalisme, dan Tindak Kriminalitas	100%		100%		100%		100%		
X			NON URUSAN										
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			42.176.486.803		43.999.496.237		44.879.486.162		44.879.486.162	DINAS KEHUTANAN
				Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD	100%		100%		100%	-	100%	-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			19.686.332.596		18.321.025.328		18.687.445.835		18.687.445.835	DINAS SOSIAL
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%		100%	-	100%	-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
	K	Rp					Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12.635.561.545		13.277.814.765		13.543.371.060		13.543.371.060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen		15 Dokumen	-	15 Dokumen	-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.627.056.951		14.919.598.090		14.919.598.090	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Kinerja Layanan Organisasi Perangkat Daerah (	100%		100 %		100 %	-	100%	-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.753.878.563		11.470.385.206		11.699.792.910		11.699.792.910	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Mengembangkan dan menguatkan kapasitas dan institusi dinas	100 %		100 %		100 %	-	100 %	-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.925.922.173		19.602.121.837,40		19.994.164.274		19.994.164.274	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Nilai SAKIP			B		B				
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.376.548.874		6.720.891.432		6.855.309.261		6.855.309.261	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %		100 %		100 %	-	100 %	-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			630.839.885.698		733.302.196.758		747.968.240.693		747.968.240.693	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase kecukupan layanan dan sarana administrasi perkantoran	100 %		100 %		100 %	-	100 %	-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			144.456.809.297		152.888.269.534		155.946.034.925		155.946.034.925	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026				
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
				Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%		100%	-	100%	-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			450.000.000		4.214.982.889		4.299.282.547		4.299.282.547	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
				Meningkatnya kualitas pelayanan BPPD Provinsi Maluku	100 %		100 %		100 %	-	100 %	-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.978.196.078		8.017.553.207		8.177.904.271		8.177.904.271	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	B		B		B	-	B	-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.663.928.377		7.893.688.799		8.051.562.575		8.051.562.575	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B (61,60)		B (61,60)		B (61,60)	-	B (61,60)	-	
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			7.393.204.720		8.674.048.202		8.847.529.166		8.847.529.166	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Terwujudnya Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %		100 %		100 %	-	100	-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			33.897.926.951		35.986.949.994		36.706.688.994		36.706.688.994	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Terpenuhinya Penunjang Administrasi Kantor	100%		100%		100 %		100%		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.513.593.703		13.464.797.283		13.734.093.229		13.734.093.229	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase capaian program dan kegiatan dinas	100%		100%		100%		100%		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.469.143.677		20.866.925.118		21.284.263.620		21.284.263.620	DINAS PERHUBUNGAN
				Nilai SAKIP	B		A		A		A		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10.181.431.589		11.522.676.792		11.753.130.328		11.753.130.328	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Persentase Ketercapaian Layanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		
5	3	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.604.246.216		7.710.932.809		7.865.151.465		7.865.151.465	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
				Nilai SAKIP	BB		BB		A		A		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			7.447.148.484		7.440.000.000		7.588.800.000		7.588.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Nilai SAKIP	B		B		B		B		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.899.711.585		5.908.683.000		6.026.856.660		6.026.856.660	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase layanan urusan pemerintahan daerah	20%		100 %		100 %	-	100 %	-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				135.493.501.564		138.203.371.595		138.203.371.595	SEKRETARIAT DAERAH	
				Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran	100 %		100 %		100 %	100 %	-		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.380.618.148	8.364.057.166		8.531.338.309		8.531.338.309	BADAN PENGHUBUNG	
				Nilai SAKIP OPD	B		B		B		B		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			14.886.845.293	50.498.302.768		51.508.268.823		51.508.268.823	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Persentase Tingkat Pelayanan Publik	99,84 %		99,84 %		99,84 %	99,84 %			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.066.417.500	11.603.122.918		11.835.185.376		11.835.185.376	DINAS PARIWISATA	
				Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100%		100%	100%			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.898.044.963		15.196.005.862		15.196.005.862	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase Terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah Dinas Nakertrans Provinsi Maluku	0		96%		96%	96%			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.603.654.920	11.416.783.888		11.645.119.566		11.645.119.566	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
				Presentasi Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %		100 %		100 %	100 %			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.534.089.134	6.659.712.592		6.792.906.844		6.792.906.844	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
				Nilai SAKIP OPD	BB		B		BB		BB		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			67.558.077.534	77.711.048.565		79.265.269.536		79.265.269.536	SEKRETARIAT DPRD	
				Tertlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %		100 %		100 %	100 %			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	Target	Rp	Target	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			N/A		7.108.941.600		7.251.120.432		7.251.120.432	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100 %		100 %		100 %		100 %		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			18.558.000.000		16.660.078.016		16.993.279.576		16.993.279.576	INSPEKTORAT
				Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum dengan Baik dan Akuntabel	100 %		100 %		100 %		100 %		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.498.465.103		8.596.835.115		8.768.771.817		8.768.771.817	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			44.179.983.547		40.861.340.467		41.678.567.276		41.678.567.276	DINAS PERTANIAN
				Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.528.007.116		10.098.255.476		10.300.220.586		10.300.220.586	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			31.823.395.678		39.230.804.820		40.015.420.916		40.015.420.916	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Nilai SAKIP	B		B		B		B		
				Indeks Pelayanan Publik	B		B		B		B		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.228.633.615		5.229.665.030		5.334.258.331		5.334.258.331	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase Program Tercapai	100%		100 %		100%		100%		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9.387.510.797		8.896.366.797		9.074.294.133		9.074.294.133	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Terwujudnya tata sistem tata kelola dinas perpustakaan dan kearsipan secara baik	100%		100%		100%		100		
Total								3.199.970.655.389		3.263.970.068.496			



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

8.1.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Penetapan target kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Maluku tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 8. 1 Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Provinsi Maluku Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,69	5,24	5,79	6,35
2	Tingkat inflasi	%	6,28	2,81	2,09- 2,99	2,08- 3,66	2,89- 3,84
3	Rasio Gini	Rasio	0,306	0,288	0,286	0,278	0,269
4	Tingkat Kemiskinan	%	16,23	16,42	15,88	15,47	15,07
5	Tingkat pengangguran Terbuka	%	6,44	6,08	6,28	6,06	5,84
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,04	72,75	73,80	74,72	75,63



8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Provinsi Maluku pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode pembangunan 2025-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8. 2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku
Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,04	72,75	73,80	74,72	75,63
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,2	N/A	93,47	93,58	93,70
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,69	5,24	5,79	6,35
4	Indeks Infrastruktur	Indeks	81,51	84,61	87,72	90,82	93,3
5	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	28,51	23,4	24,57	24,17	23,77
6	Tingkat Inflasi	%	6,28	2,81	2,09-2,99	2,08-3,66	2,89-3,84
7	Indeks Wiliamson	Indeks	0,401	0,285	0,530	0,580	0,630
8	Tingkat Kemiskinan	%	16,23	16,42	15,88	15,47	15,07
9	Rasio Gini	Rasio	0,306	0,288	0,286	0,278	0,269
10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	CC (58,49)	C (38,08)	BB (72,50)	BB (75,0)	BB (77,50)



8.1.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan



indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diuraikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 8. 3 Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target		
			2022	2023	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73	5,69	5,24	5,79	6,35
2	LPE Sektor Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5,72	5,66	5,29	5,81	6,34
3	LPE Lap. Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	%	15,78	N/A	17,77	21,03	24,30
4	Nilai Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah	1.664	3.478	3.626	3.799	3.987
5	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	%	6,49	6,5	6,51	6,52	6,53
6	Tingkat Inflasi	%	6,28	2,81	2,09-2,99	2,08-3,66	2,89-3,84
7	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	28,51	23,4	24,57	24,17	23,77
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	162,47	160,05	159,95	159,90	159,85
9	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	60,20	64,37	71,65	72,75	79,03
10	Rasio Gini	Rasio	0,306	0,288	0,286	0,278	0,269
11	Tingkat Kemiskinan	%	16,23	16,42	15,88	15,47	15,07
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,88	6,31	6,28	6,06	5,84
13	Indeks Modal Sosial	Indeks	N/A	N/A	79,80	80,43	82,33
14	Rasio Konektivitas	Rasio	0,766	0,766	0,774	0,784	0,793
15	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6325	0,6674	0,702	0,7322	0,7721



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target		
			2022	2023	2024	2025	2026
16	Indeks Infrastruktur	Indeks	81,51	84,61	87,72	90,82	93,3
17	Indeks <i>Williamson</i>	Indeks	0,401	0,285	0,530	0,580	0,630
18	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Bantuan Sosial	%	41,19	43,63	45	47	50
19	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,67	0,98	1,05	1,07	1,09
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,04	72,75	73,80	74,72	75,63
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,00	14,08	14,03	14,05	14,07
22	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,19	10,20	10,22	10,29	10,37
23	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,45	70,45	69,88	70,85	71,82
24	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	55,33	54,5	57,25	58,11	58,97
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,87	N/A	53,77	53,65	53,53
26	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,2	93,74	93,47	93,58	93,70



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
ASPEK PELAYANAN UMUM								
	PENDIDIKAN							
1	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	Persen	79,03	81,96	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	73,15	N/A	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Rasio Guru terhadap murid Pendidikan Menengah	Rasio	01:20	01:13	01:20	01:20	01:20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	KESEHATAN							
1	Angka Kematian Ibu	Angka	62	69	65	113	110	Dinas Kesehatan
2	Angka kematian bayi	Angka	7	6	5	6	5	Dinas Kesehatan
3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Persen	97,57	78,65	89	100	100	Dinas Kesehatan
4	Rasio Dokter terhadap Satuan Penduduk	Rasio	40	41,82	43	40	41	Dinas Kesehatan
5	Persentase Penanganan Krisis Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi KLB	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
7	Tingkat Pemanfaatan RS Bed Occupation Ratio (BOR)	%	18,6	34,9	50%	50%	50%	Dinas Kesehatan
8	Mutu Pelayanan RS Average Length of Stay (ALOS)	Hari	4,5	5,7	6 Hari	6-7 hari	6-7 hari	Dinas Kesehatan
9	Survey Kepuasan Masyarakat	%	-	-	76-88	76-88	76-88	Dinas Kesehatan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten	Persen	75	94	100	20	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Akses Air Minum Layak	Persen	89,44	77,79	87,78	78,3	80,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	68,13	70,22	74,30	76,53	78,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Persen	0	0	5	20	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase Kemantapan Jalan	Persen	55,88	50,18	51	52	54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Rasio	71	15	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Tata Ruang Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	73	97,16	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
8	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dapat Dilayani Jaringan Irigasi	Persen	42,85	43,30	43,5	44	45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	100	100	100	15,90	16,04	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Presentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 – 15 Ha yang Ditangani	Persen	68,21	68,47	100	27,49	27,54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Persen	100	100	100	100	100	Satpolpp
2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	162,47	160,33	159,95	159,90	159,85	Badan Penanggulangan



NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
								n Bencana Daerah
SOSIAL								
1	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	100	N/A	100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
TENAGA KERJA								
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persen	54,54	54,54	20	20	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,18	0,18	0,18	0,18	0,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	2,43	2,43	0,48	0,48	0,48	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang- undangan Bidang Ketenagakerjaan	Persen	22,5	22,5	8,25	8,25	8,25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,527	N/A	0,505	0,494	0,485	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PANGAN								
1	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	15	10	11	35	40	Dinas Ketahanan Pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	70,7	75,9	75	75,5	76	Dinas Ketahanan Pangan
3	Persentase Pengawasan Pangan Segar yang aman dan bermutu	Persen	70,58	89,32	80	80	85	Dinas Ketahanan Pangan
4	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	48,3	17,8	23,7	20	18	Dinas Ketahanan Pangan
PERTANAHAN								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	33	N/A	0	100	100	Biro Pemerintahan
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	Persen	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan
LINGKUNGAN HIDUP								



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	28,51	28,89	24,22	25,22	26,12	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	77,69	78,75	77,87	82,19	82,33	Dinas Lingkungan Hidup
3	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	77,78	88,89	33,33	33,33	33,33	Dinas Lingkungan Hidup
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	88,67	89,37	93,33	96,67	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Status Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	3,35	2,61	3	5	7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	24,02	32,97	34	35,00	37,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	34,72	N/A	46,23	49,01	52,62	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,52	N/A	2,46	2,45	2,40	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PERHUBUNGAN								
1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi	Persen	-34,11	-3,24	9	9	9	Dinas Perhubungan
2	Pertumbuhan Lintasan Angkutan Penyeberangan Perintis	Persen	-12,68	0,00	-6,45	6,89	3,23	Dinas Perhubungan
3	Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis	Persen	0,00	4,35	8,33	3,85	3,70	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,23	2,23	2,45	2,56	2,67	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase pengembangan infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Persen	N/A	N/A	N/A	29,55	34,09	Dinas Komunikasi dan Informatika
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	66,99	67,64	68,5	68,5	68,7	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Jumlah Pengukuran tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	0	0	11	11	11	Dinas Koperasi dan UMKM



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026**

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
3	Jumlah Peningkatan Koperasi yang berkualitas	Unit	0	0	11	11	11	Dinas Koperasi dan UMKM
4	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	61.95	92.25	92.26	92.27	92.29	Dinas Koperasi dan UMKM
5	Jumlah peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang- undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel	Unit	70	70	140	140	140	Dinas Koperasi dan UMKM
6	Jumlah Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Unit	25	25	150	150	150	Dinas Koperasi dan UMKM
Penanaman Modal								
1	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	1,6	3,4	2,38	2,6	2,8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	92	92,5	93	93,5	94	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olahraga								



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kepeloporan, kepramukaan dan kepemimpinan Pemuda	Orang	327	82	325	112	112	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Persentase wirausaha Muda yang di fasilitasi	Persen	0,344	2,14	10	3	4	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Jumlah atlit berprestasi	Orang	5	45	45	30	35	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Olahraga Yang Memadai	Unit	301	304	307	306	307	Dinas Pemuda dan Olahraga
Statistik								
1	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	N/A	2,43	2,6	2,8	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian								
1	Persentase Kematangan Keamanan Informasi	Persen	26,35	32,86	38,76	42,17	44,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan								
1	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	Nilai	N/A	N/A	8	10	12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dimensi Warisan Budaya	Nilai	N/A	N/A	26	28	34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Dimensi Ekspresi Budaya	Nilai	N/A	N/A	10	12	14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perpustakaan								



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	49,77	63,97	66	70	73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	56,88	62,88	75	82	90	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan								
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan internal	Nilai	31,17	54,12	57	63	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Nilai hasil pengawasan kearsipan Eksternal	Nilai	30,71	40,89	50	60	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan								
Kelautan dan Perikanan								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	536.112,62	510.160,58	566.394,53	511.435,9	511.691,6	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	278.134,47	224.182,64	217.363,20	236.000	247.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	27,27	76,23	80	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Luas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang Dikelola	Ha	2.053.528,18	2.053.528,18	2.283.055,09	2.053.582,18	2.198.747,25	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/thn	78,02	0	76,54	78	79	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	13,30	13,92	13,15	13,17	13,20	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pariwisata								



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	387.589	385.653	444.098	466.302	489.617	Dinas Pariwisata
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	7.422	11.946	14.335	15.052	15.804	Dinas Pariwisata
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	380.167	373.707	429.763	451.251	473.814	Dinas Pariwisata
4	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Maluku	Persen	1,5	1,51	1,50	1,51	1,52	Dinas Pariwisata
Pertanian								
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	9,77	9,77	10,54	10,55	10,56	Dinas Pertanian
Kehutanan								
1	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar	355,62	364,24	350	400	450	Dinas Kehutanan
2	Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)	Jumlah	24	20	23	25	30	Dinas Kehutanan
3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,54	0,50	0,53	0,55	0,57	Dinas Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral								
1	Jumlah IUP yang diterbitkan	Dokumen	5	20	18	2	2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	0,17	0	0	27,3	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Rasio Elektrifikasi	Rasio	97,49	98,79	99	99,5	99,6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4	Peta Konservasi Air Tanah	Dokumen	4	3	1	1	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan								



NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Perizinan Jenis Bahan Berbahaya	Jenis	2	2	2	4	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit	0	0	0	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Penting	persen	8	3,5-4	3,5-4	4-5	4-5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	0	10	10	10	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase Penanganan Konsumen	Persen	79,88	4	5	5	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	Persen	79,88	85	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persen	6	6	6	7	7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
8	Jumlah sampel hasil uji Laboratorium Komoditi Potensial	Sampel	0	0	0	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian								
1	Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas	USD (Juta)	40,5	25	35	38,5	42,3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Orang	0	37,905	38,663	39,128	39,683	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Transmigrasi								
1	Jumlah Kelompok masyarakat kawasan transmigrasi yang berdaya saing	Kelompok	5	38	10	10	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penunjang Urusan								
Perencanaan								
1	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	N/A	N/A	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	75,33	N/A	71,5	72	72,5	Bappeda & BPKAD



NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Keuangan							
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	75,33	N/A	71,5	72	72,5	Bappeda & BPKAD
2	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan	Persen	97,73	100	98	98	98	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	74,39	85	80	80	80	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	Efektifitas Pendapatan Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	97,7	98	Badan Pendapatan Daerah
	Pengawasan							
1	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT
	Kepegawaian							
1	Indeks Merit Provinsi Maluku	Indeks	192	209,5	270	280	300	Badan Kepegawaian Daerah
	Sekretariat Daerah							
1	Nilai SAKIP	Skor	B(60,35)	B (61,06)	BB (70,00)	BB (72,50)	BB (75,00)	Semua OPD
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (58,49)	N/A	BB (72,50)	BB (75,00)	BB (77,50)	Sekretariat Daerah
3	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	100	100	100	Sekretariat Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
4	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Hukum yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	100	100	100	Sekretariat Daerah
5	Persentase Pengoordinasian Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	100	100	100	Sekretariat Daerah
6	Persentase Pengoordinasian Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	100	100	100	Sekretariat Daerah
7	Persentase Pengoordinasian Kebijakan Daerah Bidang pengadaan barang dan jasa	Persen	N/A	N/A	100	100	100	Sekretariat Daerah
8	Persentase Pengoordinasian Kebijakan Daerah Bidang administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	100	100	100	Sekretariat Daerah
9	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Bidang Tatalaksana	Persen	N/A	N/A	100	100	100	Sekretariat Daerah
10	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha	Persen	N/A	N/A	100	100	100	Sekretariat Daerah
11	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Bidang Materi dan Komunikasi Pimpinan dan Bidang Protokol	Persen	N/A	N/A	100	100	100	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD								
1	Persentase Fasilitasi DPRD	Persen	85	87	90	95	100	Sekretariat DPRD
Penelitian dan Pengembangan								



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Rencana Kelitbangan yang Diteliti	Persen	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendidikan dan Pelatihan								
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	99,91	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pengelolaan Perbatasan								
1	Persentase Peningkatan Status Pembangunan Kecamatan LOKPRI Kawasan Perbatasan Provinsi Maluku	Persen	100	74	74	85	90	Badan Perbatasan
Pengelolaan Penghubung								
1 tan	Persentase Pelayanan Penghubung	Poin	88,3	N/A	100	100	100	Badan Penghubung
Transparansi dan Partisipasi Publik								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	N/A	35,71	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Inspektorat Daerah								
1	Level Maturitas SPIP	Level	3.003	3,201	3	3	3	Inspektorat
Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Persentase Konflik yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
								Bangsa dan Politik
2	Persentase Tindak Kriminal yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Tingkat Kesadaran Masyarakat Akan Cinta Tanah Air	Persen	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Persentase Parpol Penerima Bantuan Keuangan	Persen	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Persentase Penigkatan Ormas yang terdaftar	Persen	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
I	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Pangan							
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Juta	1.169.828	1.219.982	1.196.209	1.256.081	1.289.262	Dinas Ketahanan Pangan
1.2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Juta	580.343	595.754	637.738	645.780	678.961	Dinas Ketahanan Pangan
2	Pertanian							
2.1	Nilai Tukar Petani	Persen	102,5	105,1	102,7	102,6	102,6	Dinas Pertanian



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target			OPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
3	Perikanan							
3.1	Nilai Tukar Nelayan	Poin	115,08	114,74	103,31	103,36	103,88	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2	Nilai Tukar Pembudidaya	Poin	109,48	110,53	100,50	101,5	102,5	Dinas Kelautan dan Perikanan
II	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur							
II.1	Indeks Infrastruktur	Persen	81,51	84,61	87,72	90,82	93,93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
II.2	Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Layak	Persen	89,44	77,79	87,78	78,3	80,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
III	Iklm Berinvestasi							
III.1	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	20	10	10	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
III.2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6325	0,6674	0,7023	0,7372	0,7721	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku 2025 – 2026 disusun dengan memperhatikan kebijakan yang terlebih dahulu diundangkan seperti RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025, dan regulasi serta kebijakan lainnya yang masih berlaku. Selain itu, capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2019-2024 dan isu-isu strategis relevan yang masih akan berkembang sampai dengan tahun 2026 juga dijadikan acuan dalam penyusunan RPD. Oleh karena itu, rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program kerja, pendanaan dan indikator keberhasilannya tepat untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Keseluruhan bab dalam RPD ini selaras untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Maluku pada tahun 2025- 2026 untuk mencapai tema pembangunan yaitu “Masyarakat Maluku yang Maju dan Berkelanjutan”. Penjabaran atas tema tertuang dalam empat tujuan daerah yaitu: 1) Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, produktif, berdaya saing dan berkarakter berbasis budaya inklusif; 2) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan; 3) Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kepulauan secara merata; serta 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan berprinsip *Good Governance* yang diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan akan tercapai di tahun 2025-2026.



Akhirnya, pada masa transisi pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur ini Pj, Gubernur dapat mempedomani RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Maluku. Bagi perangkat daerah, RPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026. Selanjutnya RPD Tahun 2025-2026 ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Tahun 2026, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026.

Demikian semoga bermanfaat bagi kita bersama.

Gubernur Maluku



MURAD ISMAIL